



**PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
Perubahan
RKPD
KABUPATEN PESISIR BARAT
Tahun Anggaran 2024**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2024**



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/pmk.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
25. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);
38. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
39. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.
11. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
 - d. yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahandan/atau penambahan Rencan Kerja Daerah.
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak bisa ditunda karena menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Dalm rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;

- c. Adanya kebijakan Pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau;
 - d. Dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program.
- (4) Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan PPAS;
- c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- d. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026; dan
- b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 24 Juli 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 25 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR **516**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada peran, fungsi dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu tolok ukur awal dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) adalah landasan hukum utama bagi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan turut melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017) mengamanatkan bahwa

perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan prioritas pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam sisa tahun anggaran berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 berikut Pemutakhirannya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 berikut Perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dalam hal untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dokumen Perubahan RKPD memiliki peran yang sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, terlebih dalam kondisi penyesuaian perubahan kerangka ekonomi dan fiskal daerah dalam sisa pelaksanaan tahun perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana strategis ke dalam rencana operasional. Perubahan RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis ke dalam rencana operasional yang dapat diimplementasikan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan masing-masing perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini juga mengarahkan pada proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-Perangkat Daerah), Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) dan Rancangan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

Berikutnya Perubahan RKPD menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum serta instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKJP) serta diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pemenuhan penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tentunya harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika serta perubahan kondisi di daerah, walaupun sebagai dokumen perencanaan tetap harus memiliki kerangka-kerangka yang dapat diukur dan rasional. Perubahan RKPD dapat diubah dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017 seperti hal-hal di bawah ini:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini pada dasarnya dilakukan berlandaskan pada:

- a. Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan dan/atau penyesuaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 ini.
- b. Perubahan struktur perekonomian daerah menyebabkan terjadinya perubahan target-target pada Renja Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaikan dengan kerangka ekonomi daerah yang mengalami koreksi;

- c. Untuk memenuhi ketentuan peraturan, yaitu: (i) Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka diperlukan penataan belanja untuk dapat memenuhi ketentuan pemenuhan belanja yang berasal dari DAU untuk Dukungan Penggajian PPPK Daerah, Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan dan DAU Bidang Pekerjaan Umum;

Perubahan RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiran maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu/plafon indikatif yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain pendapatan yang sah yang ditempuh dengan tetap mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan pada uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan demi terciptanya tertib dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran baik di tingkat Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Pesisir Barat menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat pada sisa Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Keuangan Noor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/pmk.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

25. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);
38. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
39. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 452);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Pasal 264 dan 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dokumen RKPD bersama dengan dokumen RPJPD dan RPJMD daerah adalah merupakan dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan PPPAS APBD TA 2024 dan pada akhirnya akan menjadi dasar dalam menyusun Perubahan RAPBD TA 2024 ini.

Secara garis besar Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu sebagai berikut:

1.3.1. RPJMN Tahun 2020-2024

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN Tahun 2020-2024; (ii) Lampiran II yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024; (iii) Lampiran III yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

1.3.2. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

RPJMD Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih pada saat kampanye yang secara garis besar menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan untuk menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan tujuan pembangunan menciptakan Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Visi tersebut didukung dengan 6 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai;
- 2) Mewujudkan “*Good Governance*” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik;
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel;
- 4) Mengembangkan Infrastruktur guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah;
- 5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diarahkan untuk menyusun perencanaan untuk: (i) menciptakan kehidupan yang aman dan damai; (ii) mewujudkan good governance dan pelayanan publik; (iii) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengupayakan perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas; (iv) mengembangkan infrastruktur dan konektivitas wilayah;

(v) membangun ekonomi masyarakat; dan (vi) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.3. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut “Pesisir Barat Madani dan Sejahtera 2025”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala Mantab, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan.
- 2) Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.
- 3) Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari.
- 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.
- 5) Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Berbudaya, dan Tentram dengan Mengedepankan Supremasi Hukum.
- 6) Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good and clean governance*).

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 diarahkan pada pencapaian beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Membangun prasaran, sarana & utilitas dasar wilayah dalam skala mantap, tanggap bencana dan berwawasan lingkungan;
- 2) Membangun infrastruktur perekonomian yang kuat dan berkelanjutan berbasis pariwisata, sumber daya alam dan kearifan lokal;
- 3) Membangun pesisir barat yang asri dan lestari;
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing;

- 5) Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya dan tentram dengan mengedepankan supremasi hukum;

1.3.4. RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dan merupakan penjabaran dari periode kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Pesisir Barat akan diarahkan pengembangannya dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapai tujuan yang hendak dicapai; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2021-2026.

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dan Sejahtera” dapat diformulasikan dengan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing.
- 2) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan.
- 3) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.
- 4) Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal.
- 5) Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga.

1.3.5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam proses penyusunan RKPD wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan indikasi program pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Sinkronisasi perlu dijaga dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola ruang. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses penggunaan lahan serta dalam upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di daerah.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- 1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah;
- 3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan;
- 4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor;
- 5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
- 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.

Proses sinkronisasi termasuk dalam mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

- 1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral

RKPD perlu memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang menjadi suplemen dan/atau readiness bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, Beberapa dokumen perencanaan sektoral antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* (RAD SDG's), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, (iii) Stategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2025, (iv) Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026 dan (v) dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

1.3.7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat daerah berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun demi menunjang visi, misi dan arah kebijakan dari Bupati Pesisir Barat tahun 2021-2026.

Renstra juga menjadi dokumen perencanaan yang memuat target-target kinerja dari masing-masing perangkat daerah yang dirumuskan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan menjawab target-target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan.

1.3.8. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan basis data bahan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 berdasarkan pada pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan hingga pada triwulan II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 352 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berikutnya berdasarkan pada Pasal 353 ayat (1), Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan materi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD yang akan disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yang digunakan dalam penentuan Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari masing-masing urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah;
- 2) Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang digunakan dalam proses perumusan program dan kegiatan tahunan yang berisi dengan tolok ukur, indikator kinerja sasaran dan juga pagu anggaran dalam tahun berjalan;
- 3) Mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu/plafon indikatif dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai dengan rencana program prioritas dan tema pembangunan pada rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2024;
- 4) Mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan II Tahun 2024 sebagaimana yang terangkum pada Bab II Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran dari Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024; dan
- 5) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sisa tahun berjalan (tahun perencanaan 2024).

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu pelaksanaan sisa tahun 2024.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024 dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS antara DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-Perangkat Daerah, Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024 dan DPPA TA 2024;
- b. Menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional Perangkat Daerah dalam sisa waktu pelaksanaan tahun 2024;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan Urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur

- Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dalam melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2024;
- e. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2024, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;
 - f. Menyediakan informasi bagi penyusunan dokumen-dokumen, kajian dan/atau laporan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada relevansinya.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai capaian yang telah diraih oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2024 berdasarkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan APBD Tahun 2024.

2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Mencakup gambaran kinerja dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2024. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dari kinerja pemerintah daerah.

Berikutnya, juga mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan RKPD tahun 2024 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2024

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pada sub bab ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam proses peningkatan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sisa tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan kondisi ekonomi daerah dengan merujuk pada pencapaian kinerja daerah sampai dengan Triwulan II tahun perubahan RKPD, termasuk membandingkan dengan kondisi ekonomi nasional, regional.

Berikutnya memberikan gambaran mengenai potensi dan juga tantangan ekonomi pada tahun perubahan RKPD.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah pada Perubahan RKPD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun (n) berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun (n) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD pada periode pelaksanaan Perubahan RKPD tahun (n).

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun perubahan (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana perubahan (n).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan triwulan ii kedudukan tahun rencana perubahan (RKPD) dalam upaya pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat program prioritas daerah dalam upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Memuat rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2024 untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD diperlukan sinergisitas dan sinkronisasi yang profesional dan proposional di jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II

TAHUN 2024

Evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan II Tahun 2024, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu semester (Triwulan I dan II) tahun 2024 sebagai salah satu syarat dalam penyusunan Perubahan RKPD serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan hasil dan capaian yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024.

Pengukuran atau evaluasi secara triwulan atas target-target yang ditetapkan dilakukan untuk melihat tren capaian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan hingga akhir pelaksanaan ditahun anggaran dimaksud. Dengan dasar tersebut, beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi yang dimaksud. Evaluasi kinerja pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, realisasi keuangan daerah dan indikator kinerja pembangunan selama Triwulan II sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pada akhirnya, proses pengendalian dan evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan terhadap dinamika yang dihadapi sehingga mampu memberikan rekomendasi yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target-target yang telah ditetapkan mampu terealisasi. Rekomendasi juga dapat memberikan gambaran terkait dengan perubahan terhadap pencapaian target-target kinerja daerah dan perangkat daerah.

2.1 Evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1.1 Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Penetapan sasaran indikator makro pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target-target pembangunan yang terangkum dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut target sasaran makro yang terangkum dalam RKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2024	capaian sampai dengan Triwulan II
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,6 – 4,1	3,42*
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	33.60 – 34,10	33,78*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,6	3,47*
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,34	12,64
5	Indeks Pembangunan Manusia	Point	65,44	70.40*
6	Indeks Gini	Point	0,30 – 0,29	0,31*

Sumber: RKPD Tahun 2024, Bappelitbangda (diolah)
*data tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa data capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 tidak tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS Provinsi Lampung dan/atau BPS Kabupaten Pesisir Barat, kecuali data tingkat kemiskinan yang dirilis pada Juli 2024. Sehingga data-data capaian yang disajikan sebagian besar masih menggunakan data capaian pada tahun 2023 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024 mendatang berdasarkan pada tren series.

Lebih lanjut, analisis yang akan dipergunakan mempergunakan data capaian dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa data-data untuk Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia. Asumsinya analisis dengan menggunakan data capaian Provinsi Lampung sedikit banyak memberikan gambaran tentang kondisi di daerah.

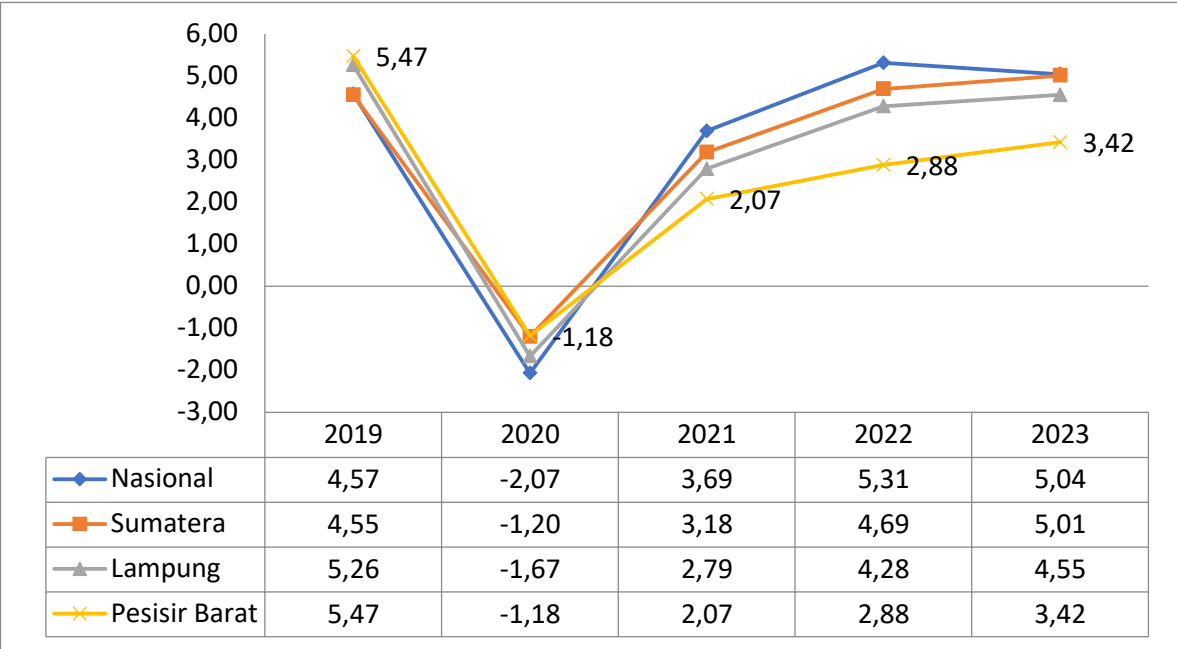
Gambaran mengenai capaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 sebesar 3,42% atau meningkat 0,54% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dengan pertumbuhan 2,88%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.55% serta regional Sumatera dengan capaian pertumbuhan 5,01%. Selanjutnya bila dilihat dari skala nasional, maka capaian Pesisir Barat memiliki selisih 1,62% dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5.04%.

Merujuk pada publikasi Bank Indonesia Wilayah Lampung, kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 3,30% atau melemah jika dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya (yoy) sebesar 4,96%. Pertumbuhan positif dicapai oleh sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 14,23% Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 11,55 & dan 11,46 % Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh cukup pesat adalah Jasa Perusahaan dan Real Estate yang tumbuh 9,91 & dan 9,84 % Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan terutama pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 16,90 & dan 10,97 % Sementara untuk Kabupaten Pesisir Barat menurut BPS struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan 47,79%, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,92%, Kontruksi 8,34%, Pertambangan dan Penggalian 5,61% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,30%.

Gambar 2.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat hingga Semester I Tahun 2024

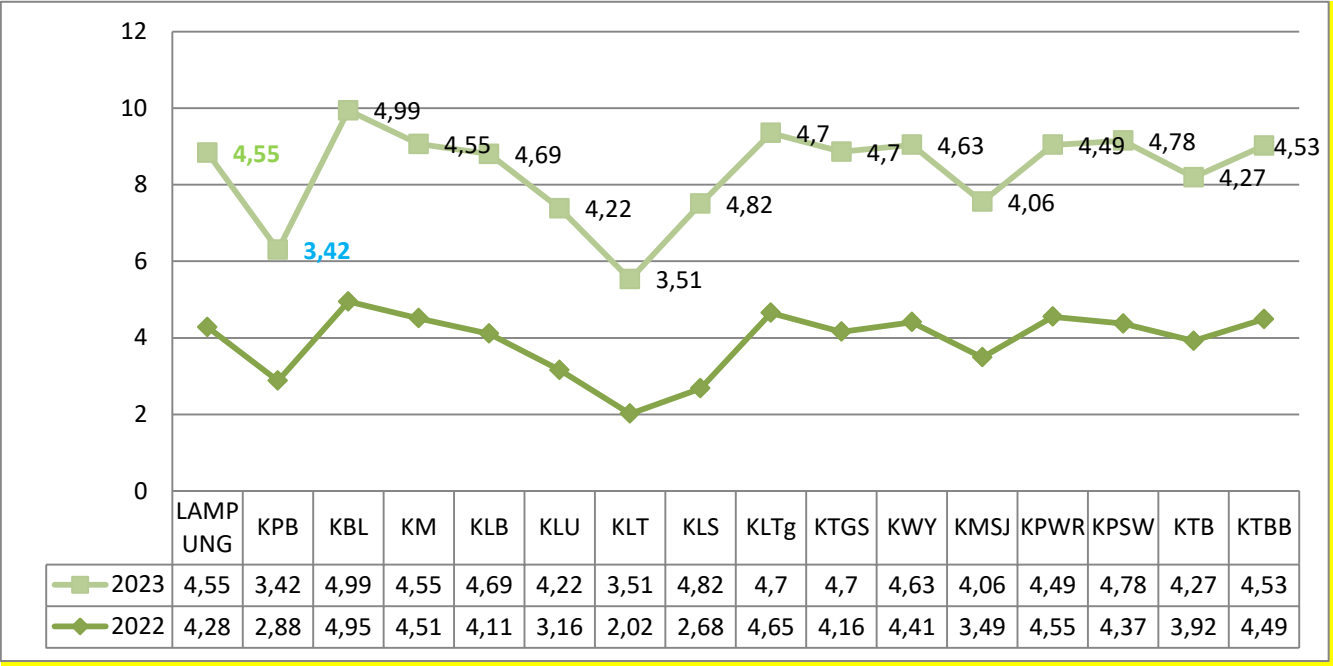


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Lebih lanjut, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat mengalami peningkatan namun diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada urutan terendah di Provinsi Lampung di bawah Kabupaten Lampung Timur yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,51% dan Kabupaten Mesuji sebesar 4,06%. Capaian tertinggi dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai 4.99% dan Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai 4.82%. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan mengandalkan sektor ekonomi modern seperti perdagangan dan jasa sebagai penyumbang PDRB terbesar, Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi salah satunya sebagai dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Jalan Tol dan Bakauheni Haebour City. Kedua daerah ini lebih cepat melakukan *recovery* dan kembali menghidupkan perekonomian daerahnya pasca Pandemi Covid-19.

**Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2023**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024



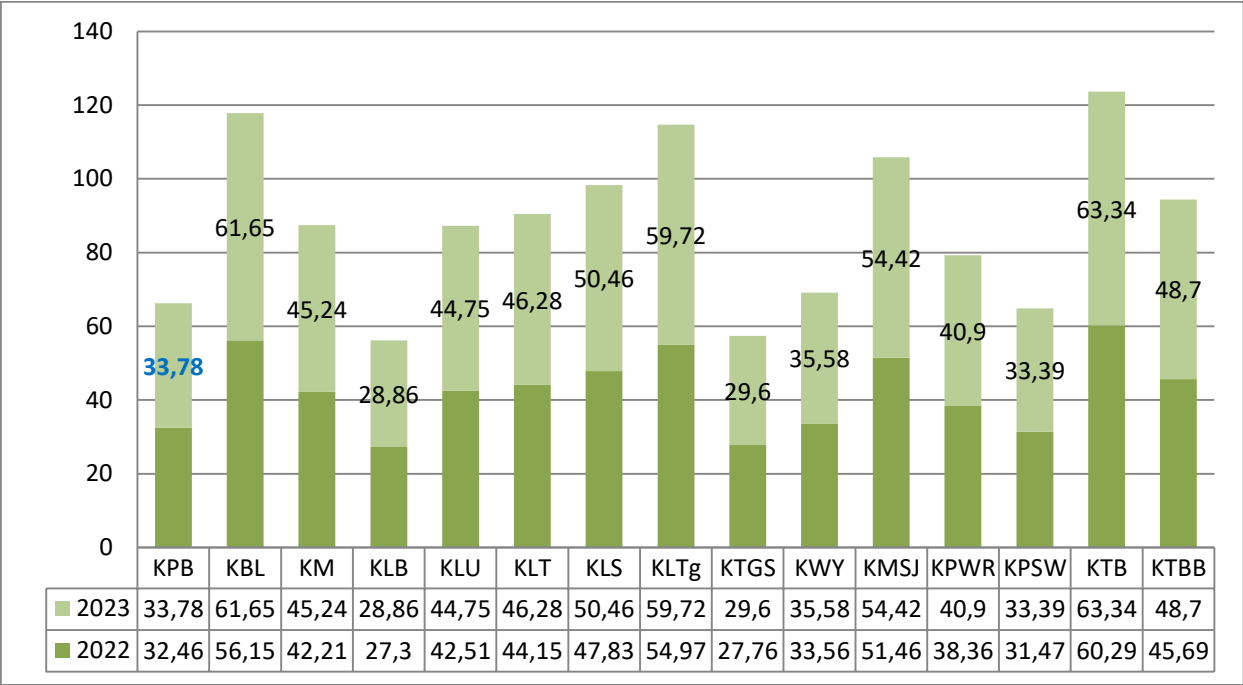
b. PDRB Perkapita ADHB

Capaian PDRB Perkapita berdasarkan nilai ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2023 sebesar 33,78 (juta rupiah) atau meningkat 1,32 (juta rupiah) dari tahun sebelumnya sebesar 32,46 (juta rupiah), namun secara regional di Provinsi Lampung PDRB Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan dari peringkat 11 di tahun 2022 menjadi peringkat 12 di tahun 2023. Kabupaten Tulang Bawang menempati urutan tertinggi PDRB Perkapita disusul urutan kedua Kota Bandar Lampung dengan nilai masing - masing 63,34 (juta rupiah) dan 61,65 (juta rupiah), sedangkan untuk Kabupaten dengan nilai PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Lampung Barat 28,86 (juta rupiah) dan Kabupaten Tanggamus dengan nilai 29,60 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional, Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah PDRB Perkapita Provinsi Lampung sebesar 48,19 (jura rupiah) dan PDRB Perkapita Nasional sebesar 74,96 (juta rupiah) .

Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB Perkapita adalah struktur ekonomi, dimana struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan 47,79%, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,92%, Kontruksi

8,34%, Pertambangan dan Penggalian 5,61% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,30%.

Gambar 2.3 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

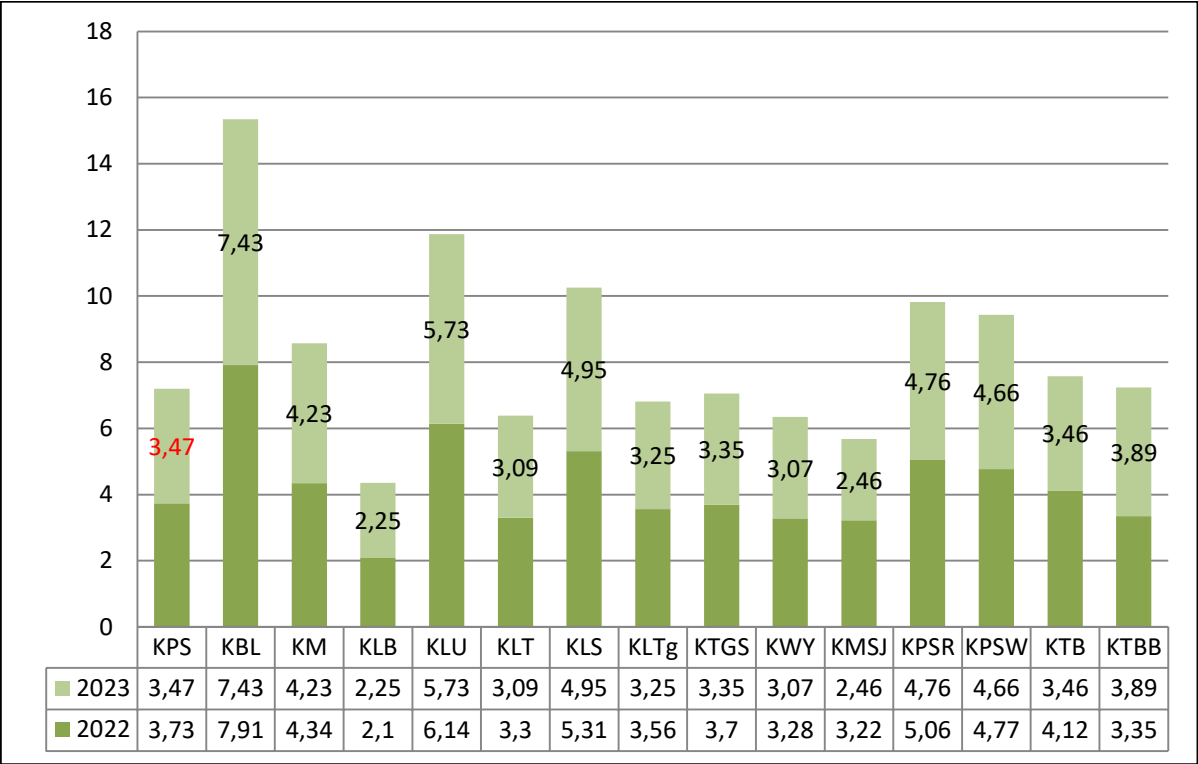
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 mencapai 3,47% atau mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 3,73% yang artinya menunjukkan capaian yang positif, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat sehingga mampu menurunkan TPT sebesar 0,26%. Merujuk pada TPT Provinsi Lampung, dan Nasional, TPT Kabupaten Pesisir Barat lebih rendah daripada TPT Provinsi Lampung dan Nasional, dimana masing –masing mencapai 4,23% dan 5,32% artinya TPT Kabupaten Pesisir Barat lebih baik dari pada TPT Provinsi Lampung maupun nasional.

Menurut Laporan Perekonomian Provinsi Lampung yang dirilis oleh Bank Indonesia Wilayah Lampung pada Mei 2024, menggambarkan bahwa Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,84 juta pekerja, meningkat 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja

(TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,56% poin dari 72,07% pada Februari 2023 menjadi 71,51% per Februari 2024, meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,47% poin dibandingkan Agustus 2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 sebesar 3,30% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat berkontraksi sebesar 0,06% poin menjadi 4,12% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%.

Sementara itu, untuk level Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung nilai TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke-8, dimana TPT terendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 2,25% dan TPT Tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung dengan nilai TPT tertinggi senilai 7,43%.

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

d. Tingkat Kemiskinan

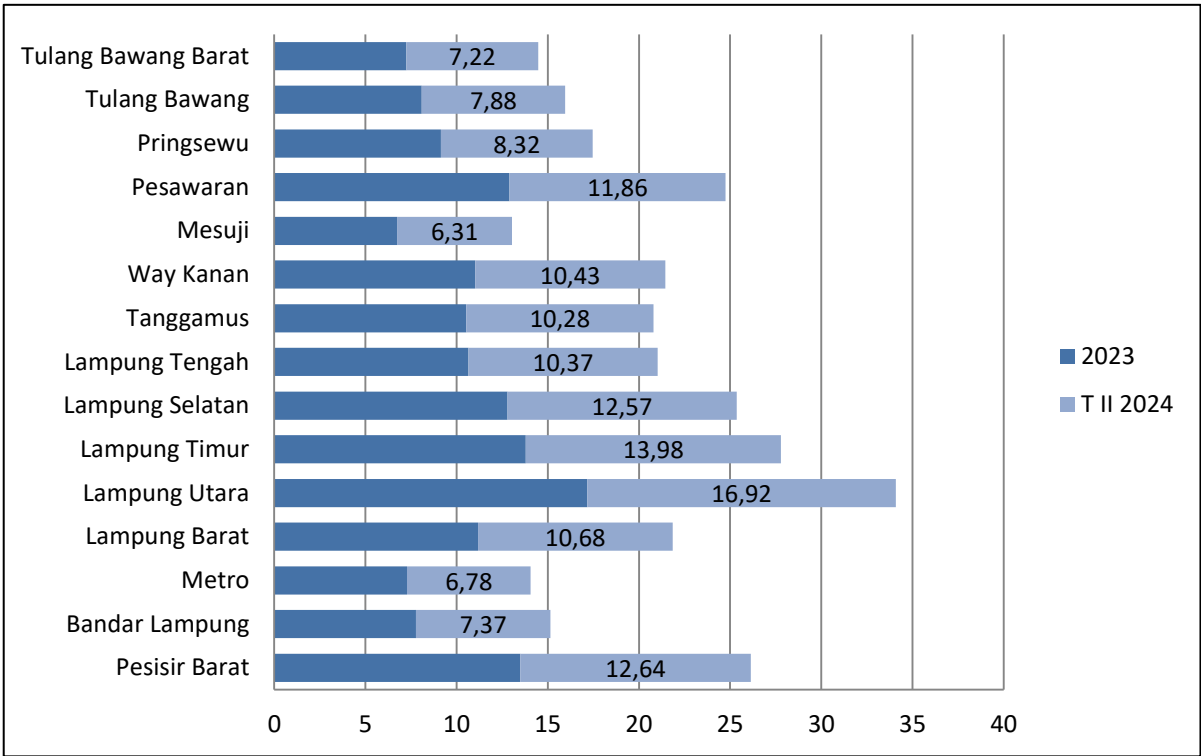
Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada triwulan II tahun 2024 tercatat sebesar 12,64% atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 13,49%, penurunan sebesar 0,85 yang menunjukan kabar positif

bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,35 dari tahun 2022 dengan nilai 13,84%.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada Triwulan II tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional dimana tingkat kemiskinan masing – masing tercatat sebesar 10,69% dan 9,03%. Secara regional, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Timur yang tercatat masing – masing 16,92% dan 13,19% sedangkan tingkat kemiskinan terendah ada di Kabupaten Mesuji dan Kota Metro yang tercatat masing – masing sebesar 6,31% dan 6,78%. Secara peringkat Kabupaten Pesisir Barat berada di urutan ke-13 dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih disebabkan pada belum meratanya sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi di masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang juga terbatas. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat juga merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan. Meskipun capaian di triwulan II tahun 2024 ini memberikan gambaran bahwa target telah terpenuhi di tahun 2024 ini namun diperlukan usaha-usaha yang lebih nyata dan konkrit untuk menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024



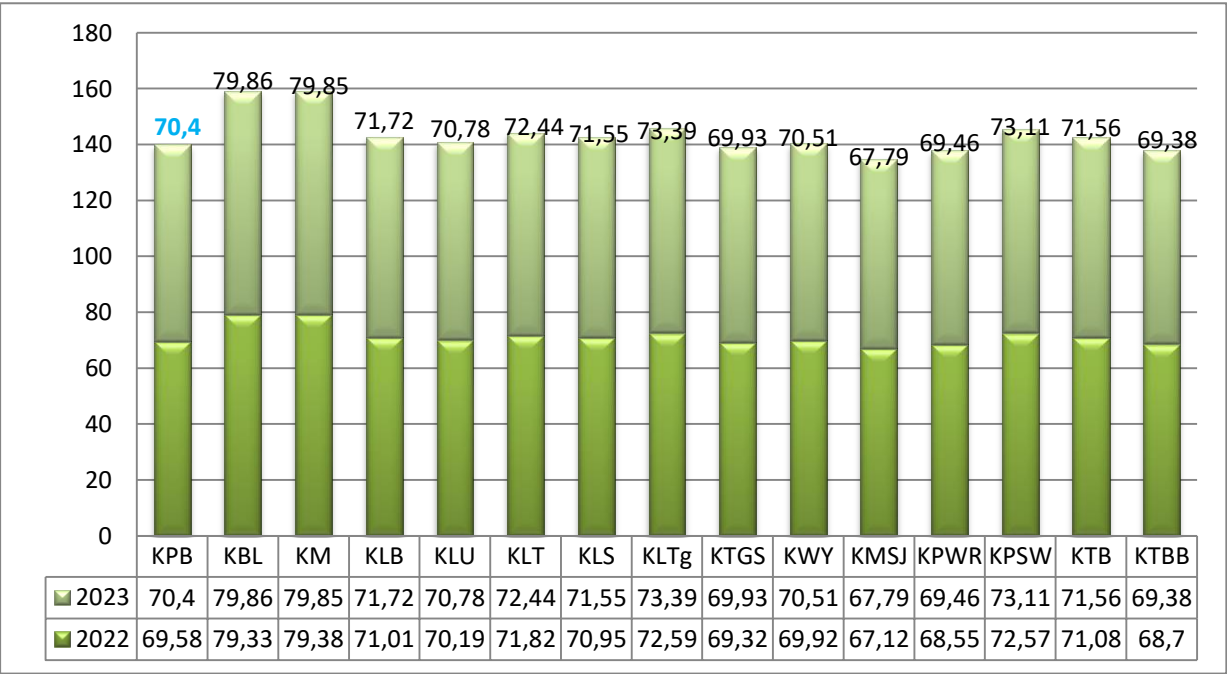
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

e. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH) SP2010 Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2023 mencapai 70,40 (tergolong sedang) atau mengalami kenaikan sekitar 0.82 point dari tahun 2022 yang dengan nilai 69,58. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung IPM Kabupaten Pesisir Barat di posisi ke-11 dimana Kota Bandar Lampung mencapai IPM tertinggi sebesar 79,86 dan Kabupaten Mesuji memiliki IMP terendah di Provinsi Lampung dengan nilai 67,79. Kabupaten Pesisir Barat memiliki IPM di bawah IPM Provinsi Lampung dengan nilai 72,48.

Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan masih rendahnya derajat status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utamanya. Ketersediaan infrastruktur serta kondisi geografis daerah turut mempengaruhi kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih dari sisi kemampuan daya beli masyarakat yang belum bisa bersaing dengan daerah lain.

Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023

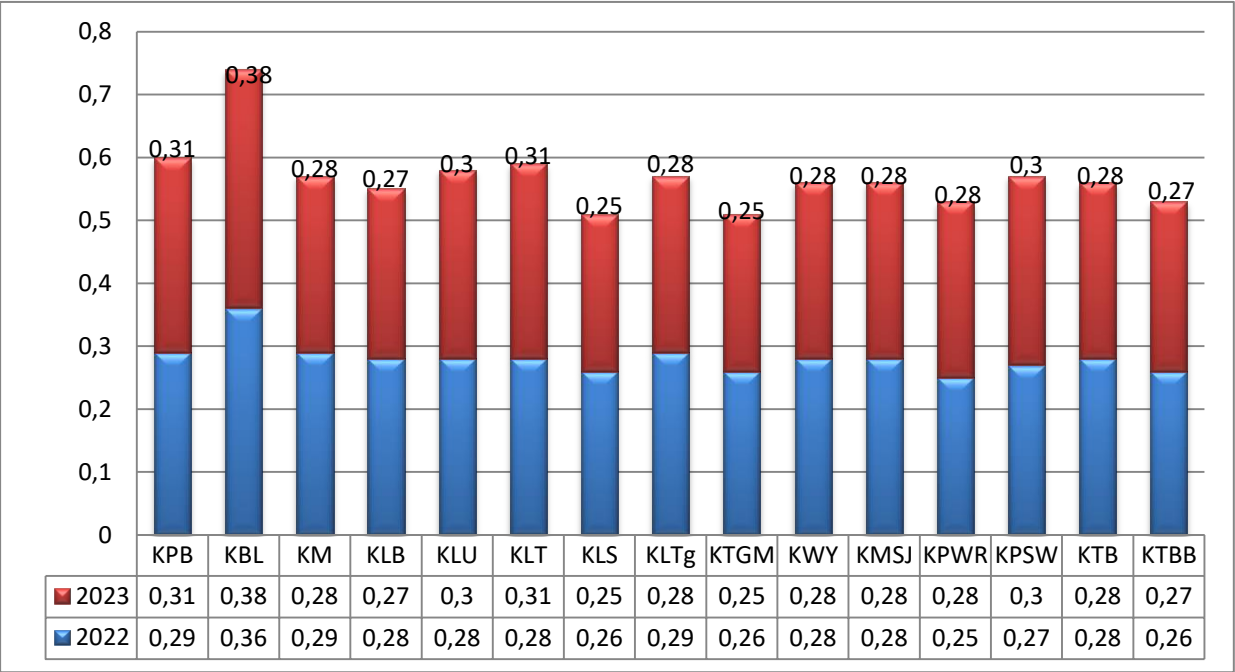


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

f. Indeks Gini

Gini rasio merupakan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu ketimpangan pendapattan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian gini rasio (Indek Gini) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,31 atau meningkat 0,02 point dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 0.29. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.32 dan nasional yang berada pada angka 0.38. Capain pada tahun 2023, sebagai perbandingan dengan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke 13, dengan Kabupaten Tanggamus menjadi kabupaten dengan capaian nilai gini terendah atau terbaik 0,25. Sementara itu, Kota Bandar Lampung merupakan Kota dengan nilai tertinggi dengan capaian 0.38. Ketimpangan pendapatan di daerah lebih disebabkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Jumlah penduduk miskin dan juga jumlah pengangguran turut mempengaruhi capaian ini.

Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi target utama

bagi kepala daerah selama kurun waktu periode RPJMD yang dibagi menjadi 5 (lima) tahun RKPD. Berikut target Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam RKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian s.d. TW II 2024
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing					
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	65,44	70,40*
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saig Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,60	3,47*
Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3. Terwujudnya Kesenjangan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94.29	94,25*
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan					
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	42,00	45,54*
	2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	Persen	42,50	53,03
	3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	55.00	63,21
	4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,20	74,20*
	5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Indeks Resiko Bencana	Angka	180.47	189.70*

	Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah				
Misi III Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan					
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.60-4,10	3,42*
	2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	33,60 – 34,10	33,78 *
	3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	100,77	109.32
	4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Angka	0.30-0,29	0,31*
	5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13.34	12,64
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal					
Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	25.00	24,84*
Misi V Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga					
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	80.00	87,47*
	2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	CC	CC*
	3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP
	4. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Indeks Desa Membangun	Angka	0.6800	0.6988*

Sumber: RKPd Tahun 2024, Bappelitbangda (diolah)

*data tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, beberapa data realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 tidak tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS. Sehingga data-data capaian yang disajikan masih menggunakan data capaian pada tahun 2023 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024 mendatang.

Secara umum, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 beberapa sasaran pembangunan daerah telah mencapai target sasaran. Namun demikian, disisi lain beberapa sasaran juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rangkaian pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.

2.1.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan pada evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 juga didapatkan perhitungan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 40 Urusan Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Capaian IKD tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
I	Pendidikan			
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.10	8,70*
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.06	12.14*
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	73.00	72,20
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	92.12	99,08
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	70.50	72,17
6	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar	Persen	81,27	80,87
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	92,57	89,50
8	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	60,62	50,86
9	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	Persen	99,34	80,87
10	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	93,33	71,17
11	Angka Putus Sekolah	Persen	0.21	0,074*
12	Angke Melek Huruf (AMH)	Persen	93,90	98,34*

13	Rasio Guru SD terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 11*
14	Rasio Guru SMP terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 8*
II	Kesehatan			
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	63.73	73,75*
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.30	16,10*
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kasus	11	14*
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	4	5*
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	98,08*
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100*
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	92,80*
8	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	71,43	93,00
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	5	5*
10	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	11	14*
11	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	90,00	89,00*
12	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	0.35	0.50*
13	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Persen	19,10	38,08
14	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	Persen	23.40	31,67
15	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	Persen	100	98,08
16	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	18,76
17	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Unit	11	100
18	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	100	66,70*
19	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	47*
20	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Angka	1.36	15,91*
21	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Angka	11.35	128,42*
22	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Angka	12.35	235,64*
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Ruang Terbuka Lahan Hijau	Persen	4.70	4.60*
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	54.65	54,00
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km	664.08	460,10
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	72.50	74,76
5	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan daerah yang dibangun	Km	45.00	42,29
6	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persen	65.00	63,21
7	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persen	7.00	7,08
8	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	Persen	70.00	67,00
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	42,50	53,03
10	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	45,00	24,51

11	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital	Dok	1	1
12	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dok	1	-
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	60	61
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum	Persen	45,00	96,84
3	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	100	100
4	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	12,00	12,92
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100
7	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	0.5	0.0
8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Umum	Persen	42,50	87,50
V	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang Tertangani	Persen	100	100*
2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100*
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	30
6	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100	80,00
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	0,00
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	25,00
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Persen	100	22,00
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	0,00
11	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Persen	100	0,00
VI	Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	35,20	2,05
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	9,43	8,21
3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	100	0,55
4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Persen	100	0
5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100

6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	86,65	46,11
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
I	Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	73.04	71,91*
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	64.00	62,00*
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama*
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1.22	0,90
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0.043	0.096*
4	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani	Persen	47,30	0
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	0.1	1,01
6	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	0
7	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100
8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.012	0.052
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
III	Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor (Angka)	85,10	84.70*
2	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	35.000	28.176*
3	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	4.583	2,166.80*
4	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/hari)	235,70	62,60*
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	60.00	100*
IV	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	55.00	70,07
2	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100	0
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	5.000	0
4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	11,00	1,66*
V	Lingkungan Hidup			
1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	87.67	50*
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	58.64	89.90*
3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	76,02	78,67*
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	71,43*
5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi	Persen	2.00	0,00

	usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota			
6	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	54,70	54,70*
7	Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah	Persen	5.60	5,00*
8	Persentase jumlah penanganan timbulan sampah	Persen	20,48	20,48*
9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	5.00	5*
VI	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100*
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	Sudah	Sudah*
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99.00	97,60
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	95.00	99,92*
5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	Persen	80.00	
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50.00	69,17
VII	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100
2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	94	25
4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen	100	100
5	Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten	Persen	100	90
6	Persentase Desa Tertinggal	Persen	37,21	3,45*
7	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,45	2,59*
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.17	2,58
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.64	68,80
3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	14.00	0,00
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.89	100
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	58,00	61,42
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.95	0,79
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	61.00	69,86
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	68,80
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,40	6,36
10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana	Persen	60.00	0,00
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	23	20
12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22.50	21,50*
13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting	Persen	21.00	0,00*
14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	29.00	39,17

IX	Perhubungan			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	Baik*
2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	65	-
3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	85.00	50,00*
4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	Persen	75.00	89,00*
5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	45.00	65.00*
6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	85.00*
7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	19.00	100*
X	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	90,00
2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	85.00	81,82
3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90.00	90,00
4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	25.00	30,76
5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	70.00	75
6	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	70.00	77,78
XI	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase Koperasi Akfif	Persen	50.00	55*
2	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	330	2.432
XII	Penanaman Modal			
1	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	16.49	0
2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5.55	0
3	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah (Rp)	398.652	277.186
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Per Usahaan	190 orang/ per Usahaan	21 orang/Per usahana*
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	20.50	4,71*
6	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan	Persen	80.00	80,00*
7	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penerapan Online Single Submission (OSS)	Persen	100	100*
8	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG)	Persen	100	1
9	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)	Persen	80.00	2
10	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100*
11	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5	5*
XIII	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang	5	8
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	38	35

3	Persentase wirausaha muda	Persen	1.32	1,62
4	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	15,15	14,48
5	Athlet Berprestasi	Jumlah	25	32
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.32	1,72
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	45,07	47,25
8	Jumlah Wirausahaan Muda Mandiri	Jumlah	160	155
9	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	7.00	7,00
XIV	Statistik			
1	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Dok	2	1*
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100*
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100*
XV	Persandian			
1	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	100	100*
XVI	Kebudayaan			
1	Persentase Kesenian Budaya yang Dilestarikan	Persen	8.50	8,00*
XVII	Perpustakaan			
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.06	0.043*
2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.50	0.157*
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	174	894*
XVIII	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	25.00	0,00*
2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	55	262*
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75.00	85,50*
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	85.00	43,60*
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	14.419	15.376*
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.209	110*
3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th	41,66	39*
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	270	246*
II	Pariwisata			
1	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	1,76	2.31*
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	8	9*
3	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	2.98	9,29
4	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/	1.350.	1.350.000*

		Kunjungan	000	
5	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/Kunjungan	8.250.000	8,300,000*
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	407	292
7	Jumlah wisatawan domestic	Orang	494.120	73,622
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic	Persen	22,00	24,85*
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	22.00	21,53*
10	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	70	83
III	Pertanian			
1	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	86.00	99.00*
2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	86.00	83,70*
3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/Tahun	112.015	59.439
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/Tahun	36.325	31.491*
5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/Tahun	108.173	121.056*
IV	Perdagangan			
1	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	71.00	50
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.56	15,92*
V	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	40.00	40,00*
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.99	3.95*
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	25.00	20.00*
4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.96	2,00*
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	75.00	85.00*
VI	Transmigrasi			
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	1*
D	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH			
I	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	C	CC*
2	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100*
3	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100*
4	Rasio Elektrifikasi	Persen	85.00	-
5	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persen	100	98.27*
II	Sekretariat DPRD			
1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD	Status	Tersedia	Tersedia

	untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran			
3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tersedia
E	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH			
I	Perencanaan			
1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	93,33*
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100*
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100*
7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra)	Persen	100	100*
8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	100	97,34*
II	Keuangan			
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Persen	100	100
2	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100
3	Persentase ketercapaian target pendapatan daerah	Persen	97,29	22,43
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	4,20	3,32
5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	31,19	4,10
III	Kepegawaian			
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	10,07	14,46*
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	22,42	-
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	73,54	-
IV	Pendidikan dan pelatihan			
1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	-
V	Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif*
2	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	90,00	87,50*
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80,00	84,00*
4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100*
5	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90,00	90,00*
F	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Inspektorat			
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	90,00	95,00
2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan	Persen	85,00	80,00

	Pengawasan pada objek pemeriksaan			
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	90,00
4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	75
G	UNSUR KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Kecamatan			
1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	99,00*
2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	85.00	85,00*
3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100	80,00*
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	49,00	90,00
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.92	82,87
3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	75.00	100

Sumber: Bappelitbangda, 2024
*data tahun 2023

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja daerah yang belum tercapai target secara umum, yaitu data yang digunakan adalah triwulan II tahun 2024 sehingga capaian baru menunjukan setengah dari tahun pelaksanaan program kemudian data yang belum dipublikasi oleh instansi terkait sehingga masih menggunakan data tahun 2023. secara sektoral permasalahan pada urusan bidang pendidikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini, sementara pada bidang kesehatan permasalahannya adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan seperti pada *treatment coverage* pada pasien TB terdapat satu kasus putus berobat di triwulan II tahun 2024, partisipasi masyarakat terhadap posyandu belum maksimal, hambatan logistik dari kementerian dan ada beberapa lokasi yang belum dilakukan sosialisasi kemudian untuk penanganan stunting terbatasnya anggaran intervensi spesifik dan seneitif terbatas. Pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan permukiman permasalahannya adalah program masih dalam proses sehingga hasil dari pelaksanaan program di triwulan IV tahun 2024. Permasalahan Bidang sosial dalam pencapaian target adalah di triwulan I dan II masih dalam proses assesment sehingga realisasi akan meningkat di triwulan III dan ke IV tahun 2024.

Permasalahan urusan pemerintahan lain seperti urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum selian keterbatasan fiskal juga masih berjalannya program yang outcome dan/atau outputnya terealisasi di triwulan ke IV tahun 2024. Dengan demikian Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan dapat melakukan optimalisasi sumber daya yang ada untuk percepatan pelaksanaan program sebelum tahun anggaran berakhir.

2.1.4 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Data yang disajikan merupakan data yang dihimpun melalui aplikasi e-SPM milik Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga Triwulan II Tahun 2024. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang mampu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ditampilkan capaian SPM sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

a. SPM Urusan Pendidikan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	94,99
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100	56,04
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	2,38
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100	72,90
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	50,86

Sumber : Dinas P dan K, 2024

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang secara total mencapai angka 55,43%. Keseluruhan angka capaian dari indikator pendidikan ini tentu saja menjadi catatan penting dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah yang perlu melakukan akselerasi percepatan pencapaian target-target kinerja hingga selesainya tahun 2024. Permasalahan utama dari capaian SPM Pendidikan ini adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan dikarenakan belum meratanya SDM Pendidikan secara proposional termasuk belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang perlu ditingkatkan lagi.

b. SPM Urusan Kesehatan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	69,44
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	58,51
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	61,68
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	94,99
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	60,07
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	9,87
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	10,23
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	6,88
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	47,97
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	131,62
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	49,69
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko	Jumlah warga negara dengan risiko	100	32,21

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
	Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia <i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum capaian masing-masing indikator SPM pada Kesehatan belum mampu mencapai target 50% sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Gambaran total capaian SPM baru mencapai 36,96%. Tentunya komitmen untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di semua sektor wajib menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kesehatan. Permasalahan utama dalam proses pencapaian SPM Kesehatan yang belum memenuhi target hingga Triwulan II Tahun 2024 (minimal 50%) adalah masih rendahnya keterbukaan dan kemauan dari masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan masih belum optimalnya proses sosialisasi oleh unit layanan kesehatan di masyarakat dan juga tingginya biaya masyarakat dalam menuju fasilitas kesehatan terdekat.

c. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	0
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	0

Sumber : Dinas PU dan PR, 2024

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum belum ada *progress* hingga Triwulan II Tahun 2024. Hal ini masih dapat dimaklumi, dikarenakan pencapaian pekerjaan fisik baru akan selesai pada Triwulan IV. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan utama dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat adalah pendanaan, dimana luasan daerah yang menjadi kewenangan tidak berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam membiayai seluruh pembangunan. Terlebih daerah lebih banyak mengandalkan pendanaan transfer untuk pembangunan infrastruktur.

d. SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber : Dinas PR dan KP, 2024

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, capaian untuk 2 (dua) indikator adalah 100%. Capaian ini perlu dipertahankan hingga selesainya triwulan IV tahun 2024.

e. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh (i) Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran serta (ii) Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian SPM Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	25
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	22
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	80

Sumber : Satpol PP – Damkar dan BPBD, 2024

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 baru mencapai target 90,00%. Sementara khusus untuk capaian pada sektor kebencanaan telah mencapai 49,00%. Pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah terlebih Kabupaten Pesisir Barat berada pada daerah rawan bencana. Masih relatif minimnya kemampuan pendanaan kembali menjadi masalah utama dari pelaksanaan urusan Trantibumlinmas. Ditambah lagi dengan masih minimnya jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dan terbatasnya jumlah SDM bila dibandingkan dengan luasan wilayah yang menjadi kewenangan.

f. SPM Urusan Sosial

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hingga pada Semester I (triwulan II) Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	2,05
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	8,21
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0,55
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2024

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial hingga Triwulan II Tahun 2024 mencapai angka 22,16%. Permasalahan utama dari belum optimalnya pelayanan pada urusan sosial adalah pendananaan dan juga luasan daerah administratif yang menjadi kewenangan daerah serta masih minimnya jumlah SDM pelaksana urusan. Hal ini tentu saja wajib menjadi catatan bagi Dinas Sosial sebagai pengampu urusan

dimaksud.

2.1.5 Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Semester I (Triwulan I dan II) pada tahun 2024 ini bertujuan untuk:

- a. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja (*outcome* dan *output*) dari masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Semester I (triwulan I dan II) Tahun 2024;
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD pada tahun-tahun berikutnya pada umumnya dan Perubahan RKPD Tahun 2024 pada khususnya.

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester anggaran (Januari-Juni Tahun 2024).

Berdasarkan data yang di dapat dari dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, diperoleh jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

abel 2.10 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah			Perangkat Daerah
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Pendidikan	2	11	48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	4	17	82	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	10	23	49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	5	16	33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

	Permukiman				Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	10	28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		2	11	35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	4	12	31	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	4	13	24	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	11	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9	Pangan	4	12	35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pertanahan	3	3	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Lingkungan Hidup	7	14	38	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	13	33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	10	31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	6	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	2	10	24	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	3	8	30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4	10	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
18	Penanaman Modal	6	11	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Kepemudaan dan Olahraga	3	13	32	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1	1	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21	Persandian	1	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
22	Kebudayaan	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	1	2	3	Sekretariat Daerah
24	Kearsipan	1	2	2	Sekretariat Daerah
25	Kelautan dan Perikanan	5	14	36	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	4	12	38	Dinas Pariwisata

27	Pertanian	5	10	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
28	Perdagangan	3	4	7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
29	Perindustrian	2	2	5	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
30	Transmigrasi	2	2	3	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
31	Sekretariat Daerah	3	20	74	Bagian Kesejahteraan Rakyat
32	Sekretariat DPRD	2	15	46	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	3	13	49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34	Keuangan	3	13	51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2	8	30	Badan Pendapatan Daerah
35	Kepegawaian	2	6	30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
37	Penelitian dan Pengembangan	1	3	8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
38	Inspektorat Daerah	3	11	35	Inspektorat
39	Kecamatan	2	6	21	Kec. Bangkunt
		2	6	21	Kec. Ngaras
		2	6	21	Kec. Ngambur
		2	6	20	Kec. Pesisir Selatan
		2	6	20	Kec. Krui Selatan
		2	7	18	Kec. Pesisir Tengah
		1	5	18	Kec. Way Krui
		1	5	17	Kec. Karya Penggawa
		2	6	20	Kec. Pesisir Utara
		2	5	19	Kec. Lemong
		2	6	20	Kec. Pulau Pisang
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	12	32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		156	454	1332	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester perencanaan dan anggaran (Juni 2024).

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2024 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang terbagi atas kelompok urusan pemerintahan daerah yang terbagi kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan pemredikatan yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 91% ($91\% \leq 100\%$);
- Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 76% sampai dengan 90% ($76\% \leq 90\%$);
- Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 66% sampai dengan 75% ($66\% \leq 75\%$);
- Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 51% sampai dengan 65% ($51\% \leq 65\%$); dan
- Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($\leq 50\%$).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut (dalam hal ini, secara umum asumsi pencapaian kinerja pada Semester I adalah 50%):

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup);
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2024, dilakukan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 48 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan adalah Sangat Rendah dengan nilai 28,87% dan realisasi anggaran Sangat Rendah dengan nilai 25,36% sehingga perlu percepatan pencapaian target kinerja.

Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan capaian kinerja rata-rata akan tinggi di semester II, begitu pula dengan realisasi keuangan telah sesuai angkas yang telah direncanakan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (i) Melakukan peningkatan kompetensi SDM dan (ii) Percepatan proses administrasi dan perencanaan dengan tetap mematuhi dan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2024, dilakukan dengan 4 program; 17 kegiatan; dan 84 sub kegiatan oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah sebesar 88,80% (Tinggi) dan realisasi keuangan sebesar 24,80% (Sangat Rendah) hal ini disebabkan output kegiatan ada pada semester II sehingga perlu ditingkatkan pencapaiannya. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah percepatan pencapaian kinerja dengan optimal, terutama untuk kegiatan-kegiatan DAK.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 10 program; 23 kegiatan; dan 49 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 19,30% (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar 28,10% (Sangat Rendah) dikarenakan pembangunan fisik masih berjalan dan akan selesai di semester II.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 5 program; 16 kegiatan; dan 33 sub kegiatan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dinilai 50,12% dan realisasi keuangan juga masih dikategori Sangat Rendah dengan nilai 38,33%. Catatan yang didapat dari evaluasi laporan renja adalah, agar melakukan percepatan pencapaian target kinerja, mengingat output kegiatan akan tinggi di semester II.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dilaksanakan melalui 3 program; 10 kegiatan; dan 28 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar adalah Tinggi dengan nilai 78,00% namun realisasi keuangan adalah 31,00% (Sangat Rendah), disebabkan kondisi fiskal daerah yang berakibat pada arus kas tidak sesuai angkas yang direncanakan.

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sangat Rendah dengan nilai 24,79% dan realisasi keuangan adalah 21,54% (Sangat Rendah). Kondisi fiskal daerah juga yang mengakibatkan realisasi pada BPBD masih sangat rendah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2024 dilakukan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 31 subkegiatan. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 24,93% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 32,86%. Ke depannya Dinas Sosial selaku pengampu Urusan Sosial harus meningkatkan kinerjanya. Faktor pendorong keberhasilan kinerja, menurut Dinas Sosial adalah kerjasama dan komunikasi yang baik antaraparatur, walau dirasa sumberdaya yang

ada sekarang masih minim yang berkompeten, yang dianggap penghambat pencapaian kinerja. Selalu melakukan evaluasi, adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2024 dilaksanakan dengan 4 program; 13 kegiatan; dan 24 sub kegiatan melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 25,12% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 43,72%. Mayoritas output kegiatan selesai di semester II, maka menyebabkan capaian pada semester I sangat rendah. Agar menjadi perhatian untuk percepatan pencapaian kinerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 5 program; 11 kegiatan; dan 15 sub kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 32,88% dan realisasi keuangan pada nilai 30,30%. Dengan tingkat capaian tersebut, catatan ke depannya adalah percepatan pencapaian target, karena output subkegiatan yang berupa laporan maupun dokumen yang akan selesai di semester II.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 35 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 30,50% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 50,52%. Rendahnya rata-rata capaian kinerja disebabkan keluaran yang berupa laporan masih dalam proses penyusunan dan akan selesai di akhir tahun. Serta jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan akan dilaksanakan di semester II. Sehingga Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian sebagai penopang Urusan Pangan perlu memaksimalkan kinerja untuk mencapai target kinerja di tahun 2024.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas izin lokasi, sengketa tanah garapam, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 3 program; 3 kegiatan; dan 4 subkegiatan dengan capaian kinerja triwulan II Sangat Rendah yaitu 36,63% dan realisasi keuangan sebesar 61,92%. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua aparatur untuk segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan pada Urusan Pertanahan. Diharapkan semangat tersebut terus dijaga demi percepatan pencapaian kinerja. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah kondisi fiskal daerah yang berpengaruh pada capaian kinerja dan keuangan.

Keterbatasan kondisi fiskal daerah menyebabkan terhambatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 program; 14 kegiatan; dan 38 sub kegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 65,00% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 60,00%. Dengan demikian diharapkan memaksimalkan peningkatan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada. Namun rendahnya capaian di semester I sesuai dokumen perencanaan, dikarenakan keluaran akan terselesaikan di semester II.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 5 program; 13 kegiatan; dan 33 subkegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 51,50% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 34,01%. Kondisi fiskal daerah menjadi penyebab pencapaian kinerja dan keuangan di semester I.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 dilaksanakan dengan 4 program; 10 kegiatan; dan 31 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 36,65% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 42,52%. Pada semester I capaian sangat rendah, dikarenakan kondisi fiskal daerah yang mempengaruhi arus kas tidak sesuai angkas. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sebagai pengemban Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat mengoptimalkan pencapaian target.

8) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2024 dilaksanakan dengan 4 program; 14 kegiatan; dan 53 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 19,66% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 16,73%. Rata-rata capaian yang sangat rendah dikarenakan beberapa keluaran yang akan selesai di semester II dan terkendala kondisi fiskal daerah yang mempengaruhi arus kas yang tidak dapat sesuai dengan perencanaan.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 program; 10 kegiatan; dan 24 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 40,72% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 30,07%. Capaian yang masih rendah dikarenakan output kegiatan akan selesai di semester II.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di tahun 2024 dilaksanakan dengan 3 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan II adalah Tinggi dengan nilai 88,13% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Tinggi pada nilai 94,01%. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capain sub kegiatan yang melebihi dari target capaiannya.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 dilaksanakan melalui 4 program; 10 kegiatan; dan 23 subkegiatan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 37,90% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 49,17%. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

12) Urusan Wajib Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di tahun 2024 dilaksanakan melalui 6 program; 11 kegiatan; dan 25 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 39,51% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 39,12%.

Dibutuhkan percepatan dalam pencapaian target kinerja, karena sebagian besar keluaran kegiatan berupa laporan akan selesai di semester II.

Keterbatasan anggaran daerah pada proses penyusunan dokumen anggaran menyebabkan program dimaksud tidak dapat dianggarkan. Hal ini tentunya menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta target capaian indikator kinerja daerah sedikit banyak terganggu. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 3 program; 13 kegiatan; dan 32 subkegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 29,00% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 29,00%. Diharapkan terus meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada, karena sesuai dengan perencanaan, keluaran kegiatan baru akan selesai di semester II. Sehingga capaian semester I masih pada kriteria sangat rendah.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sampai dengan triwulan II adalah Sangat Tinggi dengan nilai 100% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Tinggi pada nilai 96,94%. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capaian sub kegiatan yang melebihi dari target capaiannya..

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 2 subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sampai dengan triwulan II adalah Sedang dengan nilai 66,67% dan

realisasi keuangan dengan kategori Sangat Tinggi pada nilai 99,66%. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capaian sub kegiatan yang melebihi dari target capaiannya.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan II dengan predikat Sangat Rendah dengan nilai 22,22% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 27,72%. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya festival seni dan budaya serta belum terdaftarnya objek cagar budaya. Agar pada triwulan berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

17) urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2024 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan oleh Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 0,00% dikarenakan targetnya hingga akhir tahun, jadi capaian akan tinggi pada semester II dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 26,31%, telah sesuai perencanaan pada angkas.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2024 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 50,00% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 34,05%. Hal ini dikarenakan kegiatan yang outputnya adalah dokumen, selesai di akhir tahun. Mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah rencana tindak lanjut pada semester berikutnya.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dilaksanakan dengan 5 program; 14 kegiatan; dan 36 subkegiatan oleh Dinas Perikanan. Capaian kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II adalah Rendah dengan nilai 51,96% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 48,70%. Capaian masih dalam kategori rendah, dikarenakan output kegiatan masih dalam proses, dan akan selesai di semester II.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2024 dilaksanakan dengan 4 program; 12 kegiatan; dan 38 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan II adalah di kategori Sangat Rendah dengan nilai 31,77% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 22,60%. Hal ini ditunjang dengan *team work* yang baik dan SDM ASN yang kompeten. Akan tetapi diperlukan percepatan pencapaian target kinerja, mengingat keluaran kegiatan direncanakan akan selesai di semester II.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2024 dilaksanakan dengan 5 program; 10 kegiatan; dan 20 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 31,01% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 26,48%. Capaian yang masih sangat rendah, dikarenakan keluaran kegiatan memang direncanakan dicapai pada semester II. Mengingat hal tersebut diharapkan optimal meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 3 program; 4 kegiatan; dan 7 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 37,69% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 3,92%, dikarenakan

keluaran kegiatan akan dicapai pada semester II. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur dalam percepatan pencapaian target kinerja.

5) **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 5 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diampu oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 0,00% dan realisasi keuangan 3,23% juga dipredikat Sangat Rendah. Diperlukan komitmen yang tinggi dari pengampu Urusan Perindustrian dalam pencapaian target kinerja.

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 45,45% dan realisasi keuangan dengan kategori Rendah pada nilai 56,73%. Rendahnya capaian kinerja disebabkan targetnya baru akan didapat di akhir tahun. Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama tidak dilaksanakan program dimaksud. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) **Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan dengan 3 program; 20 kegiatan; dan 74 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 27,95% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 22,39%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan yang didapat outputnya di akhir tahun. Rencana tindak lanjutnya adalah mengoptimalkan pencapaian kinerja sehingga mampu maksimal mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 program; 15 kegiatan; dan 46 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 21,40% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 20,75%. Capaian tersebut telah sesuai dengan perencanaan, dan akan tinggi di semester II, karena pencapaian target yang akan terealisasi di akhir tahun. Dengan demikian, secara umum perlu ditingkatkan capaiannya pada triwulan selanjutnya.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan tahun 2024 dilaksanakan dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 49 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 22,25% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 39,69%. Target kegiatan yang berupa dokumen di sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemabangan Daerah sebagai penopang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, baru akan terealisasi di akhir tahun sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap angka capaian kinerja di semester satu. Optimalisasi kinerja dan optimalisasi pencapaian target kinerja adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam semester ke dua.

2) Keuangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan tahun 2024 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan 2 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II Sangat Rendah sebesar 46,00% dan realisasi keuangan Sangat Rendah sebesar 19,00%. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 51 subkegiatan dengan Capaian kinerja Urusan Keuangan Sangat Rendah dengan nilai 32,00% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 26,00%. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam menyelesaikan kegiatan, serta kedisiplinan aparatur yang ada. Akan tetapi keterbatasan SDM yang ada dianggap sebagai penghambat pencapaian kinerja. Dari permasalahan tersebut, disimpulkan rencana tindak lanjutnya adalah penguatan kompetensi aparatur serta selalu

melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang rutin di evaluasi. Sedangkan untuk permasalahan pada semester I secara umum disebabkan target kinerja yang akan dicapai pada semester II.

3) Kepegawaian

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2024 dilaksanakan dengan 2 program; 6 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sampai dengan triwulan II adalah berada pada kategori Sangat Tinggi dengan nilai 34,28% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 27,31%. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penopang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Kepegawaian harus meningkatkan pencapaian kinerja, mengingat target kinerja akan dicapai pada semester II.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2024 dilaksanakan dengan 1 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun capaian kinerja hingga triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran 42,64% dengan kategori Sangat Rendah. Capaian kinerja yang masih 0% dikarenakan diklat PIM yang masih dalam pelaksanaan dan prajabatan yang masih menunggu info jadwal dari BPSDM Provinsi Lampung.

5) Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 dilaksanakan dengan 1 program; 3 kegiatan; dan 8 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan II adalah berada pada kategori Sangat Rendah dengan nilai 0% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 6,25%. Capaian Kinerja sangat rendah dikarenakan output Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah berupa Laporan akhir maupun dokumen Kajian.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 3 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat sampai dengan triwulan II adalah Sangat Rendah dengan nilai 44,02% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 37,11%. Rendahnya capaian dikarenakan keluaran kegiatan yang baru akan selesai di semester II.

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 dilaksanakan dengan 5 program; 12 kegiatan; dan 32 subkegiatan. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II adalah Tinggi dengan nilai 78,00% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 31,00%. Rencana tindak lanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja lebih optimal, karena sesuai perencanaan, target akan tercapai di semester II.

Berikut rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2.11 Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian (%)	
		Kinerja	Anggaran
1	Pendidikan	28,87	25,36
2	Kesehatan	88,80	24,80
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19,30	28,10
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	50,12	38,33
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	78,00	31,00
6	Sosial	24,93	32,86
7	Tenaga Kerja	25,12	43,72
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	32,88	30,30
9	Pangan	30,50	50,52
10	Pertanahan	36,63	61,92
11	Lingkungan Hidup	65,00	60,00
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51,50	34,01
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	36,65	42,52
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19,66	16,73

15	Perhubungan	40,72	30,07
16	Komunikasi Dan Informatika	88,13	94,01
17	Dinas Koperasi, UKM	37,90	49,17
18	Penanaman Modal	39,51	39,12
19	Pemuda Dan Olahraga	29,00	29,00
20	Statistik	100,00	96,94
21	Persandian	66,67	99,66
22	Kebudayaan	22,22	27,72
23	Perpustakaan	-	26,31
24	Kearsipan	50,00	34,05
25	Perikanan	51,96	48,70
26	Pariwisata	31,77	22,60
27	Pertanian	31,01	26,48
28	Perdagangan	37,69	3,92
29	Perindustrian	-	3,23
30	Transmigrasi	45,45	56,73
31	Sekretariat Daerah	27,95	22,39
32	Sekretariat DPRD	21,40	20,75
33	Perencanaan	22,25	39,69
34	Keuangan	32,00	26,00
35	Kepegawaian	34,28	27,31
36	Pendidikan dan Pelatihan	-	42,64
37	Penelitian dan Pengembangan	-	6,25
38	Pengawasan	44,02	37,11
39	Kewilayahan	0	0
40	Kesatuan Bangsa Dan Politik	78,00	31,00
Rata-Rata Capaian		37,99	36,52

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Selanjutnya untuk penjabaran secara lengkap dalam bentuk matrik evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2024 hingga triwulan II ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Pesisir Barat

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			893.948.010.255		289.973.885.163		260.326.379.033		88.959.066.262		34,17%		88.959.066.262		9,95%	Dinas P dan K	
	1.01	Bidang Urusan Pendidikan			893.948.010.255		289.973.885.163		260.326.379.033		88.959.066.262		34,17%		296.394.863.726		33,16%	Dinas P dan K	
1	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	645.776.891.127	90,00%	208.003.718.545	90%	194.138.131.651	83,54%	77.184.442.780	92,8%	39,76%	83,5%	284.620.240.244	87,94%	44,07%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32.877.747	100%	12.800.000	100%	12.400.000	100%	5.407.500	100%	43,61%	100,0%	18.207.500	100,00%	55,38%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.192.007	4 Dokumen	2.800.000,00	2 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	2.969.750	50%	40,1%	5 Dokumen	5.769.750	50,00%	80,22%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10 Dokumen	25.685.740	4 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.437.750	50%	48,8%	5 Dokumen	12.437.750	50,00%	48,42%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	619.542.934.116	100%	198.934.915.499	100%	190.885.361.651	100%	74.948.062.476	100%	39,26%	100%	273.882.977.975	100,00%	44,21%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	619.514.679.802	28 Bulan	198.923.915.499	14 Bulan	190.879.861.651	14 Bulan	74.948.062.476	100,00%	39,26%	42 Dokumen	273.871.977.975	70,00%	44,21%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen	12.842.870	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.500.000	Dokumen	0	0,00%	0,00%	2 Dokumen	5.000.000	40,00%	38,93%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	10.274.296	4 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	2.000.000	Dokumen	0	0,00%	0,00%	4 Dokumen	4.000.000	40,00%	38,93%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5.137.148	2 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000	Dokumen	0	0,00%	0,00%	2 Dokumen	2.000.000	40,00%	38,93%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	200.000.000			100%	100.000.000	0%	5.212.250	0,00%	5,21%	0%	5.212.250	0,00%	2,61%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	100.000.000	Dokumen	5.212.250	0,00%	5,21%	Dokumen	5.212.250	0,00%	2,61%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Urusan	22.449.336.607	2 Urusan	7.300.100.000	2 Urusan	1.853.822.000	2 Urusan	1.411.488.250	100,00%	76,14%	2 Urusan	8.711.588.250	100,00%	38,81%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 Tahun	22.449.336.607	2,0 Tahun	7.300.100.000	1 Tahun	1.853.822.000	1,0 Tahun	1.411.488.250	100,00%	76,14%	3 Tahun	8.711.588.250	60,00%	38,81%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	2.211.322.715	100%	1.005.110.400	100%	533.516.000	100%	229.746.656	100,00%	43,06%	100%	229.746.656	100,00%	10,39%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	5 Tahun	8.424.923	2,0 Tahun	3.280.000	1 Tahun	2.000.000	,0 Tahun	0	0,00%	0,00%	2 Tahun	3.280.000	40,00%	38,93%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.500.000			1 Paket	9.500.000	0 Paket	0	0,00%	0,00%	0 Paket	0	0,00%	0,00%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Propaganda , Pameran dan Publikasi	5 Kali	436.657.577	2 Kali	167.900.000	1 Kali	85.000.000	1 Kali	36.000.000	100,00%	42,35%	3 Kali	203.900.000	60,00%	46,70%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang cetak dan Pengadaan Serta terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis kantor Rutin	60 Bulan	354.298.821	24 Bulan	190.931.500	12 Bulan	96.016.000	3 Bulan	10.998.000	25,00%	11,45%	27 Bulan	201.929.500	45,00%	56,99%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60 Bulan	61.645.776	24 Bulan	42.000.000	12 Bulan	30.000.000	6 Bulan	15.000.000	50,00%	50,00%	30 Bulan	57.000.000	50,00%	92,46%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minum Kantor	55 Bulan	56.508.628	22 Bulan	22.000.000	11 Bulan	11.000.000	5 Bulan	5.000.000	45,45%	45,45%	27 Bulan	27.000.000	49,09%	47,78%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	60 Bulan	1.284.286.991	24 Bulan	578.998.900	12 Bulan	300.000.000	6 Bulan	162.748.656	50,00%	54,25%	30 Bulan	741.747.556	50,00%	57,76%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	467.300.000	100%	0	100%	467.300.000	100%	416.950.000	100,00%	89,23%	100%	854.139.319	100,00%	182,78%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000			2 Unit	80.000.000	2 Unit	72.000.000	100,00%	90,00%	2 Bulan	72.000.000	100,00%	90,00%	Dinas P dan K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	387.300.000			14 Unit	387.300.000	12 Unit	344.950.000	85,71%	89,07%	12 Bulan	344.950.000	85,71%	89,07%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	430.914.246	100%	284.613.671	100%	204.542.000	100%	152.575.648	100,00%	74,59%	100%	437.189.319	100,00%	101,46%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	110.962.396	24 Bulan	59.529.671	12 Bulan	42.000.000	6 Bulan	16.215.648	50,00%	38,61%	30 Bulan	75.745.319	50,00%	68,26%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60 Bulan	292.817.434	24 Bulan	214.000.000	12 Bulan	157.000.000	6 Bulan	136.000.000	50,00%	86,62%	30 Bulan	350.000.000	50,00%	119,53%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor	60 Bulan	27.134.416	24 Bulan	11.084.000	12 Bulan	5.542.000	6 Bulan	360.000	50,00%	6,50%	30 Bulan	11.444.000	50,00%	42,18%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	442.205.697	100%	466.178.975	100%	81.190.000	100%	15.000.000	100,00%	18,48%	100%	481.178.975	100,00%	100,00%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	436.657.577	24 Bulan	205.846.975	12 Bulan	54.500.000	5 Bulan	15.000.000	41,67%	27,52%	29 Bulan	220.846.975	48,33%	50,58%	Dinas P dan K	
	1.01.01.2.09.00 11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	5.548.120	24 Bulan	260.332.000	12 Bulan	26.690.000	Bulan	0	0,00%	0,00%	24 Bulan	260.332.000	40,00%	100,00%	Dinas P dan K	
	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100%	248.171.119.127	64,08%	81.970.166.618	100%	66.188.247.382	64,08%	11.774.623.482	64,08%	17,79%	64,08%	11.774.623.482	64,08%	4,74%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi kasar SD	93,57%	140.284.083.108	89.13%	47.634.529.339	91,57%	32.583.953.330	100,00%	4.145.563.630	100,00%	12,72%	100,00%	51.780.092.969	100,00%	36,91%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SD	17.963 Siswa	929.585.250	17.963 Siswa	929.585.250							17.963 Siswa	929.585.250	100,00%	100,00%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan	20 Kali	556.782.452	4 Kali	133.218.000					0,00%	0,00%	4 Kali	133.218.000	20,00%	23,93%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	48 Bulan	17.551.855.000	12 Bulan	7.926.730.130	12 Bulan	8.280.000.000	3 Bulan	1.789.400.000	25,00%	21,61%	15 Bulan	9.716.130.130	31,25%	55,36%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni SD	82,27%	96.895.261.687	80,78%	14.819.625.088	80,27%	18.053.070.000	99,87%	4.992.000	100,00%	0,03%	99,87%	14.824.617.088	99,87%	15,30%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 38	Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	16 Kali	450.000.000	4 Kali	61.617.000	4 Kali	125.000.000	Kali	0	0,00%	0,00%	4 Kali	61.617.000	99,87%	13,69%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	15 Dokumen	150.000.000	Dokumen	0	5 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	10.680.600	20,00%	21,36%	1 Kali	10.680.600	99,87%	7,12%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.01.00 48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	25 Unit	23.750.598.720	39 Unit	23.763.753.871	35 Unit	6.075.883.330	Unit	2.340.491.030	0,00%	38,52%	39 Unit	26.104.244.901	99,87%	109,91%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi kasar SMP	92,16%	95.047.530.949	86,81%	28.017.899.723	92,08%	30.015.050.052	86,81%	7.536.189.852	94,28%	25,11%	86,81%	7.536.189.852	86,81%	7,93%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	25 Unit	45.341.727.818	12 Unit	11.756.778.168	25 Unit	11.146.350.052	Unit	4.142.761.152	0,00%	37,17%	12 Ruang	15.899.539.320	48,00%	35,07%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SMP	6.366 Paket	329.337.000	6.365 Paket	372.437.000					0,00%	0,00%	6.365 Siswa	372.437.000	99,98%	113,09%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 32	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	#####	13.048.500.000		0	#####	10.528.500.000	#####	3.343.500.000	100,00%	31,76%	422 Siswa	3.343.500.000	84,06%	25,62%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan	20 Kali	485.169.369	4 Kali	96.840.000					0,00%	0,00%	4 Kali	96.840.000	20,00%	19,96%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	120 Orang	420.000.000	30 Orang	105.317.760	50 Orang	130.000.000	Kali	0	0,00%	0,00%	Kali	105.317.760	0,00%	25,08%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni SMP	70,75%	34.432.796.762	71,72%	15.596.750.800	70,50%	7.936.200.000		4.960.500	100,00%	0,06%	81,48%	15.601.711.300	81,48%	45,31%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 51	Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	16 Kali	450.000.000	4 Kali	89.775.995	4 Kali	94.000.000	Kali	0	0,00%	0,00%	4 Kali	89.775.995	81,48%	19,95%	Dinas P dan K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.00 52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	12 Dokumen	150.000.000			4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	44.968.200	100,00%	89,94%	4 Dokumen	44.968.200	181,48%	29,98%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.02.00 60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	390.000.000			120 Orang	130.000.000	Orang	0	0,00%	0,00%	Kali	0	81,48%	0,00%	Dinas P dan K	
																		Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar PAUD	75,00%	11.614.557.624	54,37%	5.632.564.756	71,00%	3.303.684.000	54,37%	92.870.000	76,58%	2,81%	54,37%	92.870.000	54,37%	0,80%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03.00 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	10 Unit	1.487.617.261	3 Unit	922.785.050	5 Unit	851.984.000	Unit	0	0,00%	0,00%	2 Unit	0	20,00%	0,00%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03.00 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya perlengkapan Peserta Disik PAUD	6.600 Paket	161.568.000	6.600 Paket	161.568.000							6.600 Paket	161.568.000	100,00%	100,00%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03.00 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30 Orang		30 Orang	105.317.760	50 Orang	100.000.000	Kali	0	0,00%	0,00%	Kali	105.317.760	0,00%	#DIV/0!	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03.00 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	75,00%	9.195.372.363	67,76%	4.257.698.100	71,00%	2.146.700.000	54,37%	3.909.600	76,58%	0,18%	54,37%	3.909.600	77%	0,04%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03.00 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	16 Kali	450.000.000	4 Kali	89.775.995	4 Kali	80.000.000	4 Kali	0	100,00%	0,00%	8 Kali	89.775.995	81,48%	19,95%	Dinas P dan K	
	1.01.02.2.03.00 26	Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	4 Kali	320.000.000	2 Kali	95.419.851	2 Kali	125.000.000	1 Kali	88.960.400	50,00%	71,17%	100%	88.960.400	50%	27,80%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan	325 Orang	1.224.947.446	325 Orang	685.172.800	325 Orang	285.560.000	325 Orang	0	100,00%	0,00%	325 Orang	0	100,00%	0,00%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	Jumlah PKBM	2 PKBM	1.224.947.446	2 PKBM	685.172.800	2 PKBM	285.560.000	PKBM	0	0,00%	0,00%	2 PKBM	0	100,00%	0,00%	Dinas P dan K	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.237.841.350		592.770.700		466.641.000		129.354.000		27,72%		129.354.000			Dinas P dan K	
		Bidang Urusan Kebudayaan			2.237.841.350		592.770.700	22,50%	466.641.000	5%	129.354.000	22,22%	27,72%		129.354.000			Dinas P dan K	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang terlibat pertunjukan seni	40%	1.754.466.913	25,00%	253.860.000	25,00%	346.641.000	10,00%	63.629.500	40,00%	18,36%	10%	63.629.500	25,0%	3,63%	Dinas P dan K	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	70%	1.754.466.913	0,00%	253.860.000	55,00%	346.641.000	20,00%	63.629.500	36,36%	18,36%	,2 Objek	63.629.500	28,57%	3,63%	Dinas P dan K	
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	50 Kali	483.374.437	2 Kali	253.860.000	2 Kali	346.641.000	1 Kali	63.629.500	0,00%	18,36%	3 Kali	63.629.500	6,00%	13,16%	Dinas P dan K	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	40,00%	483.374.437	20%	338.910.700	20%	120.000.000	0%	65.724.500	0,00%	54,77%	0%	65.724.500	0,0%	13,60%	Dinas P dan K	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Objek Terdaftar	10 Objek	483.374.437	4 Objek	338.910.700	2 Objek	120.000.000	Objek	65.724.500	0,00%	54,77%	5,0 Objek	65.724.500	50,00%	13,60%	Dinas P dan K	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	10 Objek	483.374.437	4 Objek	338.910.700	2 Objek	120.000.000	1 Objek	65.724.500	50,00%	54,77%	5,0 Objek	65.724.500	50,00%	13,60%	Dinas P dan K	
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		99	Rp 476.162.810.276	99	Rp 152.556.497.201	98	Rp 105.591.183.638	38,9	Rp 26.239.968.869	39,7	24,9	39	Rp 26.239.968.869	39,27	5,51	Dinkes	
	1.1.02	KESEHATAN		99	Rp 476.162.810.276	99	Rp 106.063.570.473	98	Rp 105.591.183.638	38,9	Rp 26.239.968.869	39,7	24,9	39	Rp 26.239.968.869	39,27	5,51	Dinkes	
1	1.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%) Kesehatan	95	Rp 171.360.320.270	95	Rp 52.081.645.027	90	Rp 41.030.584.960	38,9	Rp 15.597.844.674	43,2	38,0	39	Rp 15.597.844.674	40,92	9,10	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 180.748.439	95	Rp 71.138.600	90	Rp 72.944.400	90,0	Rp 37.341.992	100,0	51,2	90	Rp 37.341.992	94,74	20,66	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 40.311.411	5	Rp 31.225.600	2	Rp 12.466.800	1,0	Rp 11.623.992	50,0	93,2	1	Rp 11.623.992	20,00	28,84	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Rp 25.322.308	5	Rp 10.644.200	1	Rp 19.610.000	1,0	Rp 13.754.000	100,0	70,1	1	Rp 13.754.000	20,00	54,32	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Rp 39.220.000		Rp -	1	Rp 19.610.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 10.000.000		Rp -	4	Rp 5.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Rp 65.894.720	20	Rp 29.268.800	1	Rp 16.257.600	1,0	Rp 11.964.000	100,0	73,6	1	Rp 11.964.000	5,00	18,16	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 166.635.424.996	95	Rp 49.632.768.385	90	Rp 35.984.913.900	40,0	Rp 15.277.117.468	44,4	42,5	40	Rp 15.277.117.468	42,11	9,17	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Rp 166.607.567.926	70	Rp 49.615.218.385	14	Rp 35.972.913.900	7,0	15.277.117.468	50,0	42,5	7	Rp 15.277.117.468	10,00	9,17	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 12.663.687	5	Rp 7.250.000	1	Rp 5.000.000	0,0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	Rp 10.128.922	10	Rp 6.200.000	2	Rp 4.000.000	1,0	0	50,0	0,0	1	Rp -	10,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 5.064.461	5	Rp 4.100.000	1	Rp 3.000.000	0,0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	Rp 577.951.271	0	Rp -	0	Rp 50.000.000	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05.05	Pendidikan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Rp 577.951.271	0	Rp -	25	Rp 50.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	Rp 2.236.695.564	95	Rp 633.059.724	90	Rp 484.253.860	4,5	Rp 140.339.585	5,0	29,0	5	Rp 140.339.585	4,74	6,27	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Rp 30.613.000	3	Rp 11.657.400	1	Rp 6.122.600	0,0	Rp 3.284.155	0,0	53,6	0	Rp 3.284.155	0,00	10,73	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp 26.013.000	0	Rp -	1	Rp 8.671.000	0,0	Rp -		0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Rp 126.611.536	3	Rp 131.589.189	1	Rp 44.636.760	1,0	Rp 10.209.510	100,0	22,9	1	Rp 10.209.510	20,00	8,06	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Rp 265.617.500	3	Rp 212.494.000	1	Rp 53.123.500	1,0	Rp 18.229.400	100,0	34,3	1	Rp 18.229.400	20,00	6,86	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5	Rp 351.472.950	3	Rp 206.272.950	1	Rp 36.300.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Rp 68.963.000	3	Rp 22.763.000	1	Rp 15.400.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Rp 1.367.404.578	6	Rp 568.260.660	2	Rp 320.000.000	1,0	Rp 108.616.520	50,0	33,9	1	Rp 108.616.520	10,00	7,94	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07	Pengadaan milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jumlah pengadaan mebel penunjang urusan pemerintah Daerah	100	Rp 8.069.325.600	100,0	Rp 4.284.748.000	100	Rp 3.917.412.800	66,7	Rp 89.700.000	66,7	2,3		Rp 89.700.000		1,11	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Rp 126.000.000	3	Rp 84.000.000	1	Rp 42.000.000	0,0	Rp 10.500.000	0,0	25,0	0	Rp 10.500.000	0,00	8,33	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	Rp 7.640.825.600	30	Rp 4.035.748.000	10	Rp 3.820.412.800	1,0	Rp 54.200.000	10,0	1,4	1	Rp 54.200.000	2,00	0,71	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Rp 302.500.000	6	Rp 165.000.000	2	Rp 55.000.000	1,0	Rp 25.000.000	50,0	45,5	1	Rp 25.000.000	10,00	8,26	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	Rp 485.760.000	95	Rp 142.188.188	90	Rp 147.360.000	0,0	Rp 20.345.629	0,0	13,8	0	Rp 20.345.629	0,00	4,19	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Rp 50.400.003	0	Rp -	1	Rp 50.400.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan (bulan)	5	Rp 480.000.000	3	Rp 139.308.188	1	Rp 96.000.000	0,0	Rp 20.165.629	0,0	21,0	0	Rp 20.165.629	0,00	4,20	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor (bulan)	5	Rp 5.760.000	3	Rp 2.880.000	1	Rp 960.000	0,0	Rp 180.000	0,0	18,8	0	Rp 180.000	0,00	3,13	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	Rp 1.434.859.288	90	Rp 641.072.405	90	Rp 373.700.000	32,1	Rp 33.000.000	35,7	8,8	32	Rp 33.000.000	33,78	2,30	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Rp 62.400.000	0	Rp -	7	Rp 20.800.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (unit)	35	Rp 1.249.500.000	21	Rp 749.700.000	7	Rp 249.900.000	1,0	Rp 17.000.000	14,3	6,8	1	Rp 17.000.000	2,86	1,36	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor (%)	100	Rp 185.359.288	100	Rp 52.600.000	73	Rp 51.500.000	40,0	Rp 16.000.000	54,8	31,1	40	Rp 16.000.000	40,00	8,63	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Rp 154.500.000	0	Rp -	3	Rp 51.500.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)	100	Rp 279.812.829.791	100	Rp 53.449.130.096	100	Rp 57.760.116.978	4699,9	Rp 10.584.176.695	4699,9	18,3	4700	Rp 10.584.176.695	4699,88	3,78	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 45.114.596.632	100	Rp 14.125.600.528	100	Rp 10.958.757.523	2,1	Rp 2.227.070.813	2,1	20,3	2	Rp 2.227.070.813	2,12	4,94	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.07	Pembangunan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana Fasilitas kesehatan yang Di bangun (%)	3	Rp 6.511.373.447	0	Rp -	1	Rp 3.000.872.200	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	10	Rp 11.049.550.336	4	Rp 5.981.003.955	8	Rp 2.762.387.584	5,0	Rp 1.688.586.449	62,5	61,1	5	Rp 1.688.586.449	50,00	15,28	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara (%)	1	Rp 8.179.926.700	1	Rp 4.620.077.350	1	Rp 800.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (%)	4	Rp 19.373.746.149	1	Rp 3.524.519.223	1	Rp 2.394.051.000	0,0	Rp 387.051.000	0,0	16,2	0	Rp 387.051.000	0,00	2,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11	Rp 168.375.000	11	Rp 56.125.000	11	Rp 56.125.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11	Rp 27.854.092.487	11	Rp 8.806.864.457	11	Rp 1.284.598.739	1,0	Rp 151.433.364	9,1	11,8	1	Rp 151.433.364	9,09	0,54	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1500	Rp 1.269.754.000	0	Rp -	1200	Rp 634.877.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	12	Rp 77.538.000	12	Rp 30.000.000	12	Rp 25.846.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 232.098.827.761	100	Rp 39.178.310.336	100	Rp 46.353.944.515	14093,9	Rp 8.326.418.586	14093,9	18,0	14094	Rp 8.326.418.586	14093,90	3,59	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3860	Rp 200.000.000	3000	Rp 65.000.000	3281	Rp 100.000.000	3100,0	Rp 77.859.500	94,5	77,9	3100	Rp 77.859.500	80,31	38,93	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK Puskesmas)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas	12	Rp 857.828.000	12	Rp 428.914.000	12	Rp 428.914.000	5,0	Rp 138.224.000	41,7	32,2	5	Rp 138.224.000	41,67	16,11	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus)	20	Rp 6.729.853.902	19	Rp 1.120.755.300	3132	Rp 388.820.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (BOK Puskesmas)	Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus) di wilayah Kerja Puskesmas	12	Rp 304.485.000	12	Rp 101.495.000	12	Rp 101.495.000	5,0	Rp 37.795.000	41,7	37,2	5	Rp 37.795.000	41,67	12,41	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2990	Rp 195.287.250	2890	Rp 65.095.750	2983	Rp 65.095.750	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi Lanjutan, dan Investasi KIPPI (%)	100	Rp 347.769.201	100	Rp 569.793.800	14444	Rp 50.000.000	200,0	Rp -	1,4	0,0	200	Rp -	200,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19820	Rp 75.000.000	17219	Rp 25.000.000	17479	Rp 25.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK Puskesmas)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 1.444.956.000	12	Rp 481.652.000	12	Rp 481.652.000	4,0	Rp 165.573.000	33,3	34,4	4	Rp 165.573.000	33,33	11,46	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115900	Rp 75.000.000	115800	Rp 25.000.000	115820	Rp 25.000.000	15000,0	Rp 3.098.000	13,0	12,4	15000	Rp 3.098.000	12,94	4,13	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15800	Rp 75.000.000	15680	Rp 25.000.000	15743	Rp 25.000.000	1200,0	Rp -	7,6	0,0	1200	Rp -	7,59	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20900	Rp 150.000.000	20800	Rp 50.000.000	20834	Rp 50.000.000	5200,0	Rp -	25,0	0,0	5200	Rp -	24,88	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	980	Rp 728.289.900	860	Rp 242.763.300	927	Rp 242.763.300	120,0	Rp -	12,9	0,0	120	Rp -	12,24	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta pelatihan (petugas)	165	Rp 161.042.543	165	Rp 179.018.000	271	Rp 52.066.500	29,0	Rp 3.288.000	10,7	6,3	29	Rp 3.288.000	17,58	2,04	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3000	Rp 2.611.943.600	2200	Rp 30.597.000	2500	Rp 1.305.971.800	200,0	Rp 11.407.000	8,0	0,9	200	Rp 11.407.000	6,67	0,44	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 185.580.000	12	Rp 61.860.000	12	Rp 61.860.000	5,0	Rp 24.620.000	41,7	39,8	5	Rp 24.620.000	41,67	13,27	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3800	Rp 150.000.000	3000	Rp 46.000.000	3300	Rp 50.000.000	350,0	Rp 3.302.000	10,6	6,6	350	Rp 3.302.000	9,21	2,20	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 198.780.000		Rp 66.260.000	12	Rp 66.260.000	3,0	Rp 12.950.000	25,0	19,5	3	Rp 12.950.000	25,00	6,51	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	Rp 20.000.000	0	Rp -	2	Rp 10.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	365	Rp 1.987.110.075	343	Rp 976.369.600	2	Rp 20.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus)	75	Rp 664.351.634	73	Rp 2.093.932.350	2	Rp 130.566.500	23,0	Rp -	1150,0	0,0	23	Rp -	30,67	0,00	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK Puskesmas)	Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 7.135.383.000	12	Rp 2.378.461.000	12	Rp 2.378.461.000	3,0	Rp 421.944.500	25,0	17,7	3	Rp 421.944.500	25,00	5,91	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	Rp 26.364.600	2	Rp 13.182.300	1	Rp 6.591.150	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon)	100	Rp 1.565.926.625	95	Rp 431.266.760	1	Rp 337.945.900	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (BOK Puskesmas)	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 410.190.000	12	Rp 136.730.000	12	Rp 136.730.000	4,0	Rp 43.910.000	33,3	32,1	4	Rp 43.910.000	33,33	10,70	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan yang di gunakan (unit media)	4	Rp 820.846.530	2	Rp 763.485.850	1	Rp 336.571.750	0,0	Rp 13.606.000	0,0	4,0	0	Rp 13.606.000	0,00	1,66	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3	Rp 75.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB (%)	100	Rp 270.954.530	5	Rp 283.357.830	1	Rp 159.035.650	12,0	Rp 20.232.000	1200,0	12,7	12	Rp 20.232.000	12,00	7,47	Dinkes	
		Pengelolaan Surveillans Kesehatan (BOK Puskesmas)	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB (%)	12	Rp 699.690.000	12	Rp 233.230.000	12	Rp 233.230.000		Rp 65.418.000	0,0	28,0	0	Rp 65.418.000	0,00	9,35	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	141746	Rp 59.644.500	141600	Rp 19.881.500	141746	Rp 19.881.500	77200,0	Rp 7.310.000	54,5	36,8	77200	Rp 7.310.000	54,46	12,26	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%)	100	Rp 1.402.965.481	100	Rp 2.501.934.994	3	Rp 1.313.018.476	86,0	Rp 58.494.897	2866,7	4,5	86	Rp 58.494.897	86,00	4,17	Dinkes	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Puskesmas)	Jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 3.996.420.000	12	Rp 1.332.140.000	12	Rp 1.332.140.000	4,0	Rp 371.470.000	33,3	27,9	4	Rp 371.470.000	33,33	9,30	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI, Peserta Monev kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan	60	Rp 108.458.870.432	60	Rp 39.976.373.376	12	Rp 10.222.556.000	12,0	Rp 3.414.839.969	100,0	33,4	12	Rp 3.414.839.969	20,00	3,15	Dinkes	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN Puskesmas)	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi dan Non kapitasi di Puskesmas (%)	100	Rp 7.488.079.462	100	Rp -	100	Rp 15.622.947.840	0,0	Rp 1.284.823.195	0,0	8,2	0	Rp 1.284.823.195	0,00	17,16	Dinkes	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Tersedianya dana pelayanan kesehatan INA - CBGs Rumah Sakit (%)	100	Rp 3.815.238.885	100	Rp 1.362.025.999	100	Rp 2.362.025.999	0,0	Rp 381.810.759	0,0	16,2	0	Rp 381.810.759	0,00	10,01	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Yang Didistribusikan	1	Rp 18.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	1,0	Rp 3.300.000	100,0	55,0	1	Rp 3.300.000	100,00	18,33	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah biaya operasional RS (%)	100	Rp 27.525.422.080	100	Rp 6.760.201.596	100	Rp 4.100.000.000	84,8	Rp 1.040.481.002	84,8	25,4	85	Rp 1.040.481.002	84,80	3,78	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah biaya Operasional Puskesmas	11	Rp 38.596.290.908	11	Rp 9.225.090.338	1	Rp 165.000.000	11,0	Rp -	1100,0	0,0	11	Rp -	100,00	0,00	Dinkes	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas)	Jumlah biaya Operasional Puskesmas dan manajemen Puskesmas	12	Rp 6.417.759.000	12	Rp 2.139.253.000	12	Rp 2.139.253.000	2,0	Rp 362.809.764	16,7	17,0	2	Rp 362.809.764	16,67	5,65	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah lokasi pendistribusian obat (fasyankes)	12	Rp 510.556.789	12	Rp 448.253.050	1	Rp 45.502.200	12,0	Rp -	1200,0	0,0	12	Rp -	100,00	0,00	Dinkes	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (BOK Puskesmas)	Jumlah lokasi pendistribusian obat (fasyankes)	12	Rp 46.395.000	12	Rp 15.465.000	12	Rp 15.465.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RSUD dan Puskesmas yang akan dilakukan akreditasi/Reakreditasi (Fasyankes)	30	Rp 6.239.984.829	16	Rp 402.225.400	11	Rp 88.603.000	11,0	Rp -	100,0	0,0	11	Rp -	36,67	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3	Rp 58.720.800	1	Rp 19.573.600	1	Rp 19.573.600	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) BOK Puskesmas	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Rp 143.730.000	12	Rp 47.910.000	12	Rp 47.910.000	2,0	Rp 7.580.000	16,7	15,8	2	Rp 7.580.000	16,67	5,27	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus Wabah (dokumen)	5	Rp 211.945.205	5	Rp 76.758.400	1	Rp 25.000.000	1,0	Rp -	100,0	0,0	1	Rp -	20,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Rp 60.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Rp 118.020.000	12	Rp 39.340.000	12	Rp 39.340.000	4,0	Rp 11.450.000	33,3	29,1	4	Rp 11.450.000	33,33	9,70	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) (BOK Puskesmas) (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Rp 42.570.000	12	Rp 14.190.000	12	Rp 14.190.000	3,0	Rp 1.360.000	25,0	9,6	3	Rp 1.360.000	25,00	3,19	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	500	Rp 112.402.800	250	Rp 37.467.600	250	Rp 37.467.600	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12	Rp 563.190.000	12	Rp 281.595.000	12	Rp 281.595.000	5,0	Rp 72.620.000	41,7	25,8	5	Rp 72.620.000	41,67	12,89	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	4	Rp 373.680.000	1	Rp 186.840.000	1	Rp 186.840.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	12	Rp 1.911.210.000	12	Rp 955.605.000	12	Rp 955.605.000	5,0	Rp 264.842.000	41,7	27,7	5	Rp 264.842.000	41,67	13,86	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (%)	100	Rp 2.599.405.398	100	Rp 711.329.840	100	Rp 447.414.940	3,6	Rp 30.687.296	3,6	6,9	4	Rp 30.687.296	3,64	1,18	Dinkes	
	1.1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Kesehatan Secara Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)	50	Rp 2.599.405.398	10	Rp 711.329.840	10	Rp 319.002.940	2,0	Rp 30.687.296	20,0	9,6	2	Rp 30.687.296	4,00	1,18	Dinkes	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (BOK Puskesmas)	Tersedianya Data Kesehatan Secara Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)	12	Rp 385.236.000	12	Rp 128.412.000	12	Rp 128.412.000	2,0	Rp 18.855.000	16,7	14,7	2	Rp 18.855.000	16,67	4,89	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (%)	100	Rp 24.624.814.815	100	Rp 103.644.300	100	Rp 6.335.464.600	55,5	Rp 8.132.500	55,5	0,1	56	Rp 8.132.500	55,50	0,03	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 230.566.071	100	Rp 37.383.300	100	Rp 50.000.000	95,7	Rp 8.132.500	95,7	16,3	96	Rp 8.132.500	95,74	3,53	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01.01	Pengedalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Perizinan Tenaga Kesehatan yang diperiksa (Dokumen)	1175	Rp 230.566.071	1135	Rp 58.395.050	235	Rp 25.000.000	225,0	Rp -	95,7	0,0	225	Rp -	19,15	0,00	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	Rp 50.000.000	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	0,0	Rp 8.132.500	0,0	32,5	0	Rp 8.132.500	0,00	16,27	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 24.394.248.744	100	Rp 110.044.320	100	Rp 5.230.717.200	40,0	Rp 1.607.200.750	40,0	30,7	40	Rp 1.607.200.750	40,00	6,59	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPNI dan IBI)	4	Rp 80.000.000	0	Rp -	2	Rp 40.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0				Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta penyediaan tenaga kontrak (Dokumen)	5	Rp 24.029.704.237	4	Rp 90.044.320	1	Rp 5.030.000.000	0,4	Rp 1.592.750.750	40,0	31,7	0	Rp 1.592.750.750	8,00	6,63	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dana Hibah Untuk Organisasi PPNI, IBI dan YJI (organisasi)	5	Rp 364.544.507	2	Rp 20.000.000	1	Rp 160.717.200	0,2	Rp 14.450.000	20,0	9,0	0	Rp 14.450.000	4,00	3,96	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 308.550.470	100	Rp 6.175.569.750	100	Rp 1.054.747.400	30,8	Rp 258.993.000	30,8	33,2	31	Rp 258.993.000	30,77	83,94	Dinkes	
	1.1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Petugas Kesehatan Dan Kader Dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Screening Hypotiroid Kongenital (SHK), dan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) (orang)	15	Rp 308.550.470	12	Rp 6.175.569.750	13	Rp 1.054.747.400	4,0	Rp 258.993.000	30,8	25%	4	Rp 258.993.000	26,67	83,94	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindakanlanjut terhadap Perizinan Usaha (%)	100	Rp 117.829.000	100	Rp 17.829.000	100	Rp 50.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)	100	Rp 117.829.000	100	Rp 17.829.000	100	Rp 50.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4	Rp 117.829.000	1	Rp 17.829.000	1	Rp 50.000.000	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp 247.016.400	100	Rp 411.322.050	100	Rp 415.017.100	0,0	Rp 49.815.000	0,0	12,0	0	Rp 49.815.000	0,00	20,17	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp 134.880.000		Rp 67.440.000		Rp 33.720.000		Rp -		0,0	0				Dinkes	
	1.1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Rapat Koordinasi Bidang Kesmas)	4	Rp 134.880.000	2	Rp 67.440.000	1	Rp 33.720.000		Rp -		0,0	0				Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp 247.016.400	100	Rp 411.322.050	100	Rp 82.338.800	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
	1.1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	Rp 247.016.400	2	Rp 164.677.600	1	Rp 82.338.800	0,0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0,00	0,00	Dinkes	
																		Dinkes	
	1.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah/Kota			Rp 940.403.200		Rp 342.486.600		Rp 298.958.300		Rp 49.815.000							Dinkes	
	1.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Advokasi, Koordinasi dan BinteK Kelompok Kerja Operasional Posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan Mitra Dalam Pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu Dalam Transformasi Layanan Primer	4	Rp 174.113.200	2	Rp 87.056.600	1	Rp 43.528.300	0,0	Rp -	0,0	0,0	0				Dinkes	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (BOK Puskesmas)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah Kerja Puskesmas	12	Rp 766.290.000	12	Rp 255.430.000	12	Rp 255.430.000	4	Rp 49.815.000	33,3	19,5	4				Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG																	
A	01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 27.806.086.122	90	Rp 26.002.369.153	92,5	Rp 5.787.072.211	81	Rp 2.457.272.397	87,6	42,5		Rp 32.843.703.868		118,12	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 117.184.869	90	Rp 56.117.390	92,5	Rp 24.000.000	81	Rp 6.533.500	87,6	27,2		Rp 87.130.890		74,35	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 61.410.000	5	Rp 42.899.950	2	Rp 13.000.000	1	Rp 6.533.500	50,0	50,3	6	Rp 49.433.450	120	80,50	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Rp 55.774.869	5	Rp 37.697.440	1	Rp 11.000.000	-	Rp -	-	0,0	5	Rp 37.697.440	100	67,59	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 16.304.908.808	90	Rp 21.085.172.756	92,5	Rp 2.666.750.900	73	Rp 1.084.451.110	78,9	40,7		Rp 22.169.623.866		135,97	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	Rp 16.237.752.708	56	Rp 21.040.072.756	14	Rp 2.653.250.900	8	Rp 1.084.451.110	57,1	40,9	64	Rp 22.124.523.866	91,428571	136,25	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 30.525.500	5	Rp 20.500.000	1	Rp 6.000.000	-	Rp -	-	0,0	5	Rp 20.500.000	100	67,16	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 24.420.400	8	Rp 16.400.000	2	Rp 5.000.000	-	Rp -	-	0,0	8	Rp 16.400.000	80	67,16	Dinas PU & PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5			6			7			8			9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 12.210.200		11	Rp 8.200.000		1	Rp 2.500.000		-	Rp -		-	0,0	11	Rp 8.200.000	220	67,16	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.03	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 759.763.234		90	Rp 378.503.500		92,5	Rp 61.780.000		0	Rp -		-	0,0		Rp 378.503.500		49,82	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Rp 759.763.234		36	Rp 378.503.500		1	Rp 61.780.000		-	Rp -		-	0,0	36	Rp 378.503.500	60	49,82	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 864.761.160		90	Rp 385.150.000		92,5	Rp 208.656.311		90	Rp 58.500.000		97,3	28,0		Rp 443.650.000		51,30	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	Rp 500.000.000		36	Rp 385.150.000		20	Rp 208.656.311		-	Rp 58.500.000		-	28,0	36	Rp 443.650.000	60	88,73	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 2.441.304.251		90	Rp 3.577.680.982		92,5	Rp 1.547.739.000		90	Rp 704.503.569		97,3	45,5		Rp 4.199.650.551		172,02	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat	60	Rp 49.634.463		36	Rp 82.534.000		9	Rp 23.793.000		-	Rp -		-	0,0	36	Rp 82.534.000	60	166,28	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60	Rp 488.844.374		36	Rp 305.447.024		44	Rp 169.870.000		20	Rp 84.348.500		45,5	49,7	56	Rp 389.795.524	93,333333	79,74	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	60	Rp 604.510.000		36	Rp 206.309.860		1	Rp 35.000.000		-	Rp -		-	0,0	36	Rp 206.309.860	60	34,13	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Rp 553.315.414		36	Rp 528.360.680		8	Rp 173.076.000		4	Rp 69.138.000		50,0	39,9	40	Rp 597.498.680	66,666667	107,99	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	Rp 150.000.000		36	Rp 820.902.000		2	Rp 616.000.000		1	Rp 274.750.000		50,0	44,6	37	Rp 1.095.652.000	61,666667	730,43	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	Rp 595.000.000		36	Rp 1.634.127.418		2	Rp 530.000.000		1	Rp 276.267.069		50,0	52,1	37	Rp 1.910.394.487	61,666667	321,07	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 1.404.477.090		90	Rp 968.301.000		92,5	Rp 112.000.000		0	Rp -		-	0,0		Rp 968.301.000		68,94	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	37	Rp 498.212.000		65	Rp 968.301.000		14	Rp 112.000.000		-	Rp -		-	0,0	65	Rp 968.301.000	175,67568	194,36	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 2.379.421.008		90	Rp 1.483.370.880		92,5	Rp 455.596.000		43	Rp 199.705.000		46,5	43,8		Rp 1.683.075.880		70,73	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	Rp 427.357.000		36	Rp 389.929.000		3	Rp 84.000.000		1	Rp 32.786.000		33,3	39,0	37	Rp 422.715.000	61,666667	98,91	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Rp 1.582.516.200		36	Rp 673.200.000		3	Rp 143.200.000		2	Rp 121.600.000		66,7	84,9	38	Rp 794.800.000	63,333333	50,22	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Rp 369.547.808		36	Rp 420.241.880		1	Rp 228.396.000		-	Rp 45.319.000		-	19,8	36	Rp 465.560.880	60	125,98	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 3.534.265.700		90	Rp 2.510.188.963		92,5	Rp 710.550.000		88	Rp 403.579.218		95,1	56,8		Rp 2.913.768.181		82,44	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	60	Rp 1.813.214.700		36	Rp 1.400.790.873		9	Rp 404.550.000		1	Rp 183.252.218		11,1	45,3	37	Rp 1.584.043.091	61,666667	87,36	Dinas PU & PR	
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	60	Rp 1.660.000.000		36	Rp 1.109.398.090		12	Rp 306.000.000		6	Rp220.327.000		50,0	72,0	42	Rp 1.329.725.090	70	80,10	Dinas PU & PR	
B	01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 45.269.103.738		35	Rp 34.410.397.814		45	Rp 4.567.881.748		30	Rp 308.069.447		66,7	6,7		#REF!		#REF!	Dinas PU & PR	
	1.03.02.2.01	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22.634.551.869		30	Rp 30.842.403.231		45	Rp 3.606.937.468		30	Rp 225.383.967		66,7	6,2		Rp 13.535.022.881		59,80	Dinas PU & PR	
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tersedianya Prasarana Pengaman Pantai	45	Rp 10.424.351.869		19	Rp 13.309.638.914		1	Rp 3.606.937.468		-	Rp 225.383.967		-	6,2	19	Rp 13.535.022.881	42,222222	129,84	Dinas PU & PR	
	1.03.02.2.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 100 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22.634.551.869		30	Rp 3.567.994.583		45	Rp 960.944.280		30	Rp 82.685.480		66,7	8,6		Rp 9.706.514.990		42,88	Dinas PU & PR	
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya Jaringan Irigasi Yang Mantap	20	Rp 13.476.901.869		7	Rp 9.623.829.510		1	Rp 960.944.280		-	Rp 82.685.480		-	8,6	7	Rp 9.706.514.990	20	72,02	Dinas PU & PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
C	01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11.898.748.636	40,0	Rp 7.715.071.525	43,0	Rp 650.000.000	37,5	Rp 19.605.000	87,2	3,0		Rp 6.561.603.060		55,15	Dinas PU & PR	
	1.03.03.2.01	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11.898.748.636	37,5	Rp 7.715.071.525	43,0	Rp 650.000.000	37,5	Rp 19.605.000	87,2	3,0		Rp 6.561.603.060		55,15	Dinas PU & PR	
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum	3.850	Rp 10.000.000.000	989	Rp 6.541.998.060	100	Rp 650.000.000	-	Rp 19.605.000	-	3,0	989	Rp 6.561.603.060	25,688312	65,62	Dinas PU & PR	
D	01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10.257.421.636	68,87	Rp 8.592.207.740	75	Rp 100.000.000	63,3	Rp -	84,4	0,0		Rp 7.203.445.700		70,23	Dinas PU & PR	
	1.03.05.2.01	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10.257.421.636	63,3	Rp 8.592.207.740	75	Rp 100.000.000	63,3	Rp -	84,4	0,0		Rp 7.203.445.700		70,23	Dinas PU & PR	
	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah dan MCK	1.500	Rp 7.850.848.716	601	Rp 7.203.445.700	1	Rp 100.000.000	-	Rp -	-	0,0	601	Rp 7.203.445.700	40,066667	91,75	Dinas PU & PR	
E	01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13.686.151.479	30	Rp 4.118.696.050	35	Rp 600.000.000	25	Rp 47.171.050	71,4	7,9		Rp 4.165.867.100		30,44	Dinas PU & PR	
	1.03.06.2.01	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13.686.151.479		Rp 4.118.696.050	35	Rp 600.000.000	25	Rp 47.171.050	71,4	7,9		Rp 4.165.867.100		30,44	Dinas PU & PR	
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Drainase Untuk Mengalirkan Genangan Air	113	Rp 13.686.151.479	21	Rp 4.118.696.050	300	Rp 600.000.000	-	Rp 47.171.050	-	7,9	21	Rp 4.165.867.100	18,584071	30,44	Dinas PU & PR	
F	01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513.119.588.315	60	Rp 367.407.490.094	70	Rp 18.724.458.637	55	Rp 3.815.846.136	78,6	20,4		Rp 371.223.336.230		72,35	Dinas PU & PR	
	1.03.08.2.01	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513.119.588.315	55	Rp 367.407.490.094	70	Rp 18.724.458.637	55	Rp 3.815.846.136	78,6	20,4		Rp 371.223.336.230		72,35	Dinas PU & PR	
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Pemerintah	90	Rp 513.119.588.316	70	Rp 367.407.490.094	9	Rp 18.724.458.637	-	Rp 3.815.846.136	-	20,4	70	Rp 371.223.336.230	77,777778	72,35	Dinas PU & PR	
G	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,5	Rp 19.191.194.876	5,00	Rp 1.721.219.150	5,00	Rp 365.000.000	4,7	Rp 100.465.000	94,0	27,5		Rp 1.821.684.150		9,49	Dinas PU & PR	
	1.03.09.2.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,5	Rp 19.191.194.876	4,70	Rp 1.721.219.150	5,00	Rp 365.000.000	4,70	Rp 100.465.000	94,0	27,5		Rp 1.821.684.150		9,49	Dinas PU & PR	
	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Tugu Batas	15	Rp 16.791.194.876	9	Rp 1.721.219.150	1	Rp 365.000.000	-	Rp 100.465.000	-	27,5	9	Rp 1.821.684.150	60	10,85	Dinas PU & PR	
H	01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapanan Jalan	43	Rp 67.037.660.955	41.5	Rp 272.326.616.493	42,0	Rp 26.570.919.101	41	Rp 1.391.172.138	97,6	5,2		Rp 273.717.788.631		408,30	Dinas PU & PR	
	1.03.10.2.01	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kemantapanan Jalan	43	Rp 67.037.660.955	41	Rp 272.326.616.493	42,0	Rp 26.570.919.101	41	Rp 1.391.172.138	97,6	5,2		Rp 273.717.788.631		408,30	Dinas PU & PR	
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	5	Rp 4.273.570.000	18	Rp 4.577.519.300	11	Rp 3.151.291.000	-	Rp 480.545.917	-	15,2	18	Rp 5.058.065.217	360	118,36	Dinas PU & PR	
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Untuk Transportasi Masyarakat	32	Rp 11.891.280.954	8	Rp 25.468.233.998	1,3	Rp 3.400.000.000	0	Rp 48.767.000	-	1,4	8	Rp 25.517.000.998	25,3125	214,59	Dinas PU & PR	
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12.500.000.000	130	Rp 242.280.863.195	8,3	Rp 20.019.628.101	0	Rp 861.859.221	-	4,3	130	Rp 243.142.722.416	260	1945,14	Dinas PU & PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I	01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 2.473.753.067	28	Rp 10.046.142.086	35,0	Rp 500.000.000	20	Rp 96.373.450	57,1	19,3	20	#REF!	40	#REF!	Dinas PU & PR	
	1.03.11.2.02	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 1.225.000.000	20	Rp 1.004.161.720	35,0	Rp 210.000.000	20	Rp -	57,1	0,0	20	Rp 553.441.120	40	45,18	Dinas PU & PR	
	1.03.11.2.02.07	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Basic Price/Satuan Harga	5	Rp 590.000.000	7	Rp 553.441.120	2	Rp 210.000.000	-	Rp -	-	0,0	7	Rp 553.441.120	140	93,80	Dinas PU & PR	
	1.03.11.2.04	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 668.753.066	20	Rp 7.525.512.846	35,0	Rp 290.000.000	20	Rp 96.373.450	57,1	33,2	20	Rp 1.059.399.850	40	158,41	Dinas PU & PR	
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pekerjaan Fisik Kabupaten	60	Rp 668.753.066	36	Rp 963.026.400	12	Rp 290.000.000	6	Rp 96.373.450	50,0	33,2	42	Rp 1.059.399.850	70	158,41	Dinas PU & PR	
J	01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 1.641.374.395	25	Rp 7.757.804.740	30	Rp 2.231.343.720	20	Rp 675.754.120	66,7	30,3	20	Rp 8.433.558.860	40	513,81	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.01	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 254.063.140	30	Rp 25.000.000	20	Rp 15.447.250	66,7	61,8	20	Rp 269.510.390	40	65,68	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	500	Rp 410.343.597	610	Rp 254.063.140	60	Rp 25.000.000	-	Rp 15.447.250	-	61,8	610	Rp 269.510.390	122	65,68	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.02	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 3.083.454.729	30	Rp 1.707.117.120	20	Rp 258.627.020	66,7	15,1		Rp 3.342.081.749		814,46	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kajian dan Peta Potensi Wilayah Tata Guna Lahan	5	Rp 410.343.597	8	Rp 3.083.454.729	1	Rp 1.707.117.120	-	Rp 258.627.020	-	15,1	8	Rp 3.342.081.749	160	814,46	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.03	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.603	20	Rp 1.332.368.491	30	Rp 177.781.520	20	Rp 176.978.220	66,7	99,5		Rp 1.509.346.711		367,83	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.03.01	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Optimal Kinerja Dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat	60	Rp 205.171.802	36	Rp 721.592.191	1	Rp 25.000.000	1	Rp 24.212.900	100,0	96,9	37	Rp 745.805.091	61,666667	363,50	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Web SITARU	60	Rp 205.171.802	36	Rp 610.776.300	1	Rp 152.781.520	1	Rp 152.765.320	100,0	100,0	37	Rp 763.541.620	61,666667	372,15	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.04	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 3.087.918.380	30	Rp 321.445.080	20	Rp 224.701.630	66,7	69,9	20	Rp 3.312.620.010		807,28	Dinas PU & PR	
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kajian Wilayah Cepat Tumbuh dan Peta Investasi	5	Rp 410.343.597	4	Rp 3.087.918.380	1	Rp 321.445.080	-	Rp 224.701.630	-	69,9	4	Rp 3.312.620.010	80	807,28	Dinas PU & PR	
									Rp 60.096.675.417		Rp 8.911.728.738	19,3	28,1			91	220	Dinas PU & PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95,00	20.160.733.730,00	90,00	1.703.986.620,00	90,00	2.223.197.000,00	38,92	924.416.479,00	43,25	41,58	38,92	924.416.479,00	0,41	0,05	Dinas PRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95,00	22.500.000,00	90,00	1.793.960,00	90,00	12.400.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	0,47	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	5.000.000,00	4,00	1.793.960,00	2,00	7.400.000,00	1,00	-	50,00	-	1,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	17.500.000,00	8,00	-	4,00	5.000.000,00	2,00	-	50,00	-	2,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95,00	17.152.477.730,00	90,00	1.213.400.392,00	90,00	1.742.407.400,00	48,21	775.507.679,00	53,57	44,51	48,21	775.507.679,00	0,51	0,05	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	17.119.977.730,00	28,00	1.207.111.142,00	14,00	1.736.907.400,00	8,00	775.507.679,00	57,14	44,65	8,00	775.507.679,00	0,11	0,05	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	10.000.000,00	2,00	1.998.750,00	1,00	2.500.000,00	0,50	-	50,00	-	0,50	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00	17.500.000,00	24,00	3.493.000,00	12,00	2.000.000,00	6,00	-	50,00	-	6,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,00	5.000.000,00	3,00	797.500,00	1,00	1.000.000,00	0,50	-	50,00	-	0,50	-	0,05	-	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	95,00	100.000.000,00	0,90	20.000.000,00	90,00	20.000.000,00	45,00	-	50,00	-	45,00	-	0,47	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60,00	100.000.000,00	12,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	2,00	-	50,00	-	2,00	-	0,03	-	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95,00	1.402.000.000,00	90,00	310.234.018,00	90,00	303.105.600,00	44,25	85.218.800,00	49,17	28,12	44,25	85.218.800,00	0,47	0,06	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,00	50.000.000,00	12,00	-	12,00	4.809.600,00	6,00	-	50,00	-	6,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5,00	125.000.000,00	2,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	0,50	-	50,00	-	0,50	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60,00	250.000.000,00	24,00	50.523.250,00	12,00	52.896.000,00	6,00	14.249.600,00	50,00	26,94	6,00	14.249.600,00	0,10	0,06	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720,00	72.000.000,00	288,00	14.400.000,00	12,00	14.400.000,00	6,00	3.600.000,00	50,00	25,00	6,00	3.600.000,00	0,01	0,05	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55,00	55.000.000,00	22,00	11.000.000,00	11,00	11.000.000,00	5,00	-	45,45	-	5,00	-	0,09	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	850.000.000,00	24,00	209.310.768,00	12,00	195.000.000,00	6,00	67.369.200,00	50,00	34,55	6,00	67.369.200,00	0,10	0,08	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	95,00	287.756.000,00	90,00	20.000.000,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60,00	287.756.000,00	4,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95,00	621.000.000,00	90,00	65.038.000,00	90,00	65.774.000,00	45,00	25.500.000,00	50,00	38,77	45,00	25.500.000,00	0,47	0,04	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60,00	156.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15,00	415.000.000,00	5,00	57.000.000,00	2,00	57.000.000,00	1,00	25.500.000,00	50,00	44,74	1,00	25.500.000,00	0,07	0,06	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60,00	50.000.000,00	24,00	8.038.000,00	12,00	8.774.000,00	6,00	-	50,00	-	6,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	95,00	575.000.000,00	90,00	73.520.250,00	90,00	79.510.000,00	45,00	38.190.000,00	50,00	48,03	45,00	38.190.000,00	0,47	0,07	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10,00	320.000.000,00	4,00	62.450.250,00	2,00	64.000.000,00	1,00	33.750.000,00	50,00	52,73	1,00	33.750.000,00	0,10	0,11	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60,00	5.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	80,00	250.000.000,00	28,00	11.070.000,00	16,00	15.510.000,00	8,00	4.440.000,00	50,00	28,63	8,00	4.440.000,00	0,10	0,02	Dinas PRKP	
2	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	90,00	1.815.327.122,00	86,00	329.211.758,00	87,00	199.770.000,00	43,50	47.812.310,00	50,00	23,93	43,50	47.812.310,00	0,48	0,03	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kb/Kota	90,00	60.140.914,00	-	48.790.300,00	87,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	12,00	60.140.914,00	5,00	48.790.300,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kb/Kota	90,00	877.593.104,00	-	-	87,00	66.500.000,00	43,50	17.388.000,00	50,00	26,15	43,50	17.388.000,00	0,48	0,02	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	60,00	438.796.552,00	-	-	5,00	66.500.000,00	2,50	17.388.000,00	50,00	26,15	2,50	17.388.000,00	0,04	0,04	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	60,00	438.796.552,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun	60,00	438.796.552,00	12,00	22.422.000,00	12,00	96.171.000,00	6,00	10.750.500,00	50,00	11,18	6,00	10.750.500,00	0,10	0,02	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	60,00	438.796.552,00	12,00	22.422.000,00	12,00	96.171.000,00	6,00	10.750.500,00	50,00	11,18	6,00	10.750.500,00	0,10	0,02	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	90,00	438.796.552,00	39,00	257.999.458,00	87,00	37.099.000,00	43,50	19.673.810,00	50,00	53,03	43,50	19.673.810,00	0,48	0,04	Dinas PRKP	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	90,00	438.796.552,00	39,00	257.999.458,00	12,00	37.099.000,00	6,00	19.673.810,00	50,00	53,03	6,00	19.673.810,00	0,07	0,04	Dinas PRKP	
3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	50,00	1.277.073.636,00	3,00	303.828.250,00	38,75	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas PRKP	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	6,00	851.382.424,00	3,00	303.828.250,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas PRKP	
	1.04.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	6,00	425.691.212,00	1,00	8.873.000,00	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas PRKP	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKPyang tersusun/terreview/terlegalisasi	6,00	425.691.212,00	3,00	294.955.250,00	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas PRKP	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	2,00	425.691.212,00	1,00	91.847.927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	2,00	425.691.212,00	1,00	91.847.927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
4	1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	60,00	425.691.212,00	-	207.139.150,00	8,00	129.998.000,00	4,00	6.338.500,00	50,00	4,88	4,00	6.338.500,00	0,07	0,01	Dinas PRKP	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	21,00	425.691.212,00	-	207.139.150,00	8,00	129.998.000,00	4,00	6.338.500,00	50,00	4,88	4,00	6.338.500,00	0,19	0,01	Dinas PRKP	
	1.04.04.2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang diperbaiki	21,00	425.691.212,00	8,00	207.139.150,00	5,00	129.998.000,00	2,50	6.338.500,00	50,00	4,88	2,50	6.338.500,00	0,12	0,01	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
5	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	60,00	5.984.406.692,00	5,00	1.534.389.305,00	40,00	115.851.000,00	20,00	18.983.050,00	50,00	16,39	20,00	18.983.050,00	0,33	0,00	Dinas PRKP	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	24,00	5.034.872.948,00	5,00	1.534.389.305,00	4,00	115.851.000,00	2,00	18.983.050,00	50,00	16,39	2,00	18.983.050,00	0,08	0,00	Dinas PRKP	
	1.04.05.2.01.00 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan PSU yang menunjang Fungsi Hunian	24,00	5.034.872.948,00	5,00	1.534.389.305,00	8,00	115.851.000,00	4,00	18.983.050,00	50,00	16,39	4,00	18.983.050,00	0,17	0,00	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		Dinas PRKP
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		Dinas PRKP
6	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	60,00	502.795.600,00	-	-	12,00	23.047.000,00	6,00	-	50,00	-	6,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	60,00	502.795.600,00	-	-	12,00	23.047.000,00	6,00	-	50,00	-	6,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
	2.10.04.2.01.00 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	502.795.600,00	-	-	12,00	23.047.000,00	6,00	-	50,00	-	6,00	-	0,10	-	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
7	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan lainnya	11,50	33.123.112.050,00	7,10	10.534.836.100,00	10,50	2.525.540.000,00	5,25	1.620.684.000,00	50,00	64,17	5,25	1.620.684.000,00	0,46	0,05	Dinas PRKP	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian	11,50	33.123.112.050,00	7,10	10.534.836.100,00	10,50	2.525.540.000,00	5,25	1.620.684.000,00	50,00	64,17	5,25	1.620.684.000,00	0,46	0,05	Dinas PRKP	
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas Tanah	11,50	33.123.112.050,00	7,10	10.534.836.100,00	1,60	2.525.540.000,00	0,80	1.620.684.000,00	50,00	64,17	0,80	1.620.684.000,00	0,07	0,05	Dinas PRKP	
																		Dinas PRKP	
8	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong	9,50	1.752.548.326,00	0,80	478.607.450,00	1,85	118.544.400,00	0,18	30.910.000,00	9,88	26,07	0,18	30.910.000,00	0,02	0,02	Dinas PRKP	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9,50	1.752.548.326,00	0,80	478.607.450,00	1,85	118.544.400,00	0,18	30.910.000,00	9,88	26,07	0,18	30.910.000,00	0,02	0,02	Dinas PRKP	
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Sertifikat Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	235,00	1.752.548.326,00	145,00	478.607.450,00	81,00	118.544.400,00	8,00	30.910.000,00	9,88	26,07	8,00	30.910.000,00	0,03	0,02	Dinas PRKP	
0																			
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SATPOLPP & DAMKAR																	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		95%	39.144.574.119	100	4.509.306.400	100	4.912.731.800	100	1.767.468.210	100%	36%	100%	1.767.468.210	5%	1.767.468.210	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95%	39.144.574.119	100	4.509.306.400	100	4.912.731.800	100	1.767.468.210	100%	36%	100%	1.767.468.210	5%	1.767.468.210	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	12.428.854.050	100	2.615.120.300	100	2.718.343.100	100	1.338.847.852	100%	49%	100%	1.338.847.852	11%	1.338.847.852	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	10.000.000		-	100	2.000.000		418.000	0%	21%	100%	418.000	4%	418.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	10.000.000			2	2.000.000		418.000	50%	21%	100%	418.000	4%	418.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100	9.577.447.636	100	2.063.439.400	100	2.281.703.900	100	1.086.078.372	100%	48%	100%	1.086.078.372	11%	1.086.078.372	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	9.569.018.936	13	2.063.439.400	13	2.278.231.800	7	1.086.078.372	54%	48%	100%	1.086.078.372	11%	1.086.078.372	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	7.434.900			1	2.478.300	0	-	0%	0%	#DIV/0!	-	0%	#DIV/0!	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	993.800			2	993.800		-	0%	0%	#DIV/0!	-	0%	#DIV/0!	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	324.000.000	100	81.000.000	100	-	100	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	324.000.000	1	81.000.000		-	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	680.406.414	100	150.713.900	100	127.930.200	100	62.901.600	100%	49%	100%	62.901.600	9%	62.901.600	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	5.958.000			6	1.986.000	1	218.000	17%	11%	100%	218.000	4%	218.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	52.627.600	12	13.156.900				-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	125.000.000	1	25.000.000	1	23.950.000			0%	0%	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	87.820.814	12	15.557.000	1	26.494.200	12	8.251.100	1200%	31%	100%	8.251.100	9%	8.251.100	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60				12	5.500.000		2.000.000	0%	36%	100%	2.000.000	#DIV/0!	2.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	409.000.000	12	97.000.000	12	70.000.000	9	52.650.500	75%	75%	100%	52.650.500	13%	52.650.500	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	63.000.000	100	38.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100%	100%	100%	5.000.000	8%	5.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	25.000.000			12	5.000.000	12	5.000.000	100%	100%	100%	5.000.000	20%	5.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Alat Musik	60	38.000.000	12	38.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	717.000.000	100	113.397.000	100	117.509.000	100	89.767.880	100%	76%	100%	89.767.880	13%	89.767.880	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	58.000.000	12	9.600.000	12	8.700.000	5	3.407.880	42%	39%	100%	3.407.880	6%	3.407.880	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap n Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	630.000.000	12	102.500.000	3	107.000.000	2	86.000.000	67%	80%	100%	86.000.000	14%	86.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	29.000.000	12	1.297.000	2	1.809.000	1	360.000	50%	20%	100%	360.000	1%	360.000	SATPOL PP & DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.057.000.000	100	168.570.000	100	184.200.000	100	95.100.000	100%	52%	100%	95.100.000	9%	95.100.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	1.045.000.000	12	164.220.000	6	181.200.000	3	95.100.000	50%	52%	100%	95.100.000	9%	95.100.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	12.000.000	1	4.350.000	10	3.000.000			0%	0%	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
																		SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	22.904.118.808	100	1.320.126.100	100	1.573.757.900	100	132.988.600	100%	8%	100%	132.988.600	1%	132.988.600	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan	100	22.103.737.000	100	1.229.957.200	100	1.499.537.000	100	106.346.600	100%	7%	100%	106.346.600	0%	106.346.600	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Terlaksana Piket Pengamanan Kantor /rumah dinas, pengawasan pejabat vvip dan pengamanan trantibum	60	10.407.000.000	12	1.196.857.200					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	654.237.000			2	218.079.000	1	101.446.600	50%	47%	100%	101.446.600	16%	101.446.600	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksana pengamanan Idul fitri dan Natal Tahun Baru	48	432.000.000	8	15.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	40	68.000.000			2	7.840.000	1	4.900.000	50%	63%	100%	4.900.000	7%	4.900.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksana SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40	68.000.000	8	13.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedia ganti rugi atas dampak penegakan perda dan perkada	5	30.000.000	1	5.100.000					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60	10.407.000.000			8	1.261.958.000	4	592.383.500	50%	47%	100%	592.383.500	6%	592.383.500	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	15.300.000			4	3.060.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 05 02 2.01 17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3	15.000.000			1	5.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	16	7.200.000			8	3.600.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	490.000.000	100	81.018.900	100	45.151.900	100	23.102.000	100%	51%	100%	23.102.000	5%	23.102.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02 12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60	490.000.000	12	81.018.900	12	45.151.900	6	23.102.000	50%	51%	100%	23.102.000	5%	23.102.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	310.381.808	100	9.150.000	100	29.069.000	100	3.540.000	100%	12%	100%	3.540.000	1%	3.540.000	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 02 2.03 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	60	310.381.808	12	9.150.000	12	29.069.000	1	3.540.000	8%	12%	100%	3.540.000	1%	3.540.000	SATPOL PP & DAMKAR	
																		SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3.811.601.261	100	574.060.000	100	620.630.800	100	295.631.758	100%	48%	100%	295.631.758	8%	295.631.758	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3.811.601.261	100	574.060.000	100	620.630.800	100	295.631.758	100%	48%	100%	295.631.758	8%	295.631.758	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	3.661.688.861	12	574.060.000	12	570.660.000	6	295.631.758	50%	52%	100%	295.631.758	8%	295.631.758	SATPOL PP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01 0	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10	149.912.400			2	49.970.800	-	0%	0%	0%	#DIV/0!	-	0%	0	SATPOL PP & DAMKAR	
												78,49%	35,98%					SATPOL PP & DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BPBD																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95%	9.000.310.409	79%	1.984.832.305	100%	2.713.323.076	34%	910.952.662	34%	34%	113%	2.895.784.967	119%	32%	BPBD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	15	31.697.123	100%	2.900.000	100%	15.190.090	29%	4.455.850	29%	29%	129%	7.355.850	9%	23%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7.500.000	2	1.500.000	1	7.401.200	1	3.757.300	100%	51%	3	5.257.300	30%	70%	BPBD	
	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3.700.000	1	700.000	1	700.920	0	-	0%	0%	1	700.000	20%	19%	BPBD	
	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3.700.000	0	-	1	700.920	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3.700.000	1	700.000	1	698.550	0	698.550	0%	100%	1	1.398.550	20%	38%	BPBD	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	3.500.000	0	-	1	698.550	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	9.597.123	0	-	2	4.989.950	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Ada	100%	5.592.364.628	80%	1.549.066.268	100%	2.077.134.686	30%	619.263.268	30%	30%	110%	2.168.329.536	110%	39%	BPBD	
	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	5.578.664.628	14	1.547.566.268	14	2.071.635.900	8	619.263.268	57%	30%	22	2.166.829.536	31%	39%	BPBD	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5.000.000	0	-	1	2.499.700	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	3.700.000	18	1.500.000	18	1.999.150	0	-	0%	0%	18	1.500.000	23%	41%	BPBD	
	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000	0	-	1	999.936	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	50.000.000	98%	4.020.000	100%	20.000.000	0%	-	0%	0%	98%	4.020.000	98%	8%	BPBD	
	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	50.000.000	3	4.020.000	12	20.000.000	0	-	0%	0%	3	4.020.000	21%	8%	BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	65	1.009.000.000	98%	160.609.650	100%	239.242.600	44%	105.935.992	44%	44%	142%	266.545.642	2%	26%	BPBD	
	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	54.000.000	12	11.244.600	1	12.689.600	1	3.650.150	47%	29%	13	14.894.750	22%	28%	BPBD	
	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	125.000.000	1	25.000.000	1	25.200.000	0	-	0%	0%	1	25.000.000	20%	20%	BPBD	
	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	75.000.000	12	14.093.000	1	13.353.000	1	4.521.000	31%	34%	13	18.614.000	22%	25%	BPBD	
	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	60.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	4	4.000.000	33%	33%	14	16.000.000	28%	27%	BPBD	
	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	55.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18%	18%	13	13.000.000	24%	24%	BPBD	
	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	640.000.000	12	87.272.050	12	165.000.000	6	91.764.842	50%	56%	18	179.036.892	30%	28%	BPBD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.155.742.658	0%	-	100%	69.375.000	0%	-	0%	0%	0%	-	0%	0%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	83.844.000	0	-	12	10.500.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	460.000.000	0	-	3	58.875.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	611.898.658	88%	116.110.587	100%	169.472.700	68%	115.815.556	68%	68%	156%	231.926.143	156%	38%	BPBD	
	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	83.844.000	12	10.703.587	12	16.920.000	5	3.804.356	42%	22%	17	14.507.943	28%	17%	BPBD	
	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	460.000.000	3	93.000.000	3	132.000.000	2	104.000.000	67%	79%	5	197.000.000	8%	43%	BPBD	
	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	68.054.658	12	12.407.000	12	20.552.700	5	8.011.200	2%	39%	17	20.418.200	28%	30%	BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	1.705.350.000	88%	152.125.800	100%	192.283.000	34%	65.481.996	34%	34%	122%	217.607.796	122%	13%	BPBD	
	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	272.500.000	1	30.280.000	1	37.658.000	1	14.456.996	45%	38%	2	44.736.996	200%	16%	BPBD	
	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	1.143.600.000	14	80.845.800	14	126.625.000	14	49.525.000	22%	39%	28	130.370.800	200%	11%	BPBD	
	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	154.250.000	12	16.000.000	10	18.000.000	4	1.500.000	40%	8%	16	17.500.000	27%	11%	BPBD	
	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	135.000.000	12	25.000.000	2	10.000.000	0	-	0%	0%	12	25.000.000	600%	19%	BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	2.728.500.200	97%	580.241.300	100%	813.934.800	15%	118.168.200	15%	15%	111%	698.409.500	111%	26%	BPBD	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	321.948.200	100%	57.087.525	100%	70.713.600	0%	-	0%	0%	100%	57.087.525	0%	18%	BPBD	
	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	15	321.948.200	1	57.087.525	30	70.713.600	0	-	0%	0%	1	57.087.525	7%	18%	BPBD	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1.349.848.800	96%	300.649.450	100%	283.355.650	25%	69.606.200	25%	25%	120%	370.255.650	120%	27%	BPBD	
	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	722.350.400	5	189.952.550	2	283.355.650	1	69.606.200	50%	25%	6	259.558.750	24%	36%	BPBD	
	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket bahan material	60	627.498.400	12	110.696.900	0	-	0	-	0%	0%	12	110.696.900	20%	18%	BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.056.703.200	92%	222.504.325	100%	221.619.100	22%	48.562.000	22%	22%	114%	271.066.325	114%	26%	BPBD	
	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15	460.890.000	3	85.757.150	10	146.619.100	5	38.250.000	50%	26%	8	124.007.150	53%	27%	BPBD	
	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	595.813.200	12	136.747.175	10	75.000.000	4	10.312.000	40%	14%	16	147.059.175	27%	25%	BPBD	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	627.498.400	0%	-	100%	238.246.450	5%	12.467.850	5%	5%	5%	12.467.850	5%	2%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60	627.498.400	0	-	10	238.246.450	5	12.467.850	50%	5%	5	12.467.850	8%	2%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06	Sosial																	
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.366.724.768	100%	2.286.574.398	100%	2.609.497.900	30%	1.281.667.126	30%	49,12	84%	1.746.851.956	84%	16,85	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32.000.000	100%	12.400.000	100%	12.400.000	25%	5.267.450	25%	42,48	100%	6.400.000	100%	20,00	Dinas Sosial	
1	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	7.000.000	2	7.400.000	2	7.400.000	0	3.883.450	0%	52,48	100%	1.400.000	10%	20,00	Dinas Sosial	
2	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	1.384.000	50%	27,68	100%	5.000.000	10%	20,00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8.703.221.754	100%	1.720.912.636	100%	2.105.269.300	18%	1.017.864.655	18%	48,35	79%	1.242.275.690	79%	14,27	Dinas Sosial	
3	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	8.675.721.754	14	1.715.412.636	14	2.099.769.300	3	1.017.864.655	21%	48,48	79%	1.236.775.690	1%	14,26	Dinas Sosial	
4	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0%	-	100%	2.500.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
5	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semester	5	10.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0%	-	100%	2.000.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
6	1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0%	-	100%	1.000.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	372.001.014	100%	296.298.869	100%	258.798.600	69%	132.395.397	69%	51,16	100%	226.103.761	100%	60,78	Dinas Sosial	
7	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	125.000.000	1	24.966.000	1	25.000.000	0	-	0%	-	0%	24.987.600	0%	19,99	Dinas Sosial	
8	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	187.001.014	12	63.395.000	12	65.798.600	6	31.054.400	50%	47,20	100%	38.229.250	2%	20,44	Dinas Sosial	
9	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKHU	60	60.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	6	5.000.000	50%	18,52	100%	12.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
10	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	55.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	5	3.500.000	45%	31,82	100%	11.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
11	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	845.000.000	12	169.937.869	12	130.000.000	6	92.840.997	50%	71,42	100%	139.886.911	2%	16,55	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	453.000.000	10%	22.500.000	100%	20.000.000	0%	-	0%	-	100%	15.000.000	100%	3,31	Dinas Sosial	
12	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	58	453.000.000	6	22.500.000	6	20.000.000	0	-	0%	-	100%	15.000.000	2%	3,31	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	924.225.000	75%	104.739.693	75%	95.360.000	50%	72.354.624	67%	75,88	100%	173.481.986	100%	18,77	Dinas Sosial	
13	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	120.000.000	12	7.019.693	12	2.640.000	6	1.054.624	50%	39,95	100%	13.780.986	2%	11,48	Dinas Sosial	
14	1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	60	785.000.000	12	97.000.000	12	92.000.000	6	71.000.000	50%	77,17	100%	157.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
15	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	19.225.000	12	720.000	12	720.000	6	300.000	50%	41,67	100%	2.701.000	2%	14,05	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	806.502.000	100%	129.723.200	100%	117.670.000	17%	53.785.000	17%	45,71	100%	83.590.519	100%	10,36	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	398.792.000	2	58.033.200	2	59.800.000	1	34.425.000	50%	57,57	100%	53.420.519	10%	13,40	Dinas Sosial	
17	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	20	335.960.000	4	61.970.000	4	48.500.000	2	19.360.000	50%	39,92	100%	22.420.000	5%	6,67	Dinas Sosial	
18	1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	71.750.000	12	9.720.000	12	9.370.000	0	-	0%	-	100%	7.750.000	2%	10,80	Dinas Sosial	
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100%	1.553.029.692	100%	214.955.000	100%	69.960.250	17%	29.763.600	17%	42,54	100%	191.212.500	100%	12,31	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	100%	1.553.029.692	2%	214.955.000	100%	69.960.250	17%	29.763.600	17%	42,54	100%	191.212.500	100%	12,31	Dinas Sosial	
19	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya operasional TSKS dan PSM	645	1.553.029.692	12	214.955.000	12	69.960.250	2	29.763.600	17%	42,54	100%	191.212.500	0%	12,31	Dinas Sosial	
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial	100%	16.771.568.200	87%	3.308.303.000	87%	1.543.353.900	40%	91.565.450	46%	5,93	56%	2.427.904.300	56%	14,48	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	473.315.000	100%	186.434.000	100%	176.862.000	1%	40.099.000	1%	22,67	100%	54.290.000	100%	11,47	Dinas Sosial	
20	1.06.02.2.04.2.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan nya diluar panti	130	216.870.000	119	92.483.000	119	97.675.050	0	15.073.000	0%	15,43	100%	20.571.000	1%	9,49	Dinas Sosial	
21	1.06.02.2.04.2.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	285	256.445.000	12	81.580.000	12	49.316.850	0	14.828.000	0%	30,07	100%	33.719.000	0%	13,15	Dinas Sosial	
22	1.06.02.2.04.2.03	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah ODGJ yang dilayani dengan Bimbingan Sosial	50	180.000.000	10	12.371.000	10	29.870.100	2	10.198.000	20%	34,14	97%	9.696.000	2%	5,39	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza di Luar Panti sosial	Persentase PMKS yang tertangani	100%	16.298.253.200	99%	3.121.869.000	99%	1.366.491.900	76%	51.466.450	77%	3,77	56%	2.373.614.300	56%	14,56	Dinas Sosial	
23	1.06.02.2.04.2.03	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pelayanan data	5000	1.520.836.000	500	92.434.000	500	85.039.850	389	23.503.700	78%	27,64	100%	102.235.000	0%	6,72	Dinas Sosial	
24	1.06.02.2.04.2.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Fasilitas Santunan Kematian	12	90.417.200	12	14.359.000	12	21.452.050	4	12.962.750	33%	60,43	100%	5.859.300	8%	6,48	Dinas Sosial	
25	1.06.02.2.04.2.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	tersedianya bantuan sosial	6235	14.687.000.000	3070	3.015.076.000	1110	1.260.000.000	0	15.000.000	0%	1,19	54%	2.265.520.000	0%	15,43	Dinas Sosial	
	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100%	2.118.183.115	100%	263.259.500	100%	199.065.850	15%	132.219.600	15%	66,42	97%	188.003.620	97%	8,88	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penanggulangan kemiskinan	100%	2.118.183.115	100%	263.259.500	100%	199.065.850	15%	132.219.600	15%	66,42	97%	188.003.620	97%	8,88	Dinas Sosial	
26	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	tersedianya laporan data fakir miskin	5	1.281.805.382	1	174.985.000	1	153.409.000	0	113.079.800	0%	73,71	100%	107.895.000	20%	8,42	Dinas Sosial	
27	1.06.05.2.02.01.0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	60	836.377.733	12	88.274.500	12	45.656.850	2	19.139.800	17%	41,92	93%	80.108.620	2%	9,58	Dinas Sosial	
	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan pemenuhan pasca Bencana	100%	573.625.420	20%	64.274.000	500%	62.891.300	17%	24.691.200	3%	39,26	100%	41.687.000	100%	7,27	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	100%	573.625.420	20%	64.274.000	100%	62.891.300	17%	24.691.200	17%	39,26	100%	41.687.000	100%	7,27	Dinas Sosial	
28	1.06.06.2.02.02	koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Fungsi Taruna Siaga Bencana	60	573.625.420	12	64.274.000	12	62.891.300	2	24.691.200	17%	39,26	100%	41.687.000	2%	7,27	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100%	17.308.005.285	90%	3.498.545.221	95%	2.703.786.200	30%	1.093.537.028	32	40,44	30%	1.093.537.028	30%	6,32	Dinas Transnakerprin	-
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	11.560.364.628	90%	1.688.978.321	95%	2.254.625.200	30%	998.664.922	32	44,29	30%	998.664.922	30%	8,64	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.750.000	100%	7.500.000	100%	12.400.000	50%	5.733.500	50	46	50%	5.733.500	50%	25	Dinas Transnakerprin	-
2	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	10	20.750.000	2	2.500.000	2	7.400.000	1	3.800.000	50	51,35	1	3.800.000	10	18,31	Dinas Transnakerprin	-
2	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	30.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	1.933.500	50	39	1	1.933.500	10	6,45	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.546.754.500	100%	1.322.403.359	100%	1.684.286.200	47%	874.515.006	47,06	51,92	47%	874.515.006	47%	18	Dinas Transnakerprin	-
2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	7.492.254.500	14	1.312.404.112	14	1.678.786.200	8	873.416.006	57,14	52,03	8	873.416.006	11	11,66	Dinas Transnakerprin	-
2	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	19.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0	0	0	-	-	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	5	18.500.000	1	4.999.247	1	2.000.000	0	597.250	0	30	0	597.250	-	3,23	Dinas Transnakerprin	-
2	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	16.500.000	1	2.500.000	1	1.000.000	0	501.750	0	50,18	0	501.750	-	3,04	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.277.434.124	100%	218.959.827	100%	301.729.000	48%	47.292.416	48	15,67	48%	47.292.416	48%	20	Dinas Transnakerprin	-
2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	36.630.181	12	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya pameran	5	168.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Tersedianya alat tulis kantor, penggandaan dan barang cetak	60	154.803.943	12	26.871.500	12	39.729.000	6	10.294.860	50	25,91	6	10.294.860	10	6,65	Dinas Transnakerprin	-
2	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya bahan bacaan	50	114.000.000	10	14.400.000	10	12.000.000	5	5.000.000	50	41,67	5	5.000.000	10	4,39	Dinas Transnakerprin	-
2	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	55	82.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	5	4.000.000	45	36,36	5	4.000.000	9	4,88	Dinas Transnakerprin	-
2	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	60	722.000.000	12	141.688.327	12	214.000.000	6	27.997.556	50	13,08	6	27.997.556	10	3,88	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	140.000.000	25%	3.930.000	100%	101.960.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2	07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	20	140.000.000	1	3.930.000	8	101.960.000	0	-	0	0	0	-	-	0,00	Dinas Transnakerprin	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	666.736.194	67%	71.000.000	100%	77.000.000	50%	43.499.000	50	56,49	50%	43.499.000	50%	11	Dinas Transnakerprin	-
2	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60	112.700.194	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Dinas Transnakerprin	-
2	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	60	524.000.000	12	68.500.000	12	67.000.000	6	42.500.000	50	63,43	6	42.500.000	10	8,11	Dinas Transnakerprin	-
2	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	30.036.000	12	2.500.000	12	10.000.000	6	999.000	50	10	6	999.000	10	3,33	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	471.250.000	54%	65.185.135	100%	77.250.000	29%	27.625.000	29	35,76	29%	27.625.000	29%	11	Dinas Transnakerprin	-
2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pembiayaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pembiayaan pajak kendaraan dinas	10	365.000.000	2	58.185.135	2	66.000.000	1	25.525.000	50	38,67	1	25.525.000	10	6,99	Dinas Transnakerprin	-
2	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	51.250.000	12	7.000.000	12	11.250.000	3	2.100.000	25	19	3	2.100.000	5	4,10	Dinas Transnakerprin	-
2	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	55.000.000	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	Dinas Transnakerprin	-
2		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Pemenuhan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	227.000.000	3,42%	517.111.900	2,6%	-	0%	-	0	0	0,0%	-	0%	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,21	227.000.000	3,42%	517.111.900	2,6%	-	0%	-	0	0	0,0%	-	0%	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2	01	Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Terpenuhinya database tenaga kerja kabupaten/kota	2,21	227.000.000	3,42%	517.111.900	2,6%	-	0%	-	0	0	0,0%	-	0%	0,00	Dinas Transnakerprin	-
2		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Pemenuhan Penempatan Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	1.273.705.033	72,35%	57.457.300	73,88%	120.000.000	0%	20.051.800	0	17	0,00%	20.051.800	0%	1,57	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah	Cakupan pemerataan tenaga kerja	75,51	848.705.033	72,35%	-	73,88%	54.040.000	0%	4.268.800	0	8	0,00%	4.268.800	0%	0,50	Dinas Transnakerprin	-
2	03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan	Terpenuhinya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	75,51	848.705.033	72,35%	-	73,88%	54.040.000	0%	4.268.800	0	8	0,00%	4.268.800	0%	0,50	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75,51	425.000.000	72,35%	57.457.300	73,88%	65.960.000	0%	15.783.000	0	24	0,00%	15.783.000	0%	3,71	Dinas Transnakerprin	-
2	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan	Terpenuhinya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online untuk Pencari Kerja	75,51	425.000.000	72,35%	57.457.300	73,88%	65.960.000	0%	15.783.000	0	24	0,00%	15.783.000	0%	3,71	Dinas Transnakerprin	-
2		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80%	802.093.538	0%	-	60%	-	0%	-	0	0	0	-	0%	-	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80%	423.747.266	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0	-	0%	0	Dinas Transnakerprin	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terpenuhinya Jumlah persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur, skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80%	423.747.266	0%	-	-	-	-	0	0	0	-	0%	0	-	Dinas Transnakerprin	-
2		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	80%	378.346.272	0%	-	65%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	-	Dinas Transnakerprin	-
2	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	80%	189.173.136	0%	-	0%	-	0%	0	0	0	-	0%	0	-	Dinas Transnakerprin	-
2	05	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terpenuhinya Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80%	189.173.136	0%	-	65%	-	0%	0	0	0	-	0	0	-	Dinas Transnakerprin	-
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-													Dinas Transnakerprin	-
3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		45%	2.941.421.772	37%	854.082.700	40%	209.161.000	0%	6.746.500	0	2,69	0%	6.746.500	0%	0,23	Dinas Transnakerprin	-
3		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pemenuhan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	45%	2.941.421.772	37%	854.082.700	40%	152.745.000	0%	4.110.500	0	2,69	0%	4.110.500	0%	0,14	Dinas Transnakerprin	-
3		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2.941.421.772	37%	854.082.700	40%	152.745.000	0%	4.110.500	0	2,69	0%	4.110.500	0%	0,14	Dinas Transnakerprin	-
3	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin	45%	980.473.924	37%	731.845.700	40%	92.745.000	0%	2.942.500	0	3,17	0%	2.942.500	0%	0,30	Dinas Transnakerprin	-
3	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	Terpenuhinya Jumlah dan Spesifikasi Gedung Sentra IKM yang Terpelihara	45%	980.473.924	0%	-	40%	60.000.000	0%	1.168.000	0	0	0%	1.168.000	0%	0,1	Dinas Transnakerprin	-
3	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin	45%	980.473.924	37%	122.237.000	40%	-	0%	-	0	0,00	0%	-	0%	0,00	Dinas Transnakerprin	-
3		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pengelolaan kontribusi industri sektor industri pengolahan terhadap PDRB	4,00%	978.396.132	0%	-	100%	56.416.000	0%	2.636.000	0	4,67	0%	2.636.000	0%	0,27	Dinas Transnakerprin	-
3		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan kontribusi industri sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	4,00%	978.396.132	0%	-	100%	56.416.000	0%	2.636.000	0	4,67	0%	2.636.000	0%	0,27	Dinas Transnakerprin	-
3	02	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terpenuhinya Website yang Dikelola Dengan Baik	4,00%	978.396.132	0%	-	100%	56.416.000	0%	2.636.000	0	4,67	0%	2.636.000	0%	0,27	Dinas Transnakerprin	-
3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																Dinas Transnakerprin	-
3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Pemenuhan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	44,00%	503.420.314	41,90%	380.915.000	44,00%	120.000.000	0	68.073.806	0	56,73	0	68.073.806	0	13,52	Dinas Transnakerprin	-
3		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,00%	503.420.314	41,90%	380.915.000	44,00%	120.000.000	0	68.073.806	0	56,73	0	68.073.806	0	13,52	Dinas Transnakerprin	-
3	06	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Eks Transmigran	44,00%	503.420.314	41,90%	380.915.000	44,00%	120.000.000	0	68.073.806	0	56,73	0	68.073.806	0	13,52	Dinas Transnakerprin	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian																			
A.		NON URUSAN (PROGRAM PENUNJANG PD)	Nilai Sakip (Huruf/Predikat)	B	37.893.763.478	CC	10.139.886.093	C	5.702.941.400	CC	2.881.124.210	0%	51%	CC	13.021.010.303	0%	34%	DKPP	
I.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	37.893.763.478	90	10.139.886.093	92,5	5.702.941.400	47	2.881.124.210	51%	51%	47	13.021.010.303	10%	34%	DKPP	
1	3.27.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	45.788.250	100	12.500.000	100	12.400.000	33	4.366.000	33%	35%	33	16.866.000	7%	37%	DKPP	
a.	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	15.262.750	4	5.500.000	2	7.400.000	1	4.366.000	50%	59%	5	9.866.000	50%	65%	DKPP	
b.	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	30.525.500	4	7.000.000	1	5.000.000	0	-	0%	0%	4	7.000.000	40%	23%	DKPP	
2	3.27.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100	33.422.204.878	100	8.838.495.518	100	4.911.443.000	50	2.451.385.156	50%	50%	50	11.289.880.674	10%	34%	DKPP	
a.	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70	33.388.626.828	28	8.826.995.518	14	4.905.943.000	7	2.450.243.156	50%	50%	35	11.277.238.674	50%	34%	DKPP	
b.	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	15.262.750	2	4.500.000	1	2.500.000	0	-	0%	0%	2	4.500.000	40%	29%	DKPP	
c.	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	12.210.200	4	4.500.000	2	2.000.000	1	1.142.000	50%	57%	5	5.642.000	50%	46%	DKPP	
d.	3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.105.100	2	2.500.000	1	1.000.000	0	-	0%	0%	2	2.500.000	40%	41%	DKPP	
3	3.27.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	2.202.720.080	100	761.136.577	100	371.168.400	42	157.500.113	42%	42%	42	918.636.690	8%	42%	DKPP	
a.	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10.989.180	2	3.570.000	1	1.800.000	1	1.800.000	100%	100%	3	5.370.000	60%	49%	DKPP	
c.	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	10	244.204.000	3	50.000.000	1	25.000.000	0	-	0%	0%	3	50.000.000	30%	20%	DKPP	
d.	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	280.834.600	24	86.820.000	12	30.368.400	6	16.635.000	50%	55%	30	103.455.000	50%	37%	DKPP	
e.	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	73.261.200	24	24.000.000	12	12.000.000	4	4.200.000	33%	35%	28	28.200.000	47%	38%	DKPP	
f.	3.27.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67.156.100	22	22.000.000	11	22.000.000	4	7.970.000	36%	36%	26	29.970.000	47%	45%	DKPP	
g.	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1.526.275.000	24	574.746.577	12	280.000.000	6	126.895.113	50%	45%	30	701.641.690	50%	46%	DKPP	
3	3.27.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100	105.000.000	0	-	100	15.000.000	100	14.950.000	100%	100%	100	14.950.000	20%	14%	DKPP	
a.	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	13	105.000.000	0	-	1	15.000.000	1	14.950.000	100%	100%	1	14.950.000	8%	14%	DKPP	
4	3.27.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	959.912.800	100	217.232.398	100	212.180.000	78	164.867.941	78%	78%	78	382.100.339	16%	40%	DKPP	
a.	3.27.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	146.522.400	24	105.232.398	12	44.400.000	5	18.087.941	42%	41%	29	123.320.339	48%	84%	DKPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
b.	3.27.01.2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan Sewa Kantor, Rumah Dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Operasional dinas	60	788.970.000	12	107.000.000	12	167.000.000	10	146.000.000	83%	87%	22	253.000.000	37%	32%	DKPP	
c.	3.27.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	24.420.400	24	5.000.000	12	780.000	12	780.000	100%	100%	36	5.780.000	60%	24%	DKPP	
5	3.27.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.158.137.470	100	310.521.600	100	180.750.000	49	88.055.000	49%	49%	49	398.576.600	10%	34%	DKPP	
a.	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	235.046.350	24	74.859.000	12	50.500.000	6	25.440.000	50%	50%	30	100.299.000	50%	43%	DKPP	
b.	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143	923.091.120	57	235.662.600	29	130.250.000	14	62.615.000	48%	48%	71	298.277.600	50%	32%	DKPP	
B.	2.09	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR (PANGAN)	Nilai Tukar Petani	102,3	5.564.984.899	109,3	1.161.571.504	99,77	358.489.400	109,32	104.522.750	110%	29%	109,3	1.266.094.254	107%	23%	DKPP	
I.	2.09.03	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	140.000	4.202.340.624	56.518	833.069.179	28.000	192.711.400	27.007	49.656.500	96%	26%	27007	882.725.679	4%	21%	DKPP	
1	2.09.03.2.01	Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	85,4	296.496.624	83,46	72.113.650	85,1	158.724.400	0	47.953.900	0%	30%	0	120.067.550	0%	40%	DKPP	
a.	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	16	150.600.000	0	-	1	19.122.400	0	4.984.400	0%	26%	0	4.984.400	0%	3%	DKPP	
a.	2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	296.496.624	2	72.113.650	1	139.602.000	0	42.969.500	0%	31%	2	115.083.150	40%	39%	DKPP	
a.	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Buku Neraca Bahan Makanan	5	296.496.624	2	72.113.650	1	24.050.000	1	24.039.250	100%	100%	3	96.152.900	60%	32%	DKPP	
2	2.09.03.2.02	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah (%)	100	3.978.704.000	87,7	771.987.529	20	11.047.000	20	11.032.000	100%	100%	20	783.019.529	4%	20%	DKPP	
a.	2.09.03.2.02.03	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara Tersedianya Biaya Rekonsiliasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	53	72.860.000	34	11.032.000	34	11.047.000	34	11.032.000	100%	100%	68	22.064.000	128%	30%	DKPP	
2	2.09.03.2.04	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	87,90	3.905.844.000	84,7	760.955.529	87,8	33.987.000	0	1.702.600	0%	5%	0	762.658.129	0%	20%	DKPP	
a.	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	3.663.060.000	4	719.270.404	2	15.700.000	0	-	0%	0%	4	719.270.404	50%	20%	DKPP	
b.	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan pemantauan konsumsi pangan	5	242.784.000	3	41.685.125	1	18.287.000	0	1.702.600	0%	9%	3	43.387.725	60%	18%	DKPP	
II.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5	982.082.275	18,64	277.671.725	6	97.204.000	0	30.494.000	0%	31%	0	308.165.725	0%	31%	DKPP	
1	2.09.04.2.01	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Dearah Rawan Pangan	100	219.478.345	100	67.972.800	100	47.204.000	0	8.805.000	0%	19%	0	76.777.800	0%	35%	DKPP	
a.	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terupdatenya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5	219.478.345	2	67.972.800	1	47.204.000	0	8.805.000	0%	19%	2	76.777.800	40%	35%	DKPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	2.09.04.2.02	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	4	762.603.930	1	209.698.925	1	50.000.000	0	21.689.000	0%	43%	0	231.387.925	0%	30%	DKPP	
a.	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan	15	762.603.930	4	209.698.925	2	50.000.000	1	21.689.000	50%	43%	5	231.387.925	33%	30%	DKPP	
III.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60,00	380.562.000	100	50.830.600	60	68.574.000	0	24.372.250	0%	36%	0	75.202.850	0%	20%	DKPP	
1	2.09.05.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100,00	380.562.000	100	50.830.600	100	68.574.000	0	24.372.250	0%	36%	0	75.202.850	0%	20%	DKPP	
a.	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	232.050.000	1	28.612.500	1	10.754.000	0	5.896.000	0%	55%	1	34.508.500	20%	15%	DKPP	
c.	2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	148.512.000	2	22.218.100	1	27.820.000	0	10.644.250	0%	38%	2	32.862.350	40%	22%	DKPP	
a.	2.09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4	278.460.000	0	-	1	30.000.000	0	7.832.000	0%	26%	0	7.832.000	0%	3%	DKPP	
a.	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	5	232.050.000	1	28.612.500	1	30.000.000	1	28.612.500	100%	95%	2	57.225.000	40%	25%	DKPP	
c.	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	5	148.512.000	2	22.218.100	2	22.800.000	2	22.218.100	100%	97%	4	44.436.200	80%	30%	DKPP	
C.		URUSAN PILIHAN (PERTANIAN)	Nilai Tukar Petani	102,3	9.586.082.500	109,3	2.249.975.420	99,77	1.563.067.450	99,77	413.845.800	100%	26%	100	2.663.821.220	98%	28%	DKPP	
I.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102,3	2.747.715.000	109,3	880.845.200	99,77	249.018.000	99,77	76.471.000	100%	31%	100	957.316.200	98%	35%	DKPP	
1	3.27.02.2.01	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	0,3	610.930.000	0,3	98.396.700	0,3	151.222.500	0	9.320.000	0%	6%	0	107.716.700	0%	18%	DKPP	
a.	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	5,00	610.930.000	2	98.396.700	1	151.222.500	0	9.320.000	0%	6%	2	107.716.700	40%	18%	DKPP	
b.	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	10,00	915.765.000	4	188.071.500	2	57.135.000	2	53.609.500	100%	94%	6	241.681.000	60%	26%	DKPP	
2	3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	0,5	2.136.785.000	0,5	782.448.500	0,5	97.795.500	0,3	67.151.000	60%	69%	0	849.599.500	12%	40%	DKPP	
a.	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit komoditi perkebunan	81.000	2.747.295.000	23700	630.155.350	21700	432.500.000	21700	431.822.850	100%	100%	45400	1.061.978.200	56%	39%	DKPP	
c.	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Hortikultura	Jumlah Luasan Pengembangan Hortikultura	450	2.136.785.000	83	782.448.500	53	97.795.500	37	67.151.000	70%	69%	120	849.599.500	27%	40%	DKPP	
3	3.27.02.2.06	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	3,00	2.339.938.000	3	403.867.300	3	405.160.000	3	403.867.300	100%	100%	3	807.734.600	20%	35%	DKPP	
a.	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Bibit Ternak	5.250	1.851.530.000	1655	403.867.300	1655	405.160.000	1655	403.867.300	100%	100%	3310	807.734.600	63%	44%	DKPP	
II.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	151.322	811.655.000	112.122	8.754.000	148.340	550.000.000	0	18.505.800	0%	3%	0	27.259.800	0%	3%	DKPP	
1	3.27.03.2.01	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	100	811.655.000	100	8.754.000	100	550.000.000	0	18.505.800	0%	3%	0	27.259.800	0%	3%	DKPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
a.	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5	361.665.000	0	-	2	550.000.000	0	18.505.800	0%	3%	0	18.505.800	0%	5%	DKPP	
a.	3.27.03.2.01.03	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	2	150.000.000	1	8.754.000	1	8.779.000	1	8.754.000	100%	100%	2	17.508.000	100%	12%	DKPP	
1	3.27.03.2.02	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan ber kondisi baik	85	13.718.500.000	100	298.987.500	82	306.000.000	100	298.987.500	122%	98%	100	597.975.000	24%	4%	DKPP	
a.	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14	3.090.500.000	2	298.987.500	2	306.000.000	2	298.987.500	100%	98%	4	597.975.000	29%	19%	DKPP	
III.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	90	947.630.000	83,7	422.129.720	86	98.167.450	52	61.925.500	60%	63%	52	484.055.220	58%	51%	DKPP	
1	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	90	755.900.000	83,7	349.392.220	86	56.533.450	83,7	37.820.000	97%	67%	84	387.212.220	93%	51%	DKPP	
a.	3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5	755.900.000	2	349.392.220	1	56.533.450	0	37.820.000	0%	67%	2	387.212.220	40%	51%	DKPP	
a.	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	15.000	755.900.000	7000	349.392.220	3000	98.947.000	3000	95.414.200	100%	96%	10000	444.806.420	67%	59%	DKPP	
2	3.27.04.2.04	Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100	191.730.000	100	72.737.500	100	41.634.000	58	24.105.500	58%	58%	58	96.843.000	32%	51%	DKPP	
a.	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel daging dan Produk Hewan	1.500	191.730.000	710	72.737.500	450	41.634.000	260	24.105.500	58%	58%	970	96.843.000	65%	51%	DKPP	
IV.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	90	1.409.905.000	99	124.546.000	86	118.960.000	46	39.565.000	53%	33%	46	164.111.000	51%	12%	DKPP	
1	3.27.05.2.01	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/ Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10	1.409.905.000	10	124.546.000	10	118.960.000	3	39.565.000	30%	33%	3	164.111.000	30%	12%	DKPP	
a.	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75	1.409.905.000	14	124.546.000	6	118.960.000	2	39.565.000	33%	33%	16	164.111.000	21%	12%	DKPP	
V.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	995	3.669.177.500	965	813.700.500	975	546.922.000	390	217.378.500	40%	40%	390	1.031.079.000	39%	28%	DKPP	
1	3.27.072.01	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	90	3.669.177.500	80	813.700.500	80	546.922.000	32	217.378.500	40%	40%	32	1.031.079.000	36%	28%	DKPP	
a.	3.27.072.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas SDM	11	2.136.785.000	11	683.700.500	11	295.960.000	5	123.605.500	45%	42%	11	807.306.000	100%	38%	DKPP	
b.	3.27.072.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditangkap Kapasitasnya	11	1.068.392.500	11	130.000.000	11	146.905.000	5	68.268.000	45%	46%	11	198.268.000	100%	19%	DKPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
b.	3.27.072.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11	464.000.000	11	-	11	104.057.000	3	25.505.000	27%	25%	11	25.505.000	100%	5%	DKPP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																			
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100	16.960.069.162	100	#REF!	100	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	DLH	
	2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	65.051.961	100	81%	100	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	10%	76%	DLH	
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	10	11.339.530	10	100%	2	4.057.500	1	1.941.750	50%	48%	1	1.941.751	10%	17%	DLH	
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD	10	26.236.766	10	32.677.900	2	4.999.950	1	2.585.975	50%	52%	1	35.263.875	10%	134%	DLH	
	2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	11.241.252.394	100	95%	100	100%	50%	56%	50%	56%	50%	56%	10%	128%	DLH	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	11.207.302.020	84	10.658.149.847	14	2.019.078.100	7	1.285.180.000	50%	64%	7	11.943.329.847	10%	107%	DLH	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5	13.118.383	5	15.305.500	1	2.470.850	0	-	0%	0%	0	15.305.500	0%	117%	DLH	
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	90	10.494.706	10	13.330.000	18	2.998.500	9	1.857.000	50%	62%	9	15.187.000	10%	145%	DLH	
	2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	5	5.247.353	5	6.546.200	1	999.800	1	994.800	100%	99%	1	7.541.000	20%	144%	DLH	
	2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan sarana dan prsarana pendukung kinerja	100	1.423.374.966	86	96%	100	100%	25%	28%	25%	28%	25%	28%	8%	146%	DLH	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pameran	6	113.183.828	3	114.978.500	1	25.000.000	0	-	0%	0%	0	114.978.500	0%	102%	DLH	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan dan penggandaan	60	141.358.445	59	348.098.570	12	60.574.550	6	24.479.000	50%	40%	6	372.577.570	10%	264%	DLH	
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi media massa	50	62.968.237	60	80.900.000	12	12.000.000	6	3.000.000	50%	25%	6	83.900.000	12%	133%	DLH	
	2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	55	57.720.884	49	64.288.500	11	11.000.000	5	4.000.000	45%	36%	5	68.288.500	9%	118%	DLH	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	60	970.760.325	58	1.054.263.868	12	160.000.000	6	59.254.420	50%	37%	6	1.113.518.288	10%	115%	DLH	
	2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	696.370.984	95	81%	100	100%	25%	32%	25%	32%	25%	32%	15%	#DIV/0!	DLH	
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	#DIV/0!	DLH	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas	20	600.821.931	60	776.000.000	12	67.000.000	6	42.500.000	50%	63%	6	818.500.000	30%	136%	DLH	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kebersihan Kantor	60	45.174.463	60	60.114.463	12	8.556.000	6	4.963.000	50%	58%	6	65.077.463	10%	144%	DLH	
	2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase barang miliki daerah yang dalam kondisi baik	100	2.947.648.136	99	116%	100	100%	50%	31%	50%	31%	50%	31%	37%	216%	DLH	
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	10	264.466.597	60	829.893.437	2	53.150.000	1	28.962.500	50%	54%	1	858.855.937	10%	325%	DLH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	65	1.970.800.881	60	2.910.417.171	12	487.810.000	6	166.114.640	50%	34%	6	3.076.531.811	9%	156%	DLH	
	2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan alat besar	5	598.219.244	60	699.297.600	12	162.700.000	6	41.625.000	50%	26%	6	740.922.600	120%	124%	DLH	
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin		61.687.883	60	46.248.900	12	5.920.000	0	-	0%	0%	0	46.248.900		75%	DLH	
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	52.473.531	24	82.473.531	12	160.500.000	6	15.000.000	50%	9%	6	97.473.531	10%	186%	DLH	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	3	2.482.702.500	1	320.173.700	1	370.705.000	0	144.444.800	0%	39%	0	464.618.500	0%	19%	DLH	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	1.834.747.681	100	100%	100	100%	33%	44%	100%	44%	33%	44%	10%	10%	DLH	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100	1.641.742.831	100	100%	100	100%	33%	44%	100%	44%	33%	44%	10%	10%	DLH	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen Hasil Pengukuran IKA, IKD, dan IKTL	15	1.540.161.331		620.354.706	3	50.000.000	1	21.917.400	33%	44%	1	642.272.106	1%	42%	DLH	
	2.11.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100	49.336.000	-	96%	100	250.000.000	20	1.982.000	20%	1%	100%	1%	2%	0%	DLH	
	2.11.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (pplh)		60	49.336.000	-	96%	12	70.000.000	6	23.594.625	50%	34%	100%	34%			DLH	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		60	10.782.132.298	100	98%	100	100%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	10%	10%	DLH	
	2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang tertangani	22,98	10.782.132.298	100	98%	100	100%	100%	98%	100%	98%	100%	98%	10%	10%	DLH	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	60	7.721.499.000	60	11.839.947.893	12	2.033.631.000	6	748.209.250	50%	37%	6	12.588.157.143	10%	163%	DLH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2	15.848.919.039	5	3.197.056.400	155,490	3.231.449.700	80,080	1.098.882.123	51,50%	34,01%	80,085	4.295.938.523	1601700%	27,11%	Disdukcapil	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1	15.813.919.039	1	2.651.403.400	135	2.783.904.750	80	1.017.775.323	59,26%	36,56%	81	3.669.178.723	8100%	23,20%	Disdukcapil	
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	30	73.261.200	1	6.624.000	4	12.399.850	2	2.148.350	50,00%	17,33%	3	8.772.350	300%	11,97%	Disdukcapil	
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10	61.051.000	2	4.624.000	2	7.400.100	1	2.148.350	50,00%	29,03%	3	6.772.350	150%	11,09%	Disdukcapil	
2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	12.210.200	2	2.000.000	2	4.999.750	1	-	50,00%	0,00%	3	2.000.000	150%	16,38%	Disdukcapil	
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	1	11.285.155.859	1	2.006.306.400	21	2.131.949.750	17	869.877.625	80,95%	40,80%	18	2.876.184.025	1800%	25,49%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	60	11.251.577.809	12	2.000.806.400	15	2.126.449.800	15	869.877.625	100,00%	40,91%	27	2.870.684.025	225%	25,51%	Disdukcapil	
2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	15.262.750	1	2.500.000	1	2.500.100	0	-	0,00%	0,00%	1	2.500.000	100%	16,38%	Disdukcapil	
3	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester	20	12.210.200	4	2.000.000	4	1.999.900	2	-	50,00%	0,00%	6	2.000.000	150%	16,38%	Disdukcapil	
4	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10	6.105.100	2	1.000.000	1	999.950	0	-	0,00%	0,00%	2	1.000.000	100%	16,38%	Disdukcapil	
III		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	1	1.929.211.600	1	199.903.000	58	201.745.150	33	33.523.638	56,90%	16,62%	34	233.426.638	3400%	12,10%	Disdukcapil	
1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	48.840.800	12	3.745.000	12	3.745.000	6	-	50,00%	0,00%	18	3.745.000	150%	7,67%	Disdukcapil	
2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	152.627.500	1	25.000.000	1	25.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	25.000.000	100%	16,38%	Disdukcapil	
3	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan kebutuhan ATK	60	366.306.000	12	33.158.000	12	35.000.150	6	4.295.200	50,00%	12,27%	18	37.453.200	150%	10,22%	Disdukcapil	
4	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak	60	73.261.200	12	12.000.000	10	12.000.000	10	3.000.000	100,00%	25,00%	22	15.000.000	183%	20,47%	Disdukcapil	
5	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67.156.100	11	11.000.000	11	11.000.000	5	1.433.000	45,45%	13,03%	16	12.433.000	145%	18,51%	Disdukcapil	
6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.221.020.000	12	115.000.000	12	115.000.000	6	24.795.438	50,00%	21,56%	18	139.795.438	150%	11,45%	Disdukcapil	
IV		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	1	1.520.169.900	1	228.190.000	36	228.910.000	18	83.289.710	50,00%	36,39%	19	311.479.710	1900%	20,49%	Disdukcapil	
1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	378.516.200	12	94.966.200	12	94.966.200	6	22.309.710	50,00%	23,49%	18	117.275.910	150%	30,98%	Disdukcapil	
2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas	60	787.557.900	12	129.000.000	12	129.000.000	6	60.500.000	50,00%	46,90%	18	189.500.000	150%	24,06%	Disdukcapil	
3	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	354.095.800	12	4.223.800	12	4.943.800	6	480.000	50,00%	9,71%	18	4.703.800	150%	1,33%	Disdukcapil	
V		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	1	1.006.120.480	1	125.380.000	16	208.900.000	10	28.936.000	62,50%	13,85%	11	154.316.000	1100%	15,34%	Disdukcapil	
1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	60	340.664.580	12	55.800.000	2	65.800.000	2	19.130.000	100,00%	29,07%	14	74.930.000	117%	22,00%	Disdukcapil	
2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	280.834.600	12	43.300.000	2	70.300.000	2	6.250.000	100,00%	8,89%	14	49.550.000	117%	17,64%	Disdukcapil	
3	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60	384.621.300	12	26.280.000	12	72.800.000	6	3.556.000	50,00%	4,88%	18	29.836.000	150%	7,76%	Disdukcapil	
II		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	1	249.000.000	1	358.140.000	105304	311.616.950	55000	43.896.850	52,23%	14,09%	55.001	402.036.850	5500100%	161,46%	Disdukcapil	
I		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	249.000.000	1	59.800.000	50000	50.930.300	25000	2.018.250	50,00%	3,96%	25.001	61.818.250	2500100%	24,83%	Disdukcapil	
1	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	4	249.000.000	1	59.800.000	50000	50.930.300	25000	2.018.250	50,00%	3,96%	25.001	61.818.250	2500100%	24,83%	Disdukcapil	
II		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	1	231.240.000	5304	188.740.000	0	-	0,00%	0,00%	1	231.240.000	100%	0,00%	Disdukcapil	
1	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	1	231.240.000	5304	188.740.000	0	-	0,00%	0,00%	1	231.240.000	100%	0,00%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
III		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	-	-	1	67.100.000	50000	71.946.650	30000	41.878.600	60,00%	58,21%	30.001	108.978.600	3000100%	0,00%	Disdukcapil	
1	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	50.000	67.100.000	50000	71.946.650	30000	41.878.600	60,00%	58,21%	80.000	108.978.600	160%	0,00%	Disdukcapil	
III		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	-	-	1	85.267.000	50000	47.705.100	25000	15.336.500	50,00%	32,15%	25.001	100.603.500	2500100%	0,00%	Disdukcapil	
I		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	1	40.170.000	50000	47.705.100	25000	15.336.500	50,00%	32,15%	25.001	55.506.500	2500100%	0,00%	Disdukcapil	
1		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksanakannya Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	1	40.170.000	50000	47.705.100	25000	15.336.500	50,00%	32,15%	25.001	55.506.500	2500100%	0,00%	Disdukcapil	
IV		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	35.000.000	1	56.650.000	1	45.940.850	0	3.912.000	0,00%	8,52%	1	60.562.000	100%	173,03%	Disdukcapil	
I		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	1	56.650.000	1	45.940.850	0	3.912.000	0,00%	8,52%	1	60.562.000	100%	0,00%	Disdukcapil	
1	01	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	16	56.650.000	1	45.940.850	0	3.912.000	0,00%	8,52%	16	60.562.000	100%	0,00%	Disdukcapil	
V		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun	-	-	1	45.596.000	50	42.282.050	0	17.961.450	0,00%	42,48%	1	63.557.450	100%	0,00%	Disdukcapil	
I		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	-	-	1	45.596.000	50	42.282.050	0	17.961.450	0,00%	42,48%	1	63.557.450	100%	0,00%	Disdukcapil	
1	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Data Agregat dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Barat	-	-	75	45.596.000	50	42.282.050	0	17.961.450	0,00%	42,48%	75	63.557.450	100%	0,00%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	14.913.405.801	80%	2.082.092.282	100	2.562.654.240	37	966.647.395	37%	37,72	37,80	3.048.739.677	37,80	20%	DPMP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	39.072.640	100%	7.040.000	100	12.400.050	58	7.204.500	58%	58,10	59,00	14.244.500	59,00	36%	DPMP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	10	8.547.140	1	1.540.000	2	7.400.000	1	4.398.400	50%	59,44	2,00	5.938.400	20,00	69%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	120	30.525.500	1	5.500.000	1	5.000.050	1	2.806.100	100%	56,12	2,00	8.306.100	1,67	27%	DPMP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	11.645.604.626	100	1.456.677.496	100	2.056.911.200	38	794.086.595	38%	38,61	138,00	2.250.764.091	138,00	19%	DPMP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	11.612.026.576	14	1.450.627.496	14	2.051.411.100	9	794.086.595	64%	38,71	23,00	2.244.714.091	32,86	19%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	15.262.750	1	2.750.000	1	2.500.000	-	-	0%	-	1,00	2.750.000	20,00	18%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	12.210.200	2	2.200.000	2	2.000.100	-	-	0%	-	2,00	2.200.000	20,00	18%	DPMP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.105.100	1	1.100.000	1	1.000.000	-	-	0%	-	1,00	1.100.000	20,00	18%	DPMP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan tugas dan fungsi	4				100	20.000.000	-	-	0%	-	0,00	-	0,00		DPMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	4				4	20.000.000	-	-	0%	-	0,00	-	0,00		DPMP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	1.589.141.661	100%	346.378.351	100	294.386.990	33	98.443.800	33%	33,44	34,00	444.822.151	34,00	28%	DPMP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	19.878.206	12	3.581.000	12	3.939.000	6	1.136.500	50%	28,85	18,00	4.717.500	30,00	24%	DPMP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	152.627.500	1	25.000.000	1	25.000.000	-	-	0%	-	1,00	25.000.000	20,00	16%	DPMP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK dan barang cetakan	60	158.379.725	12	47.274.444	12	32.447.990	6	18.578.400	50%	57,26	18,00	65.852.844	30,00	42%	DPMP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	73.261.200	12	12.000.000	10	12.000.000	6	6.000.000	60%	50,00	18,00	18.000.000	36,00	25%	DPMP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaanaa Makanan dan Minuman	55	67.156.100	11	11.000.000	11	11.000.000	4	4.000.000	36%	36,36	15,00	15.000.000	27,27	22%	DPMP	
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.117.838.930	12	247.522.907	12	210.000.000	6	68.728.900	50%	32,73	18,00	316.251.807	30,00	28%	DPMP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	304.500.000	100%	89.500.000								89.500.000	0,00	29%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	26	304.500.000	2	89.500.000								89.500.000	0,00	29%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	884.225.240	100%	102.912.050	100	100.386.000	48	47.801.000	48%	47,62		150.713.050	0,00	17%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	197.805.240	12	4.213.050	12	4.200.000	6	-	50%	-	18,00	4.213.050	30,00	2%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapaa n Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	641.035.500	12	92.000.000	12	87.000.000	6	45.000.000	50%	51,72	18,00	137.000.000	120,00	21%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	45.384.500	12	6.699.000	12	9.186.000	6	2.801.000	50%	30,49	18,00	9.500.000	30,00	21%	DPMP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	450.861.635	100%	79.584.385	100	78.570.000	24	19.111.500	24%	24,32	25,32	98.695.885	25,32	22%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	359.895.645	2	64.194.385	2	67.550.000	2	18.981.500	100%	28,10	4,00	83.175.885	40,00	23%	DPMP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	90.965.990	12	15.390.000	1	11.020.000	1	130.000	100%	1,18	13,00	15.520.000	21,67	17%	DPMP	
2	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Peningkatan status Desa	80%	6.240.000.000	79	356.713.000	69	355.053.900	-	-	0%	-	79,00	356.713.000	9875,00	6%	DPMP	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Maju	100	6.240.000.000	100	356.713.000	100	355.053.900	-	-	0%	-	100,00	356.713.000	100,00	6%	DPMP	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Pekon	5	6.240.000.000	1	356.713.000	1	355.053.900	-	-	0%	-	1,00	356.713.000	20,00	6%	DPMP	
3	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	14.041.013.140	100%	977.000.917	100	1.803.512.784	26	471.149.769	26%	26,12	27,00	1.448.150.686	27,00	10%	DPMP	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	14.041.013.140	100	977.000.917	100	1.803.512.784	26	471.149.769	26%	26,12	126,12	1.448.150.686	126,12	10%	DPMP	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas yang Diberikan	60	7.048.568.680	12	544.772.121	12	1.394.011.034	12	318.078.044	100%	22,82	24,00	862.850.165	40,00	12%	DPMP	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon	580	1.029.254.000	116	218.798.396	116	193.501.800	116	45.637.550	100%	23,59	232,00	264.435.946	40,00	26%	DPMP	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pekon	580	696.150.000		91.771.000	116	115.999.950	116	53.003.500	100%	45,69	116,00	144.774.500	20,00	21%	DPMP	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	jumlah BUMDES	137	1.392.300.000		110.879.600	27	100.000.000	25	54.430.675	93%	54,43	25,00	165.310.275	18,25	12%	DPMP	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa	12	1.392.300.000		10.779.800												
															-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah aparaturnya dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	110	5.963.190.460	68	2.623.872.959								2.623.872.959	0,00	44%		
4	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	12.379.295.430	100	1.588.859.523	100	2.084.847.100	12	250.837.318	12%	12,03	112,03	1.839.696.841	112,03	15%		
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	12.379.295.430	100	1.588.859.523	100	2.084.847.100	12	250.837.318		12,03	112,03	1.839.696.841	112,03	15%	DPMP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader Posyandu yang dibina	4500	6.933.300.000	900	908.500.000	900	1.325.347.050	-	-	0%	-	900,00	908.500.000	20,00	13%	DPMP	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	60	5.445.995.430	12	680.359.523	12	759.500.050	6	250.837.318	50%	33,03	18,00	931.196.841	30,00	17%	DPMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		100	Rp 13.974.052.400	98	Rp 5.026.856.674	68	Rp 5.026.856.674	89	Rp 1.524.656.629	100	30	187	Rp 6.551.513.303	100	47	DISHUB	
	2.15	Bidang Urusan Perhubungan		100	Rp 13.974.052.400	98	Rp 5.026.856.674	68	Rp 5.070.371.795	89	Rp 1.524.656.629	100	30	187	Rp 6.551.513.303	100	47	DISHUB	
1	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 9.459.501.000	94	Rp 2.016.911.881	90	Rp 2.608.789.497	50	Rp 845.865.269	55	32	144	Rp 2.862.777.150	100	30	DISHUB	
	2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp 32.000.000	100	Rp 6.400.000	90	Rp 12.399.590	100	Rp 11.126.500	100	90	200	Rp 17.526.500	100	55	DISHUB	
	2.15.01.2.01.00 01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp 7.000.000	3	Rp 1.400.000	2	Rp 7.399.700	2	Rp 6.157.350	100	83	5	Rp 7.557.350	50	100	DISHUB	
	2.15.01.2.01.00 06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 25.000.000	3	Rp 5.000.000	2	Rp 4.999.890	2	Rp 4.969.150	100	99	5	Rp 9.969.150	50	40	DISHUB	
	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 6.781.956.000	100	Rp 1.503.772.558	90	Rp 1.963.423.200	44,44444444	Rp 634.480.902	49	32	144	Rp 2.138.253.460	100	32	DISHUB	
	2.15.01.2.02.00 01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Rp 6.754.456.000	14	Rp 1.498.272.558	14	Rp 1.957.923.400	8	Rp 634.480.902	57	32	22	Rp 2.132.753.460	34	32	DISHUB	
	2.15.01.2.02.00 05	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 12.500.000	3	Rp 2.500.000	1	Rp 2.499.950	0	Rp -	0	0	3	Rp 2.500.000	60	20	DISHUB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.02.00 07	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 10.000.000	3	Rp 2.000.000	2	Rp 1.999.900	0	Rp -	0	0	3	Rp 2.000.000	30	20	DISHUB	
	2.15.01.2.02.00 08	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 5.000.000	3	Rp 1.000.000	1	Rp 999.950	0	Rp -	0	0	3	Rp 1.000.000	60	20	DISHUB	
	2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	Rp 1.500.000.000	8	Rp 44.914.625	90	Rp 10.000.157	0	Rp -	0	0	8	Rp 44.914.625	8	3	DISHUB	
	2.15.01.2.05.00 09	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	66	Rp 1.500.000.000	1	Rp 44.914.625	6	Rp 10.000.157	0	Rp -	0	0	1	Rp 44.914.625	2	3	DISHUB	
	2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 523.045.000	100	Rp 292.537.815	90	Rp 351.107.150	40	Rp 129.622.767	44	37	140	Rp 422.160.582	100	81	DISHUB	
	2.15.01.2.06.00 01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Rp 5.000.000	12	Rp 3.000.000	12	Rp 6.998.250	9	Rp 5.130.300	75	73	21	Rp 8.130.300	35	100	DISHUB	
	2.15.01.2.06.00 04	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Rp 125.000.000	12	Rp 25.000.000	13	Rp 74.875.000	0	Rp -	0	0	12	Rp 25.000.000	20	20	DISHUB	
	2.15.01.2.06.00 05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Rp 125.045.000	12	Rp 25.050.800	12	Rp 37.233.900	6	Rp 13.664.100	50	37	18	Rp 38.714.900	30	31	DISHUB	
	2.15.01.2.06.00 06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	Rp 60.000.000	12	Rp 12.000.000	13	Rp 61.000.000	6	Rp 8.000.000	46	13	18	Rp 20.000.000	36	33	DISHUB	
	2.15.01.2.06.00 08	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	55	Rp 55.000.000	11	Rp 11.000.000	11	Rp 11.000.000	2	Rp 2.000.000	18	18	13	Rp 13.000.000	24	24	DISHUB	
	2.15.01.2.06.00 09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp 153.000.000	12	Rp 216.487.015	12	Rp 160.000.000	6	Rp 100.828.367	50	63	18	Rp 317.315.382	30	207	DISHUB	
	2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 400.000.000	100	Rp 104.021.020	90	Rp 130.209.400	50	Rp 38.495.000	56	30	150	Rp 142.516.020	100	36	DISHUB	
	2.15.01.2.08.00 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60	Rp 90.000.000	12	Rp 17.145.020	12	Rp 49.000.000	6	Rp 9.514.140	50	19	18	Rp 26.659.160	30	30	DISHUB	
	2.15.01.2.08.00 03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	5	Rp 285.000.000	3	Rp 81.876.000	12	Rp 57.000.000	6	Rp 19.415.500	50	34	9	Rp 101.291.500	100	36	DISHUB	
	2.15.01.2.08.00 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	Rp 25.000.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 24.209.400	6	Rp 9.565.360	50	40	18	Rp 14.565.360	30	58	DISHUB	
	2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 222.500.000	100	Rp 65.265.863	90	Rp 141.650.000	33	Rp 32.140.100	37	23	133	Rp 97.405.963	100	44	DISHUB	
	2.15.01.2.09.00 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Rp -	0	Rp -	5	Rp 84.650.000	2	Rp 32.140.100	40	38	2	Rp 32.140.100	-	-	DISHUB	Pergantian Subkegiatan
	2.15.01.2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Rp 210.000.000	5	Rp 60.265.863	0	Rp -	0	Rp -	0	0	5	Rp 60.265.863	-	-	DISHUB	Pergantian Subkegiatan
	2.15.01.2.09.00 09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp 12.500.000	2	Rp 5.000.000	1	Rp 57.000.000	0	Rp -	0	0	2	Rp 5.000.000	40	40	DISHUB	
2	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	Rp 3.970.001.400	100	Rp 2.905.654.793	60	Rp 1.994.067.298	83	Rp 609.992.110	100	31	183	Rp 3.515.646.903	100	89	DISHUB	
	2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3.572.100.000	100	Rp 987.100.228	60	Rp 1.143.538.798	50	Rp 398.220.914	83	35	150	Rp 1.385.321.142	100	39	DISHUB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.02.2.02.00 02	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3.572.100.000	20	Rp 987.100.228	0	Rp -	0	Rp -	0	0	20	Rp 987.100.228	-	-	DISHUB	Pergantian Subkegiatan
	2.15.02.2.02.00 04	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara/Jumlah Pembayaran PJU	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 1.143.538.798	6	Rp 398.220.914	50	35	6	Rp 398.220.914	-	-	DISHUB	Pergantian Subkegiatan
	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	Rp 85.000.000	100	Rp 148.937.600	60	Rp 432.607.250	50	Rp 154.254.496	83	36	150	Rp 303.192.096	100	100	DISHUB	
	2.15.02.2.06.00 17	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	15	Rp 85.000.000	12	Rp 148.937.600	12	Rp 432.607.250	6	Rp 154.254.496	50	36	18	Rp 303.192.096	100	100	DISHUB	
	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 312.901.400	100	Rp 273.866.965	60	Rp 323.830.000	50	Rp 48.200.000	83	15	150	Rp 322.066.965	100	100	DISHUB	
	2.15.02.2.09.00 02	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	35	Rp 312.901.400	12	Rp 273.866.965	12	Rp 323.830.000	6	Rp 48.200.000	50	15	18	Rp 322.066.965	51	100	DISHUB	
	2.15.02.2.16	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -	100	Rp 1.495.750.000	60	Rp 94.091.250	50	Rp 9.316.700	83	10	150	Rp 1.505.066.700	-	-	DISHUB	
	2.15.02.2.16.00 03	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -	3	Rp 1.495.750.000	12	Rp 94.091.250	6	Rp 9.316.700	50	10	9	Rp 1.505.066.700	-	-	DISHUB	
3	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	100	Rp 544.550.000	100	Rp 104.290.000	55	Rp 467.515.000	50	Rp 68.799.250	91	15	150	Rp 173.089.250	100	32	DISHUB	
	2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100	Rp 544.550.000	100	Rp 104.290.000	55	Rp 467.515.000	50	Rp 68.799.250	91	15	150	Rp 173.089.250	150	32	DISHUB	
	2.15.03.2.06.00 04	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Rp 544.550.000	12	Rp 104.290.000	12	Rp 467.515.000	6	Rp 68.799.250	50	15	18	Rp 173.089.250	72	32	DISHUB	
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																Diskominfotksa n	
	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			33.492.528.110		4.099.414.236		6.483.766.700		6.095.092.954	96,42%	94,01%		10.194.507.190		30,44%	Diskominfotksa n	
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	95,00%	20.075.529.617	95,00%	2.831.910.366	90,00%	4.301.912.300	90,48%	3.946.944.211	89,26%	91,75%	37,01%	6.778.854.577	40,00%	33,77%	Diskominfotksa n	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95,00%	34.233.341	100,00%	2.835.000	100,00%	6.400.000	100%	6.400.000	100,00%	100,00%	40,00%	9.235.000	40,00%	26,98%	Diskominfotksa n	
1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	7.488.543	2	960.000	2	1.400.000	2	1.400.000	100,00%	100,00%	4	2.360.000	40,00%	31,51%	Diskominfotksa n	
2	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	10	26.744.798	2	1.875.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00%	100,00%	4	6.875.000	40,00%	25,71%	Diskominfotksa n	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95,00%	9.117.721.557	100,00%	1.139.232.085	100,00%	1.598.901.700	100,00%	1.287.830.646	100,00%	80,54%	40,00%	2.427.062.731	40,00%	26,62%	Diskominfotksa n	
3	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	70	9.088.302.279	14	1.136.035.685	14	1.595.705.300	14	1.284.634.246	100,00%	80,51%	28	2.420.669.931	40,00%	26,64%	Diskominfotksa n	
4	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Thun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	5	13.372.399	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	100,00%	100,00%	2	2.400.000	40,00%	17,95%	Diskominfotksa n	
5	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10.697.919	2	1.350.000	2	1.350.000	2	1.350.000	100,00%	100,00%	4	2.700.000	40,00%	25,24%	Diskominfotksa n	
6	2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	5	5.348.960	1	646.400	1	646.400	1	646.400	100,00%	100,00%	2	1.292.800	40,00%	24,17%	Diskominfotksa n	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%	10.000.879.186	100,00%	1.578.665.705	100,00%	1.758.654.600	85,71%	1.745.662.350	85,71%	99,26%	36,71%	3.324.328.055	36,71%	33,24%	Diskominfotksa n	
7	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (buah)	300	29.954.174	51	2.978.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%	51	2.978.000	17,00%	9,94%	Diskominfotksa n	
8	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas (unit)	10	877.229.377	2	91.250.000	2	67.000.000	2	67.000.000	100,00%	100,00%	4	158.250.000	40,00%	18,04%	Diskominfotksa n	
9	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pameran Pembangunan Pesisir Barat (kali)	5	133.723.990	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00%	100,00%	2	50.000.000	40,00%	37,39%	Diskominfotksa n	
10	2.16.01.2.06.05	Peneyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak, Penggandaan dan Kebutuhan ATK (bulan)	60	1.617.133.844	12	254.836.600	12	480.572.600	12	477.154.400	100,00%	99,29%	24	731.991.000	40,00%	45,26%	Diskominfotksa n	
11	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan)	60	6.588.634.495	12	906.160.000	12	803.505.000	12	794.025.000	100,00%	98,82%	24	1.700.185.000	40,00%	25,80%	Diskominfotksa n	
12	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (bulan)	55	58.838.556	11	21.000.000	11	33.000.000	11	33.000.000	100,00%	100,00%	22	54.000.000	40,00%	91,78%	Diskominfotksa n	
13	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Di Luar Kantor (bulan)	60	695.364.750	12	277.441.105	12	349.577.000	12	349.482.950	100,00%	99,97%	24	626.924.055	40,00%	90,16%	Diskominfotksa n	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%		0	-	95%	209.503.000	79%	144.415.000	83,16%	68,93%	27	144.415.000	6,62%	6,62%	Diskominfotiksan	
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya	15	2.182.942.513	0	-	34	209.503.000	27	144.415.000	79,41%	68,93%	27	144.415.000	180,00%	6,62%	Diskominfotiksan	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95,00%	363.729.254	75,00%	34.415.826	90,00%	841.956.000	100,00%	840.215.000	100,00%	99,79%	35,00%	874.630.826	35,00%	240,46%	Diskominfotiksan	
14	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	60	336.984.456	9	30.541.826	12	840.000.000	12	839.400.000	100,00%	99,93%	21	869.941.826	35,00%	258,15%	Diskominfotiksan	
15	2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (bulan)	60	26.744.798	9	3.874.000	12	1.956.000	12	815.000	100,00%	41,67%	21	4.689.000	35,00%	17,53%	Diskominfotiksan	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	95,00%	558.966.279	100%	76.761.750	90,00%	96.000.000	66,67%	66.836.215	66,67%	69,62%	33,33%	143.597.965	33,33%	25,69%	Diskominfotiksan	
16	2.16.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (bulan)	60	290.181.059	12	43.297.500	12	52.500.000	12	44.175.000	100,00%	84,14%	24	87.472.500	40,00%	30,14%	Diskominfotiksan	
17	2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (bulan)	60	177.852.907	12	17.156.250	12	37.500.000	12	22.661.215	100,00%	60,43%	24	39.817.465	40,00%	22,39%	Diskominfotiksan	
18	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (bulan)	60	90.932.313	12	16.308.000	12	6.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	16.308.000	20,00%	17,93%	Diskominfotiksan	
	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85,00%	12.557.842.972	100%	1.138.441.770	80,00%	1.900.092.500	100,00%	1.868.271.245	100,00%	97,36%	85,70%	3.006.713.015	40,70%	23,94%	Diskominfotiksan	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik dari Saluran Resmi Pemerintahan Daerah	85,00%	12.557.842.972	100%	1.138.441.770	80,00%	1.900.092.500	100,00%	1.868.271.245	100,00%	97,36%	85,70%	3.006.713.015	40,70%	23,94%	Diskominfotiksan	
19	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	100,00%	1.783.072.568	100,00%	242.050.400	100,00%	435.803.000	100,00%	426.566.900	100,00%	97,88%	100,00%	668.617.300	40,00%	37,50%	Diskominfotiksan	
20	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh dins provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (persen)	100,00%	3.019.594.232	100,00%	67.713.870	100,00%	132.800.000	100,00%	122.926.845	100,00%	92,57%	100,00%	190.640.715	40,00%	6,31%	Diskominfotiksan	
21	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Barat (persen)	100,00%	309.867.265	100%	13.477.500	100,00%	61.477.500	100,00%	61.477.500	100,00%	100,00%	100,00%	74.955.000	40,00%	24,19%	Diskominfotiksan	
22	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Bekerjasama (media)	500	7.445.308.907	114	815.200.000	100	1.270.012.000	100	1.257.300.000	100,00%	99,00%	214	2.072.500.000	42,80%	27,84%	Diskominfotiksan	
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	85,00%	859.155.521	100%	129.062.100	80,00%	281.761.900	100,00%	279.877.498	100,00%	99,33%	20,00%	408.939.598	26,67%	47,60%	Diskominfotiksan	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara Digital	80,00%	859.155.521	100%	129.062.100	80,00%	281.761.900	100,00%	279.877.498	100,00%	99,33%	20,00%	408.939.598	26,67%	47,60%	Diskominfotiksan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Derah	Operasional Pengolahan Data (bulan)	60	109.135.521	12	129.062.100	12	174.867.900	12	173.889.647	100,00%	99,44%	24	302.951.747	40,00%	277,59%	Diskominfotiksan	
24	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (unit)	25	395.000.000	0	-	5	79.000.000	5	78.125.250	100,00%	98,89%	5	78.125.250	20,00%	19,78%	Diskominfotiksan	
25	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ekosistem SPBE (dokumen)	5	355.020.000	0	-	1	27.894.000	1	27.862.601	100,00%	99,89%	1	27.862.601	20,00%	7,85%	Diskominfotiksan	
	2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			308.234.965		37.884.100		41.045.000		39.787.704		96,94%		77.671.804		25,20%	Diskominfotiksan	
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (dokumen)	10	308.234.965	1	37.884.100	1	41.045.000	1	39.787.704	100,00%	96,94%	1	77.671.804	10,00%	25,20%	Diskominfotiksan	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (dokumen)	10	308.234.965	1	37.884.100	1	41.045.000	1	39.787.704	100,00%	96,94%	1	77.671.804	10,00%	25,20%	Diskominfotiksan	
26	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)	5	308.234.965	1	37.884.100	1	41.045.000	1	39.787.704	100,00%	96,94%	2	77.671.804	40,00%	25,20%	Diskominfotiksan	
	2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			743.418.036		71.520.161		132.300.000		131.845.498		99,66%		203.365.659		27,36%	Diskominfotiksan	
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (persen)	100,00%	743.418.036	100,00%	71.520.161	100,00%	132.300.000	100,00%	131.845.498	100,00%	99,66%	70,00%	203.365.659	70,00%	27,36%	Diskominfotiksan	
	2.21.02.2.02	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (persen)	100,00%	347.500.000	0,00%	-	100,00%	47.500.000	100,00%	47.445.000	100,00%	99,88%	100,00%	47.445.000	100,00%	13,65%	Diskominfotiksan	
27	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (perangkat daerah)	39	347.500.000	0	-	39	47.500.000	39	47.445.000	100,00%	99,88%	39	47.445.000	100,00%	13,65%	Diskominfotiksan	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100,00%	395.918.036	100,00%	71.520.161	100,00%	84.800.000	100,00%	84.400.498	100,00%	99,53%	40,00%	155.920.659	40,00%	39,38%	Diskominfotiksan	
27	2.21.02.2.02.01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (bulan)	60	395.918.036	12	71.520.161	12	84.800.000	12	84.400.498	100,00%	99,53%	24	155.920.659	40,00%	39,38%	Diskominfotiksan	
					34.544.181.111		4.208.818.497		6.657.111.700		6.266.726.156	96,42%	290,60%		10.475.544.653		83,0%	Diskominfotiksan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																	
	2.17 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	90	3.564.982.104	92,5	2.398.315.600	50	1.070.118.495	54,05405405	44,62	75	4.635.100.599	78,947368	0	Diskopdag	
	2.17 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	90	17.162.300	92,5	12.400.000	50	1.857.000	54,05405405	14,98	75	19.019.300	78,947368	0	Diskopdag	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	0	4	7.162.500	2	7.400.000	0	-	0	0	2	7.162.500	20	0	Diskopdag	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		0	24	12	5.000.000	6	1.857.000	50	37,14	30	11.856.800	50	0	Diskopdag	
	2.17 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95		0	90	92,5	1.822.207.800,00	50	852.406.354,00	54,05405405	46,78	75	3.361.422.846,00	78,95	0	Diskopdag	
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60		0	24	12	1.816.707.800	6	852.406.354	50	46,92	30	3.348.930.346	50	0	Diskopdag	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	60		0	24	12	2.500.000	0	-	0	0	24	5.000.000	40	0	Diskopdag	
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60		0	24	12	2.000.000	0	-	0	0	24	4.499.500	40	0	Diskopdag	
7		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	60		0	24	12	1.000.000	0	-	0	0	24	2.993.000	40	0	Diskopdag	
	2.17 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95		0	90	92,5	25.000.000,00	50	0,00	54,05405405	0	75	19.252.000,00	78,947368	0	Diskopdag	
8		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60		0	24	12	25.000.000	0	0	0	0	24	19.252.000	40	0	Diskopdag	
	2.17 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95		0	90	92,5	290.807.800,00	50	103.450.080,00	54,05405405	35,57	75	643.068.531,00	78,947368	0	Diskopdag	
9		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60		0	24	12	2.000.000	0	-	0	0	24	4.228.000	40	0	Diskopdag	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Keikutsertaan pada Krui Fair	4		0	2	1	25.000.000	0	-	0	0	1	50.000.000	25	0	Diskopdag	
10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60		0	24	12	48.807.800	6	6.614.200	50	13,55	30	76.034.740	50	0	Diskopdag	
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60		0	24	12	24.000.000	6	3.000.000	50	12,50	30	35.600.000	50	0	Diskopdag	
12		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	55		0	22	11	11.000.000	5	1.998.000	45,45454545	18,16363636	30	23.954.000	54,545455	0	Diskopdag	
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah	60		0	24	12	180.000.000	6	91.837.880	50	51,02	30	453.251.791	50	0	Diskopdag	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	95		0	0	92,5	6.000.000	20	5.800.000	21,62162162			5.800.000	20	0	Diskopdag	
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0	0	1	6.000.000	1	5.800.000	100		1	5.800.000	20	0	Diskopdag	
	2.17 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95		0	90	92,5	86.500.000	50	48.750.000	54,05405405	56,36	75	255.965.386	78,95	0	Diskopdag	
15		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60		0	24	12	12.000.000	0	-	0	0,00	24	43.087.386	40	0	Diskopdag	
16		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60		0	24	12	72.000.000	6	47.500.000	50	65,97	30	204.000.000	50	0	Diskopdag	
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	60		0	24	12	2.500.000	6	1.250.000	50	50,00	30	8.878.000	50	0	Diskopdag	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	90	272.717.475	92,5	155.400.000,00	50	57.855.061,00	54,05405405	37,23	75	330.572.536,00	78,95	0	Diskopdag	
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	60	0	24	209.717.475	12	150.900.000	6	56.355.061	50	37,35	30	266.072.536	50	0	Diskopdag	
19		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60	0	24	63.000.000	12	4.500.000	6	1.500.000	50	33,33	30	64.500.000	50	0	Diskopdag	
	2.17 . 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	244.441.500	52,5	78.545.500	50	43.919.000	95,23809524	55,92	50	288.360.500	90,91	0	Diskopdag	
	2.17 . 03 . 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	244.441.500	52,5	78.545.500	50	43.919.000	95,23809524	55,92	50	288.360.500	90,91	0	Diskopdag	
20		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Aktif	55	0	22	244.441.500	11	78.545.500	5	43.919.000	45,45454545	55,92	27	288.360.500	49,09	0	Diskopdag	
	2.17 . 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60	0	45	986.340.000	55	112.337.700	25	60.747.700	45,45454545	54,08	45	1.047.087.700	75	0	Diskopdag	
	2.17 . 05 . 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60		45	986.340.000	55	112.337.700	25	60.747.700	45,45454545	54,08	45	1.047.087.700	75	0	Diskopdag	
21		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Tentang Perkoperasian dan UMKM	20	0	8	986.340.000	2	112.337.700	1	60.747.700	50	54,08	9	1.047.087.700	45	0	Diskopdag	
	2.17 . 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29	0	2,16	2.137.011.571	2,08	256.057.000	2,0	224.300.000	96,15384615	87,60	1,0	2.307.011.571	41,48	0	Diskopdag	
	2.17 . 07 . 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29	0	2,16	2.137.011.571	2,08	256.057.000	2,0	224.300.000	96,15384615	87,60	1,0	2.307.011.571	41,48	0	Diskopdag	
22		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya Hibah dan Bantuan Sosial	5	0	2	2.107.011.571	1	200.000.000	1	200.000.000	100	100,00	3	2.307.011.571	60	0	Diskopdag	
23		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Penyelenggaraan Pekan Festival UMKM	25	0	10	30.000.000	5	56.057.000	2	24.300.000	40	43,35	12	54.300.000	48	0	Diskopdag	
	3.30 . 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,59	0	15,92	1.341.279.983	11,58	686.495.000,00	11,58	28.178.468,00	100	4,10	12,9	1.369.458.451,00	110,96	0	Diskopdag	
	3.30 . 03 . 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,59	0	15,92	1.341.279.983	11,58	686.495.000,00	11,58	28.178.468,00	100	4,10	12,9	1.369.458.451,00	110,96	0	Diskopdag	
24		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Perdagangan	5	0	3	538.876.783	2	605.577.000,00	1	12.804.468	50	2,11	4	551.681.251	80	0	Diskopdag	
25		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pasar	60	0	24	802.403.200	12	80.918.000	6	15.374.000	50	19,00	30	817.777.200	50	0	Diskopdag	
	3.30 . 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	70	698.095.700	60	329.957.000,00	30	22.187.500,00	50	6,72	30	1.066.822.842,00	42,857143	0	Diskopdag	
	3.30 . 04 . 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	70	37.319.500	60	30.000.000,00	30	11.612.500,00	50	38,71	30	48.932.000,00	42,857143	0	Diskopdag	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Distribusi BBM dan BBG	60	0	24	37.319.500	12	30.000.000	6	11.612.500	50	38,71	30	48.932.000	50	0	Diskopdag	
	3.30 . 04 . 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	40	660.776.200	40	30.000.000	20	10.575.000	50	35,25	30	671.351.200	42,86	0	Diskopdag	
	27	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	260	0	104	660.776.200	52	30.000.000	20	10.575.000	38,46153846	35,25	124	671.351.200	47,692308	0	Diskopdag	
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.227	0	93.670	346.539.642	43.184	269.957.000	20.000	-	46,31344943	0,00	20.000	346.539.642			Diskopdag	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.227	0	93.670	346.539.642	43.184	269.957.000	1	-	0,002315672	0	1	346.539.642	0,0023134	0	Diskopdag	
28		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang	5	0	2	346.539.642	2	269.957.000	0	-	0	0,00	2	346.539.642	40	0	Diskopdag	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen	100%	14.412.914.145														
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan	100%	66.327.101	90,41%	9.402.700	100%	12.400.000	0	-	0	0%	90,41%	9.402.700	90,41%	14%		
	2.18.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	39.582.302	2	4.604.600	2	7.400.000	0	-	0,00%	0%	2	4.604.600	20,00%	12%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	26.744.799	1	4.798.100	2	5.000.000	0	-	0	0%	1	4.798.100	10,00%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketertiban admistrasi Keuangan	100%	10.068.414.084	62,80%	1.252.112.558	100%	1.721.467.200	38,98%	671.044.829	38,98%	39%	101,78%	1.923.157.387	101,78%	19%		
	2.18.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	10.037.368.720	14	1.246.313.658	14	1.715.967.200	8	671.044.829	57%	39%	22	1.917.358.487	31,43%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	13.372.400	3	2.304.000	1	2.500.000	0	-	0,00%	0%	3	2.304.000	60,00%	17%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	90	12.324.004													DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.348.961	1	998.200	1	1.000.000	0	-	0,00%	0%	1	998.200	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang Berdaya saing	100%	125.000.000	94,43%	66.105.000	100%	10.000.000	0	-	0	0%	94,43%	66.105.000	94,43%	53%		
	2.18.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	125.000.000	5	66.105.000	5	10.000.000	0	-	0,00%	0%	5	66.105.000	50,00%	53%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat daerah	100%	3.008.490.247	99,73%	593.105.016	100%	253.600.000	48,12%	122.035.281	48%	48%	147,85%	715.140.297	147,85%	24%		
	2.18.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	133.723.991	1	21.000.000	1	25.000.000	0	-	0,00%	0%	1	21.000.000	20,00%	16%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	344.708.354	12	29.376.000	12	30.600.000	6	7.613.000	50%	25%	18	36.989.000	30,00%	11%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU yang Disediakan	50	64.187.516	10	12.000.000	10	12.000.000	10	1.800.000	100,00%	15%	20	13.800.000	40,00%	21%	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.06.00 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	55	58.838.557	11	11.000.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18%	18%	13	13.000.000	23,64%	22%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2.407.031.828	12	519.729.016	12	175.000.000	6	110.622.281	50,00%	63%	18	630.351.297	30,00%	26%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	53.489.597	0	-	100%	19.800.000	0	-	0	0%	0	-	0,00%	0%		
	2.18.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	5	53.489.597	0	-	2	19.800.000	0	-	0,00%	0%	0	-	0,00%	0%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	588.658.357	100%	59.331.000	100%	58.000.000	51%	29.500.000	51%	51%	150,86%	88.831.000	150,86%	15%		
	2.18.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	572.338.680	1	57.000.000	2	57.000.000	1	29.250.000	50,00%	51%	2	86.250.000	13,33%	15%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	16.319.677	1	2.331.000	12	1.000.000	2	250.000	17%	25%	3	2.581.000	5,00%	16%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	342.065.969	99,30%	75.169.470	100%	75.700.000	25%	19.045.250	25,16%	25%	124,46%	94.214.720	124,46%	28%		
	2.18.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	330.833.153	4	72.925.000	4	73.100.000	4	18.700.000	1	26%	8	91.625.000	40,00%	28%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	11.232.816	4	2.244.470	4	2.600.000	4	345.250	100,00%	13%	8	2.589.720	40,00%	23%		
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	30%	3.814.576.076	98,90%	1.382.392.828	100%	1.499.742.000	9%	135.050.500	0,090049155	9%	107,90%	1.517.443.328	356,71%	40%		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Presentase Nilai Investasi	50%	3.814.576.076	98,90%	1.382.392.828	100%	1.499.742.000	9%	135.050.500	9,00%	9%	107,90%	1.517.443.328	215,81%	40%		
	2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10	3.814.576.076	1	1.382.392.828	2	1.499.742.000	0	135.050.500	0	9%	1	1.517.443.328	10,00%	40%	DPMPTSP	
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	85%	1.045.534.510	97,09%	274.683.000	100%	1.030.258.086	79%	814.991.000	79,11%	79%	176,20%	1.089.674.000	207,41%	104%		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Izin yang Diterbitkan	6.105	1.045.534.510	97,09%	274.683.000	100%	1.030.258.086	79%	814.991.000	0,791055184	79%	176,20%	1.089.674.000	0,03%	104%		
	2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	3000	655.240.457	600	245.016.500	600	985.258.086	2675	801.897.000	445,83%	81%	3275	1.046.913.500	109,17%	160%	DPMPTSP	
	2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	390.294.053	10	29.666.500	10	45.000.000	0	13.094.000	0	29%	10	42.760.500	20,00%	11%	DPMPTSP	
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan	80%	3.529.074.244	81,77%	423.797.520	100%	471.385.000		14.707.000	0,00%	3%	81,77%	438.504.520	102,21%	12%		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	15	3.529.074.244	81,77%	423.797.520	100%	471.385.000	0	14.707.000	0	3%	81,77%	438.504.520	5,45%	12%	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60	925.357.921	12	30.594.000	12	82.089.000	0	7.250.000	0,00%	9%	12	37.844.000	20,00%	4%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	945	1.637.560.006	189	287.762.000	189	244.436.000	0	-	0	0%	189	287.762.000	20,00%	18%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60	966.156.317	12	105.441.520	12	144.860.000		7.457.000	0,00%	5%	12	112.898.520	20,00%	12%	DPMPTSP	
	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan	5	1.604.711.994	100%	92.950.000	100%	125.000.000		32.417.000	0	26%	100,00%	125.367.000	20,00%	8%		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	5	1.604.711.994	100%	92.950.000	100%	125.000.000		32.417.000	0,00%	26%	100,00%	125.367.000	20,00%	8%		
	2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	1.604.711.994	1	92.950.000	5	125.000.000	0	32.417.000	0	26%	1	125.367.000	20,00%	8%	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemuda Olahraga																	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	21.402.978.270	100%	5.834.113.985	90%	7.398.905.520	90%	2.139.602.008	29%	29%		7.973.715.993		37%		
	2	2.13.2.13.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	32.000.000	100%	6.400.000,00	100%	6.400.000,00	100%	1.050.000,00	16%			7.450.000				
	3	2.13.2.13.01.01.01	Perangkat Daerah																
	4	2.13.2.13.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	25.000.000	4	5.000.000,00	4	5.000.000	2	1.050.000,00	21%	21%		6.050.000		24%	Dispora	
	5	2.13.2.13.01.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	85%	9.168.301.000	100%	1.407.032.857,00	90%	1.833.460.200,00	60%	707.815.058,00	39%	39%		2.114.847.915			Dispora	
	6	2.13.2.13.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65	9.082.580.000	8	1.390.470.657,00	13	1.816.516.000	13	705.881.058,00	39%	39%		2.096.351.715		23%	Dispora	
	7	2.13.2.13.01.01.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	72	57.221.000	12	11.062.200,00	13	11.444.200	13	1.934.000,00	17%	17%		12.996.200		23%	Dispora	
	8	2.13.2.13.01.01.01	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000,00	1	2.500.000			0%	0%		2.500.000		20%	Dispora	
	9	2.13.2.13.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulnan/triulan	12	10.000.000	2	2.000.000,00	2	2.000.000			0%	0%		2.000.000		20%	Dispora	
	10	2.13.2.13.01.01.01	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	6	6.000.000	1	1.000.000,00	1	1.000.000			0%	0%		1.000.000		17%	Dispora	
	11	2.13.2.13.01.01.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	0%	-	100%	13.500.000	100%		0%	0%		-		0%	Dispora	
			Persentase Jumlah aparatur SDM yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Pelatihan																
	12	2.13.2.13.01.01.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdisiplin	5	50.000.000			1	13.500.000	1	-	0%	0%		-		0%	Dispora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	2.13.2.13.01.01.0	Administrasi umum Perangkat Daerah		90%	1.059.924.000	100%	352.076.940	80%	474.980.000	80%	247.305.100,00	52%	52%		599.382.040			Dispora	
14	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah komponen listrik	6	25.020.000	1	4.999.440,00	1	5.004.000	1	1.145.200,00	23%	23%		6.144.640			25%	Dispora
15	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah aktifitas	10	75.000.000	1	25.000.000,00	1	25.000.000		-	0%	0%					Dispora	
16	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan kantor	72	61.000.000	-	-	8	70.000.000	8	60.550.000,00	87%	87%		60.550.000			99%	Dispora
17	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan Barang cetakan dan Pengganda	Jumlah ATK	72	72.255.000	12	14.451.000,00	12	14.451.000	12	9.590.000,00	66%	66%		24.041.000			33%	Dispora
17	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan	Jumlah SKHU	60	60.000.000	12	12.000.000,00	12	12.000.000	12	2.000.000,00	17%	17%		14.000.000			23%	Dispora
18	2.13.2.13.01.01.0	Facilitas kunjungan tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makan dan minum	120	55.000.000	12	24.000.000,00	12	12.000.000	12	14.000.000,00	117%	117%		38.000.000			69%	Dispora
19	2.13.2.13.01.01.0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Jumlah koordinasi diluar kantor	72	783.904.000	12	286.077.500,00	12	350.976.000	12	169.609.900,00	48%	48%		455.687.400			58%	Dispora
20															-				Dispora
21	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	591.740.000	100%	107.324.288	90%	118.348.000	60%	43.630.000,00	37%	37%		150.954.288			26%	Dispora
22	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah pembayaran tagihan	72	78.000.000	12	4.581.199,00	14	15.600.000	0	-	0%	0%		4.581.199			6%	Dispora
23	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Jumlah bangunan dan kendaraan dinas	72	485.000.000	12	97.000.000,00	12	97.000.000	12	42.500.000	44%	44%		139.500.000			29%	Dispora
24	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tagihan	72	28.740.000	12	5.743.089,00	12	5.748.000	12	1.130.000	20%	20%		6.873.089			24%	Dispora
25											-				-				Dispora
26	2.13.2.13.01.01.0	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		95%	432.610.000	100%	99.650.000	90%	110.122.000	60%	52.450.000,00	48%	48%		152.100.000			35%	Dispora
27	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan	Jumlah kendaraan	72	273.500.000	12	65.300.000,00	12	66.872.000	12	39.850.000	60%	60%		105.150.000			38%	Dispora
28	2.13.2.13.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan	Jumlah pajak	72	10.750.000	-	-	12	4.650.000	0	-	0%	0%		-			0%	Dispora
29	2.13.2.13.01.01.0	Pemeliharaan peralatan dan mesin lain	Jumlah peralatan dan mesin	72	93.360.000	12	23.350.000,00	12	27.600.000	12	8.000.000	29%	29%		31.350.000			34%	Dispora
30	2.13.2.13.01.01.0	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	25.000.000	12	5.000.000,00	12	5.000.000	12	2.300.000	46%	46%		7.300.000			29%	Dispora
31	2.13.2.13.01.01.0	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	30.000.000		6.000.000,00	12	6.000.000	12	2.300.000	38%	38%		8.300.000			28%	Dispora
32											-				-				Dispora
33		B Program Pengembangan Kapasitas Daya	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (persen)	60%	4.224.500.000			50%	2.217.600.000	50%	349.706.550,00				349.706.550				Dispora
34															-				Dispora
35	2.13.2.13.01.01.1	Penyadaraan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan		60%	4.224.500.000	100%	879.224.400	50%	974.900.000	50%		0%	18%		879.224.400				Dispora
36	2.13.2.13.01.01.1	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggara	Jumlah pemuda pelopor	15	316.900.000	12	100.724.200,00	14	163.380.000	14	28.931.250	18%	18%		129.655.450			41%	Dispora
37	2.13.2.13.01.01.1	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggara	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	12	282.600.000	12	82.758.200,00	20	86.520.000	20	3.680.000	4%	4%		86.438.200			31%	Dispora
38	2.13.2.13.01.01.1	Peningkatan Kepemimpinan , kepolo	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan,perdamaian,dan lingkungan hidup	28	3.625.000.000	8	695.742.000,00	16	725.000.000	16	32.337.800	4%	4%		728.079.800			20%	Dispora
39	2.13.2.13.01.01.0	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggara	Jumlah pemuda kader yang dikirim ke provinsi	20	350.000.000	0	0	20	50.000.000	8	32.337.800	65%	65%		32.337.800				Dispora
40	2.13.2.13.01.01.1	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah ka		60%	1.242.700.000	100%	665.000.000	50%	1.242.700.000	50%		100%	0%		665.000.000				Dispora

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
41	2.13.2.13.01.01.1	Peningkatan kapasitas pemuda dan org	Persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	30	1.242.700.000	12	665.000.000,00	16	1.242.700.000	16	284.757.500	23%	23%		949.757.500		76%	Dispora	
42															-			Dispora	
43															-			Dispora	
44		C Program Pengembangan Kapasitas Day	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (persen)	60%	4.601.203.270			45%	2.624.495.320	45%	644.757.500,00				644.757.500			Dispora	
45															-			Dispora	
46															-			Dispora	
47	2.13.2.13.01.01.1	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan		60%	745.000.000	100%	107.965.200	100%	149.000.000	100%		100%	0%		107.965.200			Dispora	
48	2.13.2.13.01.01.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaa	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	60	745.000.000	12	107.965.200,00	20	149.000.000	20	68.471.000	46%	46%		176.436.200		24%	Dispora	Faktor penghambat minimnya jumlah sarana dan prasarana olahraga di setiap kecamatan
50															-			Dispora	
51	2.13.2.13.01.01.1	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab / kota		40%	822.856.900	100%	143.381.800	100%	164.571.380	100%		100%	0%		143.381.800			Dispora	
52	2.13.2.13.01.01.1	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga m	Persentase penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten yang di fasilitasi pemerintah daerah	10	822.856.900	4	143.381.800,00	10	164.571.380	10	34.274.000	21%	21%		177.655.800		22%	Dispora	Faktor penghambat di sebabkan tidak semua cabor olahraga dapat mengikuti perlombaan event kejuaraan olahraga yang di selenggarakan oleh pemda
53															-			Dispora	
54	2.13.2.13.01.01.1	Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		80%	776.429.770	100%	374.295.500	100%	395.000.000	100%		100%	0%		374.295.500			Dispora	
55	2.13.2.13.01.01.1	Pembinaan dan pengembangan atlet be di bina	Persentase olahragawan andalan yang	60	776.429.770	12	374.295.500,00	14	395.000.000	14	150.215.000	38%	38%		524.510.500		68%	Dispora	Faktor Penghambat kurangnya penghargaan terhadap atlet yg berprestasi
56															-			Dispora	
57	2.13.2.13.01.01.1	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		60%	1.805.000.000	100%	1.585.000.000	100%	1.805.000.000	100%		0%	19%		1.585.000.000			Dispora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
58	2.13.2.13.01.01	Pengembangan organisasi keolahragaa	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi keolahragaan	20	1.805.000.000	12	1.585.000.000,00	15	1.805.000.000	15	345.000.000	19%	19%		1.930.000.000		107%	Dispora	
59															-			Dispora	
60	2.13.2.13.01.01	Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi		60%	451.916.600	100%	106.763.000	100%	110.923.940	100%		0%	42%		106.763.000			Dispora	
61	2.13.2.13.01.01	Penyelenggaraan, pengembangan dan	Jumlah perlombaan olahraga massal	6	451.916.600	12	106.763.000,00	12	110.923.940	12	46.797.500	42%	42%		153.560.500		34%	Dispora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		95%	Rp 4.300.080.950	95%	Rp 4.265.191.997	95%	Rp 3.079.819.700	70%	Rp 1.499.746.557	74%	49%	165%	Rp 5.764.938.554	174%	134%	Dinas Perikanan	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	95%	Rp 3.714.017.850	95%	Rp 2.200.323.407	93%	Rp 2.703.044.700	70%	Rp 1.254.799.557	75%	46%	165%	Rp 3.455.122.964	174%	93%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93%	Rp 1.727.878	93%	Rp 12.863.950	95%	Rp 12.400.000	2	Rp 12.400.000	211%	100%	293%	Rp 25.263.950	315%	1462%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	2	Rp 1.727.878	2	Rp 2.814.000	2	Rp 7.400.000	2	Rp 7.400.000	100%	100%	400%	Rp 10.214.000	200%	591%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	2	Rp 5.747.347	2	Rp 10.049.950	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	100%	100%	400%	Rp 15.049.950	200%	262%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhihnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.524.381.337	1	Rp 1.601.370.687	95%	Rp 2.063.097.200	14	Rp 986.980.567	1474%	48%	1500%	Rp 2.588.351.254	1500%	103%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14	Rp 2.512.903.339	14	Rp 1.598.845.687	14	Rp 2.054.819.700	7	Rp 984.203.067	50%	48%	2100%	Rp 2.583.048.754	150%	103%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun	1	Rp 3.085.446	1	Rp 2.525.000	1	Rp 2.777.500	1	Rp 2.777.500	100%	100%	200%	Rp 5.302.500	200%	172%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Rp 4.072.856	2	Rp 3.333.000	2	Rp 2.500.000	0	Rp -	0%	0%	200%	Rp 3.333.000	100%	82%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Rp 2.468.398	2	Rp 2.000.000	2	Rp 2.000.000	0	Rp -	0%	0%	200%	Rp 2.000.000	100%	81%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pro	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Rp 1.851.298	2	Rp 1.515.000	2	Rp 1.000.000	0	Rp -	0%	0%	200%	Rp 1.515.000	100%	82%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat D	Terpenuhihnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	2	Rp 64.587.081	2	Rp 7.000.000	2	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	100%	100%	400%	Rp 17.000.000	200%	26%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SMD Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	2	Rp 64.587.081	2	Rp 7.000.000	2	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	100%	100%	400%	Rp 17.000.000	200%	26%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	95%	Rp 454.728.163	95%	Rp 354.794.980	95%	Rp 260.101.900	70%	Rp 131.072.390	74%	50%	165%	Rp 485.867.370	174%	107%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihnya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	12	Rp 4.912.111	12	Rp 4.019.800	12	Rp 4.421.780	12	Rp 4.421.780	100%	100%	2400%	Rp 8.441.580	200%	172%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhihnya Pembiayaan Advetorial dan Pameran	12	Rp 30.854.970	12	Rp 25.000.000	12	Rp 21.000.000	0	Rp -	0%	0%	1200%	Rp 25.000.000	100%	81%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhihnya Barang Cetak dan Biaya Fotocopy	12	Rp 39.434.628	12	Rp 27.487.752	12	Rp 15.166.404	6	Rp 6.150.610	50%	41%	1800%	Rp 33.638.362	150%	85%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhihnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Rp 13.597.280	12	Rp 12.000.000	11	Rp 12.000.000	5	Rp 5.000.000	45%	42%	1700%	Rp 17.000.000	142%	125%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhihnya Kebutuhan Makan dan Minum Kunjungan Tamu	11	Rp 12.464.174	11	Rp 11.000.000	12	Rp 11.000.000	6	Rp 4.000.000	50%	36%	1700%	Rp 15.000.000	155%	120%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhihnya Pembiayaan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	12	Rp 353.465.000	12	Rp 275.287.428	12	Rp 196.513.716	6	Rp 111.500.000	50%	57%	1800%	Rp 386.787.428	150%	109%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhihnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 80.731.894	95%	Rp 76.413.790	95%	Rp 81.755.000	95%	Rp 41.526.000	100%	51%	190%	Rp 117.939.790	200%	146%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12	Rp 16.996.600	12	Rp 14.363.790	12	Rp 19.200.000	6	Rp 7.988.000	50%	42%	1800%	Rp 22.351.790	150%	132%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Sewa Rumah Dinas	12	Rp 57.564.300	12	Rp 57.000.000	12	Rp 57.000.000	6	Rp 32.500.000	50%	57%	1800%	Rp 89.500.000	150%	155%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembiyaan Kebersihan Kantor	12	Rp 6.170.994	12	Rp 5.050.000	12	Rp 5.555.000	6	Rp 1.038.000	50%	19%	1800%	Rp 6.088.000	150%	99%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 490.357.918	95%	Rp 147.880.000	95%	Rp 275.690.600	70%	Rp 72.820.600	74%	26%	165%	Rp 220.700.600	174%	45%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp 23.795.240	12	Rp 21.000.000	12	Rp 21.400.000	6	Rp 7.500.000	50%	35%	1800%	Rp 28.500.000	150%	120%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Rp 343.962.041	12	Rp 101.050.000	12	Rp 194.600.000	6	Rp 30.800.000	50%	16%	1800%	Rp 131.850.000	150%	38%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp 33.727.287	12	Rp 15.000.000	12	Rp 30.360.600	12	Rp 30.360.600	100%	100%	2400%	Rp 45.360.600	200%	134%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Rp 65.078.110	12	Rp 10.830.000	12	Rp 29.330.000	6	Rp 4.160.000	50%	14%	1800%	Rp 14.990.000	150%	23%	Dinas Perikanan	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0	15002	Rp 23.795.240	15376	Rp 103.259.760	15376	Rp 76.225.000	3446	Rp 50.679.000	22%	66%	1882200%	Rp 153.938.760	125%	647%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	360	Rp 214.885.732	245	Rp 103.259.760	245	Rp 76.225.000	245	Rp 50.679.000	100%	66%	49000%	Rp 153.938.760	136%	72%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	360	Rp -	10	Rp -	10	Rp 37.325.000	10	Rp 34.464.000	100%	92%	2000%	Rp 34.464.000	6%	100%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok	200	Rp 214.885.732	245	Rp 103.259.760	245	Rp 38.900.000	100	Rp 16.215.000	41%	42%	34500%	Rp 119.474.760	173%	56%	Dinas Perikanan	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	228,1	Rp 165.928.856	228,1	Rp 120.304.280	70	Rp 148.050.000	110	Rp 69.952.500	157%	47%	33810%	Rp 190.256.780	148%	115%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan	70	Rp 165.928.856	70	Rp 120.304.280	55	Rp 148.050.000	60	Rp 69.952.500	109%	47%	13000%	Rp 190.256.780	186%	115%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan (Orang)	70	Rp 44.629.850	60	Rp 72.435.000	55	Rp 72.708.000	0	Rp -	0%	-	6000%	Rp 72.435.000	86%	162%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terfasilitasinya Kegiatan Pembentukan Kelompok Perikanan (Kelompok)	12	Rp 121.299.006	6	Rp 47.869.280	6	Rp 44.629.850	1	Rp 7.740.000	17%	17%	700%	Rp 55.609.280	58%	46%	Dinas Perikanan	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0,033	Rp 89.449.577	0,033	Rp 89.056.000	0,033	Rp 75.000.000	1	Rp 74.794.000	3030%	100%	103%	Rp 163.850.000	3130%	183%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 89.449.577	1	Rp 44.528.000	1	Rp 75.000.000	1	Rp 74.794.000	100%	100%	200%	Rp 119.322.000	200%	133%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 89.449.577	1	Rp 44.528.000	1	Rp 75.000.000	1	Rp 74.794.000	100%	100%	200%	Rp 119.322.000	200%	133%	Dinas Perikanan	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	43,35	Rp 115.798.935	39	Rp 498.277.900	39	Rp 77.500.000	1	Rp 49.521.500	3%	64%	4000%	Rp 547.799.400	92%	473%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.02	Pembinan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Lomba Masak Ikan)	Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)	1	Rp 115.798.935	1	Rp 498.277.900	1	Rp 77.500.000	0	Rp 49.521.500	0%	64%	100%	Rp 547.799.400	100%	473%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jenis)	1	Rp 115.798.935	1	Rp 498.277.900	1	Rp 77.500.000	0	Rp 49.521.500	0%	64%	100%	Rp 547.799.400	100%	473%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	03.26	PARIWISATA																	
	03.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	16.374.483.825,00	90	3.385.511.700,00	95	4.003.079.600,00	30,31	1.340.175.197,00	31,90	33,48	30,31	1.340.175.197,00	3190,2341	8,18	DISPAR	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	111.884.535,00	100	18.468.000,00	100	18.468.000,00	60,00	5.000.000,00	60	27,07	60,00	5.000.000,00	6000	4,47	DISPAR	
	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	49.365.460,00	2	7.400.000,00	2	7.400.000,00	1	497.000,00	50,00	6,72	1,00	497.000,00	10,00	1,01	DISPAR	
	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	37.519.075,00	1	6.068.000,00	1	6.068.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	4.503.000,00	100,00	90,06	2,00	4.503.000,00	20,00	18,01	DISPAR	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	9.592.366.510,00	100	1.903.487.100,00	100	2.146.339.600,00	52	1.028.061.243,00	52,17	47,90	52,17	1.028.061.243,00	5217,39	10,72	DISPAR	
	2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	84	9.409.976.000,00	14	1.878.044.100,00	14	2.130.431.600,00	8	1.026.261.243,00	57,14	54,65	8,00	1.026.261.243,00	9,52	10,91	DISPAR	
	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Administrasi Perkantoran UPTD	72	154.890.510,00	12	19.943.000,00	12	10.408.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	12.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	90	10.000.000,00	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	16	1.800.000,00	88,89	90,00	16,00	1.800.000,00	17,78	18,00	DISPAR	
	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#VALUE!	DISPAR	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	159.500.000,00	0	115.940.000,00	100	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Menikuti Peningkatan Kapasitas		159.500.000,00	0	115.940.000,00	12	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	DISPAR	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2.198.206.045,00	100	457.123.600,00	100	505.898.500,00	28,57142857	114.000.229,00	28,57	22,53	28,57	114.000.229,00	2857,1429	5,19	DISPAR	
	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	14.577.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	8	323.850.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	0	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	60	353.029.045,00	12	138.643.600,00	12	149.898.500,00	6	36.162.500,00	50,00	24,12	6,00	36.162.500,00	10,00	10,24	DISPAR	
	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	60.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	2	1.800.000,00	16,67	15,00	2,00	1.800.000,00	3,33	3,00	DISPAR	
	2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	101.750.000,00	11	16.500.000,00	11	16.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1.345.000.000,00	12	262.480.000,00	12	300.000.000,00	6	76.037.729,00	50,00	25,35	6,00	76.037.729,00	10,00	5,65	DISPAR	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	401.349.535,00	100	76.210.000,00	100	77.797.500,00	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100	-	DISPAR	
	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	7	38.000.000,00	1	17.980.000,00	2	48.367.500,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0	-	DISPAR	
	2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	18	363.349.535,00	7	58.230.000,00	5	29.430.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rsentase Pemenuhan Layanan Penduku	100	3.149.927.200,00	100	704.893.000,00	100	1.034.916.000,00	36,11111111	142.654.807,00	36,11	13,78	36,11	142.654.807,00	36,111111	4,53	DISPAR	
	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	751.800.000,00	12	111.000.000,00	12	111.000.000,00	4	20.199.014,00	33,33	18,20	4,00	20.199.014,00	6,67	2,69	DISPAR	
	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan	60	475.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	6	35.500.000,00	50,00	52,99	6,00	35.500.000,00	10,00	7,47	DISPAR	
	2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	1.923.127.200,00	12	526.893.000,00	12	856.916.000,00	3	86.955.793,00	25,00	10,15	3,00	86.955.793,00	5,00	4,52	DISPAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	100%	920.750.000,00	100	225.330.000,00	100	169.660.000,00	35,29	50.458.918,00	35,29	29,74	35,29	50.458.918,00	3529,4118	5,48	DISPAR	
	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	26	509.500.000,00	4	134.870.000,00	5	96.200.000,00	2	26.573.918,00	40,00	27,62	2,00	26.573.918,00	7,69	5,22	DISPAR	
	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	411.250.000,00	12	90.460.000,00	12	73.460.000,00	4	23.885.000,00	33,33	32,51	4,00	23.885.000,00	6,67	5,81	DISPAR	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	PAD Sektor Wisata (Milyar)	3,38%	1.910.452.000,00	2,58	63.100.000,00	2,78	219.700.000,00	2,78	35.823.000,00	100,00	16,31	2,78	35.823.000,00	8224,85	1,88	DISPAR	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		15	1.910.452.000,00	3	63.100.000,00	3	219.700.000,00	3	35.823.000,00	100	16,31	3,00	35.823.000,00	20,00	1,88	DISPAR	
	2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terbangun	6	27.405.500.000,00	0	-	1	109.400.000,00	1	35.823.000,00	100	32,74	1,00	35.823.000,00	16,67	0,13	DISPAR	
	2.03.0004	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terpelihara	60	1.910.452.000,00	12	63.100.000,00	12	110.300.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Orang)	780748 Orang	31.900.000.000,00	95816	5.286.401.800,00	394375	5.742.043.000,00	119631	2.308.533.599,00	30,33	40,20	119631,00	2.308.533.599,00	124,85	7,24	DISPAR	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	50	31.900.000.000,00	100	5.286.401.800,00	100	5.742.043.000,00	100	2.308.533.599,00	100	40,20	100,00	2.308.533.599,00	200,00	7,24	DISPAR	
	2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama dan kemitraan Pariwisata	14	2.450.000.000,00	0	-	1	115.000.000,00	1	5.000.000,00	100	4,35	1,00	5.000.000,00	0,00	0,20	DISPAR	
	2.01.06	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersiarinya Publikasi Pariwisata Pesisir Barat	150	3.400.000.000,00	0	53.400.000,00	1	29.315.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.01.07	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata	11	28.500.000.000,00	2	5.233.001.800,00	2	5.597.728.000,00	2	2.308.533.599,00	100,00	41,24	2,00	2.308.533.599,00	18,18	8,10	DISPAR	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata	50%	1.380.000.000,00	0	-	20	750.609.000,00	8	382.024.950,00	40,00	50,90	8,00	382.024.950,00	1600,00	27,68	DISPAR	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Desa Wisata		1.380.000.000,00	0	-	1	750.609.000,00	1	382.024.950,00	100,00	50,90	1,00	382.024.950,00	0,00	27,68	DISPAR	
	2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tersediannya Pelatihan peningkatan Mutu Produk	4	838.000.000,00	0	176.192.400,00	1	148.519.400,00	1	5.965.000,00	100,00	4,02	1,00	5.965.000,00	0,00	0,71	DISPAR	
	2.01.08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Tersediannya SDM Pariwisata Berdasarkan	10	270.000.000,00	0	-	1	102.089.600,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DISPAR	
	2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Tersediannya Pelatihan SDM Pariwisata yang Berdaya Saing	8	1.380.000.000,00	0	-	1	500.000.000,00	1	382.024.950,00	100,00	76,40	1,00	382.024.950,00	12,50	27,68	DISPAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04.01	Sekretariat Daerah																	
1	04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100%	267.604.023.033	100%	50.273.231.805	100%	99.301.636.799	34%	20.743.157.647	34%	21%	140%	20.743.157.647	61%	52%	Setda	
2	04.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	138.577.500	100%	18.426.000	100%	15.400.000	0%	4.717.500	0%	31%	0%	23.143.500	20%	17%	Setda	
3	04.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	27.715.500	1 Dokumen	4.150.000,00	1,00	7.400.000,00	0 Dokumen	4.072.500,00	0%	55%	2 Dokumen	8.222.500	20%	30%	Setda	
4	04.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	27.715.500	1 Dokumen	3.650.000,00	1,00	2.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	3.650.000	20%	13%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	04.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	27.715.500	1 Dokumen	3.642.000,00	1,00	2.000.000,00	0 Dokumen	645.000,00	0%	32%	2 Dokumen	4.287.000	20%	15%	Setda	
6	04.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	27.715.500	1 Dokumen	3.642.000,00	1,00	2.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	3.642.000	20%	13%	Setda	
7	04.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5	27.715.500	1 Dokumen	3.342.000,00	1,00	2.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	3.342.000	20%	12%	Setda	
8	04.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan, Monev dan Pembuatan Laporan	100%	126.190.336.159	100%	17.528.520.402,00	100%	66.800.861.800	25%	8.771.532.076,00	25%	13%	100%	26.300.052.478	303%	21%	Setda	
9	04.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	60	126.185.740.603	12,00	17.524.200.402,00	12,00	66.796.542.100,00	6,00	8.771.532.076,00	50%	13%	24,00	26.295.732.478	21%	21%	Setda	
10	04.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	1.531.852	12,00	1.440.000,00	12,00	1.439.900,00	6,00	0,00	50%	0%	24,00	1.440.000	94%	94%	Setda	
11	04.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	1.531.852	12,00	1.440.000,00	12,00	1.439.900,00	6,00	0,00	50%	0%	24,00	1.440.000	94%	94%	Setda	
12	04.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	1.531.852	12,00	1.440.000,00	12,00	1.439.900,00	6,00	0,00	50%	0%	24,00	1.440.000	94%	94%	Setda	
13	04.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	3.014.815.500	100%	636.074.637,00	100%	500.000.000	50%	425.356.750,00	50%	85%	35%	1.061.431.387	35%	35%	Setda	
14	04.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Belanja Premi Asuransi untuk Kendaraan Dinas	60	3.014.815.500	12,00	636.074.637,00	12,00	500.000.000,00	6,00	425.356.750,00	50%	85%	24,00	1.061.431.387	35%	35%	Setda	
16	04.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	2.039.264.661	100%	713.273.850,00	100%	195.000.000	33%	45.000.000,00	33%	23%	30%	758.273.850	30%	30%	Setda	
17	04.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	30.000.000	12,00	34.007.400,00	12,00	10.000.000	6,00	0,00	50%	0%	24,00	34.007.400	67%	67%	Setda	
18	04.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	1050	1.930.622.661	210 Stel	398.043.400,00	210,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	310 Stel	398.043.400	20%	20%	Setda	
19	04.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60	108.642.000	12,00	281.223.050,00	12,00	150.000.000,00	6,00	45.000.000,00	50%	30%	24,00	326.223.050	20%	20%	Setda	
20	04.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.806.463.871	100%	3.727.978.834,00	100%	2.230.948.058	50%	1.720.823.767,00	50%	77%	23%	5.448.802.601	23%	134%	Setda	
21	04.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	60	80.514.586	12,00	90.480.000,00	12,00	109.935.000,00	6,00	63.031.500,00	50%	57%	24,00	153.511.500	25%	191%	Setda	
22	04.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik	60	135.802.500	12,00	50.000.000,00	12,00	25.000.000,00	6,00	0,00	50%	0%	24,00	50.000.000	50%	37%	Setda	
23	04.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	188.846.792	12,00	494.754.016,00	12,00	323.704.800,00	6,00	154.756.608,00	50%	48%	24,00	649.510.624	50%	344%	Setda	
24	04.01.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	458.088.993	12,00	256.201.900,00	12,00	85.059.600,00	6,00	33.497.100,00	50%	39%	24,00	289.699.000	50%	63%	Setda	
25	04.01.01.2.06.09	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	60	2.770.371.000	12,00	1.843.383.750,00	12,00	1.140.800.000,00	6,00	958.271.500,00	50%	84%	24,00	2.801.655.250	50%	101%	Setda	
26	04.01.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2.172.840.000	12,00	993.159.168,00	12,00	546.448.658,00	6,00	511.267.059,00	50%	94%	24,00	1.504.426.227	50%	69%	Setda	
27	04.01.01.2.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	523.958.637	100%	1.835.919.900,00	100%	897.949.750	50%	20.600.000,00	50%	2%	25%	1.856.519.900	25%	28%	Setda	
28	04.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	36	2.507.940.000	12,00	1.710.200.000,00	12,00	835.980.000	6,00	0,00	50%	0%	24,00	1.710.200.000	0%	0%	Setda	
30	04.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	60	523.958.637	12,00	125.719.900,00	12,00	23.625.000	6,00	20.600.000,00	50%	87%	24,00	146.319.900	25%	28%	Setda	
31	04.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	36 0		12,00	0,00	12,00	38.344.750	6,00	0,00	50%	0%	24,00	0	25%	0	Setda	
32	04.01.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	95.137.756.105	12 Bulan	19.153.494.941,00	12 Bulan	22.063.360.000	50%	6.886.707.585,00	50%	31%	12,00	26.040.202.526	25%	49%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
33	04.01.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	3.618.821.725	12,00	1.696.022.023,00	12,00	1.950.000.000,00	6,00	899.262.585,00	50%	46%	24,00	2.595.284.608	25%	72%	Setda	
34	04.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Volume Penyediaan Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	60	3.324.445.200	12,00	870.000.000,00	12,00	956.000.000,00	6,00	761.600.000,00	50%	80%	24,00	1.631.600.000	25%	49%	Setda	
35	04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Terlaksana dengan Baik	60	88.194.489.180	12,00	16.587.472.918,00	12,00	19.157.360.000,00	6,00	5.225.845.000,00	50%	27%	24,00	21.813.317.918	25%	25%	Setda	
36	04.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.161.335.870	100%	2.269.539.266,00	100%	2.415.080.000	50%	868.743.261,00	50%	36%	25%	3.138.282.527	25%	209%	Setda	
37	04.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	6.094.816.200	12,00	864.425.438,00	12,00	826.515.000,00	6,00	320.164.807,00	50%	39%	24,00	1.184.590.245	25%	19%	Setda	
38	04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	4.182.173.790	12,00	938.712.432,00	12,00	836.845.000,00	6,00	265.393.454,00	50%	32%	24,00	1.204.105.886	25%	29%	Setda	
39	04.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	60	851.753.280	12,00	364.081.846,00	12,00	327.000.000,00	6,00	148.055.000,00	50%	45%	24,00	512.136.846	25%	60%	Setda	
40	04.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	32.592.600	12,00	102.319.550,00	12,00	424.720.000,00	6,00	135.130.000,00	50%	32%	24,00	237.449.550	25%	729%	Setda	
41	04.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	3.132.808.473	100%	576.039.051,00	100%	711.346.000	38%	255.310.121,00	38%	36%	27%	831.349.172	27%	32%	Setda	
42	04.01.01.2.11.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60	933.800.261	12,00	166.879.673,00	12,00	347.346.000,00	6,00	95.633.730,00	50%	28%	24,00	262.513.403	20%	28%	Setda	
43	04.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36	152.627.500	12,00	16.359.378,00	12,00	25.000.000,00	6,00	9.676.391,00	50%	39%	24,00	26.035.769	20%	17%	Setda	
44	04.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	140	416.750.712	28 stel	92.800.000,00	28,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	92.800.000	20%	22%	Setda	
45	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60	1.629.630.000	12,00	300.000.000,00	12,00	300.000.000,00	6,00	150.000.000,00	50%	50%	24,00	450.000.000	20%	28%	Setda	
46	04.01.01.2.11.02	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi dalam Proses Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	100	8.190.206.400	100%	1.558.132.024,00	100%	1.412.417.690	50%	791.531.990,00	50%	56%	20%	2.349.664.014	20%	27%	Setda	
47	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	60	3.788.573.600	12,00	710.582.032,00	12,00	767.334.400,00	6,00	440.626.400,00	50%	57%	24,00	1.151.208.432	20%	30%	Setda	
48	04.01.01.2.11.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	60	2.783.635.100	12,00	545.104.732,00	12,00	580.334.400,00	6,00	309.214.400,00	50%	53%	24,00	854.319.132	20%	31%	Setda	
49	04.01.01.2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	60	1.617.997.700	12,00	302.445.260,00	12,00	64.748.890,00	6,00	41.691.190,00	50%	64%	24,00	344.136.450	20%	21%	Setda	
50	04.01.01.2.12.01	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	3.462.708.437	100%	283.947.387,00	100%	252.532.100,00	10%	78.884.858,00	10%	31%	100%	362.832.245	100%	15%	Setda	
51	04.01.01.2.12.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250	1.025.483.733	50 Buku	64.624.350,00	50,00	65.765.000,00	10 Buku	22.713.858,00	0%	35%	100 Buku	87.338.208	20%	9%	Setda	
52	04.01.01.2.12.03	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	250	1.720.717.570	50 buku	95.994.200,00	50,00	75.793.100,00	10 buku	26.550.100,00	0%	35%	100 buku	122.544.300	20%	7%	Setda	
53	04.01.01.2.13	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	275	303.449.164	55 buku	97.984.837,00	55,00	87.702.000,00	10 buku	22.827.400,00	0%	26%	105 buku	120.812.237	18%	40%	Setda	
54	04.01.01.2.13.01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	304.415.970	1 buku	17.344.000,00	1,00	16.403.000,00	0 buku	0,00	0%	0%	2 buku	17.344.000	20%	6%	Setda	
55	04.01.01.2.13.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintaha Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintaha Daerah	60	108.642.000	12,00	8.000.000,00	12,00	6.869.000,00	6,00	6.793.500,00	50%	99%	24,00	14.793.500	20%	14%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
56	04.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	8.805.791.420	100%	1.971.885.513,00	100%	1.806.741.401	0%	873.949.739,00	0%	48%	100%	2.845.835.252	100%	30%	Setda	
57	04.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	5	3.928.276.348	1 kegiatan	989.111.980,00	1,00	665.477.000,00	0 kegiatan	324.813.323,00	0%	49%	2 kegiatan	1.313.925.303	20%	33%	Setda	
58	04.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	3.074.057.872	1 kegiatan	771.281.949,00	1,00	1.006.200.000,00	0 kegiatan	478.566.606,00	0%	48%	2 kegiatan	1.249.848.555	20%	41%	Setda	
59	04.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	1.803.457.200	1 kegiatan	211.491.584,00	1,00	135.064.401,00	0 kegiatan	70.569.810,00	0%	52%	2 kegiatan	282.061.394	20%	16%	Setda	
60		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100%	41.401.178.118	100%	6.406.201.616,00	100%	7.685.448.449	19%	3.125.828.577,00	19%	31%	100%	9.532.030.193	18%	25%	Setda	
61	04.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	4.361.017.533	100%	1.023.384.439,00	100%	916.235.350	44%	345.265.004,00	44%	38%	100%	1.368.649.443	15%	27%	Setda	
62	04.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	130	2.810.533.230	26 Kegiatan	789.617.400,00	26,00	635.755.750,00	15 Kegiatan	225.491.100,00	58%	35%	52 Kegiatan	1.015.108.500	4%	36%	Setda	
63	04.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20	711.876.705	4 Laporan	111.316.619,00	4,00	140.205.250,00	1 Laporan	34.606.954,00	25%	25%	9 Laporan	145.923.573	20%	20%	Setda	
64	04.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	838.607.598	20 buku	122.450.420,00	20,00	140.274.350,00	10 buku	85.166.950,00	50%	61%	40 buku	207.617.370	20%	25%	Setda	
65	04.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	32.600.730.547	100%	4.263.051.636,00	100%	5.854.410.863	11%	2.582.841.500,00	11%	44%	100%	6.845.893.136	18%	21%	Setda	
66	04.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20	8.512.109.390	4 kegiatan	1.235.838.436,00	4,00	1.621.465.273,00	1 kegiatan	810.456.000,00	25%	50%	8 kegiatan	2.046.294.436	20%	24%	Setda	
67	04.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	160	23.735.993.127	32 Kegiatan	2.995.554.000,00	32,00	4.161.884.190,00	3 Kegiatan	1.753.985.500,00	9%	42%	55 Kegiatan	4.749.539.500	14%	20%	Setda	
68	04.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	352.628.030	1 kegiatan	31.659.200,00	1,00	71.061.400,00	0 kegiatan	18.400.000,00	0%	26%	2 kegiatan	50.059.200	20%	14%	Setda	
69	04.01.02.2.02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hukum	100%	3.879.815.096	100%	1.021.270.297,00	100%	827.620.236	0%	178.319.658,00	0%	22%	100%	1.199.589.955	20%	31%	Setda	
70	04.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	15	2.470.828.165	3 laporan	534.573.289,00	3,00	405.014.000,00	0 laporan	101.868.361,00	0%	25%	10 laporan	636.441.650	20%	26%	Setda	
71	04.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	750	949.194.433	150 peserta	429.424.908,00	150,00	381.795.236,00	0 peserta	60.728.797,00	0%	16%	300 peserta	490.153.705	20%	52%	Setda	
72	04.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	10	459.792.498	2 dokumen	57.272.100,00	2,00	40.811.000,00	0 dokumen	15.722.500,00	0%	39%	4 dokumen	72.994.600	20%	16%	Setda	
73	04.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	559.614.942	100%	98.495.244,00	100%	87.182.000	0%	19.402.415,00	0%	22%	100%	117.897.659	20%	21%	Setda	
74		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	5	559.614.942	1 kegiatan	98.495.244,00	1,00	87.182.000,00	0 kegiatan	19.402.415,00	0%	22%	2 kegiatan	117.897.659	20%	21%	Setda	
75	04.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	19.500.780.772	100%	2.628.378.767,00	100%	1.596.748.327	13%	445.159.600,00	13%	28%	75%	3.073.538.367	0%	16%	Setda	
76	04.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100%	6.070.612.933	100%	568.790.110,00	100%	308.780.482	0%	35.989.900,00	0%	12%	100%	604.780.010	#REF!	10%	Setda	
78	04.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	5.237.569.979	1 kegiatan	525.765.190,00	1,00	227.101.822,00	0 kegiatan	32.950.500,00	0%	15%	2 kegiatan	558.715.690	40%	11%	Setda	
79	04.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi KUR	5	833.042.954	1 kegiatan	43.024.920,00	1,00	81.678.660,00	0 kegiatan	3.039.400,00	0%	4%	2 kegiatan	46.064.320	40%	6%	Setda	
80	04.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	8.211.236.235	100%	1.494.190.032,00	100%	611.887.027	0%	246.712.144,00	0%	40%	100%	1.740.902.176	40%	21%	Setda	
81	04.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	15	3.918.831.014	3 dokumen	582.712.832,00	3,00	123.293.610,00	1 dokumen	59.897.844,00	0%	49%	6 dokumen	642.610.676	40%	16%	Setda	
82	04.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15	2.769.632.234	3 dokumen	633.182.500,00	3,00	168.491.000,00	1 dokumen	61.435.500,00	0%	36%	6 dokumen	694.618.000	40%	25%	Setda	
83	04.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	1.522.772.987	4 dokumen	278.294.700,00	4,00	320.102.417,00	1 dokumen	125.378.800,00	0%	39%	8 dokumen	403.673.500	40%	27%	Setda	
84	04.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	4.190.624.569	100%	502.805.785,00	100%	535.897.650	0%	146.026.800,00	0%	27%	0%	648.832.585	0%	15%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
85	04.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1300	960.029.762	200 Paket	119.407.485,00	200,00	104.009.600,00	100 Paket	72.954.300,00	0%	70%	500 Paket	192.361.785	38%	20%	Setda	
86	04.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1300	2.344.597.569	200 Paket	348.325.300,00	200,00	368.587.400,00	0Paket	59.067.700,00	0%	16%	500 Paket	407.393.000	38%	17%	Setda	
87	04.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	885.997.238	10 peserta	35.073.000,00	10,00	63.300.650,00	0 peserta	14.004.800,00	0%	22%	60 peserta	49.077.800	38%	6%	Setda	
88	04.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	1.028.307.035	100%	62.592.840,00	100%	140.183.168	50%	16.430.756,00	50%	12%	100%	79.023.596	13%	8%	Setda	
89	04.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	60	590.055.560	12,00	41.277.720,00	12,00	55.876.192,00	6,00	12.689.756,00	50%	23%	24,00	53.967.476	40%	9%	Setda	
90	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan	TerlaksananyaKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan	60	226.676.180	12,00	16.008.960,00	12,00	47.672.988	6,00	1.713.500,00	50%	4%	24,00	17.722.460	40%	8%	Setda	
91	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60	211.575.295	12,00	5.306.160,00	12,00	36.633.988	6,00	2.027.500,00	50%	6%	24,00	7.333.660	40%	3%	Setda	
92	4.01.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	100%	69.344.013	100%	31.116.224,00	100%	34.029.802	50%	11.587.198,00	50%	34%	50%	42.703.422	40%	62%	Setda	
93	4.01.24.2.24	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip	100%	46.229.342	100%	31.116.224,00	100%	21.514.198	50%	5.219.700,00	50%	24%	100%	36.335.924	40%	79%	Setda	
94	4.01.24.2.24.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	60	23.114.671	12,00	13.840.520,00	12,00	10.263.398	6,00	5.219.700,00	50%	51%	24,00	19.060.220	40%	82%	Setda	
95	4.01.24.2.24.02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	60	23.114.671	12,00	17.275.704,00	12,00	11.250.800	6,00	0,00	50%	0%	24,00	17.275.704	40%	75%	Setda	
	4.01.24.2.24	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip					100%	12.515.604	25%	6.367.498,00	25%	51%	100%	6.367.498	#####	25%	Setda	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota					12,00	12.515.604	6,00	6.367.498,00	50%	51%	100%	6.367.498	#####	600%	Setda	
96	04.01.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	100%	340.152.661	100%	106.714.031,00	100%	145.000.000	0%	38.146.050,00	0%	26%	100%	144.860.081	#DIV/0!	43%	Setda	
97	4.01.02.2.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		100%	340.152.661	100%	66.218.831,00	100%	40.000.000	0%	7.752.000,00	0%	19%	100%	73.970.831	20%	22%	Setda	
98	4.01.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	5	81.090.380	1 kegiatan	46.054.831,00	1,00	18.000.000	0 kegiatan	2.880.000,00	0%	16%	2 kegiatan	48.934.831	20%	60%	Setda	
99	4.01.02.1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka	5	259.062.281	1 kegiatan	20.164.000,00	1,00	22.000.000	0 kegiatan	4.872.000,00	0%	22%	2 kegiatan	25.036.000	20%	10%	Setda	
100		Pembudayaan Gemar Membaca	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca	5		100%	40.495.200,00	1,00	105.000.000	0%	30.394.050,00	0%	0%	100%	70.889.250	20%	100%	Setda	
101		Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	terlaksananya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5	87.732.700	1 kegiatan	40.495.200,00	1,00	105.000.000	0 kegiatan	30.394.050,00	0%	29%	2 kegiatan	70.889.250	40%	81%	Setda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02	Sekretariat DPRD		95	175.380.414.495	90	30.843.990.241		35.179.712.899	92,5	16.407.132.663		47%	93	16.407.132.663	97%	9%		
1	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang kinerja perangkat daerah	90	106.905.713.045	90	18.805.877.097	90	21.381.142.609	34	8.081.808.702	38%	38%	34	8.081.808.702	38%	8%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu.	100	62.000.000	100	6.400.000	100	12.400.000	-	5.598.000	0%	45%	-	5.598.000	0%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	37.000.000	2	1.400.000	2	7.400.000	1	3.435.000	50%	46%	1	3.435.000	10%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	10	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	2.163.000	50%	43%	1	2.163.000	10%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Dae	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100	9.172.679.500	100	1.639.453.873	100	1.834.535.900	17	916.051.561	17%	50%	17	916.051.561	17%	10%	Setwan	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	70	9.145.179.500	14	1.633.953.873	14	1.829.035.900	8	914.060.561	57%	50%	8	914.060.561	11%	10%	Setwan	
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	10	10.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	1	991.000	50%	50%	1	991.000	10%	10%	Setwan	
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100%	100%	1	1.000.000	20%	20%	Setwan	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat D	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	2.500.000.000	100	306.000.000	100	500.000.000	-	67.500.000	0%	14%	-	67.500.000	0%	3%	Setwan	
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan/Skil Sumber daya Aparatur	30	2.500.000.000	6	306.000.000	6	500.000.000	1	67.500.000	17%	14%	1	67.500.000	3%	3%	Setwan	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	9.203.866.360	100	1.676.721.150	100	1.840.773.272	3	394.954.000	3%	21%	3	394.954.000	3%	4%	Setwan	
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen intalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Tercapainya Kondisi Listrik yang baik di Kantor	30	162.990.660	5	29.252.900	6	32.598.132	3	15.120.000	50%	46%	3	15.120.000	10%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30	108.864.000	6	21.420.000	6	21.772.800	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Aktivitas	30	228.130.000	6	45.680.000	6	45.626.000	1	2.268.000	17%	5%	1	2.268.000	3%	1%	Setwan	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengad	Jumlah ATK	60	1.364.815.250	6	225.695.850	6	272.963.050	2	85.284.100	33%	31%	2	85.284.100	3%	6%	Setwan	
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Informasi melalui bahan bacaan dan Perundang-undangan	30	4.250.000.000	6	749.300.000	6	850.000.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman	55	1.362.500.000	11	337.324.000	11	272.500.000	5	145.500.000	45%	53%	5	145.500.000	9%	11%	Setwan	
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi di luar kantor	30	1.726.566.450	6	268.048.400	6	345.313.290	3	146.781.900	50%	43%	3	146.781.900	10%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	1.248.000.000	100	461.804.031	100	249.600.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	30	498.000.000	4	223.046.429	6	99.600.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kan	30	750.000.000	6	238.757.602	6	150.000.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	6.641.534.000	100	648.090.832	100	1.328.306.800	-	153.830.473	0%	12%	-	153.830.473	0%	2%	Setwan	
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan	30	1.440.000.000	5	286.002.832	6	288.000.000	2	101.607.573	33%	35%	2	101.607.573	7%	7%	Setwan	
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30	495.000.000	5	57.000.000	6	99.000.000	2	39.500.000	33%	40%	2	39.500.000	7%	8%	Setwan	
	4.02.01.2.08.04	Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Tagihan	60	4.706.534.000	12	305.088.000	12	941.306.800	1	12.722.900	8%	1%	1	12.722.900	2%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik	100	3.659.399.190	100	622.025.210	100	731.879.838	-	127.380.000	0%	17%	-	127.380.000	0%	3%	Setwan	
	4.02.01.2.09.01	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	35	1.078.500.000	7	218.620.000	7	215.700.000	3	85.020.000	43%	39%	3	85.020.000	9%	8%	Setwan	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	60	1.770.190.190	9	250.150.210	12	354.038.038	1	11.500.000	8%	3%	1	11.500.000	2%	1%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	810.709.000	12	153.255.000	12	162.141.800	2	30.860.000	17%	19%	2	30.860.000	3%	4%	Setwan	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	73.255.883.995	100	13.234.042.361	100	14.651.176.799	20	6.335.854.668	20%	43%	20	6.335.854.668	20%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	70	68.503.384.995	14	12.657.923.536	14	13.700.676.999	8	6.335.854.668	57%	46%	8	6.335.854.668	11%	9%	Setwan	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	750	2.750.000.000	125	296.250.000	150	550.000.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	125	2.002.499.000	25	279.868.825	25	400.499.800	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	1.162.350.000	100	211.339.640	100	232.470.000	-	80.640.000	0%	35%	-	80.640.000	0%	7%	Setwan	
	4.02.01.2.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/kab/kota	300	-	-	-	60	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	#DIV/0!	Setwan	
	4.02.01.2.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	300	1.162.350.000	54	211.339.640	60	232.470.000	21	80.640.000	35%	35%	21	80.640.000	7%	7%	Setwan	
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).	100	68.474.701.450	100	12.038.113.144	100	13.798.570.290	21	8.325.323.961	21%	60%	21	8.325.323.961	21%	12%	Setwan	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan pembentukan perda dan peraturan DPRD yang sesuai regulasi	100	2.800.500.000	-	338.020.960	100	560.100.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	20	2.800.500.000	4	338.020.960	4	560.100.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	2.157.640.000	100	405.170.000	100	431.528.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	314.090.000	6	62.898.000	6	62.818.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	314.090.000	6	62.898.000	6	62.818.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	456.030.000	6	91.286.000	6	91.206.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	456.030.000	6	91.286.000	6	91.206.000	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	45	617.400.000	9	96.802.000	9	123.480.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100	518.150.000	-	-	100	103.630.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50	103.630.000	-	-	10	20.726.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50	103.630.000	-	-	10	20.726.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50	103.630.000	-	-	10	20.726.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50	103.630.000	-	-	10	20.726.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50	103.630.000	-	-	10	20.726.000	-	-	0%	0,0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	100	12.934.485.050	100	2.364.484.200	100	2.586.897.010	2	45.424.000	2%	2%	2	45.424.000	2%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5	1.545.475.000	-	-	1	309.095.000	-	-	0%	0,0%					Setwan	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	25	10.012.660.050	5	2.020.250.800	5	2.002.532.010	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Setwan	
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	20	-	0	0	4	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	#DIV/0!	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	1.376.350.000	6	344.233.400	6	275.270.000	1	45.424.000	17%	17%	1	45.424.000	3%	3%	Setwan	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan pokir yang terealisasi	100	4.562.425.000	100	1.080.596.045	100	912.485.000	17	538.866.000	17%	59%	17	538.866.000	17%	12%	Setwan	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	180	1.150.000.000	26	91.913.700	36	230.000.000	25	157.847.500	69%	69%	25	157.847.500	14%	14%	Setwan	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	15	3.412.425.000	3	988.682.345	3	682.485.000	1	381.018.500	33%	56%	1	381.018.500	7%	11%	Setwan	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintergrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Tahunan DPRD	100	46.019.651.400	100	7.849.841.939	100	9.203.930.280	30	7.741.033.961	30%	84%	30	7.741.033.961	30%	17%	Setwan	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	140	45.719.651.400	28	7.821.421.059	28	9.143.930.280	24	7.723.873.961	86%	84%	24	7.723.873.961	17%	17%	Setwan	
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Mus	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	60	300.000.000	12	28.420.880	12	60.000.000	3	17.160.000	25%	29%	3	17.160.000	5%	6%	Setwan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	05.01	Perencanaan		100%	50.575.576.691				6.139.985.500		2.437.113.589							Bappelitbangda	
1	05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90%	18.959.936.687	90	7.418.622.074	90	4.195.922.500	46,09	1.640.895.639	51,21	39,11	46,09	1.640.895.639	51,214986	8,7	Bappelitbangda	
	05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	183.013.000	100	86.080.200	100	24.900.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	10	31.310.000	4	8.050.600	2	7.400.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	5	19.156.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5	18.524.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	5	24.976.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5	24.800.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40.122.000	4	8.304.000	2	5.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5	24.125.000	2	8.184.000	1	2.500.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.718.695.570		4.347.553.156	100	2.888.626.500	20,59	1.210.784.648	20,59	41,92	20,58823529	1.210.784.648	20,588235	8,83	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	13.626.433.570	28	4.319.479.956	14	2.883.126.500	7	1.210.784.648	50,00	42,00	7	1.210.784.648	10	8,89	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD	5	27.580.000	2	8.260.400	1	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.05.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan /Triwulan /Semester SKPD	90	37.412.000	36	11.668.400	18	2.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5	27.270.000	1	8.144.400	1	1.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	285.000.000		158.846.500	100	100.000.000	100	-	100,00	0,00	100	-	100	0,00	Bappelitbangda	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Olahraga	50	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0		0		Bappelitbangda	
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	30	200.000.000	22	158.846.500	10	100.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2.544.473.117	100	1.217.369.175	100	760.436.000	47,92	230.163.372	47,92	30,27	47,91666667	230.163.372	47,916667	9,05	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktifitas	5	159.661.457	2	49.982.000	1	25.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	752.490.057	24	243.592.000	12	122.436.000	6	55.554.150	50,00	45,37	6	55.554.150	10	7,38	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	428.484.421	24	180.000.000	12	132.000.000	6	40.000.000	50,00	30,30	6	40.000.000	10	9,34	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makan dan Minum	55	56.111.055	22	22.000.000	11	11.000.000	5	4.000.000	45,45	36,36	5	4.000.000	9,09	7,13	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Diluar Kantor	60	1.147.726.127	24	721.795.175	12	470.000.000	6	130.609.222	50,00	27,79	6	130.609.222	10	11,38	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Prasarana Pendukung kinerja	100%	34.000.000	100	830.518.000	100	60.750.000	100	57.750.000	100,00	95,06	100	57.750.000	10000	169,85	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	30	34.000.000	18	830.518.000	1	60.750.000	1	57.750.000	100,00	95,06	1	57.750.000	3,3333333	169,85	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1.424.995.000	100	475.000.000	100	216.000.000	50	92.500.000	50,00	42,82	50	92.500.000	50	6,49	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan Dan Kendaraan Dinas	34	1.250.000.000	8	475.000.000	4	216.000.000	2	92.500.000	50,00	42,82	2	92.500.000	5,88	7,40	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Yang Dalam Kondisi Baik	100%	769.760.000	100	303.255.043	100	145.210.000	40,00	49.697.619	40,00	34,22	40	49.697.619	40	6,46	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	60	709.110.000	24	292.235.043	12	133.850.000	6	49.697.619	50,00	37,13	6	49.697.619	10	7,01	Bappelitbangda	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	20	60.650.000	6	11.020.000	3	11.360.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran	100%	15.939.179.519	100	2.497.188.812	100	1.083.720.000	100	505.946.300	100,00	46,69	100	505.946.300	100	3,17	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	8.736.127.618	100	1.591.433.500	100	825.428.000	28,57	464.017.700	28,57	56,22	28,57142857	464.017.700	28,571429	5,31	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPI Bupati Pertahun dan Rantek RPJMD	7	1.058.427.934	3	294.353.600	2	165.714.000	1	74.402.800	50,00	44,90	1	74.402.800	14,285714	7,03	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	5	1.481.760.339	1	152.093.600	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD Yang Dilaksanakan	5	1.643.589.723	2	407.542.300	1	267.217.000	1	257.508.600	100,00	96,37	1	257.508.600	20	15,67	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya LAKIP Kabupaten Pertahun	5	1.022.312.818	2	184.082.200	1	64.823.000	0	47.917.000	0,00	73,92	0	47.917.000	0	4,69	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia nya Dokumen Perencanaan ; RKPD dan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Oleh Peraturan	10	2.082.250.649	2	553.361.800	3	327.674.000	0	84.189.300	0,00	25,69	0	84.189.300	0	4,04	Bappelitbangda	
	5.01 . 02 . 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data Dan informasi Pembangunan Daerah	100%	2.716.647.087	100	374.637.850	100	68.148.000	0	5.005.000	0,00	7,34	0	5.005.000	0	0,18	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia nya Sistem Data Dan Statistik Yang terintegrasi	5	1.101.851.769	2	221.517.800	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	5	785.820.840	2	153.120.050	1	68.148.000	0	5.005.000	0,00	7,34	0	5.005.000	0	0,64	Bappelitbangda	
	5.01 . 02 . 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistinsi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	2.821.433.199	100	531.117.462	100	190.144.000	0	36.923.600	0,00	19,42	0	36.923.600	0	1,31	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Usulan DAK	5	852.954.632	3	210.044.131	1	73.547.000	0	13.300.100	0,00	18,08	0	13.300.100	0	1,56	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan DAK Fisik dan Evaluasi RKPD	10	1.968.478.567	4	321.073.331	3	116.597.000	0	23.623.500	0,00	20,26	0	23.623.500	0	1,20	Bappelitbangda	
	5.01 . 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistinsi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat	95%	15.676.460.485	95	2.478.398.476	95	860.343.000	95	290.271.650	100,00	33,74	95	290.271.650	10000	1,85	Bappelitbangda	
	5.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata Rata capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70%	8862167840	70	1.309.992.976	70	454.395.000	30	150.938.050	42,86	33,22	30	150.938.050	42,857143	1,70	Bappelitbangda	
	5.01 .03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RAD SDGS	5	858.792.804	2	208.613.100	1	84.642.000	0	20.963.450	0,00	24,77	0	20.963.450	0	2,44	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral PDT Dan Transmigrasi	60	856.065.700	24	205.006.004	12	81.681.000	6	35.268.950	50,00	43,18	6	35.268.950	10	4,12	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Penaggulangan Kemiskinan Daerah(LP2KD)	5	941.759.035	2	246.347.950	1	90.885.000	0	34.459.200	0,00	37,92	0	34.459.200	0	3,66	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAN HAM	5	718894403	2	189.902.800	1	57.335.000	0	1.971.250	0,00	3,44	0	1.971.250	0	0,27	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksana RAD-PG	5	731.610.046	2	218.879.000	1	64.355.000	0	15.561.250	0,00	24,18	0	15.561.250	0	2,13	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya	60	811.082.701	24	241.244.122	12	75.497.000	6	42.713.950	50,00	56,58	6	42.713.950	10	5,27	Bappelitbangda	
	5.01 . 03 . 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian SDA (Sumber daya Alam)	70%	1.438.901.548	70	429.614.400	70	101.500.000	0,00	42.760.000	0,00	42,13	0	42.760.000	0	2,97	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Updating Potensi Ekonomi Daerah	5	719.882.879	2	214.765.400	1	101.500.000	0	42.760.000	0,00	42,13	0	42.760.000	0	5,94	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Keoordinasi Lintas Sektor Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga	60	719.018.669	24	214.849.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Insfatruktur Dan Kewilayahan	70%	5.375.391.097	70	738.791.100	70	304.448.000	35	96.573.600	50,00	31,72	35	96.573.600	50	1,80	Bappelitbangda	
	5.01 .03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Program air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	60	1.027.066.230	24	262.917.800	12	101.624.000	6	33.899.000	50,00	33,36	6	33.899.000	10	3,30	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	60	877.630.047	24	259.392.900	12	101.421.000	6	33.027.000	50,00	32,56	6	33.027.000	10	3,76	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Keoordinasi Bidang Kewilayahan	60	761.455.947	24	216.480.400	12	101.403.000	6	29.647.600	50,00	29,24	6	29.647.600	10	3,89	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02	URUSAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN		100	150.694.074.022	293	160.195.094.255	100	190.309.514.291	44	84.086.795.024	44	44	337	244.281.889.279	67	2	BPKAD	
A	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90	60.229.718.932	186	10.007.634.550	440	22.431.935.966	53	5.476.847.074	12	24	239	15.484.481.624	266	26	BPKAD	
I	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	67.000.000	13	15.495.000	21	15.499.400	-	-	-	-	13	15.495.000	13	23	BPKAD	
1	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	5	10.000.000	1	2.000.000	1	1.999.900	-	0	-	-	1	2.000.000	20	20	BPKAD	
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	8	8.000.000	0	2.000.000	2	1.999.900	-	0	-	-	-	2.000.000	-	25	BPKAD	
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	8.000.000	0	2.000.000	2	1.999.900	-	0	-	-	-	2.000.000	-	25	BPKAD	
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8	8.000.000	0	2.000.000	2	1.999.900	-	0	-	-	-	2.000.000	-	25	BPKAD	
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	8.000.000	0	2.000.000	2	1.999.900	-	0	-	-	-	2.000.000	-	25	BPKAD	
2	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	60	25.000.000	12	3.495.000	12	3.500.000	-	0	-	-	12	3.495.000	20	14	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4	8.000.000	0	2.000.000	1	1.999.900	-	0	-	-	-	2.000.000	-	25	BPKAD	
II	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	49.675.425.794	18	7.660.864.432	100	20.787.845.466	6	4.728.281.329	6	23	24	12.389.145.761	24	25	BPKAD	
3	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji,Tunjangan PNS, luran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan luran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat	70	49.637.925.794	14	7.655.864.432	13	20.782.845.766	6	4.728.281.329	46	23	20	12.384.145.761	29	25	BPKAD	
4	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.500.000	1	2.000.000	1	1.999.850	-	-	-	-	1	2.000.000	20	16	BPKAD	
5	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	12.500.000	2	2.000.000	2	1.999.900	-	-	-	-	2	2.000.000	20	16	BPKAD	
6	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	12.500.000	1	1.000.000	1	999.950	-	-	-	-	1	1.000.000	20	8	BPKAD	
III	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100	1.200.000.000	23	499.400.000	100	300.000.000	12	164.920.000	12	55	35	664.320.000	35	55	BPKAD	
7	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	126	1.200.000.000	23	499.400.000	23	300.000.000	12	164.920.000	52	55	35	664.320.000	28	55	BPKAD	
IV	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	6.138.000.000	48	1.110.107.391	100	784.271.050	17	304.062.100	17	39	65	1.414.169.491	65	23	BPKAD	
9	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	220.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	-	-	-	-	1	25.000.000	20	11	BPKAD	
10	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60	2.500.000.000	12	590.152.000	12	327.771.050	6	195.645.850	50	60	18	785.797.850	30	31	BPKAD	
11	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	668.000.000	12	72.000.000	12	43.000.000	-	-	-	-	12	72.000.000	24	11	BPKAD	
12	5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	1.250.000.000	11	144.382.000	11	188.500.000	5	49.950.000	45	26	16	194.332.000	29	16	BPKAD	
13	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.500.000.000	12	278.573.391	12	200.000.000	6	58.466.250	50	29	18	337.039.641	30	22	BPKAD	
V	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan mesin	100	240.000.000	6	309.211.193	100	128.625.000	8	125.250.000	8	97	14	434.461.193	14	181	BPKAD	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	240.000.000	6	309.211.193	8	128.625.000	8	125.250.000	100	97	14	434.461.193	127	181	BPKAD	
VI	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	2.074.380.000	65	240.008.000	100	261.201.550	9	118.097.100	9	45	74	358.105.100	74	17	BPKAD	
15	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.915.000.000	5	221.160.000	9	213.000.000	3	114.000.000	33	54	8	335.160.000	27	18	BPKAD	
16	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	159.380.000	60	18.848.000	12	48.201.550	6	4.097.100	50	8	66	22.945.100	110	14	BPKAD	
VI	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.074.913.138	19	172.548.534	19	154.493.500	9	36.236.545	47	23	28	208.785.079	28	19	BPKAD	
17	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	35	696.233.138	7	120.673.534	7	140.350.000	3	34.572.545	43	25	10	155.246.079	29	22	BPKAD	
19	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	378.680.000	12	51.875.000	12	14.143.500	6	1.664.000	50	12	18	53.539.000	30	14	BPKAD	
B	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	77.704.007.090	103	147.899.931.062	100	165.514.829.625	33	77.910.460.330	33	47	136	225.810.391.392	136	291	BPKAD	
I	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	100	21.788.585.780	24	2.860.790.538	100	2.694.558.800	33	876.547.589	33	33	57	3.737.338.127	57	17	BPKAD	
20	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	10	2.456.983.671	2	331.108.750	2	289.896.150	1	242.191.889	50	84	3	573.300.639	30	23	BPKAD	
21	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	10	2.532.922.000	2	304.233.100	2	289.896.150	-	25.679.000	-	9	2	329.912.100	20	13	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
22	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552.150.300	1	69.098.260	1	50.305.500	-	-	-	-	1	69.098.260	20	13	BPKAD	
23	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552.150.300	1	96.112.260	1	50.305.500	1	41.335.500	100	82	2	137.447.760	40	25	BPKAD	
24	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1.084.959.009	1	36.823.620	1	50.429.400	1	42.959.400	100	85	2	79.783.020	40	7	BPKAD	
25	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1.116.925.000	1	40.906.514	1	50.429.400	-	-	-	-	1	40.906.514	20	4	BPKAD	
26	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5.250.090.000	2	833.576.560	2	697.946.650	1	101.107.900	50	14	3	934.684.460	30	18	BPKAD	
27	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5.250.840.000	2	859.899.724	2	736.646.650	1	397.050.900	50	54	3	1.256.950.624	30	24	BPKAD	
28	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi Bidang Anggaran	10	2.991.565.500	12	289.031.750	2	478.703.400	-	26.223.000	-	5	12	315.254.750	120	11	BPKAD	
II	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	6.142.730.600	60	2.944.786.870	100	1.760.660.950	37	658.484.689	37	37	97	3.603.271.559	9.740	59	BPKAD	
29	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Kasda, Rekap Dokumen SP2D dan Daftar Gaji Pemerintah Daerah	180	1.749.125.000	36	1.682.778.925	36	518.258.050	18	222.302.600	50	43	54	1.905.081.525	30	109	BPKAD	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8	588.730.000	0	139.792.259	2	147.182.500	1	63.452.900	50	43	1	203.245.159	13	35	BPKAD	
30	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	60	1.829.545.600	12	336.208.995	12	298.959.650	6	119.287.789	50	40	18	455.496.784	30	25	BPKAD	
31	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Laporan Konsinyering dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	60	1.975.330.000	12	420.227.800	12	375.523.500	6	120.233.150	50	32	18	540.460.950	30	27	BPKAD	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	280	1.682.949.000	0	365.778.891	70	420.737.250	20	133.208.250	29	32	20	498.987.141	7	30	BPKAD	
III	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	4.684.237.600	6	718.488.708	100	674.655.800	56	375.655.360	56	56	62	1.094.144.068	62	23	BPKAD	
32	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi APBD Per Semester	10	362.455.000	2	89.889.616	2	154.474.100	-	40.977.550	-	27	2	130.867.166	20	36	BPKAD	
33	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	2.990.422.000	1	440.433.900	1	332.690.500	1	272.608.560	100	82	2	713.042.460	40	24	BPKAD	
34	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	1.180.175.000	2	188.165.192	2	187.491.200	2	62.069.250	100	33	4	250.234.442	40	21	BPKAD	
35	5.02.02.2.03.09	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah LaporanKoordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	151.185.600	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	25	-	BPKAD	
IV	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	100	45.088.453.110	13	140.974.789.454	100	160.199.650.925	47	75.901.467.975	47	47	60	216.876.257.429	60	481	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
38	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Belanja Tak Terduga	60	33.500.000.000	12	364.550.000	12	6.945.750.000	7	55.000.000	58	1	19	419.550.000	32	1	BPKAD	
39	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pesisir Barat	5	11.588.453.110	1	140.610.239.454	1	153.253.900.925	1	75.846.467.975	100	49	2	216.456.707.429	40	1.868	BPKAD	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah	100	741.212.600	0	401.075.492	100	185.303.150	78	98.304.717	78	53	78	499.380.209	78	67	BPKAD	
	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	280	741.212.600	0	401.075.492	78	185.303.150	78	98.304.717	100	53	78	499.380.209	28	67	BPKAD	
C	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan tata kelola barang milik daerah sesuai aturan (Persen)	100	12.760.348.000	4	2.287.528.643	100	2.362.748.700	-	699.487.620	-	30	4	2.987.016.263	4	23	BPKAD	
I	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pencatatan aset daerah	100	12.760.348.000	4	2.287.528.643	100	2.362.748.700	-	699.487.620	-	30	4	2.987.016.263	4	23	BPKAD	
40	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	5	3.171.618.800	1	185.105.450	1	333.774.200	-	40.726.700	-	12	1	225.832.150	20	7	BPKAD	
41	5.02.03.2.01.05	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	5	320.087.200	1	876.096.015	1	631.393.800	-	202.171.936	-	-	1	1.078.267.951	20	337	BPKAD	
42	5.02.03.2.01.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD Pemerintah Daerah dan LBMD SKPD	10	4.068.690.000	2	240.707.440	2	255.077.700	-	31.268.922	-	12	2	271.976.362	20	7	BPKAD	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2.889.848.000	1	629.940.000	1	564.977.000	-	205.316.550	-	36	1	835.256.550	20	29	BPKAD	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	2.310.104.000	0	355679738	1	577.526.000	-	220.003.512	-	38	-	575.683.250	-	25	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	19.994.186.371	88	4.515.394.841	90	5.326.291.650	41,76	1.720.498.239	46%	32%	41,76	1.720.498.239	46	9%	BAPENDA	
2		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	74.777.320	90	13.150.760	90	12.400.000	22,50	1.832.050	25%	15%	23	1.832.050	25	2%	BAPENDA	
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	10	38.516.600	2	7.703.320	2	7.400.000	1	1.832.050	50%	25%	1	1.832.050	0	5%	BAPENDA	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	36.260.720	2	5.447.440	2	5.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	13.029.251.080	90	1.788.219.794	90	2.202.767.700	45,00	824.443.250	50%	37%	45,00	824.443.250	50	6%	BAPENDA	
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	60	12.947.010.280	14	1.781.771.634	14	2.197.267.700	9	824.443.250	64%	38%	9	824.443.250	0	6%	BAPENDA	
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	13.141.000	1	2.628.200	1	2.500.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	10	12.181.000	2	2.436.200	2	2.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	56.918.800	1	1.383.760	1	1.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	495.000.000	90	125.000.000	90	300.000.000	67,50	54.000.000	75%	18%	67,50	54.000.000	75	11%	BAPENDA	
11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	60	495.000.000	10	125.000.000	8	300.000.000	6	54.000.000	75%	18%	6	54.000.000	0	11%	BAPENDA	
12		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	2.104.918.200	90	497.731.105	90	462.589.798	45,96	193.934.039	51%	42%	45,96	193.934.039	51	9%	BAPENDA	
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	38.100.000	12	7.620.000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
14		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Propaganda/Pameran	5	181.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
15		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	411.818.200	12	117.363.640	12	82.107.500	6	37.540.700	50%	46%	6	37.540.700	0	9%	BAPENDA	
16		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	100.000.000	10	11.160.000	10	12.000.000	6	4.000.000	60%	33%	6	4.000.000	0	4%	BAPENDA	
17		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	164.000.000	11	22.000.000	12	21.104.298	6	6.700.000	50%	32%	6	6.700.000	0	4%	BAPENDA	
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.210.000.000	12	314.587.465	12	322.378.000	6	145.693.339	50%	45%	6	145.693.339	0	12%	BAPENDA	
19		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	40	1.237.431.539	26	102.000.000	10	111.000.000	1	15.000.000	1000%	14%	1	15.000.000	0	1%	BAPENDA	
20		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	40	1.237.431.539	26	102.000.000	10	111.000.000	1	15.000.000	1000%	14%	1	15.000.000	0	1%	BAPENDA	
21		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1.611.420.000	84	293.360.682	90	190.000.000	45,00	105.674.000	50%	56%	45,00	105.674.000	50	7%	BAPENDA	
22		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	214.820.000	10	24.040.682	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
23		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.342.500.000	6	263.500.000	12	180.000.000	6	105.000.000	50%	58%	6	105.000.000	0	8%	BAPENDA	
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	54.100.000	12	5.820.000	12	10.000.000	6	674.000	50%	7%	6	674.000	0	1%	BAPENDA	
25		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1.441.388.232	83	217.795.490	90	127.750.000	12,86	40.759.800	14%	32%	12,86	40.759.800	14	3%	BAPENDA	
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	854.660.782	3	98.650.000	3	112.750.000	1	40.759.800	33%	36%	1	40.759.800	0	5%	BAPENDA	
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kantor	60	10.727.450	12	2.145.490	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	351.000.000	10	8.000.000	1	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	150.000.000	12	15.000.000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	75.000.000	12	94.000.000	10	15.000.000	1	0	10%	0%	1	15.000.000	0	20%	BAPENDA	
31		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	90%	7.285.650.960	83	1.478.137.010	90	1.919.784.152	53,51	484.855.100	59%	25%	53,51	484.855.100	59	7%	BAPENDA	
32		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan TA selanjutnya, Terlaksananya Penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan	90%	7.285.650.960	83	1.478.137.010	90	1.919.784.152	53,51	484.855.100	59%	25%	53,51	484.855.100	59	7%	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
33		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah	10	907.882.440	1	30.651.600	0	-	0,00	-	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
34		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	-	1	265.693.000	0,00	102.727.450	0%	39%	-	102.727.450	-	0%	BAPENDA	
34		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	-	1	106.045.602	0	43.358.500	0%	41%	-	43.358.500	-	0%	BAPENDA	
35		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	5	894.590.000	1	277.151.400	1	524.887.600	1	63.193.500	100%	12%	1	63.193.500	0	7%	BAPENDA	
36		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pengelolaan Pajak Daerah	55	4.443.108.000	9	732.352.000	9	485.410.000	9	104.172.000	100%	21%	9	104.172.000	0	2%	BAPENDA	
37		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah	60	1.027.658.960	12	148.609.750	12	207.479.800	6	84.675.550	50%	41%	6	84.675.550	0	8%	BAPENDA	
38		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1	140.090.000	1	133.994.260	1	250.642.950	0	63.908.000	0%	25%	-	63.908.000	-	46%	BAPENDA	
39		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	60	780.204.000	12	155.378.000	12	79.625.200	6	22.820.100	50%	29%	6	22.820.100	0	3%	BAPENDA	
					19.994.186.371			90	5.326.291.650	41,76	1.720.498.239	46%	32%		1.720.498.239				
No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Kepegawaian																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	95,00	12.730.162.338	90,00	14.437.290.448	90,00	2.244.425.400	46,23	855.142.642	46,23	38,10	46,23	855.142.642	46,23	6,72	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,00	47.000.000	90,00	69.376.200	90,00	14.399.950	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 . 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22.000.000	40	29.477.600	2	7.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 . 0	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	8	7.000.000	-	-	2	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 . 0	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8	7.000.000	-	-	2	499.950	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 . 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	25.000.000	32	39.898.600	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,00	9.176.561.900	90,00	10.547.915.792	90,00	1.883.137.800	29,63	779.472.142	29,63	41,39	29,63	779.472.142	29,63	8,49	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	9.137.416.400	98	10.499.040.992	14	1.877.637.800	8	779.472.142	57,14	41,51	8	779.472.142	11,43	8,53	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	16.423.000	8	19.944.000	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	13.602.500	16	15.959.600	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03 . 01 . 2.02 . 0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	9.120.000	10	12.971.200	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
																		BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	1.974.977.370	90,00	2.447.453.927	90,00	211.267.650	60,87	34.676.000	60,87	16,41	60,87	34.676.000	60,87	1,76	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	125.000.000	6	125.999.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	293.560.070	85	362.958.100	12	43.582.500	6	14.967.000	50,00	34,34	6	14.967.000	10,00	5,10	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	79.261.200	94	93.600.000	10	12.000.000	5	4.000.000	50,00	33,33	5	4.000.000	8,33	5,05	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	55	67.156.100	89	83.400.000	11	11.000.000	5	4.000.000	45,45	36,36	5	4.000.000	9,09	5,96	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.410.000.000	96	1.781.496.827	12	119.685.150	12	11.709.000	100,00	9,78	12	11.709.000	20,00	0,83	BKPSDM	
																		BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa	95,00	1.080.602.700	90,00	1.069.000.000	90,00	67.000.000	50,00	29.000.000	50,00	43,28	50,00	29.000.000	50,00	2,68	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08 . 0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	1.080.602.700	85	1.069.000.000	12	67.000.000	6	29.000.000	50,00	43,28	6	29.000.000	10,00	2,68	BKPSDM	
																		BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95,00	451.020.368	90,00	303.544.529	90,00	68.620.000	50,00	11.994.500	50,00	17,48	50,00	11.994.500	50,00	2,66	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dihavarkan Paiaknya	5	336.391.010	8	278.026.529	2	60.100.000	1	11.994.500	50,00	19,96	1	11.994.500	20,00	3,57	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09 . 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	114.629.358	2	25.518.000	12	8.520.000	6		50,00	-	6	-	120,00	-	BKPSDM	
																		BKPSDM	
2	5.03 . 02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Managemen Kepegawaian Daerah	13.390	16.175.706.700	18.830	8.614.187.351	1.019	1.371.442.400	995	132.241.324	97,64	9,64	995	132.241.324	7,43	0,82	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	7.511	7.957.872.600	9.319	3.617.227.496	9	745.564.550	4	78.237.524	44,44	10,49	4	78.237.524	0,05	0,98	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6.681	6.176.707.800	8.034	2.382.338.297	2	548.952.900	1	59.817.824	50,00	10,90	1	59.817.824	0,01	0,97	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	260	296.986.000	412	309.306.292	2	23.824.200	1	3.941.000	50,00	16,54	1	3.941.000	0,38	1,33	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	60	363.392.000	49	172.777.031	1	137.819.000	-	7.928.700	-	5,75	-	7.928.700	-	2,18	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10	431.774.000	21	518.836.049	2	20.779.150	1	4.673.000	50,00	22,49	1	4.673.000	10,00	1,08	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	500	689.012.800	803	233.969.827	2	14.189.300	1	1.877.000	50,00	13,23	1	1.877.000	0,20	0,27	BKPSDM	
																		BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	44	5.846.740.000	39	2.780.664.687	3	422.613.200	1	18.730.900	33,33	4,43	1	18.730.900	2,27	0,32	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02 . 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30	2.266.740.000	30	770.397.240	2	72.613.200	1	12.328.900	50,00	16,98	1	12.328.900	3,33	0,54	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02 . 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14	3.580.000.000	9	2.010.267.447	1	350.000.000	-	6.402.000	-	1,83	-	6.402.000	-	0,18	BKPSDM	
																		BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.835	2.371.094.100	9.472	2.216.295.168	1.007	203.264.650	990	35.272.900	98,31	17,35	990	35.272.900	16,97	1,49	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03 . 02 . 2.04 . 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	499.393.000	55	521.745.098	2	79.586.850	1	2.731.000	50,00	3,43	1	2.731.000	1,67	0,55	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 . 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5.750	1.446.611.000	9.378	1.525.621.865	1000	90.825.750	987	29.827.200	98,70	32,84	987	29.827.200	17,17	2,06	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 . 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25	425.090.100	39	168.928.205	5	32.852.050	2	2.714.700	40,00	8,26	2	2.714.700	8,00	0,64	BKPSDM	
	5.04	Pendidikan dan Pelatihan																BKPSDM	
3	5.04. 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia	797	10.005.573.686	57	326.953.862	3	236.770.000	-	100.961.500	-	42,64	-	100.961.500	-	1,01	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	797	10.005.573.686	57	326.953.862	3	236.770.000	-	100.961.500	-	42,64	-	100.961.500	-	1,01	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.02. 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	797	10.005.573.686	57	326.953.862	3	236.770.000	-	100.961.500	-	42,64	-	100.961.500	-	1,01	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05	Penelitian dan Pengembangan			9.619.513.713		3.851.644.215		3.096.515.000		193.409.450		6,25	0	193.409.450		2,01	Bappelitbangda	
	5.05 . 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan inovasi Yang Ditetapkan Di Daerah	90	9.619.513.713	90	3.851.644.215	90	3.096.515.000	20%	193.409.450	0,22	6,25	0,2	193.409.450	0,2222222	2,01	Bappelitbangda	
	5.05 . 02 . 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Dan Pengkajian Peraturan	80	4.717.513.713	80	2.464.512.900	80	518.259.000	0	171.451.450	0,00	33,08	0	171.451.450	0	3,63	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	839.513.713	1	193.436.500	1	115.195.250	0	77.880.250	0,00	67,61	0	77.880.250	0	9,28	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	480.000.000	0	277.952.900	1	223.422.750	0	11.118.400	0,00	4,98	0	11.118.400	0	2,32	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	6	2.874.000.000	0	1.856.908.500	1	84.716.000	0	32.786.700	0,00	38,70	0	32.786.700	0	1,14	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	524.000.000	0	136.215.000	1	94.925.000	0	49.666.100	0,00	52,32	0	49.666.100	0	9,48	Bappelitbangda	
	5.05 . 02 . 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang di Fasilitasi Dalam Penerapan SIDA	100%	2.488.000.000	100	745.966.765	100	528.249.000	40%	9.313.000	0,40	1,76	0,4	9.313.000	40	0,37	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	863.000.000	0	426.484.065	1	528.249.000	0	9.313.000	0,00	1,76	0	9.313.000	0	1,08	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	4	1.625.000.000	0	319.482.700	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05 . 02 . 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	2.414.000.000	0	641.164.550	100	2.050.007.000	20	12.645.000	20,00	0,62	20	12.645.000	2000	0,52	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Hasil Persentase Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4	1.286.000.000	0	320.887.550	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Persentase Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	2	2.500.000.000	0	-	5	2.050.007.000	0	12.645.000	0,00	0,62	0	12.645.000	0	0,51		
	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	4	1.128.000.000	1	320.277.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01	Bidang Urusan Inspektorat		100	-	100	10.775.288.769	100	-	40%	3.701.642.143	40%	#DIV/0!	49,14%	14.476.930.912	49,14%	#DIV/0!		
	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	31.369.633.625	100	7.259.944.935	100	5.385.186.300	27%	2.059.015.221	27%	38%	51%	9.318.960.156	51%	30%		
	6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen penyusunan perangkat daerah	100	37.510.956	100	13.054.000	100	12.400.000	0	2.692.700	0	22%	40%	15.746.700	40%	42%		
	6.01.01.2.01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	5	9.305.956	2	3.058.000	1	7.400.000	0	2.692.700	0%	36%	2	5.750.700	40%	62%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	5	28.205.000	2	9.996.000	1	5.000.000	0	-	0%	0%	2	9.996.000	40%	35%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	23.724.213.549	100	5.096.779.111	100	4.488.210.300	14%	1.723.198.977	14%	38%	43%	6.819.978.088	43%	29%		
	6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70	23.693.560.355	28	5.085.924.861	14	4.482.710.300	8	1.723.198.977	57%	38%	36	6.809.123.838	51%	29%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5	14.102.500	2	4.988.000	1	2.500.000	0	-	0%	0%	2	4.988.000	40%	35%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusun laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	10	10.909.694	4	3.866.250	2	2.000.000	0	-	0%	0%	4	3.866.250	40%	35%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran	5	5.641.000	2	2.000.000	1	1.000.000	0	-	0%	0%	2	2.000.000	40%	35%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	968.200.000	1	149.392.738	100	50.000.000	25%	14.580.000	25%	29%	38%	163.972.738	38%	17%		
	6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pengawas	60	968.200.000	24	120.879.800	12	50.000.000	6	14.580.000	50%	29%	30	135.459.800	50%	14%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4	148.512.000	1	28.512.938	0	-	0	-	0%	0%	1	28.512.938	25%	19%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.450.206.661	1	825.572.262	100	315.281.000	49%	97.419.544	49%	31%	50%	922.991.806	50%	38%		
	6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	60	31.583.959	24	8.374.000	12	1.932.000	6	779.450	50%	40%	30	9.153.450	50%	29%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	60	618.218.009	24	235.091.500	12	109.349.000	6	26.642.700	50%	24%	30	261.734.200	50%	42%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan 10 Buah Surat Kabar	60	67.692.000	24	24.000.000	12	12.000.000	6	6.000.000	50%	50%	30	30.000.000	50%	44%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum tamu	55	124.102.000	22	44.000.000	11	22.000.000	5	8.000.000	45%	36%	27	52.000.000	49%	42%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	1.608.610.693	24	514.106.762	12	170.000.000	6	55.997.394	50%	33%	30	570.104.156	50%	35%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	741.450.167	100	307.371.500	100	99.803.000	1%	2.700.000	1%	3%	65%	310.071.500	65%	42%		
	6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya barang penunjang urusan perkantoran	18	147.600.000	6	24.800.000	1	-	0	-	0%	#DIV/0!	6	24.800.000	33%	17%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Komputer/laptop/notebook, printer dan proyektor	90	565.000.167	54	253.721.500	44	99.803.000	1	2.700.000	2%	3%	55	256.421.500	61%	45%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	28.850.000	12	28.850.000	0	-	0	-	0%	0%	12	28.850.000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1.708.629.142	100	602.570.100	100	293.492.000	50%	164.434.000	50%	56%	61%	767.004.100	61%	45%		
	6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Jasa Telpon/internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12	16.800.000	10	14.768.100	0	-	0	-	0%	0%	10	14.768.100	83%	88%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kantor/ Rumah Dinas dan Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	60	1.644.095.000	24	551.500.000	12	255.000.000	6	150.000.000	50%	59%	30	701.500.000	50%	43%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	47.734.142	24	36.302.000	12	38.492.000	6	14.434.000	50%	37%	30	50.736.000	50%	106%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.739.423.150	100	265.205.224	100	126.000.000	100	53.990.000	50%	43%	59%	319.195.224	59%	18%		
	6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayarnya pajak kendaraan	60	224.511.800	24	79.428.500	12	39.800.000	6	18.280.000	50%	46%	30	97.708.500	50%	44%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dan terbayarnya kendaraan dinas milik daerah di inspektorat	60	1.422.428.500	24	164.976.724	12	72.000.000	6	34.250.000	50%	48%	30	199.226.724	50%	14%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya secara rutin peralatan dan mesin	48	87.482.850	12	15.800.000	12	14.200.000	6	1.460.000	50%	10%	18	17.260.000	38%	20%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12	5.000.000	12	5.000.000	0	-	0	-	0%	0%	12	5.000.000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan		100	8.720.033.728	100	2.369.914.377	100	1.354.727.500	44%	450.753.752	44%	33%	41%	2.820.668.129	41%	32%		
	6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	6.892.284.283	100	1.769.354.177	100	990.110.500	54%	359.033.052	54%	36%	45%	2.128.387.229	45%	31%		
	6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan hasil pengawasan kinerja (internal berkala 70 LHP dan Evaluasi LPPD 1 Laporan hasil)	355	723.121.934	142	238.914.250	25	184.153.000	22	127.109.200	88%	69%	164	366.023.450	46%	51%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kas opname 60 LHP dan Money dana BOS 30 LHP)	420	720.898.895	150	227.145.300	110	218.099.000	66	97.213.700	60%	45%	216	324.359.000	51%	45%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	tersusunnya laporan hasil reviu laporan kinerja	20	312.360.559	5	112.271.200	3	57.271.000	2	27.452.000	67%	48%	7	139.723.200	35%	45%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	tersusunnya laporan hasil reviu keuangan (Reviu LKPD 1 Laporan dan reviu penyerapan PBJ 4 laporan)	40	469.584.253	13	215.132.600	5	71.827.000	3	22.592.000	60%	31%	16	237.724.600	40%	51%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	tersusunannya laporan hasil pengawasan dana desa/pekon	580	852.874.927	232	290.804.049	40	156.518.000	0	-	0%	0%	232	290.804.049	40%	34%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	terjalinnnya kerjasama pengawasan dengan pihak APH dalam rangka pencegahan dan pembrantasan praktik pungutan liar	60	2.337.785.011	24	213.305.000	12	51.531.000	6	18.820.000	50%	37%	30	232.125.000	50%	10%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	60	1.475.658.704	24	471.781.778	12	250.711.500	6	65.846.152	50%	26%	30	537.627.930	50%	36%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	1.827.749.445	100	600.560.200	100	364.617.000	34%	91.720.700	34%	25%	38%	692.280.900	38%	38%		
	6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	60	402.282.995	24	185.487.000	12	153.067.000	6	38.099.800	50%	25%	30	223.586.800	50%	56%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	tersusunnya laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kasus pengaduan masyarakat)	135	1.425.466.450	32	415.073.200	17	211.550.000	3	53.620.900	18%	25%	35	468.694.100	26%	33%	Inspektorat	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100	2.578.851.896	100	1.145.429.457	100	23.899.962.130	50%	1.191.873.170	50%	5%	55%	2.337.302.627	55%	91%		
	6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100	293.707.580	100	152.476.157	100	30.000.000	50%	14.834.122	50%	49%	51%	167.310.279	51%	57%		
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	60	293.707.580	24	109.063.657	0	-	0	-	0%	0%	24	109.063.657	40%	37%	Inspektorat	
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	48	162.435.000	24	43.412.500	12	30.000.000	6	14.834.122	50%	49%	30	58.246.622	63%	36%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		100	2.285.144.316	100	992.953.300	100	23.869.962.130	50%	1.177.039.048	50%	5%	59%	2.169.992.348	59%	95%		
	6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	60	1.643.972.516	24	641.422.300	12	89.150.500	6	23.530.000	50%	26%	30	664.952.300	50%	40%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi, serta penilaian reformasi birokrasi	12	331.000.000	12	125.210.400	12	33.184.000	0	-	0%	0%	12	125.210.400	100%	38%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	60	310.171.800	24	304.595.300	12	111.930.000	6	55.811.397	50%	50%	30	360.406.697	50%	116%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	48	216.224.190	12	46.935.700	12	28.532.000	6	6.000.000	50%	21%	18	52.935.700	38%	24%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							23.607.165.630		1.331.112.201								
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	14.023.279.669	34%	3.306.158.276	90%	2.491.220.500	32%	1.091.697.651	35%	44%	40%	4.350.859.927	42%	31%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95%	23.936.042	40%	4.822.900	90%	12.400.000	50%	7.400.000	56%	60%	50%	12.222.900	53%	51%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	12.274.042	4	2.749.950	2	7.400.000	2	7.400.000	100%	100%	6	10.149.950	60%	83%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	11.662.000	4	2.072.950	2	5.000.000	0	0	0%	0%	4	2.072.950	40%	18%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95%	7.868.833.516	40%	1.817.361.822	90%	1.582.848.500	38%	741.139.046	42%	47%	49%	2.558.500.868	51%	33%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	7.839.733.516	28	1.812.616.172	14	1.577.848.500	8	741.139.046	57%	47%	36	2.553.755.218	51%	33%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.800.000	2	1.872.600	1	2.000.000	0	0	0%	0%	2	1.872.600	40%	15%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	10.300.000	4	1.865.450	2	2.000.000	0	0	0%	0%	4	1.865.450	40%	18%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.000.000	2	1.007.600	1	1.000.000	0	0	0%	0%	2	1.007.600	40%	17%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	95%	140.000.000	0%	0	90%	15.000.000	0%	0	0%	0%	0%	0	0%	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	26	140.000.000	0	0	3	15.000.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	95%	2.005.673.663	41%	387.548.149	90%	300.628.000	35%	54.956.143	39%	18%	47%	442.504.292	50%	22%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	58.792.000	24	2.708.000	1	3.781.000	1	3.535.000	100%	93%	25	6.243.000	42%	11%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	283.560.000	2	53.850.000	1	27.100.000	0	0	0%	0%	2	53.850.000	40%	19%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	436.297.100	24	43.701.330	12	58.747.000	6	23.351.050	50%	40%	30	67.052.380	50%	15%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	50	120.000.000	24	48.000.000	12	24.000.000	4	8.000.000	33%	33%	28	56.000.000	56%	47%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	275.000.000	22	44.000.000	11	22.000.000	0	0	0%	0%	22	44.000.000	40%	16%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	832.024.563	24	195.288.819	12	165.000.000	6	20.070.093	50%	12%	30	215.358.912	50%	26%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	99.500.000	33%	46.996.000	90%	45.720.000	0%	0	0%	0%	33%	46.996.000	35%	47%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	18	99.500.000	6	46.996.000	1	45.720.000	0	0	0%	0%	6	46.996.000	33%	47%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	3.106.413.543	40%	867.169.955	90%	435.624.000	53%	241.202.462	59%	55%	51%	1.108.372.417	53%	36%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	1.718.376.000	24	440.377.955	12	208.800.000	6	67.598.462	50%	32%	30	507.976.417	50%	30%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.310.540.000	12	421.000.000	6	224.000.000	4	171.500.000	67%	77%	16	592.500.000	53%	45%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	77.497.543	24	5.792.000	12	2.824.000	6	2.104.000	50%	75%	30	7.896.000	50%	10%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	95%	1.018.422.905	40%	182.259.450	90%	99.000.000	47%	47.000.000	52%	47%	49%	229.259.450	52%	23%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	498.459.750	6	136.409.450	3	80.000.000	1	35.000.000	33%	44%	7	171.409.450	47%	34%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	519.963.155	24	45.850.000	12	19.000.000	6	12.000.000	50%	63%	30	57.850.000	50%	11%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	53%	500.009.468	33%	96.746.956	46%	777.117.000	1	19.243.400	109%	2%	42%	115.990.356	79%	23%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	53%	500.009.468	33%	96.746.956	46%	777.117.000	50%	19.243.400	109%	2%	42%	115.990.356	79%	23%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.02.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah rakor	12	500.009.468	4	96.746.956	2	777.117.000	1	19.243.400	50%	2%	5	115.990.356	42%	23%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat	84,92%	34.700.771.342	34%	856.963.078	84,92%	828.317.130	9%	150.097.200	11%	18%	35%	1.007.060.278	42%	3%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	84,92%	34.700.771.342	34%	856.963.078	84,92%	828.317.130	9%	150.097.200	11%	18%	35%	1.007.060.278	42%	3%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah Partai politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif tahun 2019	45	33.534.227.768	18	667.274.260	9	333.637.130	0		0%	0%	18	667.274.260	40%	2%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.04	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah fasilitas kegiatan	7	442.404.549	1	73.989.100	2	494.680.000	1	150.097.200	50%	30%	2	224.086.300	29%	51%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan	10	724.139.025	2	115.699.718	0	0	0	0	0%	0%	2	115.699.718	20%	16%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Pesisir Barat	77,5%	6.562.559.479	27%	12.948.083.502	75%	19.180.000.000	0%	0	0%	0%	27%	12.948.083.502	35%	197%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	77,5%	6.562.559.479	27%	12.948.083.502	75%	19.180.000.000	0%	0	0%	0%	27%	12.948.083.502	35%	197%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan hibah tahun 2022	105	6.165.970.743	27	12.875.000.000	11	19.180.000.000	0	0	0%	0%	27	12.875.000.000	26%	209%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rakor	10	396.588.736	4	73.083.502	0	0	0	0	0%	0%	4	73.083.502	40%	18%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	74,86%	365.066.280	20%	90.757.800	74,2%	130.511.000	0%	0	0%	0%	20%	131.054.000	27%	36%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	74,86%	365.066.280	20%	90.757.800	74,2%	130.511.000	0%	0	0%	0%	20%	131.054.000	27%	36%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah kegiatan	5	365.066.280	2	90.757.800	2	130.511.000	0	0	0%	0%	2	90.757.800	40%	25%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah rakor	10	365.066.280	1	40.296.200	0	0	0	0	0%	0%	1	40.296.200	10%	11%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Pesisir Barat	74,86%	946.432.754	32%	268.164.500	74,2%	200.000.000	50%	70.073.950	67%	35%	40%	338.238.450	53%	36%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	74,86%	946.432.754	32%	268.164.500	74,2%	200.000.000	50%	70.073.950	67%	35%	40%	338.238.450	53%	36%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan	5	298.109.862	0	0	2	100.000.000	1	27.461.200	50%	27%	1	27.461.200	20%	9%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah rakor	10	527.441.400	4	179.784.900	2	100.000.000	1	42.612.750	50%	43%	5	222.397.650	50%	42%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan	10	418.991.354	4	88.379.600	0	0	0	0	0%	0%	4	88.379.600	40%	21%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

2.2 Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembangunan pada hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kewenangan daerah dengan target dan capaian yang secara umum mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Walaupun secara umum Kabupaten Pesisir Barat masih perlu melakukan akselerasi perbaikan kinerja pada seluruh sektor pembangunan. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2024 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Secara umum isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 masih identik dengan RKPD Tahun 2024, yaitu masih berada pada sektor-sektor :

1. Perekonomian Masyarakat; bahwa PDRB Kabupaten Pesisir Barat bertumpu pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan masih lemahnya pengembangan potensi-potensi unggulan daerah yang sangat diharapkan untuk tumbuh, seperti pariwisata. Berikutnya, nilai investasi yang ada di daerah belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan pengembangan wilayah;
2. Sumber Daya Manusia; bahwa akses pendidikan dan kesehatan yang layak baik dari sisi sarana dan prasarana termasuk jumlah tenaga belum sepenuhnya merata dan dapat dengan mudah dinikmati oleh seluruh masyarakat. Daerah juga belum mampu memanfaatkan bonus demografi, sehingga jumlah angkatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya terserap di dunia kerja. Efek akhirnya adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi;
3. Sarana Dan Prasarana; ketersediaan infrastruktur daerah yang belum baik dan merata serta ketersediaan fasilitas umum yang layak masih menjadi permasalahan daerah. Jumlah jalan mantab yang tinggi serta besarnya kawasan kumuh di daerah merupakan tantangan pembangunan infrastruktur, selain daripada penyediaan pembangunan kantor pemerintahan daerah;
4. Kemampuan Keuangan Daerah; keterbatasan fiskal daerah yang sangat bergantung pada pendapatan transfer menunjukkan masih lemahnya pos pajak dan retribusi daerah sebagai penunjang PAD. Hal ini dapat dilihat dari salah satu alasan dilakukan perubahan RKPD Tahun 2024 untuk menyikapi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023

5. Aksesibilitas Wilayah; bahwa masih ada beberapa pekon yang sulit untuk diakses, baik dari sisi transportasi dan juga ketersediaan akomodasi. Khususnya pada
6. Karakteristik Daerah; Secara administrasi Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang strategis sebagai kabupaten terlur yang berbatasan dengan Kabupaten Kaur (Bengkulu) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan). Namun demikian, secara geografis, daerah yang terpit oleh Kawasan TNBBS serta Samudera Hindia menjadikannya sebagai daerah yang rawan bencana, potensi bencana yang mungkin terjadi seperti tanah longsor, gempa bumi, gelombang tinggi hingga tsunami.

2.2.1 Permasalahan Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang telah dipaparkan di atas serta penelaahan atas laporan evaluasi Renja oleh perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Adanya ketidaksesuaian antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024 dengan dokumen APBD/DPA Perangkat Daerah TA 2024, ditemukan beberapa program yang telah direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2024, akan tetapi tidak dilaksanakan pada dokumen APBD/DPA Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah atau penyesuaian prioritas perangkat daerah;
- b. Adanya keterlambatan dan/atau kesalahan pada proses penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 oleh beberapa perangkat daerah sehingga mempengaruhi

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan evaluasi RKPD sampai dengan Triulan II Tahun 2024;

- c. Pada sebagian Perangkat Daerah sering terjadi penggantian aparatur yang mengerjakan laporan evaluasi dan monev Renja, sehingga mempengaruhi ketepatan, validitas data serta pemahaman terhadap proses bisnis penyusunan laporan;
- d. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian serta penyusunan anggaran pada tataran daerah dan perangkat daerah;

2.2.2 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang dihadapi daerah sampai dengan Triwulan II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	A B C D E	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum optimal; Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal; Kesadaran Masyarakat belum memadai
2	Kesehatan	A B C D E F	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; Rasio tenaga Kesehatan per penduduk masih belum ideal; Belum Terpenuhinya 9 Jenis Profesi Tenaga Kesehatan; Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan; Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal; Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan belum memadai
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A B C D	Jumlah jalan dalam kondisi baik yang belum memadai; Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase belum dilakukan secara integratif; Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik yang belum memadai; Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang belum ideal dibandingkan dengan jumlah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
			pegawai;
		E	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang belum memadai;
		F	Belum optimalnya pengendalian penataan ruang daerah;
		G	Pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum optimal;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	A	Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian;
		B	Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian;
		C	Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian;
		D	Jumlah jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik yang belum memadai;
		E	Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	A	Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah;
		B	Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor;
		C	Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan pasca bencana;
6	Sosial	A	Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung;
		B	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tinggi;
		C	Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan;
		D	Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel;
		E	Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;
II	Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	A	Kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi;
		B	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri;
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan;
		B	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat;
		C	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan masyarakat;
3	Pangan	A	Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
		B	Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga;
		C	Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah
4	Pertanahan	A	Masih terjadi kasus-kasus konflik pertanahan atau

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		B	sengketa kepemilikan lahan daerah dengan taman nasional hutan bukit barisan selatan; Masih rendahnya jumlah aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan.
5	Lingkungan Hidup	A	Belum optimalnya pengendalian/ pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
		B	Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Belum optimalnya kualitas pelayanan pencatatan sipil;
		B	Belum optimalnya kuantitas pelayanan pencatatan sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah;
		B	Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah;
		B	Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;
9	Perhubungan	A	Minimnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan daerah;
		B	Belum tersusunnya moda transportasi di daerah dengan baik;
10	Komunikasi dan Informatika	A	Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah;
		B	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika;
		C	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan jumlah BTS;
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah;
		C	Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan;
		D	Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;
12	Penanaman Modal	A	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
13	Kepemudaan dan Olah Raga	A	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet daerah;
		C	Keterbatasan jumlah sarana prasarana olahraga;
14	Statistik	A	Masih sulitnya melakukan penghitungan data statistik di daerah oleh Perangkat Daerah;
		B	Masih terbatasnya ketersediaan data sektoral
15	Persandian	A	Belum optimalnya kegiatan persandian daerah;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		B C	Belum adanya sarana dan prasarana persandian; Belum adanya SDM yang menguasai;
16	Kebudayaan	A B	Masih belum ditetapkan cagar budaya daerah; Masih belum optimalnya pengembangan budaya daerah sebagai salah satu atraksi wisata daerah;
17	Perpustakaan	A B C D E	Masih belum adanya Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan perpustakaan; Belum ada pustakawan daerah; Masih sedikitnya jumlah koleksi judul buku; Masih rendahnya minat baca masyarakat;
18	Kearsipan	A B C	Masih belum adanya Gedung Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan kearsipan; Belum ada arsiparis daerah;
III	Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	A B C D	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap; Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit; Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
2	Pariwisata	A B C	Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata; Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata di daerah; Masih belum adanya industri pendukung pariwisata;
3	Pertanian	A B C D E	Masih rendahnya produktivitas pertanian; Masih rendahnya produktivitas perkebunan; Masih rendahnya produktivitas peternakan; Masih adanya alih fungsi lahan pertanian; Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
4	Perdagangan	A B	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional; Masih belum optimalnya pengawasan pasar;
5	Perindustrian	A B C D	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal; Belum optimalnya pembinaan terhadap industri daerah Masih sulitnya industri kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan; Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku industri kecil;
6	Transmigrasi	A B	Masih relatif belum berkembang secara signifikan kehidupan masyarakat transmigran; Masih belum optimalnya pembinaan masyarakat transmigran dalam pengembangan produk pertanian dan perkebunan dan peternakan;
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
1	Sekretariat Daerah	A	Belum Optimalnya proses pelayanan terhadap kepala daerah;
		B	Belum optimalnya proses pengkoordinasian antar perangkat daerah
2	Sekretariat DPRD	A	Belum optimalnya proses pelayanan kepada DPRD
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1	Perencanaan	A	Masih belum optimalnya proses perencanaan daerah;
		B	Masih lemahnya pengendalian dan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
		C	Masih belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian;
2	Kuangan	A	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah;
		B	Masih belum optimalnya pendataan aset daerah;
		C	Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah;
		D	Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;
3	Kepegawaian	A	Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai;
		B	Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;
4	Pendidikan dan Pelatihan	A	Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi PNS di daerah;
		B	Masih minimnya jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
5	Penelitian dan Pengembangan	A	Masih minimnya jumlah kajian penelitian dan pengembangan daerah sebagai materi teknis perencanaan daerah;
		B	Belum optimalnya hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
1	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A	Masih belum optimalnya proses pembinaan terhadap pegawai daerah;
		B	Masih belum optimalnya proses reviu dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
		C	Masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan;
VII	Unsur Kewilayahan		
1	Kecamatan	A	Masih belum meratanya sarana dan prasana di tingkat kecamatan;
		B	Masih belum adanya sistem pelayanan bagi masyarakat yang terintegrasi
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	A	Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat;
		B	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum;

2.2.3 Rekomendasi

Sebagai langkah perbaikan kinerja pada periode mendatang, khususnya pada proses penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah diperlukan rekomendasi perbaikan berdasarkan pada capaian kinerja serta permasalahan-permasalahan yang telah disajikan sebelumnya, antara lain:

- a. Perlunya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, hingga nantinya pada dokumen penganggaran daerah dan perangkat daerah terjalin sinergitas;
- b. Perlunya dilakukan perubahan target sasaran indikator makro daerah yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2024 untuk dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2024, hal ini berdasarkan pada realisasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (dalam hal ini data yang tersedia sampai dengan tahun 2023 yang dinilai memberikan gambaran capaian hingga akhir tahun 2024) dengan tetap memperhatikan kondisi daerah;
- c. Dalam penetapan target kinerja yang akan dicapai pada setiap program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat daerah agar memperhatikan satuan *output* pada dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan dan juga Renja Perangkat Daerah maupun Renstra Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berikut turunannya dan/atau pembaharuannya. Termasuk penentuan *output* yang terukur dan saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya;
- d. Asumsi dan proyeksi pendapatan daerah baik berupa transfer pusat, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya yang mempengaruhi perhitungan penerimaan daerah pada periode mendatang sebaiknya dapat diukur secermat mungkin dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat lebih akurat, efektif dan efisien;

- e. Penyusunan, penataan dan/atau penambahan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;
- f. Sebagai salah satu bagian dalam siklus manajemen perencanaan dan penganggaran, tahap pengendalian evaluasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujud satu kesatuan manajemen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pesisir Barat dan kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat serta pengaruh perekonomian regional (Provinsi Lampung) dan nasional. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikannya secara efektif dan efisien dengan pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat ini disusun dalam suatu kondisi perekonomian daerah yang masih berkembang sehingga perencanaan pembangunan yang terencana, tersusun dan akuntabel.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di suatu daerah merupakan salah satu indikator dalam menilai pencapaian kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hal ini adalah sebagai fasilitator dan juga regulator dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang terencana diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi.

3.1.1 Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dan evaluasi dalam penilaian hasil pembangunan yang pada akhirnya akan menentukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah tersebut. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sektor ekonomi terguncang dengan adanya Pandemi Covid-19. Dimana pada tahun 2023 daerah masih berada pada posisi untuk merestrukturisasi efek dari pandemi dimaksud, Hal ini tentunya sangat mempengaruhi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Menurut data BPS di tahun 2023 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tercatat 5.734,56 (dalam milyar rupiah) atau naik 389,19 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2022 yang tercatat 5.345,37 (dalam milyar rupiah). PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan *time series* digambarkan sebagai berikut, tahun 2022 PDRB ADHB naik 453,33 (dalam milyar rupiah), tahun 2021 PDRB ADHB tercatat 4.892,04 (dalam milyar rupiah) atau mengalami kenaikan 214,50 (dalam milyar rupiah), tahun 2020 PDRB ADHB tercatat 4.677,54 atau turun 9,85 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 4.687,39 (dalam milyar rupiah).

Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) tahun 2020 berada pada angka 3.069,60 atau turun 36,5 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2019 yang tercatat di angka 3.106,10 (dalam milyar rupiah). Tahun 2021 tercatat di angka 3.132,70 (dalam milyar rupiah) atau naik 63,10 (dalam milyar rupiah), tahun 2022 sebesar 3.221,10 (dalam milyar rupiah) atau naik 88,4 (dalam milyar rupiah), tahun 2023 tercatat sebesar 3.331,4 atau naik sebesar 110,30 (dalam milyar rupiah)

Pada tahun 2024 ini PDRB ADHB diproyeksi dapat meningkat menjadi 6.021,29 (dalam miliar rupiah). Sementara itu untuk PDRB ADHK diproyeksikan pada tahun 2024 ini dapat tetap meningkat menjadi 3.464,66 (dalam miliar rupiah). Proyeksi ini berkaca dari perhitungan selama kurun waktu 2015-2019 dimana perkembangan PDRB ADHB dan ADHK yang masih mampu berkembang 4,0-5,0% pertahunnya, namun terjadi perubahan perkembangan nilai mulai tahun 2020-2021 berkembang pada kisaran (-1,0) - 2,0% pertahunnya.

Optimisme pertumbuhan diharapkan dari perbaikan ekonomi global, nasional dan regional yang dibarengi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perubahan pola hidup masyarakat daerah secara umum akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan perilaku masyarakat yang mulai teratur serta beraktivitas dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (dalam miliar rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	4.687,39	4.677,54	4.892,04	5.345,37	5.734,56
ADHK	3.106,10	3.069,60	3.132,70	3.221,10	3.331,40

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Data untuk PDRB ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana Ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai 112.091,01 (dalam milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 65.952,47 (dalam milyar rupiah).

3.1.1.2 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB harga berlaku suatu daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah daerah tersebut. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) kategori. Besar kecilnya PDRB dalam 17 (tujuh belas) kategori tersebut di

atas sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan SDA, Infrastruktur, SDM yang memadai dan lain sebagainya. 17 kategori tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran masing-masing sector sebagai penyumbang pertumbuhan PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB. Persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selama 5 (lima) tahun terakhir cukup seimbang artinya dari nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

Dari 9 (sembilan) sektor yang ada dalam komponen perhitungan PDRB, sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Konstruksi; kelompok sektor sekunder terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Industri Pengolahan, (4) Jasa Pendidikan dan (5) Real Estate. Sementara untuk sektor tersier terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu: (1) Informasi dan Komunikasi, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa Keuangan dan Asuransi, (5) Transportasi dan Pergudangan, (6) Jasa lainnya, (7) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (8) Pengadaan Listrik dan Gas dan (9) Jasa Perusahaan.

Pada tahun 2019 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 48,47% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,96%. Pada tahun 2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB tetap pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 49,29% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%. Kembali pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,86% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,86%. Tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat disumbang sebesar 46,41% dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,68%. Tahun 2023 kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan menurun menjadi 43,79%, peningkatan kontribusi terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Refarasi Mbdil dan Sepeda Motor sebesar 15,92% dan Sektor Kontruksi sebesar 8,34%.

Berdasarkan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha yang dipublikasi oleh BPS, Selama 5 (lima) tahun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi di sektor lain, pertama Sektor Kontruksi di tahun 2019 memberikan kontribusi 7,01% kemudian meningkat 18,97% di tahun 2023 menjadi 8.34%, dari tahun 2019 sampai 2023. Kedua sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Refarasi Modil dan Sepeda Motor di tahun 2019 berkontribusi sebesar 12,96% atau meningkat 22,84% di tahun 2023 menjadi 15,92%.

Keseluruhan gambaran distribusi PDRB ADHB ini menunjukkan bahwa sebagai daerah pemekaran baru Kabupaten Pesisir Barat masyarakatnya masih berorientasi pada agraris, sektor-sektor industri dan jasa belum sepenuhnya berkembang dan perlu dukungan investasi dan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah.

Tabel 3.2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,47	49,29	48,86	46,41	43,79
2	Pertambangan dan Penggalian	5,64	5,74	5,21	5,22	5,61
3	Industri Pengolahan	4,49	3,98	4,11	3,76	3,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	7,01	6,83	7,53	8,04	8,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,96	12,54	12,86	14,68	15,92
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	0,97	0,96	1,25	1,51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03	1,95	1,81	1,98	2,16
10	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,29	2,38	2,27	2,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	1,38	1,43	1,38	1,34
12	Real Estate	3,69	3,61	3,58	3,62	3,71
13	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,11	5,23	5,12	5,17	5,30
15	Jasa Pendidikan	3,62	3,79	3,78	3,73	3,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,18	1,19	1,15	1,18
17	Jasa lainnya	1,06	1,00	0,95	1,13	1,45
	PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Data untuk PDRB berdasarkan lapangan usaha untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data triwulan I Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana Pertumbuhan positif Provinsi Lampung dicapai oleh sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 14,23 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 11,55 persen dan 11,46 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh cukup pesat adalah Jasa Perusahaan dan Real Estate yang tumbuh 9,91 persen dan 9,84 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi (y-on-y) terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 16,90 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi sebesar 10,97 persen, dan Pengadaan Air terkontraksi sebesar 3,27 persen.

3.1.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran

PDRB menurut Pengeluaran digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah melihat dari sisi pengeluaran dan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, sebagai berikut: (1) Konsumsi Rumah Tangga; (2) Konsumsi LNPRT; (3) Konsumsi Pemerintah; (4) PMTB; (5) Perubahan Inventori; (6) Ekspor; (7) Impor.

Berdasarkan pada data PDRB ADHB menurut Pengeluaran yang berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik antar wilayah dan luar negeri. BPS mencatat bahwa PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut pengeluaran tahun 2020 sebesar 4.677,54 (dalam milyar rupiah) atau turun 19,85 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2019 sebesar 4.687,39 (dalam miliar rupiah), kemudian di tahun 2021 tercatat 4.892,04 (dalam milyar rupiah) atau naik 214,50 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2020, dan di tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan kembali sebesar 453,33 (dalam milyar rupiah) dari 4.892,04 (dalam milyar rupiah) ke 5.345,37, terakhir di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan 389,19 (dalam milyar rupiah) menjadi 5.734,56 (dalam milyar rupiah).

Sementara itu untuk data PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) menurut Pengeluaran pada tahun 2019 adalah sebesar 3.106,11 (dalam miliar rupiah), kemudian turun di tahun 2020 sebesar 36,51 (dalam milyar rupiah) menjadi 3.069,60 (dalam milyar rupiah), di tahun 2021 mengalami kenaikan 63,10 (dalam milyar rupiah) menjadi 3.132,70 kemudian di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 88,50 (dalam milyar rupiah) menjadi 3.221,12, dan terakhir di tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 110,23 (dalam milyar rupiah) menjadi 3.331,35 (dalam milyar rupiah).

Baik pada nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK menurut pengeluaran, sektor terbesar tetap ada pada: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; (2) Pembentukan Modal Tetap Bruto; (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; (4) Pengeluaran Konsumsi LNPRT; (5) Net Ekspor Barang dan Jasa; (6) Perubahan Inventori.

Berikutnya disampaikan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023 (dalam Miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.285,05	3.279,17	3.368,27	3.717,25	4.090,89
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	84,65	87,02	90,20	96,19	110,37
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	147,14	146,50	149.45	147,23	152,01
4	PMTB	1.068,19	1.017,88	1.110,62	1.205,95	1.284,16
5	Perubahan Inventori	18,96	11,08	7,17	7,46	3,46
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	83,40	135,88	166,34	171,36	93,67
	Total PDRB	4.687,39	4.692,20	4.919,53	5.345,44	5.734,56

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

*angka sementara

**angka sangat sementara

Lebih lanjut, disajikan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.4 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.237,12	2.195,72	2.206,39	2.310,06	2.432,56
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	51,49	51,90	52,63	53,55	59,30
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	98,57	96,10	96,69	93,89	94,95
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	727,03	670,11	702,02	732,58	752,69
5	Perubahan Inventori	8,29	14,61	4,29	4,40	2,49
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(16,40)	41,17	70,68	26,64	--10,64
	PDRB	3.106,11	3.069,60	3.132,70	3.223,12	3.331,35

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

*angka sementara

**angka sangat sementara

Data untuk PDRB berdasarkan pengeluaran untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data Triwulan I Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana Dari sisi pengeluaran, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi yaitu sebesar 19,13 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 15,67 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,10 persen. Di sisi lain, komponen impor sebagai faktor pengurang tumbuh sebesar 8,75 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2023 (y-on-y), Komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I2024, yakni sebesar 2,96 persen, diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,89 persen

3.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran 3,60-4,10% atau menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dan perekonomian daerah. Angka ini dinilai cukup realistis dan moderat bila melihat pada tantangan dan juga proyeksi pembangunan ekonomi pada tahun 2024 dan 2025 mendatang. Target pada tahun 2024 sebesar 3,6-4,1% juga melihat dari capaian pada tahun 2023 mencapai pertumbuhan 3,42%, angka ini berdasarkan pada data series tahun 2019 – 2023 berada pada kisaran 3,42 – 5,47 dimana pada tahun 2020 berada pada minus -1,18% sebagai dampak dari pandemi covid-19 kemudian mengalami Perbaikan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2021 yang berada pada angka 2.06% dan di tahun 2022 sebesar 2,82%.

Diproyeksikan sumbangan terbesar perekonomian daerah masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor konstruksi dengan sumbangan $\pm 59,71\%$ dari total PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2024 ini diproyeksikan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih ada pada sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan konsumsi masyarakat dan juga konsumsi Pemerintah Daerah. Proyeksi tersebut merupakan suatu hal yang wajar mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat

selama tahun 2023 dan semester I Tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif atau meningkat secara stabil dengan catatan adanya peningkatan belanja modal Pemerintah Daerah dalam infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Target pertumbuhan ekonomi ini juga sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Lampung, Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Lampung per Mei 2024, Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik dan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 4,67% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 15,67% (yoy) pada triwulan laporan, terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Komponen investasi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,31% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangun.

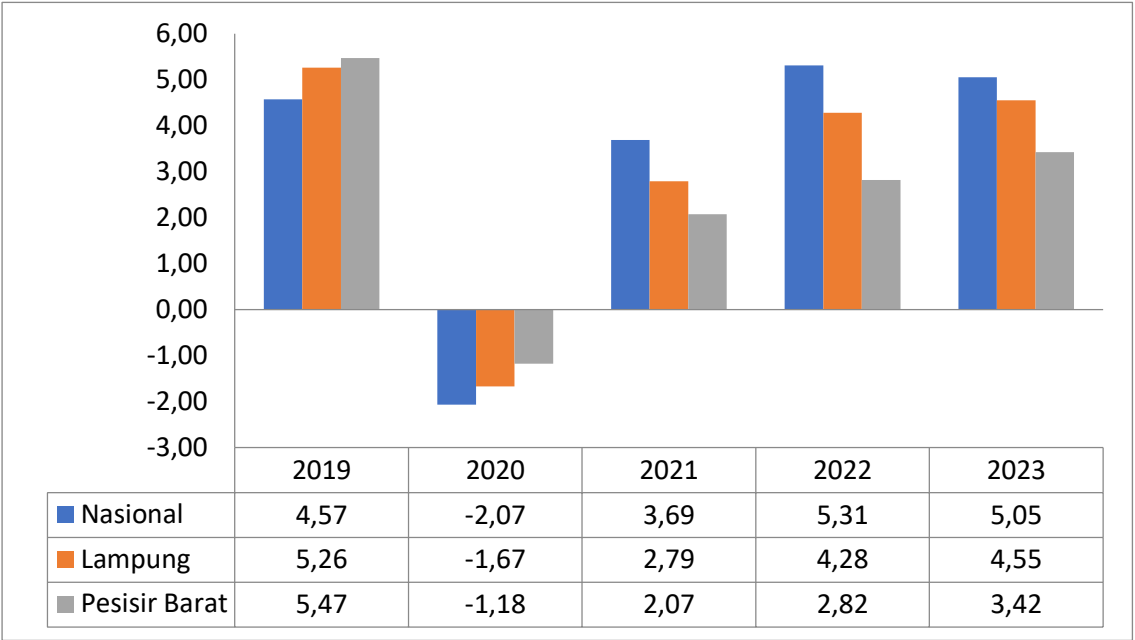
Sementara Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat bahwa Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,30 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,13 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada pada 5.47%, kemudian mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi -1,18% akibat dari Pandemi Covid-19 lalu mulai membaik di tahun 2021 dan 2022 menjadi masing - masing 2.06% dan 2,82%. Di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,40 menjadi 3,42%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2023 sebesar 3,42% tersebut masih berada di bawah Provinsi Lampung yang

mencatatkan nilai 4.55% dan nasional 5,05% atau selisih masing – masing sebesar 1,13 dan 1,63.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Data untuk pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 3,30 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,13 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 12,57 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 37,50 persen.

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan harga berlaku tahun 2023 meningkat 389 Milyar di banding tahun 2022 dengan 5 (lima) lapangan usaha memberikan kontribusi tertinggi, yaitu (i) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 43,79%, (ii) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor 15,92%, (iii) sektor konstruksi 8,34%, (iv) sektor pertambangan dan penggalian 5,61% dan (iv) sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 5,30%. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat ke lima sektor tersebut mengindikasikan bahwa sektor ini sangat layak dikembangkan menjadi strategi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu sektor real Estat, penyediaan akomodasi dan makan minum dan informasi dan komunikasi perlahan namun pasti diprediksi akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari 3 (tiga) sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Ketimpangan dalam perkembangan sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier pada dasarnya mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang riil di Kabupaten Pesisir Barat. Secara umum dapat dikatakan bahwa efisiensi dan produktivitas lebih dominan terjadi pada sektor primer dan sekunder. Kelompok sektor Primer memegang dominasi paling kuat dalam struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat atau dapat dikatakan struktur ekonomi daerah adalah struktur ekonomi yang masih pada sektor tradisional, pada urutan kedua penyumbang terbesar ada pada sektor Tersier dan menunjukkan angka yang stabil. Ini merupakan potensi bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian di sektor Tersier dan mulai mengembangkan potensi ekonomi modern yang tidak lagi berbasis atau mengandalkan sektor Primer atau Tradisional.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,71	0,02	-0,11	-3,50	-2,44
2	Pertambangan dan Penggalian	6,37	0,00	-5,76	5,70	11,58
3	Industri Pengolahan	-0,10	-12,49	1,70	-1,09	-1,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26,56	5,08	7,99	4,31	10,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,71	5,02	5,94	2,17	3,22
6	Konstruksi	28,50	-2,03	9,63	6,93	8,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,11	-4,01	7,11	15,97	11,45
8	Transportasi dan Pergudangan	7,50	-4,73	4,17	22,29	16,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,89	-4,54	-3,32	15,64	12,63
10	Informasi dan Komunikasi	9,09	2,99	10,78	3,81	6,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	0,29	3,69	-1,25	2,03
12	Real Estate	6,25	-3,80	3,44	6,69	1,12
13	Jasa Perusahaan	8,47	-1,81	1,30	4,20	1,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,90	1,34	3,22	6,55	8,44
15	Jasa Pendidikan	9,48	4,09	3,42	4,66	0,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	9,53	5,19	2,23	5,77
17	Jasa lainnya	8,20	-4,49	-1,09	26,85	27,14
	PDRB ADHK	5,47	-1,18	2,07	2,88	3,42

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3.1.1.6 Pendapatan Per Kapita

Dilihat dari jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, pada tahun 2019 tercatat sebesar 30,25 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2020 PDRB Perkapita turun mengikuti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada minus 1,18% dengan nilai 28,88 (dalam jutaan rupiah). Tahun 2021 terjadi peningkatan 2,90% menjadi 29,72 (dalam jutaan rupiah), tahun 2022 terjadi kembali peningkatan sebesar 757% menjadi 31,97 dan di tahun 2023 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat sebesar 33,78 (dalam jutaan rupiah).

Tabel 3.6 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (berdasarkan BPS)	PDRB Perkapita (PPK)
2019	4,687.38	154,973	30.25
2020	4,692.20	161.984	28.88
2021	4,919.52	164.613	29,72
2022*	5,349.44	167.190	31,97
2023**	5.734,56	169.750	33,78

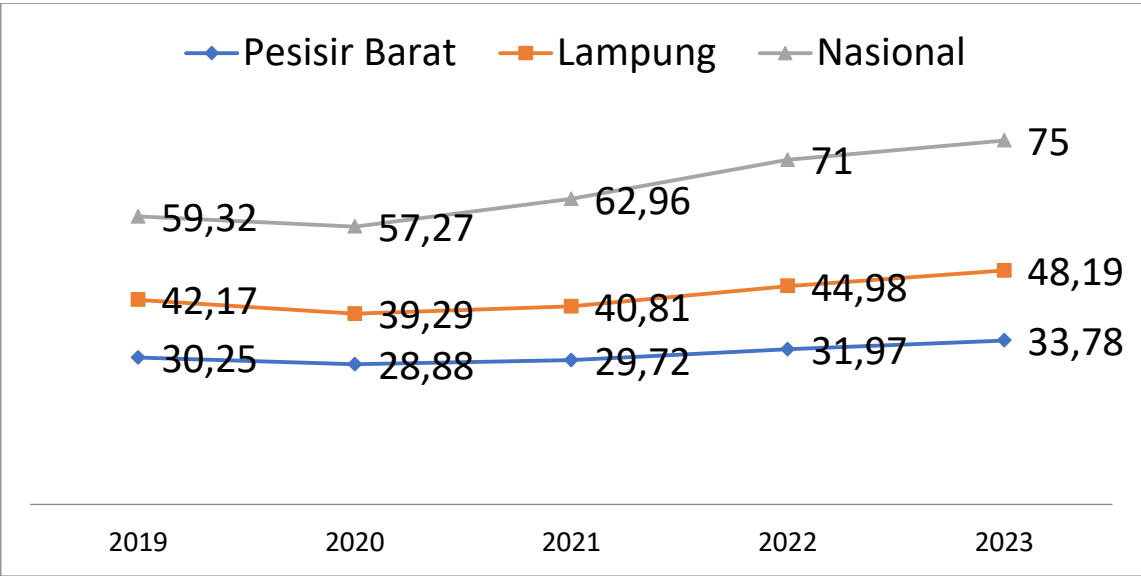
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

*angka sementara

*angka sangat sementara

Pada tahun 2024 PDRB Perkapita diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan berada pada angka 34.60-36.60 (dalam juta rupiah). sementara untuk target pada tahun 2025 mendatang diproyeksikan sebesar 36,60-38.10 (dalam juta rupiah). Walaupun melihat tantangan perekonomian nasional dan provinsi yang semakin berat, optimisme akan terjadinya pertumbuhan ekonomi juga masih diharapkan.

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

3.1.1.7 Inflasi Daerah

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan dan juga penurunan. Rata-rata

tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan inflasi regional, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Pada Juni 2024, terjadi inflasi years on years (yoy) Provinsi Lampung sebesar 2,84% dengan indek harga konsumen (IHK) sebesar 107,31. Penyumbang inflasi tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur mencapai 4,06% dan inflasi terendah adalah Kota Bandar Lampung sebesar 2,25% dengan IHK 106,11. Selain itu menurut month to moth (m-to-m) Juni 2024 tercatat deflasi sebesar 0,11% dan tingkat inflai years to date (y-to-d) Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,52%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau 6,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 3,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,59 persen; kelompok kesehatan 0,06 persen; kelompok transportasi 0,59 persen;; kelompok pendidikan 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,68 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen dan kelompok rekreasi.olahraga dan budaya sebesar 0.96. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Juni 2024, antara lain beras, kopi bubuk, sigaret krtetk mesin (SKM), cabai merah dan bawang putih. .

Inflasi years on years (yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi memberikan andil sebesar 0,06 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 2,05 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,18 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,17 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,04. Sementara kelompok pengeluaran

yang mengalami penurunan/stabil indeks adalah kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil sebesar -0,02 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,02.

3.1.2. Perkembangan Kinerja Sosial Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik antar penduduk dan antar wilayah. Beberapa indikator dalam peningkatan kinerja sosial ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat antara lain adalah Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

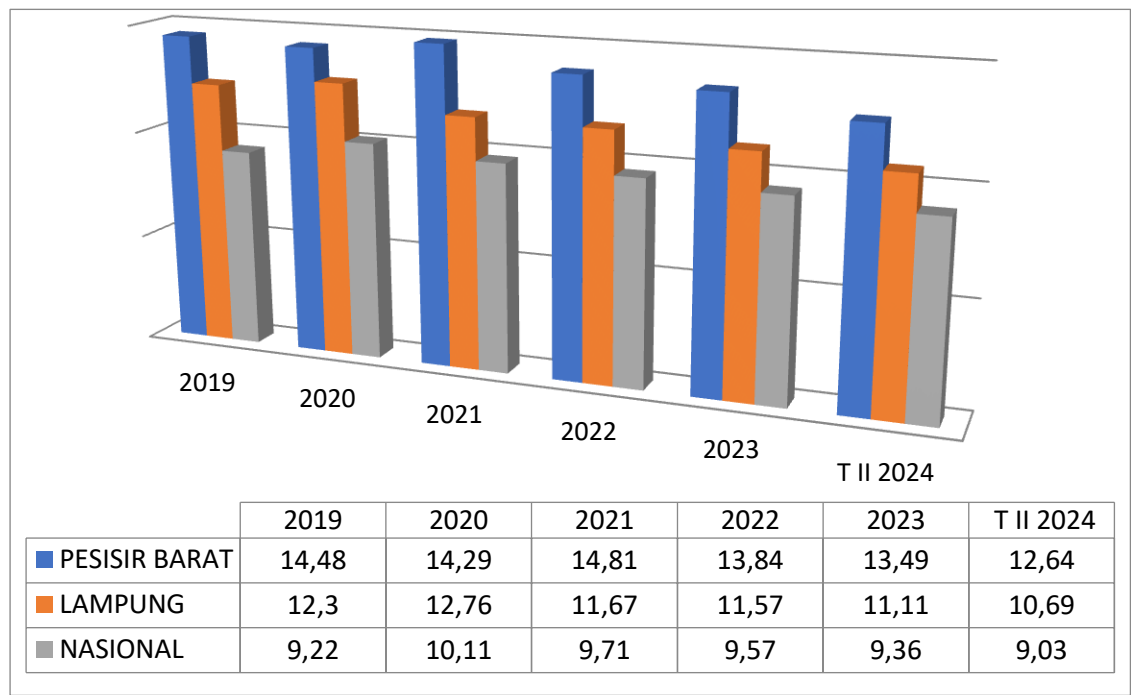
3.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan terus menurun, hal ini sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pada data tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 tingkat kemiskinan sebesar 14,48% atau terdapat 22.380 jiwa penduduk miskin. Data pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada pada angka 14,29% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.241 jiwa. Pada tahun 2021, angka kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14.81% atau sebanyak 23.230 jiwa penduduk miskin daerah. Kenaikan sebanyak 0.52% dipengaruhi dari efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan penduduk marginal kesulitan dalam berusaha kemudian di tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 13,84% penduduk miskin di daerah atau sebanyak 21.500 orang. Capaian tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 13,49% atau sebanyak 21,450 penduduk sementara data keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 berada pada indeks 0,45 atau turun 0,08 point dari tahun 2022 dengan indeks 0,53

Untuk triwulan II tahun 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 12,64% atau lebih baik dari proyeksi/target tingkat kemiskinan tahun 2024 13,34%. Proyeksi jumlah penduduk miskin yang naik dari sisi jumlah dilakukan dengan tetap memperhatikan kenaikan jumlah penduduk. Angka proyeksi ini diambil dari

perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat selama 5 (lima) tahun dari 2019-2023 yang secara rata-rata turun sebanyak 0,30-0,50% pertahunnya walaupun terkoreksi pada tahun 2021. Proyeksi tingkat kemiskinan di tahun 2024 sebesar 13,34% – 12,30% dengan mempertimbangkan capaian pada triulan tahun 2024 yang sudah mencapai 12,64%.

Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023

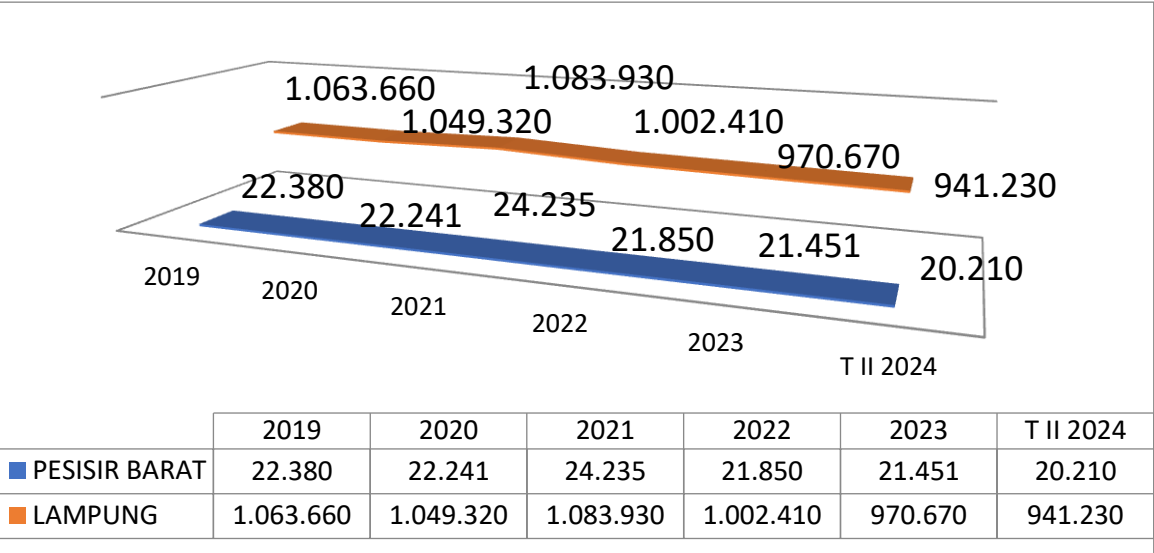


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Untuk triwulan II tahun 2024, tingkat kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 12,64%, jauh melebihi data Provinsi Lampung pada angka 10,69%. Angka capaian Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung ini masih diatas dari Nasional yang mencatat sebanyak 9,03% jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Data untuk Tingkat Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 20.210 jiwa atau menurun 1.240 jiwa dari tahun 2023 yang mencapai 21.450. penurunan jumlah penduduk miskin secara regional di Provinsi Lampung juga mengalami penuruan dari 970,670 jiwa menjadi 941.230 jiwa atau turun sebanyak 29.440 jiwa dengan demikian kontribusi penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung mencapai 4,21%.

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

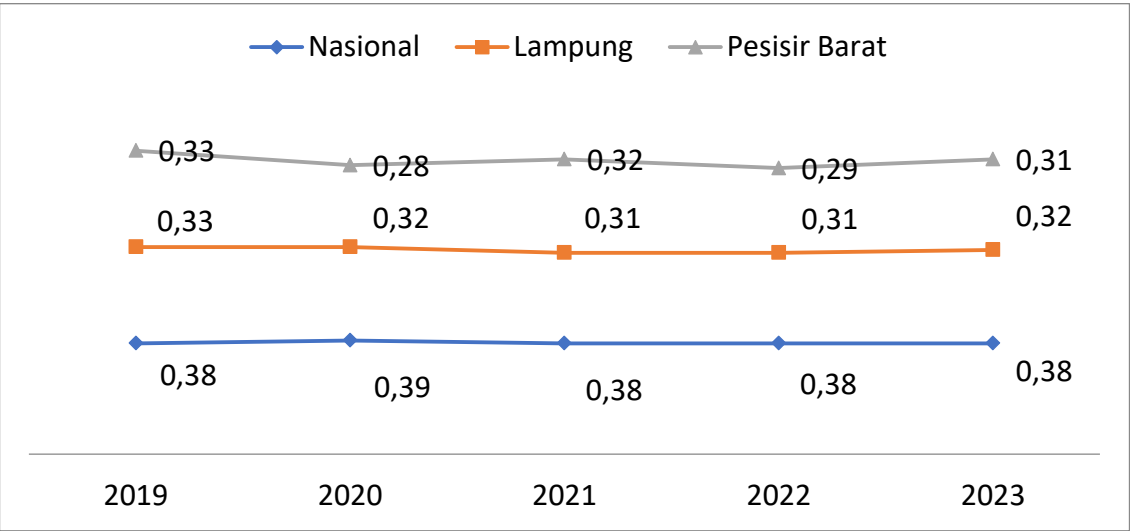
3.1.2.2 Indeks Gini

Rasio Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan indeks gini (gini ratio) di Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini terus mengalami perbaikan. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan PDRB Perkapita penduduk dan juga persebaran jumlah tenaga kerja. Kabupaten Pesisir Barat yang juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Ketimpangan pendapatan di antara penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 sebesar sebesar 0,33. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian mengalami perbaikan kinerja dan berada pada angka 0,28. Pada tahun 2021 yang lalu, angka ini kembali mengalami koreksi dan berada pada angka 0,32. Tahun 2022 ada perbaikan kinerja daerah, sehingga indeks gini turun menjadi 0,29. Sementara untuk tahun 2023 rasio gini berada pada angka 0,31 atau mengalami kenaikan ketimpangan sebesar 0,02 point.

Berikutnya proyeksi pada tahun 2024 ini diharapkan akan berada pada angka 0,29-0,31 poin. Angka proyeksi ini didapatkan dari perhitungan rata-rata dari penurunan gini ratio daerah yang cenderung turun stagnan dikisaran angka

(0,005-0,02) poin pertahunnya. Gini rasio Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 0.31. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.32 dan nasional yang berada pada angka 0.38.

Gambar 3.5 Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Data untuk Rasio Gini untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Lampung yang diukur menggunakan Rasio Gini adalah sebesar 0,302. Angka ini turun 0,022 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2023 yang sebesar 0,324 jika dibandingkan dengan September 2022 gini rasio sebesar 0.313 atau menurun 0,011 point.

Rasio Gini di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,323 turun dibanding gini rasio Maret 2023 yang sebesar 0,359 dan gini rasio September tahun 2022 yang sebesar 0,352. Sedangkan untuk gini rasio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275 atau turun dibanding gini rasio Maret 2023 yang sebesar 0,287 dan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan gini rasio September 2022.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah 22,12 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Lampung pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,45 persen yang berarti tergolong pada kategori

ketimpangan rendah sedangkan untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 23,18 persen, yang artinya tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

3.1.2.3 Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat selain dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB dan PDRB Perkapita juga perlu dilihat dari sisi sumbangan kontribusi PDRB daerah terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada tahun 2023, secara struktur PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan kontributor terendah di Provinsi Lampung atau berada pada urutan 15. Kontribusi daerah walaupun stagnan pada tahun 2019-2023 dengan nilai 1,27-1,30% dan masih terus terendah. Hal ini sejalan dengan capaian dari Kabupaten Lampung Barat yang berada pada urutan ke-13, bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten induk. Sementara Kabupaten Lampung tengah adalah kontributor tertinggi dari tahun 2019-2023.

Berikut adalah data kontribusi PDRB ADHB 15 Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Provinsi Lampung:

Tabel 3.7 Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2019-2023 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lampung Barat	1,97	1,99	1,99	1,99	2,00
2	Tanggamus	4,33	4,31	4,34	4,35	4,34
3	Lampung Selatan	12,40	12,36	12,33	12,37	12,35
4	Lampung Timur	11,55	11,35	11,65	11,94	11,71
5	Lampung Tengah	19,71	19,82	19,74	19,81	19,95
6	Lampung Utara	6,60	6,63	6,60	6,50	6,48
7	Way Kanan	3,88	3,90	3,89	3,88	3,87
8	Tulang Bawang	6,40	6,44	6,42	6,24	6,24
9	Pesawaran	4,50	4,52	4,47	4,47	4,48
10	Pringsewu	3,10	3,11	3,10	3,08	3,10
11	Mesuji	2,89	2,90	2,89	2,87	2,87
12	Tulang Bawang Barat	3,18	3,19	3,18	3,18	3,19
13	Pesisir Barat	1,30	1,30	1,30	1,28	1,27
14	Bandar Lampung	16,43	16,42	16,34	16,31	16,41
15	Metro	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74
	Jumlah	100	100	100	100	100

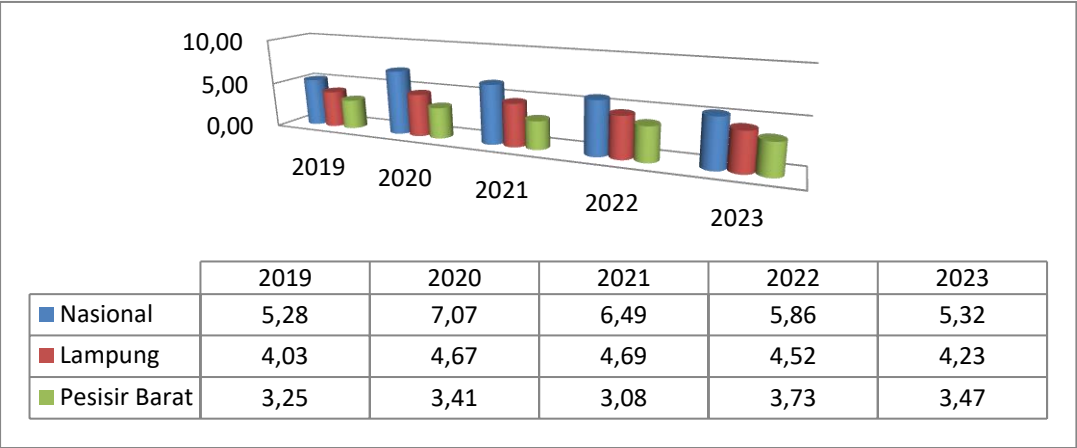
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada 3,25% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,41%. di tahun 2021 kinerja indikator TPT pada tahun 2021, kembali mengalami perbaikan menjadi 3,08%. Sementara tahun 2022 terkoreksi cukup signifikan seiring dengan terkoreksinya angka kemiskinan daerah. faktor utama efek domino dari Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi roda perekonomian daerah khususnya akibat pembatasan orang dan barang dan jasa yang beredar membuat beberapa jenis pekerjaan/usaha mengalami kemunduran yang berakibat pengurangan jumlah tenaga kerja. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 3,73%. capain kinerja indikator TPT di tahun 2023 mengalami perbaikan dengan angka 3,47% atau meningkat sebesar 0,26 point.

Selanjutnya untuk proyeksi pada tahun 2024 nilai TPT akan berada pada angka 2,60-3,20%. Proyeksi ini melihat pada kondisi dalam 5 (lima) tahun perkembangan penurunan TPT yang berada pada kisaran 0,10-0,65%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Data untuk TPT untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana jumlah angkatan kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional pada februari 2024 sebanyak 5.044,04 ribu orang, naik 40,90 ribu orang dibanding Februari 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak

4.836,33 ribu orang, naik 42,30 ribu orang dari februari 2023. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,19 persen.

Komposisi angkatan kerja pada februari 2024 terdiri dari 4.836,33 ribu orang penduduk yang bekerja dan 207,70 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan februari 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 40,90 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 42,30 ribu orang. Sementara pengangguran berkurang sebanyak 1,42 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2023. TPAK pada februari 2024 sebesar 71,51 persen, turun 0,56 persen dibanding Februari 2023. TPAK mengindikasikan bahwa besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 4.794,0 ribu orang penduduk yang bekerja dan 209,1 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2022 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 32,1 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 37,2 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 5,2 ribu orang. TPAK mengalami penurunan dibanding Februari 2022. TPAK pada Februari 2023 sebesar 72,07 persen, turun 0,44 persen poin dibanding Februari 2022.

Menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 5,46 persen jauh dibanding dengan daerah perdesaan yang sebesar 3,41%. Dibandingkan dengan TPT perkotaan dan Perdesaan mengalami penurunan masing – masing sebesar 0,28 persen dan 0,04 persen

3.1.3 Kerangka Ekonomi Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023

3.1.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan I tahun 2023 (Y-o-Y) tumbuh sebesar 5,11%. Menurut lapangan usaha Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 18,88%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial 11,64%, jasa perusahaan 9,63% kemudian jasa pengolahan dan perdagangan besar dan eceran –reparasi mobil dan

sepeda motor masing – masing tumbuh sebesar 4,13% dan 4,58%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengeolahan sebesar 19,28%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran-reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,15%, pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 11,61%, konstruksi sebesar 10,23%, kemudian pertambangan dan penggalian sebesar 9,34%. Kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,61%.

Pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2024 ini juga didukung oleh komponen pengeluaran, dimana komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-LNPRT sebesar 24,29%, diikuti komponen PK-P sebesar 19,90%, PK-RT 4,91%, PMTB sebesar 3,79% dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 0,50%. Selain itu komponen import barang dan jasa sebagai faktor pengurang juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,77%. Struktur PDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan yang berarti, dimana komponen PK-RT mendominasi dengan kontribusi sebesar 54,93%, kemudian PMTB sebesar 29,31%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 21,37%, komponen PK-P sebesar 6,25%, komponen perubahan inventori sebesar 2,53% dan komponen PK-LNPRT sebesar 1,43%. Komponen pengurang impor barang dan jasa memiliki kontribusi sebesar 19,77%.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,83% dibanding triwulan IV tahun 2023 (Q-to-Q). Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya jasa pendidikan sebesar 10,34%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,48%, konstruksi sebesar 2,57%. Sementara itu pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,19%, diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,25%. Dari aspek pengeluaran kontraksi terjadi di semua komponen pengeluaran kecuali komponen PK-RT dan komponen PK-LNPRT yang tumbuh masing – masing sebesar 0,64% dan 4,18%. Komponen dengan kontraksi terdalam adalah komponen PK-P sebesar 36,69%, diikuti komponen ekspor barang dan jasa sebesar 6,26% dan komponen PMTB sebesar 4,84% kemudian faktor pengurang impor barang dan jasa juga mengalami kontraksi sebesar 4,11%.

Secara regional Pulau Jawa masing memiliki pengaruh yang cukup tinggi secara spasial dalam perekonomian Indonesia, kontribusi tercatat sebesar 57,70% terhadap PDB, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,85%, Pulau Kalimantan sebesar 9,19%, Pulau Sulawesi sebesar 6,89%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75% dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62%. Pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan kinerja positif di triwulan I tahun 2024 ini, pertumbuhan (Y-on-Y) provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15%, disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35%, Pulau Kalimantan sebesar 6,17% dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07%. Sementara itu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera mengalami pelambatan pertumbuhan, masing – masing sebesar 4,84% dan 4,24%.

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,28. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,65 persen dengan IHK sebesar 111,29 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,08 persen dengan IHK sebesar 103,95. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 7,86 persen dengan IHK sebesar 110,53 dan terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 104,64. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,89 persen; kelompok transportasi sebesar 1,61 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,50 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Juni 2024 sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Juni 2024 sebesar 1,07 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Juni 2024 sebesar 1,90 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,10 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 1,14 persen.

3.1.3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional

Pasca Pandemi Covid-19, Pertumbuhan ekonomi Lampung telah menunjukkan tren pertumbuhan positif meski belum bisa menyamai saat sebelum pandemic Covid-19. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2019 berada pada angka 5,26 persen. Saat pandemi Covid-19 tahun 2020, ekonomi Lampung berkontraksi -1,76 persen, kemudian tumbuh 2,79 persen di tahun 2021 dan terus tumbuh positif menjadi 4,28 persen di tahun 2022 dan terakhir di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan yang lebih tinggi, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Disisi eksternal, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat akibat kenaikan suku bunga, inflasi karena kenaikan harga energi yang masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina dan pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Melambatnya pertumbuhan ekonomian global tersebut mempengaruhi turunnya harga komoditas global, termasuk harga komoditas andalan ekspor Provinsi Lampung.

Disisi internal pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih menjadi pokok perhatian antarwaktu, antara lain : mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya mendorong tumbuhnya sumber-sumber “baru” pertumbuhan ekonomi, harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi daerah, mengawal transisi sektor ekonomi yang berbasis agraris menuju industri, penyediaan infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi untuk memperkuat konektivitas dan pengembangan wilayah, mengembangkan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan lokal dan daerah, menjaga stabilitas kamtibmas dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, termasuk didalamnya upaya-upaya mengurangi kesenjangan antarkelompok, pengarus utamaan gender, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melanjutkan upaya tatakelola pemerintahan yang baik, maupun berbagai persoalan bidang pembangunan lainnya; yang kesemuanya

merupakan tantangan yang memerlukan kerja bersama antarpemangku kepentingan pembangunan,

Prospek terjaganya permintaan domestik diperkirakan menjadi penopang utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 untuk tumbuh pada kisaran 4,6%-5,1% di tengah masih tingginya risiko global. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pagu anggaran belanja APBD se Provinsi Lampung dan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 diperkirakan tetap terjaga pada sasaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi menjelang pertengahan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan terjaga terjaga pada kisaran $2,5 \pm 1\%$. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik dan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 4,67% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 15,67% (yoy) pada triwulan laporan, terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Komponen investasi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,31% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Pembangunan ekonomi yang direalisasikan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perekonomian yang berkembang, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2024, antara lain:

- a. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.
- b. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
- c. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek clean and clear, serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan antar instansi dan mendorong penggunaan *Local Currency Settlement (LCS)*.
- d. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.l melalui behaviorally informed policy intervention) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
- e. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda)
- f. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
- g. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas

pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1.3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi secara nasional diantaranya dipengaruhi oleh arah kebijakan umum fiskal yang terdapat pada RKP tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, dalam hal ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan (sustainabilitas) fiskal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara nasional dipengaruhi pula oleh arah kebijakan umum belanja yang terdiri dari kebijakan umum belanja negara, kebijakan umum belanja pegawai, kebijakan belanja barang dan jasa, kebijakan belanja modal, kebijakan belanja subsidi, kebijakan bantuan sosial, dan kebijakan belanja transfer pada Tahun 2024.

Disatu sisi, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Sementara itu di sisi lain terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter fiskal maupun sektor riil. Selain itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia yang berpengaruh pada naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak), harga-harga kebutuhan bahan pokok dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor dan yang perlu terus dijaga adalah tingkat inflasi daerah.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2023-2024. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat

sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. Tahun 2023-2024, usaha yang mampu bertahan adalah usaha yang dapat mengedepankan efisiensi dan efektivitas operasional.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023-2024 diproyeksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan-tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global dan regional. Tantangan-tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah, antara lain:

- a. Keterbatasan fiskal daerah yang lebih banyak bergantung dengan Dana Transfer diperkirakan akan sedikit banyak mempengaruhi percepatan pembangunan di daerah;
- b. Pada tahun 2024 mendatang, tantangan perekonomian daerah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam kaitanya dengan memperlancar proses produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat;
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan stimulan bagi masyarakat, baik dari sisi bantuan uang, sembako, dan atau modal usaha UMKM. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor riil (baik untuk pekerjaan penggunaan dana desa) juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi usaha mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan tanpa melupakan dukungan dari sektor-sektor lainnya, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-

- undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi untuk proses investasi dan perizinannya melalui reformasi regulasi;
- f. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
 - g. Meningkatkan partisipasi swasta dan seluruh stakeholder melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
 - h. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL (pedagang kaki lima) secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Pesisir Barat, disamping menciptakan lapangan kerja;
 - i. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Pesisir Barat;
 - j. Memfasilitasi pengembangan koperasi diberbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan
 - k. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Tantangan yang diproyeksikan tersebut di atas seyogyanya adalah hal yang hampir sama dirasakan oleh daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, melihat kondisi di lapangan berdasarkan pada kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang saat ini masih dalam fokus penguatan kelembagaan maka tantangan-tantangan tersebut akan terasa lebih berat. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi bersifat teknis dari dalam daerah, namun lebih kepada kondisi eksternal.

Prospek dan perkembangan kondisi perekonomian makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2020-2022 walaupun dengan beberapa catatan. Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai peranan dari sektor tersier seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian berpengaruh signifikan dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Perkembangan ekonomi daerah, bila dilihat dari PDRB untuk 2024 masih akan bergantung pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sektor yang paling banyak memberikan kontribusi. Terlepas selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan capaian 45% dan penyumbang lapangan pekerjaan terluas di daerah. Harapan untuk peningkatan sektor Konstruksi untuk PDRB, dimana selama 5 tahun terakhir terus meningkat dan memberikan kontribusi hampir 8% dari total PDRB. Terlebih dengan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, harapannya sektor konstruksi dapat terus tumbuh positif.

Berikutnya, perkembangan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang stabil naik dan memberikan kontribusi 15% dari total PDRB juga akan terus berkembang. Dimana dengan kenaikan jumlah penduduk dan juga kehadiran wisatawan dapat menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan sektor ini berikut dengan sektor jasa.

Dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian nasional dan regional Lampung, diestimasikan perekonomian daerah Pesisir Barat masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat lesunya pertumbuhan ekonomi secara global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Tahun 2024, dimana jumlah penduduk miskin dan kondisi kemiskinan daerah masih harus dikelola dengan proposional dan profesional dalam kaitannya menjadikan masyarakat marjinal sebagai subjek pembangunan dengan

pemberdayaan. Tujuan jangka panjangnya adalah dengan menurunnya angka kemiskinan juga akan menurunkan beban pemerintah daerah dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial. Sehingga pendanaan dapat dialihkan pada sektor lainnya. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 tidak jauh berbeda bahkan meningkat pada tahun 2022, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor. Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. Diperlukan strategi regulasi dengan ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor unggulan.

Prospek perekonomian Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2024 dipengaruhi antara lain:

- a. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis yang berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu memberikan peluang sebagai daerah penghubung sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya;
- b. Mulai menurunnya produktivitas pertanian dibarengi dengan kenaikan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib;
- c. Mulai berkembangnya jumlah sektor industri, khususnya industri skala kecil dan menengah (IKM) dan industri kreatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menopang perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dimasa yang akan datang;
- d. Sebagai daerah penunjang, peranan sektor tersier seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransidan Jasa Lainnya diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan bpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat;
- e. Kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan bantuan dan/atau jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19 diharapkan dapat memberikan impact pada kondisi ekonomi masyarakat. Diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat, sehingga sector riil dapat kembali hidup. Kemudahan dalam pengajuan kredit bagi UMKM juga merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu memperbaiki sektor usaha.

- f. Kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan bantuan dan/atau jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19 diharapkan dapat memberikan impact pada kondisi ekonomi masyarakat. Diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat, sehingga sector riil dapat kembali hidup. Kemudahan dalam pengajuan kredit bagi UMKM juga merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu memperbaiki sektor usaha.

Tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan, dimana penganggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dimana proses penganggaranya telah disusun sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 mendatang untuk tataran pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

- h. Target ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,6-4,1%;
 - Target Tingkat Kemiskinan sebesar 13,34%;
 - Target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,60%;
 - Target PDRB Perkapita sebesar Rp.33,60-34.10 juta;
 - Target IPM sebesar 65,44;
 - Target Rasio Gini sebesar 0,30-0,29;
 - Target Nilai Tukar Petani sebesar 100.77;

3.1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2024

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta dengan melihat pada tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan akhir tahun 2024 serta dengan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan ulang target-target sasaran makro pembangunan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2024	capaian sampai dengan Triwulan II	Sasaran Perubahan RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.60- 4,1%	3,42%*	3,60 –4,10%
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13,34%	12,64%	13,34 – 12,30%
3	TPT	Persen	2.60-3,00%	3,47%*	2,60 – 3.00%
4	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	33,60 – 34,10 Juta	33,78*	33,60 – 34,10 juta
5	IPM	Poin	65,44	70,40*	70,44 – 71,00
6	Rasio Gini	Poin	0,30 – 0,29	0,31*	0,30 – 0,29
7	NTP	Poin	100,77	109,32	110,00
8	Penurunan Gas Rumah Kaca	Persen	11%	-	11%

Sumber : BPS (diolah), 2024

*Data Tahun 2023

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari daerah yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (vii) Unsur Kewilayahan; dan (viii) Unsur Pemerintahan Umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah bersanding dengan perencanaan, penatausahaan serta pengendaliannya.

Guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran keuangan untuk sisa pelaksanaan tahun 2024 di Kabupaten Pesisir barat diarahkan untuk:

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan

karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara antara lain: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit anggaran yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah; dan (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel;
- d. Memenuhi ketentuan *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- e. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2024;

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilaksanakan dengan kondisi seperti hal-hal di bawah ini:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perkembangan kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai dari rencana awal pada tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 serta dinamika pembangunan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap kerangka keuangan daerah, termasuk penggunaan dana SilPA Tahun Anggaran 2023 (dalam hal ini terdapat defisit SilPA antara target yang ditetapkan pada APBD TA 2024 dengan data realisasi audit BPK RI terhadap APBD TA 2023). Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2024 ini. Berdasarkan pada kondisi tersebut, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Memperhatikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan/Dana Transfer), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

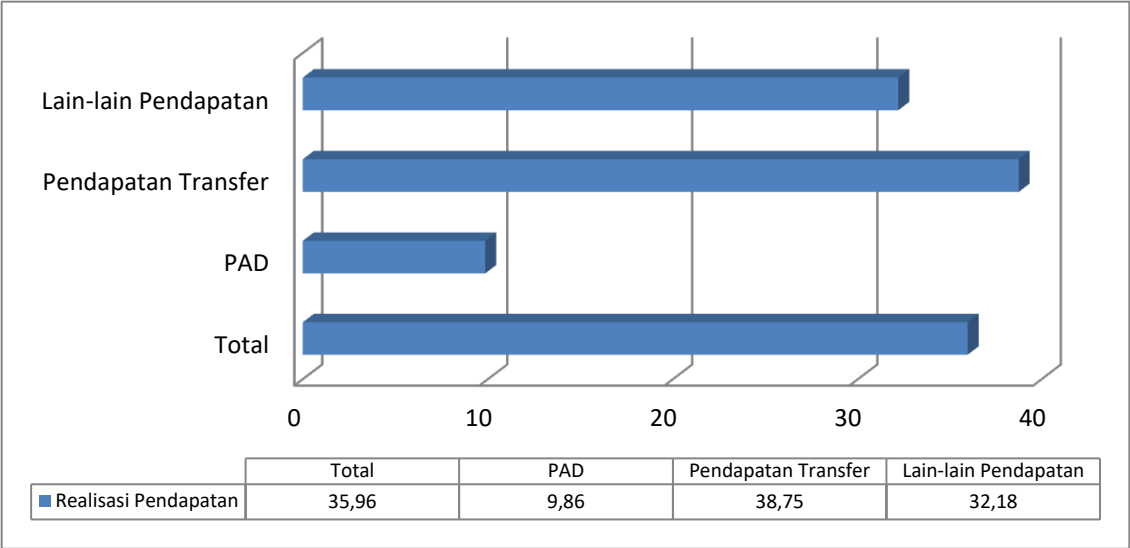
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (i) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pemeliharaan rutin bagi peningkatan pelayanan; (ii) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, baik melalui sosialisasi serta iklan layanan menggunakan media komunikasi publik dan media sosial; (iii) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; (iv) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; (v) Meningkatkan sinergitas antar instansi yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah; (vi) Melakukan perbaharuan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (vii) Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PAD;
- b. Pendapatan Transfer yang meliputi (i) Memperbaharui berbagai variabel serta kebutuhan penghitungan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat; (ii) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; (iii) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka persiapan usulan

- DAK; (iv) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk dana bagi hasil dari pemerintah provinsi; (v) Peningkatan tata kelola keuangan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan, dikoordinasikan oleh daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah mengalami kenaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu pada target lain-lain PAD yang sah.
- b. Kenaikan pada pos PAD dari sumber Lain-lain PAD yang Sah, hal ini diasumsikan berdasarkan pada perhitungan tambahan kebutuhan anggaran pada urusan pemerintahan yang tersebar di perangkat daerah.
- c. Sementara untuk pos pendapatan daerah lainnya diasumsikan tetap.
- d. Hasil realisasi capaian Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2024 yaitu Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada periode semester I Tahun 2024 belum mampu terealisasi secara maksimal, yaitu masih di bawah 50%. Hal ini dapat dilihat dari Total Pendapatan yang baru mampu teralisasi 35,96%. Angka ini didapatkan dari perhitungan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi pada angka 9,86%, Pendapatan Transfer pada angka 38,75%. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah pada angka 32,18%. Namun demikian, optimisme untuk pencapaian target-target pendapatan pada Triwulan III dan IV Tahun 2024 diharapkan akan dapat terwujud dengan beberapa catatan perbaikan kinerja.

Gambar 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Hingga triwulan II TA 2024 ini, Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.909.473.419.916 baru terealisasi Rp.327.031.316.036. Beberapa Pos Pendapatan Daerah yang pencapaiannya masih sangat minim dan perlu dilakukan monitoring seperti PAD yang terealisasi sebesar 9,86% dengan capaian Rp.8.327.609.539 dari target Rp.84.462.363.695.

Sementara itu, capaian kinerja yang telah melampaui 100% adalah pada pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan capaian sebesar 110,27% dari target Rp.2.929.479.534,00 dan angka realisasi sebesar Rp.3.230.248.906 dan capaian kinerja yang telah 50%, yaitu Dana Insentif Fiskal yang ditargetkan pada angka Rp.22.923.226.000 dan terealisasi sebesar Rp.11.461.613.000.

Berikut adalah uraian singkat realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan II TA 2024 (Rp.)	(%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	909.473.419.916	327.031.316.036	35,96
4.1	Pendapatan Asli Daerah	84.462.363.695	8.327.609.539	9,86
4.1.1	Pajak daerah	16.400.627.598	2.527.823.089	15,41
4.1.2	Retribusi Daerah	2.467.370.380	507.727.121	20,58
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg	2.929.479.534	3.230.248.906	110,27

	Dipisahkan			
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	62.664.886.183	2.061.810.423	3,29
4.2	Pendapatan Transfer	809.920.942.076	313.847.917.580	38,75
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.370.634.000	281.539.749.337	40,72
4.2.1.1	Dana Perimbangan	575.155.912.000	270.078.136.337	46,96
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0	0	0
4.2.1.3	Dana Desa	93.291.496.000	0	0
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.550.308.076	32.308.168.243	27,25
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	118.550.308.076	32.308.168.243	27,25
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	15.090.114.145	4.855.788.917	32,18
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.090.114.145	4.855.788.917	32,18
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	15.090.114.145	4.855.788.917	32,18

Sumber : Bapenda - BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Lebih lanjut, disajikan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD TA 2021 -- 2023 sebagai pembanding, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2021 - 2023

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		
		2021	2022	2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	791.417.205.888	769.761.549.332	769.698.593.890
4.1	Pendapatan Asli Daerah	28.360.235.945	29.045.920.662	36.026.850.720
4.1.1	Pajak daerah	9.431.317.364	9.997.052.361	13.118.459.278
4.1.2	Retribusi Daerah	934.137.375	1.328.688.256	1.282.316.994
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.901.458.894	2.406.970.133	2.514.171.916
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.093.322.312	15.333.209.912	19.111.902.531
4.2	Pendapatan Transfer	737.827.416.943	740.715.628.670	732.671.743.170
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	686.024.586.474	677.460.797.296	678.408.631.752
4.2.1.1	Dana Perimbangan	557.757.654.474	553.406.514.296	562.030.889.752
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	8.511.835.000	27.002.655.000	21.751.813.000
4.2.1.3	Dana Desa	119.755.097.000	97.051.628.000	94.625.929.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.802.830.469	63.254.831.374	54.263.111.418
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	51.802.830.469	63.254.831.374	54.263.111.418
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	25.229.553.000	0	0

4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25.229.553.000	0	0
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	25.229.553.000	0	0

Sumber : Bapenda - BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Dari berbagai pertimbangan serta melihat gambaran atas realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah seperti yang telah diuraikan diatas serta analisis dan perkiraan dari sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, maka proyeksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	929.603.096.460	909.473.419.916	925.992.279.822	16.518.859.906
4.1	Pendapatan Asli Daerah	108.642.198.887	84.462.363.695	100.981.223.601	16.518.859.906
4.1.1	Pajak daerah	13.882.490.847	16.400.627.598	16.400.627.598	-
4.1.2	Retribusi Daerah	2,116,319,700	2.467.370.380	2.467.370.380	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.931.409.014	2.929.479.534	2.929.479.534	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	89.711.979.326	62.664.886.183	79.183.746.089	16.518.859.906
4.2	Pendapatan Transfer	820.960.897.573	809.920.942.076	809.920.942.076	-
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750.966.290.379	691.370.634.000	691.370.634.000	-
4.2.1.1	Dana Perimbangan	618.472.903.289	575.155.912.000	575.155.912.000	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	23.926.994.300	22.923.226.000	22.923.226.000	-
4.2.1.3	Dana Desa	108.566.392.790	93.291.496.000	93.291.496.000	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.994.607.194	118.550.308.076	118.550.308.076	-
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	69.994.607.194	118.550.308.076	118.550.308.076	-

4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	15.090.114.145	15.090.114.145	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	15.090.114.145	15.090.114.145	-
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	0,00	15.090.114.145	15.090.114.145	-

Sumber : Bappelitbangda, Bapenda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, pelayanan terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan sosial.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah,

prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait operasional perkantoran pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah melalui belanja barang dan jasa dalam kaitanya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, belanja modal, dan belanja transfer kepada pemerintah desa.

Arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.* Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. *Prioritas.* Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur, energi dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
3. *Tolok Ukur dan Target Kinerja.* Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah;
4. *Optimalisasi Belanja Daerah,* Belanja Daerah khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja

modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan

5. *Transparan dan Akuntabel.* Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berikutnya, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah kebijakan Belanja Daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat:

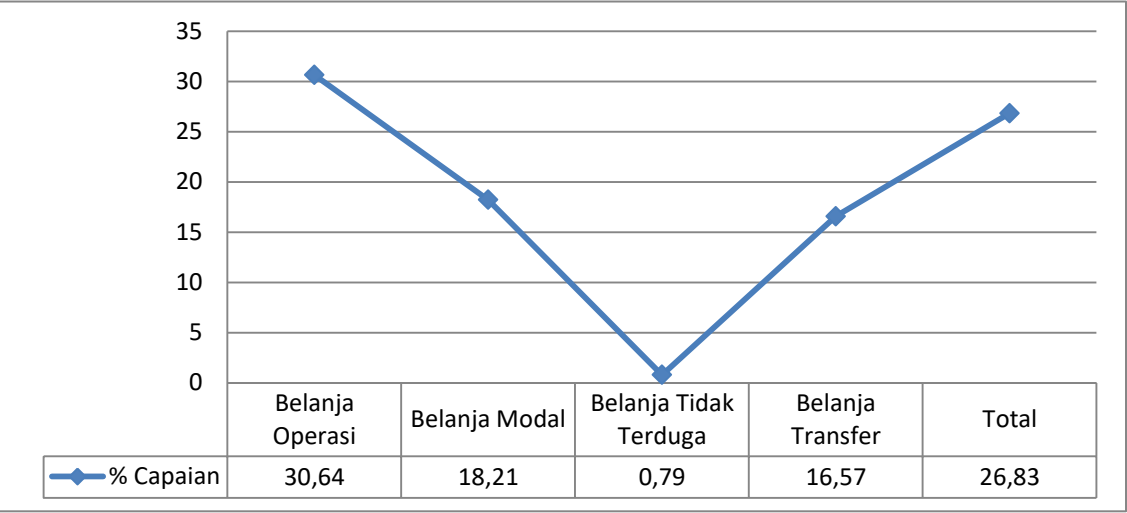
- a. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan II yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Belanja dalam rangka pemenuhan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan untuk kecamatan dan unsur pemerintahan umum;

- c. Belanja daerah diarahkan untuk pencapaian Visi, Misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan capaian kinerja dan kerangka pendanaan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dianggarkan naik dengan asumsi penyesuaian pada perhitungan ulang hingga Semester I;
- f. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran atau pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan turun dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah;
- g. Belanja bantuan sosial digunakan untuk dalam rangka meningkatkan stimulus kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat marjinal dan diberikan melalui pendataan yang terukur, selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi, pada perubahan RKPD Tahun 2024 dianggarkan tetap
- h. Belanja hibah dilakukan secara selektif, sesuai kebutuhan, pemenuhan peraturan perundang-undangan, memenuhi unsur urgensi serta dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan RKPD Tahun 2024 dianggarkan tetap;

- i. Belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk penunjang ekonomi masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pada perubahan RKPD Tahun 2024 mengalami penurunan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah;
- j. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan kegiatan kerja yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh dari Pemerintah Daerah serta sifatnya tidak biasa dan/atau tanggap darurat, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dianggarkan tetap;
- k. Belanja Transfer merupakan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintahan desa yang bersifat umum. Belanja transfer dianggarkan sesuai dengan perhitungan dari peraturan perundang-undangan dan diarahkan pada pencapaian prioritas daerah di desa, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dianggarkan tetap dalam upaya pemenuhan terhadap kewajiban daerah terhadap pemerintahan desa;
- l. Hasil realisasi capaian Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2024 belum mampu terealisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Total Belanja Daerah yang baru mampu teralisasi 26,83%. Angka capaian ini didapatkan dari perhitungan Belanja Operasi yang terealisasi pada angka 30,64%, Belanja Modal sebesar 18,21%, Belanja Tidak Terduga masih pada 0,79% dan Belanja Transfer mencapai 16,57%. Namun demikian, optimisme untuk pencapaian target-target Belanja pada Semester II Tahun 2024 akan dapat terwujud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja yang terukur.

Gambar 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Total Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.913.718.174.916 dan baru terserap sebesar Rp.245.125.410.522 atau 26,83%. Secara umum realisasi belanja daerah masih sangat minim. Sebagaimana belanja modal baru terrealisasi sebesar Rp.16.283.210.503 atau 18,21% dari total anggaran Rp. 89.425.413.678 dan belanja transfer terealisasi 25.458.470.375 atau 16,57% dari tottal anggaran 153.666.700.925 serta belanja tidak terduga yang terrealisasi sebesar Rp. 55.000.000 atau 0,79% dari total anggaran Rp. 6.945.750.000.

Capaian serapan belanja yang masih rendah berdasarkan rekening belanja pada kelompok belanja transfer, yaitu belanja bagi hasil sebesar Rp. 2,771,636.000 belum terrealisasi atau 0,00%, kemudian kelompok belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 2.000.000 atau 0,06% dari total anggaran Rp. 3.598.814.960 dan belanja jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 785.517.787 atau 2,76% dari total anggaran Rp. 28.469.440.319. sedangkan serapan pada rekening belanja tertinggi pada kelompok belanja modal, yaitu belanja modal tanah sebesar Rp. 1.620.684.000 atau 63,79% dari total anggaran Rp. 2.540.540.000.

Adapun gambaran singkat realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan II TA 2024 (Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH	913.718.174.916	245.125.410.522	26,83
5.1	Belanja Operasi	663.680.310.313	203.328.729.644	30,64
5.1.1	Belanja Pegawai	390.818.983.506	137.906.581.136	35,29
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.273.289.677	61.434.948.508	25,15
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	
5.1.5	Belanja Hibah	26.003.637.130	3.670.000.000	14,11
5.1.6	Belanja Bansos	2.584.400.000	317.200.000	12,27
5.2	Belanja Modal	89.425.413.678	16.283.210.503	18,21
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.540.540.000	1.620.684.000	63,79
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.415.210.496	2.361.366.750	17,60
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.401.407.903	11.513.641.966	27,81
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.469.440.319	785.517.787	2,76
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.598.814.960	2.000.000	0,06
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.945.750.000	55.000.000	0,79
5.3.5	Belanja Tidak Terduga	6.945.750.000	55.000.000	0,79
5.4	Belanja Transfer	153.666.700.925	25.458.470.375	16,57
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.771.636.000	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	150.895.064.925	25.458.470.375	16,87

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Capaian belanja daerah pada Triwulan II TA 2024 yang cenderung kecil diasumsikan akan naik pada akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2023

No	Uraian	APBD TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2023 (Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH	906.653.546.508	768.956.085.337	84,81
5.1	Belanja Operasi	565.951.639.704	471.972.151.479	83,39
5.1.1	Belanja Pegawai	300.651.223.356	232.858.667.102	77,45
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	237.735.779.218	213.547.071.776	89,83
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	20.047.637.130	18.696.975.801	93,26
5.1.6	Belanja Bansos	7.517.000.000	6.869.436.800	83,39
5.2	Belanja Modal	181.071.291.104	155.905.944.404	86,10
5.2.1	Belanja Modal Tanah	962.351.000	882.939.750	91,75
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.191.182.920	11.996.958.986	90,94
5.2.3	Belanja Modal Gedung	107.519.161.520	84.366.112.071	78,47

	dan Bangunan			
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.940.983.835	55.208.624.103	98,69
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.209.581.829	3.209.135.134	99,99
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	248.030.000	243.174.360	98,04
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.615.000.000	364.550.000	5,51
5.3.5	Belanja Tidak Terduga	6.615.000.000	364.550.000	5,51
5.4	Belanja Transfer	153.015.615.700	140.713.439.454	91,96
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	153.015.615.700	140.713.439.454	91,96

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Selanjutnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu sisa tahun 2024. Gambaran Proyeksi Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
5	BELANJA DAERAH	938.603.096.460	913.718.174.916	929.234.401.098	15.216.226.182
5.1	Belanja Operasi	611.127.096.460	663.680.310.313	678.896.536.495	15.216.226.182
5.1.1	Belanja Pegawai	314.265.521.808	390.818.983.506	400.205.583.506	9.386.600.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	241.427.774.652	244.273.289.677	250.102.915.859	5.829.626.182
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	44.560.000.000	26.003.637.130	26.003.637.130	-
5.1.6	Belanja Bansos	10.873.800.000	2.584.400.000	2.584.400.000	-
5.2	Belanja Modal	187.200.000.000	89.425.413.678	89.725.413.678	300.000.000
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	2.540.540.000	2.540.540.000	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000.000	13.415.210.496	13.415.210.496	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan	83.500.000.000	41.401.407.903	41.701.407.903	300.000.000

	Bangunan				
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	90.000.000.000	28.469.440.319	28.469.440.319	-
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	200.000.000	3.598.814.960	3.598.814.960	-
5.2.6	Aset Lainnya	0	0	0	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	6.945.750.000	6.945.750.000	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	6.945.750.000	6.945.750.000	-
5.4	Belanja Transfer	139.276.000.000	153.666.700.925	153.666.700.925	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.138.500.000	2,771,636.000	2.771.636.000	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	137.137.500.000	150.895.064.925	150.895.064.925	-

Sumber: Bappelitbangda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

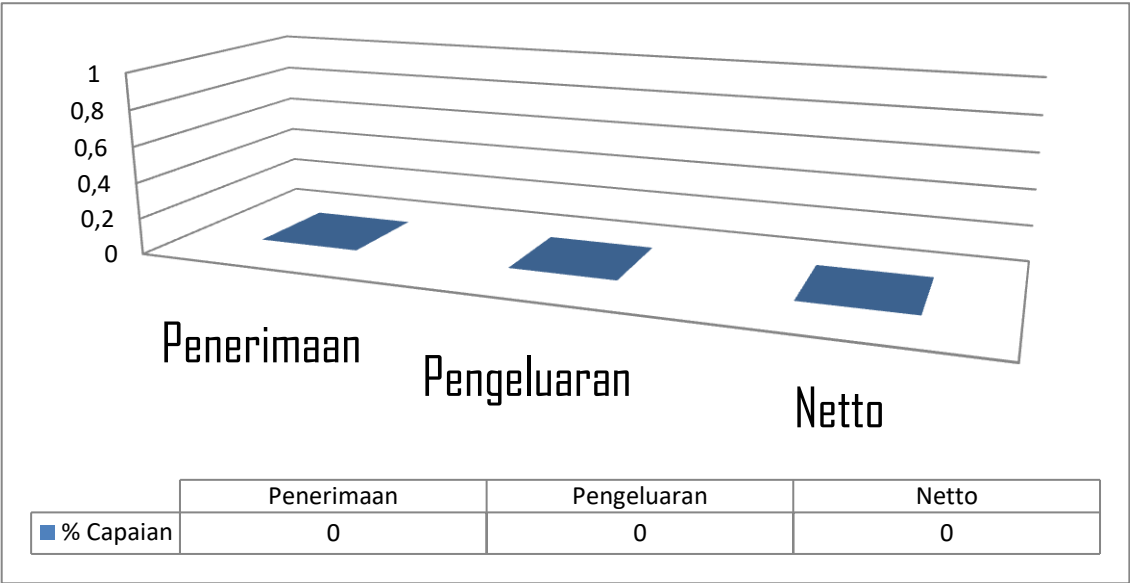
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara APBD. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini pada dasarnya bersifat pasif, dalam artian kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didapatkan dari perhitungan SilPA hasil dari audit riil BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan pada LKPD APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024, yaitu:

- a. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk menyeimbangkan antara kemampuan pendapatan daerah dengan belanja daerah;
- b. Penerimaan Pembiayaan berupa SilPA APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada APBD TA 2024 sebesar Rp.6.744.755.000,- namun sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum terrealisasi.
- c. Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp.2.500.000.000,00 belum terealisasi, namun tetap dianggarkan serupa pada Perubahan RKPD;

- f. Hasil realisasi capaian Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan II TA 2024 masih nihil atau 0,00% karena belum Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Gambar 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Total pembiayaan daerah masih belum terrealisasi dimana target yang ditetapkan pada angka Rp.4.244.755.00. penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 6.744.755.000 telah terkoreksi berdasarkan pada hasil audit riil keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menjadi Rp.5.742.121.276. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal dengan target Rp.2.500.000.000 belum direalisasikan.

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan II TA 2024 (Rp.)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4,244,755.000	0	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	6.744.755.000	0	0,00
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	6.744.755.000	0	0,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0,00

6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	0	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	0	0,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Sebagai pembanding capaian kinerja, disajikan capaian realisasi pembiayaan daerah pada TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2023

No	Uraian	APBD TA 2023 (Rp.)	Realisasi TA 2023 (Rp.)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	48.499.612.722	5.999.612.722	12,37
6.1	Penerimaan Pembiayaan	57.499.612.722	7.499.612.722	13,04
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	7.499.612.722	7.499.612.722	100
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000.000	0	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0,00

	Daerah			
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	1.500.000.000	16,67
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.500.000.000	0	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	1.500.000.000	60,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Gambaran Proyeksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000	4,244,755.000	3.242.121.276	(1.002.633.724)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	6.744.755.000	5,742,121,276	(1.002.633.724)
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	10.000.000.000	6.744.755.000	5.742.121.276	(1.002.633.724)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian	0	0	0	0

	Pinjaman Daerah				
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500,000,000	2.500.000.000
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	2.500.000.000,00	2.500.000.000	2.500.000.000
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0

Sumber: Bappelitbangda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atau target atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas dan/atau gabungan beberapa program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah dan hasil perumusan teknokratis terkait/naskah akademik. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah serta perubahan-perubahan kondisi di lapangan pada saat tahun berjalan. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tahun kedua RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan pada pencapaian kinerja, antara lain: (i) pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah sampai dengan twiluan II tahun 2024, (ii) telaah tujuan dan tahapan dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, (iii) telaah tujuan dan tahapan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, (iv) telaah prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dan isu-isu kebijakan nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi demi percepatan target dan sasaran pembangunan daerah, provinsi dan nasional tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat harus dapat mendukung target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Namun demikian, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tetap harus berpedoman pada kewenangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga dalam menyusun Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat daerah harus berdasarkan pada pembagian urusan pemerintahan daerah.

Visi dari pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang terangkum dalam Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera”**. Penjelasan secara umum dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pesisir Barat yang Amanah

Pesisir Barat yang Amanah mengandung makna setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan selalu dilandasi dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam usaha-usaha untuk menyejahterakan masyarakat.

b. Pesisir Barat Maju

Pesisir Barat yang maju mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dalam artian sumber daya manusia yang kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Sumber daya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan mempunyai integritas. Dengan demikian, maka akan dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain) dari produk daerah dan sumber daya alam.

c. Pesisir Barat Sejahtera

Setelah Pesisir Barat mampu menjalankan pemerintahan yang amanah dan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta daya saing daerah, maka diharapkan secara bertahap Pesisir Barat akan sejahtera. Secara ekonomi, sejahtera adalah kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejahtera adalah suatu kondisi yang bersifat multidimensi yang mencakup terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), tersedianya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, ketersediaan jaminan masa depan, tingginya kualitas sumber daya manusia serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan bermasyarakat.

Visi tersebut diarahkan pencapaiannya dengan misi-misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dasar berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (6) Pengentasan kemiskinan; dan (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing dari angkatan kerja.

b. Misi 2: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan melalui: (1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar secara bertahap dan merata, khususnya gedung pelayanan pemerintahan daerah; (2) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (3) Pembangunan konektivitas multimoda transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (4) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi informasi untuk transformasi digital; (5) Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup dan daya dukung lingkungan; (6) Peningkatan Ketahanan Bencana daerah dan Perubahan Iklim.

c. Misi 3: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan perikanan dan peternakan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; (3) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; (4) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; (5) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah.

d. Misi 4: Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal

Pariwisata daerah diharapkan menjadi lokomotif peningkatan ekonomi daerah, yaitu dengan konsep pembangunan inklusif seluruh sektor yang akan mendukung pariwisata daerah, melalui (1) Pembangunan destinasi pariwisata daerah; (2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (3) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e. Misi 5: Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga

Pelayanan publik yang dekat, murah dan mudah bagi masyarakat merupakan indikator keberhasilan pengelolaan pemerintahan daerah usaha menuju kearah ini dicapai melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Penataan regulasi dan tata kelola proses perizinan dan investasi daerah; (3) Peningkatan rasa aman, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Visi dan Misi, tujuan serta Sasaran Pembangunan merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan Visi dan Misi menjadi program dan kegiatan yang dapat direalisasikan. Dengan kata lain, merealisasikan suatu hal yang abstrak menjadi riil dan konkret. Visi dan Misi dimaksudkan untuk memberikan gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan dimaksudkan untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dan harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mencapai target dan hasil yang ingin dicapai.

Sebagai kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka memasuki periode tahun kedua untuk RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan periode Kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, perencanaan yang harus dilalui pada tahap ini adalah tahapan perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan capaian-capaian dari kinerja yang telah dicapai pada periode RPJMD Tahun 2016-2021 dengan mensinergikan pencapaian target dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada tahapan ini pembangunan difokuskan untuk kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, utamanya dengan peningkatan capaian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar atau pelaksanaan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu dengan peningkatan pelayanan publik pada akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum dan linmas, sosial. Lebih lanjut pembangunan juga diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, infrastruktur dan fasilitas umum penunjang di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik aparatur maupun SDM masyarakat, pemerataan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat secara aktif secara integratif dengan mengembangkan potensi lokal daerah sebagai penggerak roda perekonomian. Pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian daerah melalui sumber daya manusia yang berkarakter mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *sustainable development* untuk kualitas kehidupan daerah yang lebih baik.

Selanjutnya, di bawah ini adalah penjabaran dan uraian dari Misi dan Tujuan, Sasaran pembangunan daerah yang diambil dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing			
1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1 Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk
			2 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
			3 Peningkatan Pembinaan dan Layanan Keluarga Berencana
2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
			2 Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja

3 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1 Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	1 Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemenuhan dan Perlindungan Anak	1 Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga
Misi II: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan			
1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	1 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan dan Sarana Perhubungan Daerah	1 Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan
			2 Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas
	2 Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana Jaringan Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, Persampahan serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungannya	1 Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang
	3 Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana pada Sistem Jaringan Irigasi Daerah	1 Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir
	4 Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	1 Pengendalian Lingkungan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara,	1 Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan

		Air, Lahan	Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan
	5 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah termasuk Pemadam Kebakaran	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelamatan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran
Misi III: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan			
1 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Cepat Tumbuh	1 Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh
			2 Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
			3 Peningkatan dan Pengembangan Iklim investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing
	2 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat	1 Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
	3 Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	1 Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan	1 Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			2 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas

			Kelembagaan Penyuluh dan Petani
			3 Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
			4 Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah
	4 Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1 Penguatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Pengungkit Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM
	5 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	1 Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin dan Mempermudah Akses Mendapatkan Pelayanan	1 Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan
Misi IV: Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal			
1 Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1 Pengembangan Destinasi Wisata, Aksesibilitas serta Atraksi dan Amenitas Pariwisata Daerah dengan Peningkatan Promosi dan Pembangunan	1 Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

		Sumber Daya Manusia Pariwisata	Masyarakat
Misi V: Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga			
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Responsif, Murah, Mudah dan Cepat serta Berdaya Saing sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	2 Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	1 Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pemerintahan Daerah	1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada Penggunaan Data dan Teknologi Informasi
			2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional
			3 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

			Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
			4 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
			5 Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik
			6 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah
	3 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	1 Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
	4 Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 Peningkatan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 masih terfokus pada pemantapan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah dalam rangka memantapkan ekonomi masyarakat dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian dan pemantapan daya

saing sektor pariwisata unggulan Daerah yang berpijak pada kearifan lokal. Sementara untuk peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menyediakan manusia yang berkualitas sebagai faktor produksi untuk pembangunan daerah terutama sektor pertanian dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pada tahun 2024 ini juga kembali fokus pembangunan untuk penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat. Selain agenda pembangunan tersebut, pada tahun 2024 Pemerintah Daerah juga memiliki satu agenda penting tingkat nasional, yaitu Pemilu serentak. Dengan adanya agenda tersebut, sumber daya daerah tentunya sedikit banyak akan teralokasikan juga untuk mensukseskan agenda tersebut. Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 adalah **“Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Daerah”** ditetapkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat “Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera”. Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama sisa pelaksanaan pembangunan untuk satu tahun kedepan yaitu pada tahun 2024.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2024 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan:
 - Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk;
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
 - Peningkatan pembinaan dan akses layanan keluarga berencana;
 - Penurunan diskriminasi dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga;
 - Pemberdayaan dan pengembangan kompetensi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - Peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja, serta pelayanan penempatan kerja bagi penduduk usia kerja;
- b. Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - Penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan;

- Mengembangkan moda transportasi yang aman, murah dan terjangkau dan berkualitas;
 - Pembangunan fasilitas layanan permukiman dan perumahan yang layak dan berkualitas dengan memperhatikan penataan ruang;
 - Pengembangan jaringan irigasi daerah dari hulu hingga hilir;
 - Perencanaan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran dan kerusakan kualitas udara, air dan lahan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penyelamatan bencana yang efektif, efisien dan tepat guna termasuk pemadam kebakaran;
- c. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat, dengan arah kebijakan:
- Peningkatan produktivitas industri cepat tumbuh;
 - Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa;
 - Peningkatan dan pengembangan iklim investasi yang kondusif, stabil dan berdaya saing;
 - Optimalisasi pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani;
 - Optimalisasi pengelolaan Perikanan tangkap dan budidaya;
 - Optimalisasi penyediaan, penyaluran dan pengendalian pangan di Masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM;
 - Penguatan dan perluasan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dengan pengelolaan kebudayaan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;
- d. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas, dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada penggunaan data dan teknologi informasi;
 - Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional proposional;
 - Peningkatan dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah serta peningkatan layanan kepada kepala daerah dan anggota DPRD;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pimpinan dan pemerintan daerah;
 - Membangun tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik;
 - Peningkatan pembangunan desa dan masyarakatnya termasuk pada kawasan transmigrasi;

Berikut persandingan antara tema, prioritas, arah kebijakan antara Perubahan RKPD Tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Matrik Sandingan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Tema RKPD 2024	Prioritas Perubahan RKPD 2024	Arah Kebijakan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024
Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan terhadap Masyarakat	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk
		Peningkatan Minat Baca pada masyarakat khususnya pelajar	
		Pengelolaan Arsip daerah yang berkelanjutan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang dekat dengam masyarakat termasuk keluarga berencana	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
			Peningkatan Pembinaan dan Akses Layanan Keluarga Berencana

		Pemberdayaan Masyarakat, termasuk keluarga, perempuan dan anak	Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga
		Peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
	Pembangunan Infrastruktur daerah yang Berkelanjutan	Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah	Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang
		Penyediaan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman masyarakat	
		Pembangunan jaringan jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan
		Pengembangan jaringan transportasi	Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas
		Pembangunan jaringan irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir
		Pengendalian banjir pada daerah sungai dan pantai	
		Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan
		Menjaga stabilitas pemerintahan dan masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelamatan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan termasuk pemadam kebakaran	Kebakaran
	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Peningkatan akses dan kapasitas pencari kerja	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja
		Penyediaan lapangan pekerjaan	
		Peningkatan investasi di daerah	Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh
		Menciptakan kemudahan iklim investasi yang mudah, murah dan ramah investor	Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing
		Pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan serta peternakan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Pemberdayaan petani dan nelayan	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani
		Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Perikanan	Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
		Mempertahankan cadangan pangan masyarakat	Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah
		Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat

		Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM	Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM
		Pengendalian inflasi dan harga sembako	Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
		Pengembangan pasar dengan meningkatkan industri kecil dan kreatif	Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
		Pengembangan promosi perdagangan dan perindustrian	Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya masyarakat dan daerah dalam kehidupan	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
		Perluasan bantuan sosial kepada masyarakat	Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan
	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Peningkatan pelayanan publik dan masyarakat yang mudah dan murah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional

		Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta pengawasan Pembangunan termasuk pengembangan Inovasi dalam Pembangunan	Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
		Peningkatan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
		Pengelolaan persandian daerah yang terintegrasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis SPBE	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik
		Pemberdayaan masyarakat pekon dan kawasan transmigrasi Pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran pekon	Peningkatanan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dalam RKPD yang telah ditetapkan di atas disusun sebagai kesinambungan pembangunan daerah dan pusat baik melalui sistem *bottom up* maupun *top down planning* dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan pada tingkat Pemerintah Provinsi

Lampung dan Pemerintah Pusat Tahun 2024, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan dapat selaras dan berkesinambungan baik pada tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan yang ditetapkan.

Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu **“PEMULIHAN EKONOMI, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH”**. Sedangkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah **“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SDM MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”** dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**. Berdasarkan pada masing-masing rumusan Tema Pembangunan pada Tahun 2024 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rumusan Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah sejalan dengan RPJMN Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan titik berat pembangunan ada pada Pembangunan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Tema yang ditetapkan juga telah disusun dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan publik masyarakat.

Sejalan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional yang pada utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan segala bidang, khususnya pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga dengan demikian telah dapat diterangkan bahwa rumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat telah selaras dengan target dan sasaran dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan
Pemerintah Pusat**

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan					
Kabupaten Pesisir Barat		Provinsi Lampung		Nasional	
I	Tema	I	Tema	I	Tema
	Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan		Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat		Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

	Infrastruktur Daerah		Lampung Berjaya		
II	Prioritas	II	Prioritas	II	Prioritas
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	2	Meningkatkan Kualitas SDM	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	3	Pembangunan Infrastruktur	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	4	Reformasi Birokrasi	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
				7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber : Data Diolah, 2024

Bila dilakukan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024, maka akan diperoleh padanan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan					
Kabupaten Pesisir Barat		Provinsi Lampung		Nasional	
I	Tema	I	Tema	I	Tema
	Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Daerah		Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya		Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
II	Prioritas	II	Prioritas	II	Prioritas
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	3	Pembangunan Infrastruktur	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
5	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	4	Reformasi Birokrasi	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber : Data Diolah, 2024

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2024 tersebut juga menetapkan target sasaran makro pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Barat berusaha untuk bersinergi dalam mencapai target kinerja dimaksud dalam upaya pelaksanaan sistem pembangunan nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Target kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.5 Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024

No	Indikator	Pemerintah Pusat	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,7	5,0 – 5,5	3,6 – 4,1
2	Inflasi (%)	-	3 ± 1	-
3	PDRB Perkapita (juta rupiah)	-	45 – 46	33.60 – 34.10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 - 5,7	4,0 – 3,8	2,6
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	10,9 – 10,4	12,30
6	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	73,99 – 74,02	70,6 – 71,1	70,40 - 71,00
7	Indeks Gini (Nilai)	0,374 – 0,377	0,293 – 0,314	0,30 - 0,29
8	Nilai Tukar Petani (Nilai)	105 – 108	105 – 106	110,00
9	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	107 – 110	-	-
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27	7.29	11

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu bersinergi dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan pusat. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang menjelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan, kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran Proyek Strategi Nasional, serta konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tepat sasaran dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat dan stabil, serta terealisasinya secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional ke seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berikut Daftar Proyek Strategis Nasional yang berada di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung

No	Daftar Proyek Startegis Nasional	Lokasi
I	Sektor Kereta	
A	Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan – Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
II	Sektor Kawasan	
A	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
B	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
III	Sektor Bendungan dan Irigasi	
A	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
B	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
IV	Sektor Air Bersih dan Sanitasi	
A	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung

Sumber : Permenko Perekonomian 7 Tahun 2021, 2024

Berdasarkan pada data di atas, Kabupaten Pesisir Barat memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan pada potensi pengembangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanggamus. Direncanakan Kawasan Industri ini akan dibangun diatas milik PT. Pertamina seluas 802 hektar, dengan infrastruktur penunjang diantaranya Dermaga/Pelabuhan milik Kementerian Perhubungan, Industri Air Baku melalui PDAM Way Agung Tanggamus, akses jalan Provinsi Lampung dan jaringan listrik PT. perusahaan Listrik Negara (PLN).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dan juga didapatkan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten tetangga dalam peluang pengembangan wilayah, antara lain:

- a. Pengembangan KI Tanggamus akan semakin mengembangkan wilayah Kabupaten Tanggamus dan harapannya juga kepada Kabupaten Pesisir Barat (sebagai daerah yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan) bila melihat pada pengembangan jalan nasional;
- b. Pemanfaatan pengembangan jaringan listik PLN untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus;
- c. Mempermudah akses terhadap Distribusi Logistik sumatera bagian Barat termasuk Pesisir Barat;
- d. Memberikan peluang daerah untuk membangun industri-industri penunjang yang dibutuhkan dalam proses pembangunan hingga berjalannya KI Tanggamus;
- e. Membuka lapangan pekerjaan, bagaimana Kabupaten Pesisir Barat mampu menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam proses

pembangunan kawasan industri hingga nantinya kawasan tersebut selesai pembangunannya;

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 serta Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan sinergitas dengan Visi dan Misi Nasional (Rencana Kerja Pemerintah), maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2005-2025 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi serta pada akhirnya membantu meningkatkan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhi kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

2) Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut antara lain: pengembangan Bandara Krui (Bandara M Taufik Kemas);

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik investasi, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastruktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumberdaya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode RPJMD 2019-2024. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan baik, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian.

Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasarana, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dasar dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan makanan lengkap (secara nutrisi) dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti Covid-19 dan sejenisnya.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun dan dikembangkan.

b. Pendekatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendekatan pembangunan melalui Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan cara pendekatan pembangunan yang menempatkan daerah sebagai perencanaan, pelaksana, pengawas dan yang bertanggungjawabkan penggunaan keuangan tersebut. Pendekatan pengelolaan keuangan daerah merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2) Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Prioritas-prioritas serta metode pendekatan diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*. Masih berkaitan dengan prioritas tersebut di atas, pada Kabupaten Pesisir Barat prioritas-prioritas pembangunan untuk tahun 2023 tersebut dibebankan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dengan langkah-langkah kebijakan disusun dalam urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas, diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pemuda dan Olahraga, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, Urusan Transmigrasi;
- b. Pembangunan Ekonomi Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Pangan, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian;
- c. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

- Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan;
- d. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat, difokuskan pada pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Unsur Sekretariat Daerah, Unsur Sekretariat DPRD, Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Pelatihan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Unsur Inspektorat Daerah, Unsur Kecamatan.

Berikutnya dibawah ini adalah hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia
		Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas	
		Peningkatan Pembinaan dan Layanan Keluarga Berencana	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	
		Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja	
		Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas	

		Hidup Keluarga	
2	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan	Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan	Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas	
		Pembangunan Fasilitas Layanan Pemukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang	
		Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir	
		Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelematan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran	
3	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
		Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa	
		Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil dan Berdaya Saing	
		Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	
		Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	
		Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani	
		Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	
		Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah	
		Peningkatan Kapasitas, Kualitas	

		dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan	
4	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
5	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
		Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengaawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Berpedoman pada Penggunaan Data dan Tekonologi Informasi	
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional	Harmonosisai Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD	
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum	
		Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah	
		Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	
		Peningkatan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi	

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat 2021-2026 Diolah, 2024

Selain berpedomanan pada Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi dan Misi Bupati Pesisir Barat, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi/pengendalian dan reviu yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Bab II dokumen ini serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional serta global.

Rencana Arah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan arah kebijakan yang diambil pada tahun-tahun sebelumnya, atau masih dalam arah kebijakan yang sebagaimana diarahkan pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Hal utama yang mendasarinya adalah Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah termuda di Provinsi Lampung baru berdiri pada tahun 2013 yang lalu dan sebagai daerah yang tergolong minim dalam ketersediaan sarana dan parasarana serta pusat pelayanan publik.

Kabupaten Pesisir Barat juga masih tergolong daerah tertinggal berdasarkan pada Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 bersama-sama dengan 62 daerah lainnya di Indonesia dan satu-satunya daerah di Provinsi Lampung (untuk perencanaan tahun 2024 hal ini dinilai masih relevan). Arah kebijakan diambil berdasarkan pada isu strategis daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Isu Strategis RKPD Tahun 2024	Strategi RKPD Tahun 2024
1	Pengembangan Kompetensi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Jumlah Pengangguran Daerah Dan Pengentasan Kemiskinan	Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Yang Masih Kurang Optimal; Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik di Pedesaan; Optimalisasi Kelembagaan Dan Kualitas Aparatur Desa; Pemberian stimulant/bantuan sosial tepat sasaran; Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

		PelestarianBudaya Lokal
2	Peningkatan Pertanian Dan Perikanan Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Produksi Padi Dengan Perluasan Lahan Sawah (Cetak Sawah); Pengembangan Pertanian Dengan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Penyediaan Alat Pertanian Dan Bibit Unggul; Pengembangan Peternakan Dengan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Penyediaan Bibit Unggul Ternak; Penguatan Dan Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya; Diversifikasi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan; Menjaga stabilitas harga bahan pokok daerah; Peningkatan cadangan pangan daerah;
3	Penguatan Dan Pemberdayaan Struktur Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata ; Meningkatkan Pengelolaan Kepariwisataaan Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pariwisata; Memfasilitasi Pemasaran Produk UMKM
4	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam Upaya Memperlancar Produksi Dan Distribusi	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik di Pedesaan; Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan termasuk pengembangan pasar pekon
5	Pembangunan Kewilayahan dalam upaya pemerataan Pembangunan	Pembangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Fasilitas Umum; Pembangunan Jalan – Jalan Kabupaten Dan/Atau Jalan Yang Menghubungkan Antar Pekon; Pembangunan Irigasi Pertanian Dan Jaringan; Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut Dan Udara
6	Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Ramah Lingkungan; Pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah
7	Pengembangan Pendidikan Serta Penguatan Literasi dan Pelestarian Budaya Masyarakat	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun Dengan Melanjutkan Upaya Untuk Memenuhi Hak Seluruh Penduduk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar, Dan Memperluas Dan Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Menengah Berkualitas; Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Melalui Penguatan Jaminan Kualitas (Quality Assurance) Pelayanan Pendidikan Dasar;

		Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten Pesisir Barat
8	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Termasuk Pengendalian Covid Dan Stunting Dengan Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat; Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat; Pengembangan kabupaten layak anak; Pengembangan lembaga-lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak; Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
9	Mitigasi Bencana Alam Dan Non Alam	Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan; Pengembangan kampung siaga bencana
10	Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Optimalisasi Pelaksanaan Good Government Dan Clean Governance; Peningkatan Pelayanan Publik yang sesuai Harapan Masyarakat; Perlunya Sinkronisasi Impelementasi Peraturan Antara Tingkat Pusat Dan Daerah; Peningkatan kualitas SDM Aparatur Baik Secara Kuantitas Dan Kualitas; Penyusunan Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Kepala Daerah Yang Berkualitas Dan Bersinggungan Langsung Dengan Kebutuhan Masyarakat; Peningkatan Inovasi Daerah
11	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum Dan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Pengembangan wawasan kebangsaan; Pendeteksian secara dini konflik sosial di masyarakat; Penyediaan pendanaan pemilu dan pilukada tahun 2024; Penegakan netralitas ASN; Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat yang humanis

Sumber : Data diolah, 2024

UU Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berikutnya berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses-tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan memperhatikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pokok-pokok kebijakan pembangunan kabupaten/kota diarahkan pada:

- a. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, substansi dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten/kota diminta untuk mengintegrasikan program/kegiatan pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018, dan mendukung kebijakan pembangunan global yang terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) sesuai dengan PP Nomor 59 Tahun 2018.
- b. Penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan dalam RKPD Kabupaten/Kota perlu memperhatikan konsistensi dan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten/Kota, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Lampung, dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP yang disesuaikan dengan lingkup kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
- c. Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
 - 1) Secara substansial, memuat perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan

- maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam sisa waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun;
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Perubahan RAPBD;
 - 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - 4) Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Prioritas & Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan Pemutakhiran RKP Tahun 2024:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 % 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 %
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 % 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 – 108
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 – 110
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8. 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	

- e. Prioritas & Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 5,5 %
2	Meningkatkan Kualitas SDM	2. Inflasi sebesar 3 ± 1
3	Pembangunan Infrastruktur	3. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,4 – 10,9 %
4	Reformasi Birokrasi	4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,0 – 3,8 %
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5. Pendapatan Perkapita sebesar Rp.45 - 46 juta
6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6. Indek Pembangunan Manusia sebesar 70,6 – 71,1
		7. Rasio Gini sebesar 0,293 - 0,314
		8. Emisi Gas Rumah Kaca 7,29;
		9. Nilai Tukar Petani sebesar 105 - 106;
		10. Pertumbuhan PAD sebesar 8,47%;
		11. Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 78%

- f. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan; Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan, yakni reviu atas dokumen RKPD/Perubahan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen perencanaan perlu dijabarkan oleh seluruh tingkatan pemerintahan daerah, sebaliknya dapat pula dinyatakan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional akan tercapai apabila terdapat kontribusi dari daerah; yang dimulai dari adanya keselarasan antardokumen perencanaan pusat dan daerah.

Terkait dengan sasaran dan target makro pembangunan nasional dan Provinsi Lampung pada tahun 2024 yang terangkum dalam dokumen perencanaan

Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam rangka pencapaiannya terdapat pula target dan sasaran makro pembangunan pada lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, yaitu:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,6 – 4,1 % 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,30 % 3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,60 – 3,00 % 4. PDRB Perkapita sebesar Rp. 33,60 – 34,10 juta 5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,40– 71,00 6. Rasio Gini sebesar 0,30 – 0,29 7. Nilai Tukar Petani sebesar 110,00
2	Pembangunan Infrastruktur daerah	
3	Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	
4	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas	
5	Harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat	

Sumber : Data Diolah, 2024

4.2.1. Program Prioritas Daerah

Pelaksanaan program prioritas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk melaksanakan pencapaian dari misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk tahun perencanaan 2024. selanjutnya akan dijelaskan gambaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 disandingkan dengan program dari perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan pada pembagian pelaksanaan Urusan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, serta Unsur Pemerintahan Umum berdasarkan pada Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD	Indikator	Target	Perangkat Daerah Pelaksana	Prioritas RKPD Tahun 2024
Misi I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan	Indeks Pembangunan	71,00		Meningkatkan Kualitas Sumber

	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Manusia (Angka)			Daya Manusia
Sas 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	71,00		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	100	Dinas P dan K	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	Sekretariat Daerah	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	25	Sekretariat Daerah	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0.95	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2.17	Dinas PP PA dan KB	

	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	61.00	Dinas PP PA dan KB	
Tuj 2	Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Pemuda Dan Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.60 – 3,00		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.60 – 3,00		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Persen)	55.00	Dinas Pora	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Persen)	50.00	Dinas Pora	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.60- 3,00	Dinas Trans Naker dan Perindustri an	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	73.88	Dinas Trans Naker dan Perindustri an	
	Program Hubungan Industrial	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	70.00	Dinas Trans Naker dan Perindustri an	
Tuj 3	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	94.76		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 3	Terwujudnya	Indeks	94.76		Meningkatkan

	Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas	Pembangunan Gender (Angka)			Kualitas Sumber Daya Manusia
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	35.00	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (Persen)	33.33	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
Misi II	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Infrastruktur (Angka)	60.00		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
Sas 1	Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	45,00		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	45,00	Dinas Pu dan PR	
	Program	Persentase Jalan	30.00	Dinas PU	

	Pengembangan Permukiman	Desa Strategis dengan kondisi baik (Persen)		dan PR	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (Persen)	72.50	Dinas Perhubungan	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (Persen)	60.00	Dinas Perhubungan	
Sas 2	Tersedianya Pemukiman Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	42.50		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	42.50	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	74.76	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	35.00	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	88.00	Dinas PR dan KP	
	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Persen)	42.50	Dinas PR dan KP	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang Tertata (Persen)	50.00	Dinas PR dan KP	
Sas 3	Tersedianya	Rasio Jaringan	57,00		Pembangunan

	Sumber Daya Air Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Irigasi (Persen)			Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	45.00	Dinas PU dan PR	
Sas 4	Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74.20		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	45.00	Dinas PR dan KP	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	70.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	5.00	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	3500	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	30.00	Dinas PU dan PR	
	Program Perencanaan	Cakupan Dokumen Perencanaan	100	Dinas LH	

	Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup (Persen)			
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74.20	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	54.70	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	5.00	Dinas LH	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) (Persen)	100	Dinas LH	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (Persen)	35.00	Dinas LH	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Kepala Keluarga)	5.000	Dinas PR dan KP	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan	11.00	Dinas PR dan KP	

	Tanah Untuk Pembangunan	untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)			
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Persen)	2.90	Dinas PR dan KP	
Sas 5	Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (Angka)	180.47		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	BPBD	
Misi III	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Dengan Fokus Pada Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,60 s/d 4,10		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
Sas 1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,60 s/d 4,10		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Persen)	11.56	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang	Persentase Stabilitas dan Jumlah	50.00%	Dinas Koperasi, UKM dan	

	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)		Perdagangan	
	Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.141	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan/ Perorangan)	750	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (Persen)	80.00	Dinas PM dan PTSP	
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (Persen)	6.05	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (Persen)	16.99	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)	5	Dinas PM dan PTSP	
Sas 2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita (juta)	33,79 s/d 34,00		Pembangunan Ekonomi Daerah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	40.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Persen)	3.99	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Sas 3	Meningkatnya Kontribusi	Nilai Tukar Petani (Angka)	110,00		Peningkatan Kualitas

	Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat				Ekonomi Masyarakat
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (Angka)	110,00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	148.340	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	975	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	86.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	86.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	4.50	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	60.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	14.419	Dinas Perikanan	

	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	19.209	Dinas Perikanan	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.032	Dinas Perikanan	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	104	Dinas Perikanan	
Sas 4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Angka)	0.30 – 0.29		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	52.50	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	50.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)	2.08	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
Sas 5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah (Persen)	13,34-12,30		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)	100	Dinas Sosial	

	Program Penanganan Bencana	Cakupan Pemenuhan pasca Bencana (Persen)	100	Dinas Sosial	
Misi IV	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal				
Tuj 1	Meningkatkan Pariwisata Daerah Yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Persen)	1.76		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
Sas 1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (persen)	25.00		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen)	2.98	Dinas Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan (Orang)	494.527	Dinas Pariwisata	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	30.00	Dinas Pariwisata	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi (Persen)	30.00	Dinas P dan K	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (Persen)	25.00	Dinas P dan K	
Misi V	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga				
Tuj 1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	C		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
Sas 1	Terwujudnya Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	88.00		Reformasi Birokrasi dan

	Publik Yang Berkualitas	terhadap pelayanan publik (Angka)			Pelayanan Publik Berkualitas
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	82.50	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (Persen)	80.00	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)	100	Kecamatan Bangkunt; Krui Selatan; Lemong; Ngambur; Ngaras; Pulau Pisang; Pesisir Selatan; Pesisir Utara	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	Kecamatan Pesisir Tengah	
Sas 2	Terwujudnya	Nilai SAKIP	CC		Reformasi

	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Yang Berkualitas	(Huruf/Predikat)			Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas; Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	92.50	Seluruh Perangkat Daerah	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	100	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	100	Bappelitbangda	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	90.00	Bappelitbangda	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi daerah (Angka)	Sangat Inovatif	Bappelitbangda	
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	73.54	BKPSDM	

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	22.42	BKPSDM	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	85.00	Sekretariat Daerah	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	85.00	Sekretariat Daerah	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi	100	Sekretariat DPRD	

		Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	49.00`	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	84.92	Badan Kesbangpol	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	75.00	Badan Kesbangpol	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	67.50	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	75.00	Badan Kesbangpol	
Sas 3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah	Opini BPK (Huruf/Predikat)	WTP		Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

	Yang Berkualitas				
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	4.20	Bapenda	
Sas 4	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (Angka)	0.7000		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (Pekon)	60	Dinas PMP	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi (Pekon)	100	Dinas PMP	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon)	100	Dinas PMP	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	42.53	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)	1	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	

Sumber ; RPJMD Kabupaten Pesisir Barat 2021-2026 (Diolah)

4.2.2. Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan di mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2030. Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adapun elemen dari pembangunan berkelanjutan yaitu bidang sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Agenda SDGs disusun berdasarkan capaian MDGs, dengan target dan sasaran yang diperluas. SDGs jauh lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan MDGs. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 tujuannya tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs. Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan visi pembangunan Indonesia dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs.

Kabupaten Pesisir Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh sektor 17 Tujuan TPB, yaitu: (1) Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua; (7) Energi bersih dan terjangkau untuk semua; (8) Mempromosikan

Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangunan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim; (15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh; (17) Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.10 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	TPB/SDGs
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan bagi Semua Penduduk dalam segala Usia Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat bagi Semua
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2 Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak

	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3	Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Tujuan 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
		4	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau untuk Semua Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya Tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim

Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
		3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
		4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara
		5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak

Misi V Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/ Pekon	Tujuan 16 Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

Upaya untuk pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pesisir Barat hendaknya dimulai dari area-area prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Bahwa aspek pendidikan dan kesehatan, terutama pendidikan usia dini, menengah dan tinggi merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, agenda pembangunan sebaiknya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan minimal di tingkat menengah dan penguasaan IPTEK. Sementara itu, target utama pembangunan SDM dibidang kesehatan adalah tersedianya akses universal terhadap jaminan kesehatan, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Aspek pencegahan dan hidup sehat menjadi lebih utama dibandingkan dengan aspek kuratif. Penting untuk segera mewujudkan akses universal jaminan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk dari sisi kualitas pelayanan dan pembiayaannya.
- b. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pemerintah daerah dituntut

agar dapat berinovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar tersebut mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.

- c. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Kehadiran infrastruktur multi-moda yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jalan darat, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut merupakan salah satu komponen penting untuk peningkatan PDRB di masing-masing daerah. Sekaligus hal ini dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- d. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak. Penciptaan lapangan kerja yang layak dapat didorong dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang baru dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- e. Penggunaan institusi dan tata kelola (*good governance*) yang baik akan menjamin tercapainya berbagai target dalam SDGs dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, kehadiran peran pemerintah dibutuhkan di seluruh pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara tidak langsung juga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pada pemerintah dan akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik dan perlu mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Kerangka hukum yang adil dan merata;
- c. Pelayanan public yang responsif;
- d. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan semua program dan kegiatan pelayanan publik.
- b. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- c. Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan;
- d. Sumber Daya Publik dikelola secara efektif dan efisien.

4.2.3. Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian. Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif dan efisien.

Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian

integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. SPM menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib pemerintahan daerah, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif mulai pada tahun 2019 maka perangkat daerah wajib:

- a. Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD dan Renja, sebagai acuan dalam penyusunan RKA untuk penyusunan RAPBD;
- b. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- c. Diharapkan kedepannya SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.
- d. Untuk itu diharapkan seluruh perangkat daerah untuk bersama sama melakukan satu kesatuan gerak langkah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja organisasi dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana telah diamanahkan kepada masing-masing perangkat daerah.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		Jenis SPM
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 Tahun); Pendidikan Dasar (Usia 7-15 Tahun); Pendidikan Kesetaraan (usia 7-18 Tahun);
				Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV);
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Lingkungan				
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembanguna n Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, Khususnya Gelandangan dan Pengemis; Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana;

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

4.3. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan daerah pada tahun 20219 ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi

perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005–2025, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam RTRW meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan perbatasan negara ini terdapat di Pulau Batu Kecil, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai Pulau Betuah, berada di Kecamatan Bangkunt yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Betuah ini merupakan salah satu pulau terluar di Wilayah Barat Indonesia.
- b. Kawasan Strategis Provinsi, meliputi
 - Kawasan Agro Minapolitan, lokasi agrominapolitan yang dimaksud berada di Kecamatan Ngambur, Ngaras dan Bangkunt.
 - Taman Nasional Bukit Barisan Selatan/TNBBS. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung berhulu di TNBBS dan hutan yang masih termasuk kategori primer juga hanya terdapat di TNBBS.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - Kawasan Ekowisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;
 - Kawasan Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah;
 - Kawasan Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan; dan
 - 2) Kawasan perkotaan krui di Kecamatan Pesisir Tengah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) tersebar di wilayah kabupaten.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:
 - 1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;
 - mengembangkan daya tarik wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan
 - membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial.
 - 2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.
 - mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;
 - membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah; dan
 - Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah.
 - 3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan.
 - mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;
 - mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;

- menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan
 - meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan.
- 4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor.
- mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan
 - mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan.
- 5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal.
- mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;
 - mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan;
 - melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.
- 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.

b. Arah Pemanfaatan Ruang

Sementara itu, berdasarkan pada Perda No 8 Tahun 2017, arahan pemanfaatan ruang untuk perencanaan Tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
A	Pengembangan Struktur Ruang							
A1	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Pelayanan							
A1.1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembang an Kawasan pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembanguna n Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an SPAM Perpipaan	Pesisir Tengah				Pengelolaan dan Pengembanga	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		dan Berbasis Masyarakat					n Sistem Penyediaan Air Minum	
		Pengembang an Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
A1.2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangku nat				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembang an Kawasan Pariwisata	Bangku nat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangku nat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangku nat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri	Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
A1.3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan				Penyelenggar aan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembang an kawasan pariwisata	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan				Penyediaan dan Pengembang a n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembang a n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri	Pesisir Selatan				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengembang an Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		A1.4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong			
Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Lemong						Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembang an kawasan pariwisata	Lemong				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu Ngambur	Pengembangan kawasan pariwisata	Ngambur				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambur				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembangan kawasan pariwisata	Krui Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
							dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
A1.7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembang an kawasan pariwisata	Way Krui				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Way Krui				Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembang an kawasan pariwisata	Karya Pengga wa				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Pengga wa				Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembang an kawasan Pariwisata	Ngaras				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang	Ngaras				Penyediaan	Dinas

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		an Infrastruktur dan Komoditas pertanian					dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
A1.10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembang an kawasan pariwisata	Pesisir Utara				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembang an Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang				Perencanaan dan Pembanguna	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
							n Industri	
A2	Sistem Prasarana Utama							
A2.1	Pengembang an Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Bangku nat, Lemong				Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubung an
		Pengembang an Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubung an
		Pengembang an Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
A2.2	Pengembang an Sistem Prasarana	Pembanguna n dan Pengembang an Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
	Transportasi Laut	Laut Pengumpan Lokal						
		Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A3	Sistem Prasarana lainnya							
A3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi (Komunikasi, Data dan Informasi)	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Pembangunan jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintahan dan Dunia Usaha	Pesisir Barat				Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
A3.2	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS						
		Pembanguna n dan Peningkatan Daerah Irigasi	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pembanguna n Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Rehabilitasi System Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
A3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan							
A3.3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
A3.3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Pembangunan Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan TPST	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembanguun an TPS	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
A3.3.3	Pengembangan Sistem Jaringan Air	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana	Pesisir Barat				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
	Limbah	Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan					dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Pembanguna n IPLT	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
B	Pengembangan Pola Ruang							
B1	Pengembangan Kawasan Budidaya							
B1.1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembang an Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n (LP2B)	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian;	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Holtikultura					Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Pengembang an Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Budidaya Peternakan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Pertanian melalui Pendekatan Agropolitan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		pada Kawasan-kawasan Potensial					dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
B1.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelyanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B1.3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembanguna n Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Pengembang an Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengembang an Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
B1.4	Pengembang an Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembang an Kawasan Pariwisata Berkelanjuta n	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjuta n	Pesisir Barat				Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
B1.5	Pengembang an Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembang an Kawasan Permukiman Perkotaan	Pesisir Barat				Pengembangana n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembang an Kawasan Permukiman Pedesaan	Pesisir Barat				Kawasan Permukiman	Dinas PR dan KP
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembang an Perumahan Rakyat	Pesisir Barat				Pengembanga n Perumahan	Dinas PR dan KP
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pembanguna n dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembang an Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat				Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Dinas PU dan PR
C	Pengembangan Kawasan Strategis							
C1	Pengembang an Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembang an Kawasan Pulau Pisang	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Kawasan Tanjung Setia	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang	Pesisir				Penataan	Dinas PU

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		an Kawasan Perkotaan	Tengah				Bangunan dan Lingkungannya	dan PR

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Dengan mengusung tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 **“Pemulihan Ekonomi, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Serta Pembangunan Infrastruktur Daerah”** tema tersebut ditetapkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat **“Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera”**. Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum dari pemerintah daerah yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama sisa pelaksanaan tahun 2024.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan;
3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat;
4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;
5. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;

Berdasarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut di atas, penganggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan konsistensi dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Elemen-elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan, dimana kegiatan juga merupakan akumulasi dari pencapaian dari masing-masing sub kegiatan. Disatu sisi, bahwa

proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas bawah (*top-down*); serta tetap memperhatikan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

1. Tematik-holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hirarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Uraian pokok pada bab ini terdiri dari (1) Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib berdasarkan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur pada UU No. 23 Tahun 2014; (2) Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional; (3) Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut di atas, penganggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui program pembangunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024

No	Urusan	Program	Pagu Indikatif Anggaran (Rp)			Perangkat Daerah
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		449,587,992,585	441.553.552.964	442.740.416.964	
1	Pendidikan		186.082.741.297	260.326.379.033	260.626.379.033	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	126,958,119,093	194.138.131.651	194.138.131.651	Dinas P dan K
		Program Pengelolaan Pendidikan	59,124,622,204	66.188.247.382	66.488.247.382	Dinas P dan K
2	Kesehatan		103,815,980,684	105.467.548.638	105.467.548.638	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	34,963,420,870	41.011.984.960	41.011.984.960	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61,778,931,631	57.655.081.978	57.655.081.978	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,918,705,636	6.335.464.600	6.335.464.600	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	351,980,965	50.000.000	50.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,802,941,582	415.017.100	415.017.100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		134,524,594,526	60.096.675.417	60.096.675.417	
		Program Penunjang Urusan	5,348,238,701	5.787.072.211	5.787.072.211	Dinas PU dan PR

		Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota				
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7,184,286,394	4.567.881.748	4.567.881.748	Dinas PU dan PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,275,402,820	650.000.000	650.000.000	Dinas PU dan PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,975,202,820	100.000.000	100.000.000	Dinas PU dan PR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2,544,820,052	600.000.000	600.000.000	Dinas PU dan PR
		Program Pengembangan Permukiman	1,641,144,895	-	-	Dinas PU dan PR
		Program Penataan Bangunan Gedung	96,818,073,298	18.724.458.637	18.724.458.637	Dinas PU dan PR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3,678,831,711	365.000.000	365.000.000	Dinas PU dan PR
		Program Penyelenggaraan Jalan	12,269,910,459	26.570.919.101	26.570.919.101	Dinas PU dan PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	473,880,948	500.000.000	500.000.000	Dinas PU dan PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	314,802,428	2.231.343.720	2.231.343.720	Dinas PU dan PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		10,112,756,606	2.668.816.000	2.802.921.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,283,109,000	2.223.197.000	2.357.302.000	Dinas PR dan KP
		Program Pengembangan	1,643,820,052	199.770.000	199.770.000	Dinas PR dan KP

		Perumahan				
		Program Kawasan Permukiman	1,164,129,345	-	-	Dinas PR dan KP
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3,844,401,966	129.998.000	129.998.000	Dinas PR dan KP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1,177,296,243	115.851.000	115.851.000	Dinas PR dan KP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		8,354,196,969	8.509.364.676	9.212.123.676	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	4.074.303.737	5.501.041.176	5.844.300.176	Satpol-PP dan Damkar, BPBD
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2,373,744,778	1.573.757.900	1.603.757.900	Satpol-PP dan Damkar
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	738,036,704	620.630.800	620.630.800	Satpol-PP dan Damkar
		Program Penanggulangan Bencana	1,168,111,750	813.934.800	1.143.434.800	BPBD
6	Sosial		6,697,722,503	4.484.769.200	4.534.769.200	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,237,394,511	2.609.497.900	2.659.497.900	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	312,848,941	69.960.250	69.960.250	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	3,401,463,270	1.543.353.900	1.543.353.900	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan	454,645,096	199.065.850	199.065.850	Dinas Sosial

		Sosial				
		Program Penanganan Bencana	291,370,685	62.891.300	62.891.300	Dinas Sosial
II	Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar		78,670,746,081	61.688.478.757	62.460.787.077	
1	Tenaga Kerja		2,677,044,091	2.374.625.200	2.424.625.200	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	1,990,955,081	2.254.625.200	2.304.625.200	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	259,190,649	-	-	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
		Program Penempatan Tenaga Kerja	221,520,704	120.000.000	120.000.000	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
		Program Hubungan Industrial	205,377,657	-	-	Dinas Trans Naker dan Perindustrian
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1,136,012,101	1.171.000.000	1.171.000.000	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	207,568,766	428.875.000	428.875.000	Dinas PPPA dan KB
		Program Perlindungan Perempuan	124,175,456	125.561.000	125.561.000	Dinas PPPA dan KB

		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	223,797,979	52.880.000	52.880.000	Dinas PPPA dan KB
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	387,030,849	129.245.000	129.245.000	Dinas PPPA dan KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	193,439,051	434.439.000	434.439.000	Dinas PPPA dan KB
3	Pangan		7,956,573,313	6.061.430.800	6.061.430.800	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	6,650,524,300	5.702.941.400	5.702.941.400	Dinas KP dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	929,136,880	192.711.400	192.711.400	Dinas KP dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	270,039,584	97.204.000	97.204.000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	106,872,549	68.574.000	68.574.000	Dinas KP dan Pertanian
4	Pertanahan		5,854,329,407	2.667.131.400	2.667.131.400	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	92,391,704	23.047.000	23.047.000	Dinas PR dan KP
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5,463,757,704	2.525.540.000	2.525.540.000	Dinas PR dan KP
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	298,179,999	118.544.400	118.544.400	Dinas PR dan KP
5	Lingkungan Hidup		6,612,324,336	5.977.313.850	5.977.313.850	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,267,704,529	3.202.977.850	3.202.977.850	Dinas LH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	493,738,650	370.705.000	370.705.000	Dinas LH

		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	311,715,209	50.000.000	50.000.000	Dinas LH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	202,476,679	250.000.000	250.000.000	Dinas LH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	125,139,419	70.000.000	70.000.000	Dinas LH
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	106,816,815	0	0	Dinas LH
		Program Pengelolaan Persampahan	2,104,733,035	2.033.631.000	2.033.631.000	Dinas LH
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5,142,916,875	3.231.449.700	3.231.449.700	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	4,507,625,600	2.783.904.750	2.783.904.750	Dinas Duk Capil
		Program Pendaftaran Penduduk	335,363,433	311.616.950	311.616.950	Dinas Duk Capil
		Program Pencatatan Sipil	108,507,804	47.705.100	47.705.100	Dinas Duk Capil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92,897,209	45.940.850	45.940.850	Dinas Duk Capil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98,522,829	42.282.050	42.282.050	Dinas Duk Capil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		8,139,472,190	6.806.068.924	6.806.068.924	

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,263,797,064	2.562.654.240	2.562.654.240	Dinas PMP
		Program Penataan Desa	1,302,601,300	355.053.900	355.053.900	Dinas PMP
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,750,000,000	1.803.512.784	1.803.512.784	Dinas PMP
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2,823,073,826	2.084.848.000	2.084.848.000	Dinas PMP
8	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana		9,306,952,620	8.055.747.400	8.055.747.400	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	4,556,653,452	4.192.096.400	4.192.096.400	Dinas PPPA dan KB
		Program Pengendalian Penduduk	113,638,330	247.600.000	247.600.000	Dinas PPPA dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,338,479,550	2.336.451.000	2.336.451.000	Dinas PPPA dan KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	298,181,288	1.279.600.000	1.279.600.000	Dinas PPPA dan KB
9	Perhubungan		6,201,111,894	5.070.371.795	5.330.371.795	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,608,051,200	2.608.789.497	2.868.789.497	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,940,519,400	1.994.067.298	1.994.067.298	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	652,541,294	467.515.000	467.515.000	Dinas

						Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika		8,846,019,769	7.049.369.300	7.329.677.620	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	5,002,041,300	4.098.074.700	4.378.383.020	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,555,591,900	2.254.180.500	2.254.180.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,288,386,569	697.114.100	697.114.100	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3,731,353,336	2.845.255.800	2.845.255.800	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,702,155,039	2.398.315.600	2.398.315.600	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	93,545,599	78.545.500	78.545.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	532,707,739	112.337.700	112.337.700	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	402,944,959	256.057.000	256.057.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

12	Penanaman Modal		5,527,740,677	5.277.352.286	5.277.352.286	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,803,476,742	2.150.967.200	2.150.967.200	Dinas PM dan PTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	344,409,399	0	0	Dinas PM dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	742,684,517	1.499.742.000	1.499.742.000	Dinas PM dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	635,250,009	1.030.258.086	1.030.258.086	Dinas PM dan PTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	677,916,651	471.385.000	471.385.000	Dinas PM dan PTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	324,003,359	125.000.000	125.000.000	Dinas PM dan PTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga		6,503,726,404	4.282.346.500	4.464.346.500	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,343,684,086	2.512.348.500	2.694.348.500	Dinas Pora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,167,564,804	444.998.000	495.998.000	Dinas Pora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,992,477,514	1.325.000.000	1.274.000.000	Dinas Pora
14	Statistik		112,207,375	41.045.000	41.045.000	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	112,207,375	41.045.000	41.045.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
15	Persandian		106,021,325	132.300.000	132.300.000	

		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	106,021,325	132.300.000	132.300.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
16	Kebudayaan		438,358,847	466.641.000	466.641.000	
		Program Pengembangan Kebudayaan	346,443,502	346.641.000	346.641.000	Dinas P dan K
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,915,345	120.000.000	120.000.000	Dinas P dan K
17	Perpustakaan		320,000,000	145.000.000	145.000.000	
		Program Pembinaan Perpustakaan	320,000,000	145.000.000	145.000.000	Setda
18	Kearsipan		58,581,521	34.029.802	34.029.802	
		Program Pengelolaan Arsip	58,581,521	34.029.802	34.029.802	Setda
III	Urusan Pilihan		35,022,196,956	16.643.931.750	16.643.931.750	
1	Perikanan		5,058,925,795	3.019.819.700	3.079.819.700	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,205,408,358	2.643.044.700	2.703.044.700	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	618,386,706	76.225.000	76.225.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	598,020,651	148.050.000	148.050.000	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	162,266,807	75.000.000	75.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	474,843,273	77.500.000	77.500.000	Dinas Perikanan
2	Pariwisata		21,999,701,700	10.715.431.600	10.790.432.770	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,649,701,700	4.003.079.600	4.044.080.770	Dinas Pariwisata

		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,100,000,000	219.700.000	219.700.000	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	11,450,000,000	5.742.043.000	5.776.043.000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2,800,000,000	750.609.000	750.609.000	Dinas Pariwisata
3	Pertanian		6,226,962,026	1.563.067.450	1.563.067.450	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,336,903,374	249.018.000	249.018.000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,368,805,929	550.000.000	550.000.000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	239,616,243	98.167.450	98.167.450	Dinas KP dan Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400,273,913	118.960.000	118.960.000	Dinas KP dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	881,362,567	546.922.000	546.922.000	Dinas KP dan Pertanian
4	Perdagangan		696,971,927	1.016.452.000	1.016.452.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	103,918,299	686.495.000	686.495.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	329,179,609	60.000.000	60.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	263,874,019	269.957.000	269.957.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
5	Perindustrian		647,613,352	209.161.000	209.161.000	
		Program Perencanaan Dan	446,332,868	152.745.000	152.745.000	Dinas Trans,

		Pembangunan Industri				Naker dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	201,280,484	56.416.000	56.416.000	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
6	Transmigrasi		392,022,156	120.000.000	120.000.000	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	99,651,202	120.000.000	120.000.000	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	292,370,954	0	0	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
IV	Unsur Pendukung		93,706,176,270	143.763.546.474	146.937.263.994	
1	Sekretariat Daerah		59,464,832,261	108.583.833.575	108.672.350.095	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,665,574,245	99.301.636.799	99.390.153.319	Setda
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9,970,144,764	7.685.448.449	7.685.448.449	Setda
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3,829,113,252	1.596.748.327	1.596.748.327	Setda
2	Sekretariat DPRD		34,241,344,009	35.179.712.899	38.264.913.899	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	20,420,263,022	21.381.142.609	21.466.343.609	Setwan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	13,821,080,987	13.798.570.290	16.798.570.290	Setwan

V	Unsur Penunjang		222,625,392,008	208.724.944.241	218.161.544.241	
1	Perencanaan		10,152,174,063	6.139.985.500	6.139.985.500	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	3,866,833,917	4.195.922.500	4.195.922.500	Bappelitbangda
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,155,165,031	1.083.720.000	1.083.720.000	Bappelitbangda
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,130,175,115	860.343.000	860.343.000	Bappelitbangda
2	Keuangan		203,966,793,768	195.635.805.941	205.022.405.941	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	15.878.405.191	25.838.443.464	35.085.803.464	BPKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	182,614,083,973	165.514.829.625	165.654.069.625	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,373,990,797	2.362.748.700	2.362.748.700	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,100,313,807	1.919.784.152	1.919.784.152	Bapenda
3	Kepegawaian		4,317,648,916	3.615.867.800	3.665.867.800	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,583,313,341	2.244.425.400	2.294.425.400	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	1,734,335,575	1.371.442.400	1.371.442.400	BKPSDM

4	Pendidikan dan Pelatihan		2,648,176,820	236.770.000	236.770.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,648,176,820	236.770.000	236.770.000	BKPSDM
5	Penelitian dan Pengembangan		1,540,598,441	3.096.515.000	3.096.515.000	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,540,598,441	3.096.515.000	3.096.515.000	Bappelitbangda
VI	Unsur Pengawasan		8,813,620,900	6.420.695.300	7.032.710.300	
1	Inspektorat		8,813,620,900	6.420.695.300	7.032.710.300	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	5,053,620,900	4.773.171.300	5.385.186.300	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,260,000,000	1.354.727.500	1.354.727.500	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,500,000,000	292.796.500	292.796.500	Inspektorat
VII	Unsur Kewilayahan		9,810,417,700	11.499.369.800	11.499.369.800	
1	Kecamatan		9,810,417,700	11.499.369.800	11.499.369.800	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	8,847,377,140	9.169.738.750	9.169.738.750	Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Pesisir Utara, Bangkuntat, Ngaras Ngambur, Lemong, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pulau Pisang

		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	330,240,560	334.961.050	334.961.050	Kecamatan Bangkumat, Krui Selatan, Lemong, Ngambur, Ngaras, Pulau Pisang, Pesisir Selatan, Pesisir Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	632,800,000	1.994.670.000	1.994.670.000	Kecamatan Pesisir Tengah
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		40,366,553,960	23.423.655.630	23.623.375.802	
1	Kesatuan bangsa dan politik		40,366,553,960	23.423.655.630	23.623.375.802	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,773,644,407	2.307.710.500	2.491.220.500	Badan Kesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,256,985,542	777.117.000	777.117.000	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32,390,266,865	828.317.130	844.527.302	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,274,406,134	19.180.000.000	19.180.000.000	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	670,286,948	130.511.000	130.511.000	Badan Kesbangpol

		Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,000,964,064	200.000.000	200.000.000	Badan Kesbangpol
		Total Belanja	938,603,096,460	913.718.174.916	929.234.401.098	
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		449,587,992,585	441.553.552.964	442.740.416.964	47,65
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		78,670,746,081	61.688.478.757	62.460.787.077	6,72
III	Urusan Pilihan		35,022,196,956	16.643.931.750	16.778.932.920	1,81
IV	Unsur Pendukung		93,706,176,270	143.763.546.474	146.937.263.994	15,81
V	Unsur Penunjang		222,625,392,008	208.724.944.241	218.161.544.241	23.48
VI	Unsur Pengawasan		8,813,620,900	6.420.695.300	7.032.710.000	0.76
VII	Unsur Kewilayahan		9,810,417,700	11.499.369.800	11.499.369.800	1.24
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		40,366,553,960	23.423.655.630	23.623.375.802	2,54
		Jumlah	938,603,096,460	913.718.174.916	929.234.401.098	100.00

Pada kolom data Pagu Anggaran Program APBD TA 2024, terdapat beberapa program yang sebelumnya telah terangkum dan tercatat dalam RKPD Tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang tidak dianggarkan pada APBD TA 2024. Program dimaksud tidak dapat dianggarkan dikarenakan keterbatasan fiskal daerah pada saat proses penyusunan dokumen anggaran daerah. Namun demikian, pada Perubahan RKPD Tahun 2024, ada program yang sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD TA 2024 namun kembali dianggarkan. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan koreksi bagi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berikutnya dalam upaya menjaga harmonisasi penyusunan.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, penganggaran untuk Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada urutan persentase terbesar adalah sebagai berikut: (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar memiliki porsi terbesar dengan persentase 47,65%, (2) Pelaksanaan Unsur Penunjang dengan persentase 23,48%, (3) Pelaksanaan Unsur Pendukung dengan persentase 15,81%, (4) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan persentase 6,72%, (5) Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum dengan persentase 2,54%, (6) Urusan Pilihan dengan persentase 1,81%. Dan (6) Pelaksanaan urusan Kewilayahan 1,24% serta (7) Pelaksanaan Unsur Pengawasan dengan persentase 0,76%.

Berikutnya disajikan Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Nasional Perubahan Tahun 2024

Prioritas Nasional		Urusan Pemerintahan Daerah		Pagu Indikatif Anggaran (Rp.)		
				RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,731,353,336	2.845.255.800	2.845.255.800
		2	Penanaman Modal	5,527,740,677	5.277.352.286	5.277.352.286
		3	Perikanan	5,058,925,795	3.019.819.700	3.079.819.700
		4	Pariwisata	21,999,701,700	10.715.431.600	10.790.432.770
		5	Pertanian	6226962026	1.563.067.450	1.563.067.450
		6	Perdagangan	696,971,927	1.016.452.000	1.016.452.000

		7	Perindustrian	647,613,352	209.161.000	209.161.000
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,139,472,190	6.806.068.924	6.806.068.924
		2	Perhubungan	6.201.111.894	5.070.371.795	5.330.371.795
		3	Transmigrasi	392,022,156	120.000.000	120.000.000
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pendidikan	186,082,741,297	260.326.379.033	260.626.379.033
		2	Kesehatan	103,815,980,684	105.467.548.638	105.467.548.638
		3	Tenaga Kerja	2,677,044,091	2.374.625.200	2.424.625.200
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,136,012,101	1.171.000.000	1.171.000.000
		5	Pangan	7,956,573,313	6.061.430.800	6.061.430.800
		6	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	9,306,952,620	8.055.747.400	8.055.747.400
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Sosial	6,697,722,503	4.484.769.200	4.534.769.200
		2	Kepemudaan dan Olahraga	6,503,726,404	4.282.346.500	4.464.346.500
		3	Kebudayaan	438,358,847	466.641.000	466.641.000
		4	Kesatuan Bangsa dan Politik	40,366,553,960	23.423.655.630	23.623.375.802
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134,524,594,526	60.096.675.417	60.096.675.417
		2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,112,756,606	2.668.816.000	2.802.921.000
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan	1	Lingkungan Hidup	6,612,324,336	5.977.313.850	5.977.313.850

	Iklm					
		2	Pertanahan	5,854,329,407	2.667.131.400	2.667.131.400
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8,354,196,969	8.509.364.676	9.212.123.676
		2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,142,916,875	3.231.449.700	3.231.449.700
		3	Komunikasi dan Informatika	8,846,019,769	7.049.369.300	7.329.677.620
		4	Statistik	112,207,375	41.045.000	41.045.000
		5	Persandian	106,021,325	132.300.000	132.300.000
		6	Perpustakaan	320,000,000	145.000.000	145.000.000
		7	Kearsipan	58,581,521	34.029.802	34.029.802
		8	Sekretariat Daerah	59,464,832,261	108.583.833.575	108.672.350.095
		9	Sekretariat DPRD	34,241,344,009	35.179.712.899	38.264.913.899
		10	Perencanaan	10,152,174,063	6.139.985.500	6.139.985.500
		11	Keuangan	203,966,793,768	195.635.805.941	205.022.405.941
		12	Kepegawaian	4,317,648,916	3.615.867.800	3.665.867.800
		13	Pendidikan dan Pelatihan	2,648,176,820	236.770.000	236.770.000
		14	Penelitian dan Pengembangan	1,540,598,441	3.096.515.000	3.096.515.000
		15	Inspektorat	8,813,620,900	6.420.695.300	7.032.710.300
		16	Kecamatan	9,810,417,700	11.499.369.800	11.499.369.800
			Total	938,603,096,460	913.718.174.916	929.234.401.098

Lebih lanjut disajikan Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Provinsi Lampung Perubahan Tahun 2024

Prioritas Provinsi		Urusan Pemerintahan Daerah		Pagu Indikatif Anggaran (Rp.)		
				RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,731,353,336	2.845.255.800	2.845.255.800
		2	Penanaman Modal	5,527,740,677	5.277.352.286	5.277.352.286
		3	Perikanan	5,058,925,795	3.019.819.700	3.079.819.700
		4	Pariwisata	21,999,701,700	10.715.431.600	10.790.432.770
		5	Pertanian	6,226,962,026	1.563.067.450	1.563.067.450
		6	Perdagangan	696,971,927	1.016.452.000	1.016.452.000
		7	Perindustrian	647,613,352	209.161.000	209.161.000
2	Meningkatkan Kualitas SDM	1	Pendidikan	186,082,741,297	260.326.379.033	260.626.379.033
		2	Kesehatan	103,815,980,684	105.467.548.638	105.467.548.638
		3	Tenaga Kerja	2,677,044,091	2.374.625.200	2.424.625.200
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,136,012,101	1.171.000.000	1.171.000.000
		5	Pangan	7,956,573,313	6.061.430.800	6.061.430.800
		6	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	9,306,952,620	8.055.747.400	8.055.747.400
3	Pembangunan Infrastruktur	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134,524,594,526	60.096.675.417	60.096.675.417
		2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,112,756,606	2.668.816.000	2.802.921.000
		3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,139,472,190	6.806.068.924	6.806.068.924
		4	Perhubungan	6,201,111,894	5.070.371.795	5.330.371.795
		5	Transmigrasi	392,022,156	120.000.000	120.000.000
4	Reformasi Birokrasi	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,142,916,875	3.231.449.700	3.231.449.700
		2	Komunikasi dan	8,846,019,769	7.049.369.300	7.239.677.620

			Informatika			
		3	Statistik	112,207,375	41.045.000	41.045.000
		4	Persandian	106,021,325	132.300.000	132.300.000
		5	Perpustakaan	320,000,000	145.000.000	145.000.000
		6	Kearsipan	58,581,521	34.029.802	34.029.802
		7	Sekretariat Daerah	59,464,832,261	108.583.833.575	108.672.350.095
		8	Sekretariat DPRD	34,061,344,009	35.179.712.899	38.264.913.899
		9	Perencanaan	10,152,174,063	6.139.985.500	6.139.985.500
		10	Keuangan	203,966,793,768	195.635.805.941	205.022.405.941
		11	Kepegawaian	4,317,648,916	3.615.867.800	3.665.867.800
		12	Pendidikan dan Pelatihan	2,648,176,820	236.770.000	236.770.000
		13	Penelitian dan Pengembangan	1,540,598,441	3.096.515.000	3.096.515.000
		14	Inspektorat	8,813,620,900	6.420.695.300	7.032.710.300
		15	Kecamatan	9,810,417,700	11.499.369.800	11.499.369.800
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	1	Sosial	6,697,722,503	4.484.769.200	4.534.769.200
		2	Kepemudaan dan Olahraga	6,503,726,404	4.282.346.500	4.464.346.500
		3	Kebudayaan	438,358,847	466.641.000	466.641.000
		4	Kesatuan bangsa dan politik	40,366,553,960	23.423.655.630	23.623.375.802
6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	1	Lingkungan Hidup	6,612,324,336	5.977.313.850	5.977.313.850
		2	Pertanahan	5,854,329,407	2.667.131.400	2.667.131.400
		3	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8,354,196,969	8.509.364.676	9.212.123.676
			Total	938,603,096,460	913.718.174.916	929.234.401.098

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, dirumuskan Program dan Kegiatan

Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk mendukung Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024

No	Prioritas RKPD	Sasaran RPJMD	Program	Indikator Program (Target)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Target)	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya SDM Daerah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (100 Persen)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD (70.00 Persen)	Dinas P dan K
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP (70.00 Persen)	Dinas P dan K
			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (1 Lokasi)	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (150 Orang)	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (25.00 Persen)	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Dinamis sebagai Warisan Budaya yang Preservasi (21.000 Arsip)	Sekretariat Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (100 Persen)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik (100 Persen)	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (100 Persen)	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Masyarakat yang Mengetahui PHBS (100 Persen)	Dinas Kesehatan
		Menurunnya	Program	Cakupan Pemenuhan	Penyadaran,	Persentase Wirausaha	Dinas Pora

		Jumlah Penganguran Daerah	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (55.00 Persen)	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Muda (1.10 Persen)	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (50.00 Persen)	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Lomba Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan (100 Persen)	Dinas Pora
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (73.88 Persen)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Cakupan Pemerataan Tenaga Kerja (30.00 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (100 Persen)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Persentase Peserta yang Menerima Pembinaan P3KSS dan GSI (100 Persen)	Dinas PP PA dan KB
			Program Pemenuhan Hak	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan	Penguatan dan Pengembangan	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang	Dinas PP PA dan KB

			Anak (PHA)	Terhadap Anak (33.33 Persen)	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Pemenuhan Hak-hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak (100 Persen)	
			Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (0.95 Persen)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Koordinasi Integrasi Program Bangga Kencana dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (11 Kecamatan)	Dinas PP PA dan KB
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Transportasi Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (42.50 Persen)	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota (41.00 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (72.50 Persen)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perlengkapan Jalan (10.00 Persen)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (60.00	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan	Persentase Sarana Transportasi Laut yang Layak (70.00 Persen)	Dinas Perhubungan

				Persen)	Pengoperasian Kapal dalam Kab/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kab/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kab/Kota		
		Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (42.50 Persen)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (37.50 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (88.00 Persen)	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun (86.00 Persen)	Dinas PR dan KP
		Tersedianya SDA untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (42.50 Persen)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (30.00 Persen)	Dinas PU dan PR
		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR (100 Persen)	Dinas PU dan PR

		Lingkungan		Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (30.00 Persen)	Kab/Kota		
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (45.00 Persen)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (20.00 Persen)	Dinas PR dan KP
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (11.00 Ha)	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian (10 Lokasi)	Dinas PR dan KP
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (74.20 Angka)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (100 Persen)	Dinas LH
		Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Pencegahan dan Penyelematan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (100 Persen)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (15 Menit)	Satpol PP dan Damkar

		Bencana Daerah	Penyelamatan Non Kebakaran		Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota		
			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (100 Persen)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (100 Persen)	BPBD
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (16.99 Persen)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rasio Izin yang Diterbitkan (80.00 Persen)	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (14.419 Ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Area Penangkapan Ikan (80.00 Persen)	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (2.08 Persen)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan serta Terdata di Database	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

					Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	(60.00 Persen)	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (11.56 Persen)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (60.00 Persen)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (100.77 - 110,00 Angka)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian (0.30 Persen)	Dinas KP dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (28.000 Ton)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (84.95 Angka)	Dinas KP dan Pertanian
		Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (40.00 Persen)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Terealisasinya Rencana Pembangunan Industri (100 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (100 Persen)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan (100 Persen)	Dinas Sosial

					Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (100 Persen)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran dan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (100 Persen)	Dinas Sosial
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (25.00 Persen)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Menonton secara Langsung Pertunjukan Seni (60 Orang)	Dinas P dan K
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (2.98 Persen)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Lamanya Kunjungan Wisatawan (8 Hari)	Dinas Pariwisata
4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (100 Persen)	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (100 Persen)	Dinas Duk dan Capil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Pengembangan Pemuda (100 Persen)	11 Kecamatan

			Pelayanan Publik	Pelayanan Publik (100 Persen)	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (2 Dokumen)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (100 Persen)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (100 Persen)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penjabaran konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan anggaran terhadap kepatuhan Peraturan peundang-undangan (100 Persen)	Inspektorat
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (100 Persen)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (100 Persen)	Bappelitbang da
			Program Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi Daerah (Sangat Inovatif Predikat)	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA	Bappelitbang da

		Daerah			(100 Persen)	
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (73.54 Persen)	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pemenuhan ASN (50.00 Persen)	BKPSDM
		Program Pengembangan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (100 Persen)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (20 Jam Pelajaran)	BKPSDM
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (85.00 Persen)	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu (100 Persen)	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Yang sesuai regulasi (100 Persen)	Sekretariat DPRD

				(RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (100 Persen)			
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (100 Persen)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu (100 Persen)	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (100 Persen)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pencatatan Aset Daerah (100 Persen)	BPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (4.20 Persen)	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Peningkatan PAD (2.50 Persen)	Bapenda
		Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (75.00 Persen)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (100 Persen)	Badan Kesbangpol
5	Harmonisasi Kehidupan	Terwujudnya Pelayanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan	Pengelolaan Nama Domain yang telah	Cakupan Penyediaan Informasi Digital di	Dinas Kominfo,

	Sosial dan Budaya Masyarakat	yang Berkualitas		Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (82.50 Persen)	ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Lingkup Pemerintah Daerah (100 Persen)	Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (60 Pekon)	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa (65.00 Persen)	Dinas PMP
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (1 Lokasi)	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran (80.00 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaaan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2024 dapat dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan daerah untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (P1)	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas (S1) 2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah (S2) 3. Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas (S3)	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Tenaga Kerja d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Pemuda dan Olahraga g. Perpustakaan h. Kearsipan
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan (P2)	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah (S4) 2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas (S5) 3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan (S6) 4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan (S7) 5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah (S8)	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman c. Pertanahan d. Lingkungan Hidup e. Perhubungan f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat (P3)	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (S9) 2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (S10) 3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat (S11)	a. Pangan b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah c. Penanaman Modal d. Kelautan dan Perikanan e. Pariwisata f. Pertanian

		4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat (S12) 5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah (S13) 6. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (S14)	g. Perdagangan h. Perindustrian i. Sosial j. Pariwisata k. Kebudayaan
4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas (P4)	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas (S15) 2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas (S16) 3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (S17)	a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Statistik c. Persandian d. Sekretariat Daerah e. Sekretariat DPRD f. Perencanaan g. Keuangan h. Kepegawaian i. Pendidikan dan Pelatihan j. Penelitian dan Pengembangan k. Inspektorat l. Kecamatan m. Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat (P5)	1. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas (S16) 2. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon (S18)	a. Komunikasi dan Informatika b. Pemberdayaan Masyarakat c. Transmigrasi

Selanjutnya, berdasarkan pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Urusan Pemerintahan Daerah untuk menunjang pelaksanaan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat serta Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dijabarkan pada tabel di bawah ini ;

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PESISIR BARAT
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							186.521.100.144,00	260.793.020.033,00	261.093.020.033,00							304.736.418.686,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							186.082.741.297,00	260.326.379.033,00	260.626.379.033,00							304.236.418.686,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							186.082.741.297,00	260.326.379.033,00	260.626.379.033,00							304.236.418.686,00	
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				92,50 Persen	92,50 Persen	126.958.119.093,00	194.138.131.651,00	194.138.131.651,00							233.474.255.000,00	
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	15.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	10.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	119.157.038.093,00	190.885.361.651,00	190.885.361.651,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		225.005.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14,00 Orang/bulan	1697 Orang/bulan	119.151.538.093,00	190.879.861.651,00	190.879.861.651,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		225.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan Terlaksananya Jenis Bidang Urusan yang dilaksanakan	-			-	2 Jenis 2 Urusan	6.622.333.000,00	1.853.822.000,00	1.853.822.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		7.286.897.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	61.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	81 Orang	6.560.733.000,00	1.853.822.000,00	1.853.822.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		7.216.897.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	493.516.000,00	533.516.000,00	533.516.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		493.516.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Paket	12 Paket	96.016.000,00	96.016.000,00	96.016.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		96.016.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					30 Dokumen	30 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	254.000.000,00	467.300.000,00	467.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		254.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14 Unit	14 Unit	174.000.000,00	387.300.000,00	387.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		174.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-		-	100 %	204.542.000,00	204.542.000,00	204.542.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		204.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	12 Laporan	157.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		157.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	5.542.000,00	5.542.000,00	5.542.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		-	100 %	111.690.000,00	81.190.000,00	81.190.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		114.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	13 Unit	26.690.000,00	26.690.000,00	26.690.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		29.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan			-	100 Persen	59.124.622.204,00	66.188.247.382,00	66.488.247.382,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			70.762.163.686,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi kasar SD	-		-	92.57 %	35.605.440.227,00	32.583.953.330,00	32.883.953.330,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		40.603.562.186,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14098 Peserta Didik	14098 Peserta Didik	8.460.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		9.306.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	11 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				70 Orang	70 Orang	280.000.000,00	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				128 Satuan Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	17.986.980.000,00	18.053.070.000,00	18.053.070.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		19.785.578.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		161.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				17772 Paket	17772 Paket	1.080.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		1.965.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				35 unit	36 Unit	7.623.160.227,00	6.075.883.330,00	6.375.883.330,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		8.516.694.186,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi kasar SMP	-		-	92.12 %	18.264.500.000,00	30.015.050.052,00	30.015.050.052,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		24.625.039.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	25 Unit	4.359.110.000,00	11.146.350.052,00	11.146.350.052,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa		4.359.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				422 Peserta Didik	422 Peserta Didik	5.275.500.000,00	10.528.500.000,00	10.528.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat, Siswa	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	5.803.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	143.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				36 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	7.817.150.000,00	7.936.200.000,00	7.936.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	8.598.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	4 Dokumen	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	103.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	40 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				6129 Paket	6129 Paket	388.740.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	427.614.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar PAUD	-		73 %	73 %	4.842.361.977,00	3.303.684.000,00	3.303.684.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	5.080.010.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0002																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	5 Unit	1.318.151.977,00	851.984.000,00	851.984.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	-	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	40 Orang	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	2.192.510.000,00	2.146.700.000,00	2.146.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	2.192.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	137.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			3239 Paket	-	996.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan	-		325 Orang	325 Orang	412.320.000,00	285.560.000,00	285.560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	453.552.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	412.320.000,00	285.560.000,00	285.560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Siswa	453.552.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						438.358.847,00	466.641.000,00	466.641.000,00						500.000.000,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						438.358.847,00	466.641.000,00	466.641.000,00						500.000.000,00		
3	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 Tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni			25,00 Persen	25,00 Persen	346.443.502,00	346.641.000,00	346.641.000,00						400.000.000,00		
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	-		60 %	60 %	346.443.502,00	346.641.000,00	346.641.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			7 Objek	5 Objek	346.443.502,00	346.641.000,00	346.641.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi			30,00 Persen	30,00 Persen	91.915.345,00	120.000.000,00	120.000.000,00						100.000.000,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Terdaftar	-		2 Objek	2 Objek	91.915.345,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			2 Objek	2 Objek	91.915.345,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Dinas Kesehatan						103.815.980.684,00	74.389.667.799,00	74.389.667.799,00						74.389.667.799,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						103.815.980.684,00	74.389.667.799,00	74.389.667.799,00						74.389.667.799,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						103.815.980.684,00	74.389.667.799,00	74.389.667.799,00						74.389.667.799,00		
5	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,5 %	92,5 %	34.963.420.870,00	41.011.984.960,00	41.011.984.960,00						41.011.984.960,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan	-		92,5 %	92,5 %	61.449.600,00	72.944.400,00	72.944.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	72.944.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.00 Dokumen	2 Dokumen	19.220.000,00	12.466.800,00	12.466.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	12.466.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.610.000,00	19.610.000,00	19.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	19.610.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.610.000,00	19.610.000,00	19.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	19.610.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.752.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	185.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Pelita Jaya	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		36.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		15.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan	-		92,5 %	92,5 %	167.000.000,00	3.917.412.800,00	3.917.412.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		3.917.412.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	26 Unit	55.000.000,00	3.820.412.800,00	3.820.412.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		3.820.412.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan	-		92,5 %	92,5 %	108.960.000,00	147.360.000,00	147.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		147.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		50.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 2 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	960.000,00	960.000,00	960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan	-		92,5 %	92,5 %	405.629.000,00	355.100.000,00	355.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		355.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	7 Unit	27.229.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		20.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	281.800.000,00	249.900.000,00	249.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		249.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30.00 Unit	73 Unit	56.600.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		51.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		32.900.000,00	DINAS KESEHATAN
6	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan			100 %	100 %	61.778.931.631,00	26.832.631.139,00	26.832.631.139,00							26.832.631.139,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	-		100 %	100 %	43.889.952.308,00	10.958.757.523,00	10.958.757.523,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		10.958.757.523,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2.00 Unit	0 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				11 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	3.000.872.200,00	3.000.872.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		3.000.872.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Way Suluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	11 Unit	5.000.000.000,00	2.762.387.584,00	2.762.387.584,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		2.762.387.584,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				7 Unit	0 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	7 Unit	5.000.000.000,00	2.394.051.000,00	2.394.051.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		2.394.051.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				11 Unit	0 Unit	246.868.108,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-			11 Unit		0,00	56.125.000,00	56.125.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		56.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	0 Unit	7.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Way Suluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	4.565.144.200,00	1.284.598.739,00	1.284.598.739,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		1.284.598.739,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				-	1200 Layanan	0,00	634.877.000,00	634.877.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		634.877.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	77.940.000,00	25.846.000,00	25.846.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur, masyarakat		25.846.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	-			100 %	100 %	17.470.377.400,00	15.554.870.676,00	15.554.870.676,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		15.554.870.676,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	3281 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	3132 Orang	82.065.600,00	388.820.000,00	388.820.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		388.820.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	2983 Orang	100.000.000,00	65.095.750,00	65.095.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.095.750,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	14444 Orang	70.705.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	17479 Orang	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	115820 Orang	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24 Orang	15743 Orang	209.400.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	20834 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	927 Orang	100.000.000,00	242.763.300,00	242.763.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		242.763.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	271 Orang	75.207.600,00	52.066.500,00	52.066.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		52.066.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				48 Orang	2500 Orang	116.724.000,00	1.305.971.800,00	1.305.971.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.305.971.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				48 Orang	3300 Orang	101.876.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	71.467.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	3 Dokumen	126.560.300,00	130.566.500,00	130.566.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		130.566.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	6.591.150,00	6.591.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		6.591.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	189.945.500,00	337.945.900,00	337.945.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		337.945.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	9 Dokumen	101.423.800,00	336.571.750,00	336.571.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		336.571.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	97.115.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1.00 Dokumen	3 Dokumen	52.970.000,00	159.035.650,00	159.035.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		159.035.650,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	141746 Orang	100.000.000,00	19.881.500,00	19.881.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		19.881.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	12 Dokumen	400.870.200,00	1.313.018.476,00	1.313.018.476,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.313.018.476,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	8.932.168.000,00	10.222.556.000,00	10.222.556.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		10.222.556.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	0 Dokumen	5.100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Way Suluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				11 Dokumen	1 Dokumen	213.624.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	45.502.200,00	45.502.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		45.502.200,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	243.891.000,00	88.603.000,00	88.603.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		88.603.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	2 Laporan	231.118.000,00	19.573.600,00	19.573.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		19.573.600,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.270.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	64.976.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	325 Orang	0,00	37.467.600,00	37.467.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		37.467.600,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
1	02	02	2.03				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	-		100 %	100 %	418.601.923,00	319.002.940,00	319.002.940,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		319.002.940,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	4 Dokumen	418.601.923,00	319.002.940,00	319.002.940,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		319.002.940,00	DINAS KESEHATAN	
7	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan				100 %	100 %	4.918.705.636,00	6.335.464.600,00	6.335.464.600,00							6.335.464.600,00		
1	02	03	2.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan	-			100 %	100 %	66.134.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.134.800,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan	-			100 %	100 %	4.812.570.836,00	5.230.717.200,00	5.230.717.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		5.230.717.200,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	4.709.760.236,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				95 Orang	100 Orang	62.810.600,00	5.030.000.000,00	5.030.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		5.030.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	160.717.200,00	160.717.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		160.717.200,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan	-			100 %	100 %	40.000.000,00	1.054.747.400,00	1.054.747.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		1.054.747.400,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				9 Orang	30 Orang	40.000.000,00	1.054.747.400,00	1.054.747.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		1.054.747.400,00	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha	-			100 %	100 %	351.980.965,00	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha	-			100 %	100 %	94.419.165,00	0,00	0,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	0 Dokumen	94.419.165,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha	-			100 %	100 %	56.071.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	56.071.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha	-			100 %	100 %	201.490.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	0 Dokumen	201.490.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan				100 %	100 %	1.802.941.582,00	159.587.100,00	159.587.100,00							159.587.100,00		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	0,00	33.720.000,00	33.720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		33.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	33.720.000,00	33.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas /fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	-			100 %	100 %	1.792.234.782,00	82.338.800,00	82.338.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		82.338.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.792.234.782,00	82.338.800,00	82.338.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		82.338.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas /fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	-			100 %	100 %	10.706.800,00	43.528.300,00	43.528.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Serai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		43.528.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	10.706.800,00	43.528.300,00	43.528.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		43.528.300,00	DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Lemong							0,00	2.603.165.000,00	2.603.165.000,00							2.626.144.600,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.603.165.000,00	2.603.165.000,00							2.626.144.600,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.603.165.000,00	2.603.165.000,00							2.626.144.600,00		
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SDM Bidang Kesehatan					100%	0,00	2.591.075.000,00	2.591.075.000,00							2.614.054.600,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	2.584.415.000,00	2.584.415.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		2.607.394.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	50.844.000,00	50.844.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		50.844.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		6.660.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan				-	100%	0,00	12.090.000,00	12.090.000,00							12.090.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	12.090.000,00	12.090.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		12.090.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
						Puskesmas Pugung Tampak							0,00	1.483.675.000,00	1.483.675.000,00							1.516.500.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.483.675.000,00	1.483.675.000,00							1.516.500.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.483.675.000,00	1.483.675.000,00							1.516.500.000,00		
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan				-	100%	0,00	1.451.635.000,00	1.451.635.000,00							1.484.460.000,00		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
1	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
1	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
1	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
1	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
1	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
1	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
1	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
1	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
1	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
1	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
1	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
1	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
1	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	6.660.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	-	100%	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00						5.760.000,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	5.760.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
	1					Pukesmas KruI					0,00	2.899.150.750,00	2.899.150.750,00						2.966.643.938,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0,00	2.899.150.750,00	2.899.150.750,00						2.966.643.938,00				
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan	-	-	100%	0,00	2.887.040.750,00	2.887.040.750,00						2.966.643.938,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	0,00	2.821.343.750,00	2.821.343.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	2.900.946.938,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	100%	0,00	65.697.000,00	65.697.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	65.697.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	-	100%	0,00	12.110.000,00	12.110.000,00						0,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	0,00	12.110.000,00	12.110.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
	1					Pukesmas Biha					0,00	2.666.165.000,00	2.666.165.000,00						2.753.652.200,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0,00	2.666.165.000,00	2.666.165.000,00						2.753.652.200,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0,00	2.666.165.000,00	2.666.165.000,00						2.753.652.200,00				
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan	-	-	100%	0,00	2.622.850.000,00	2.622.850.000,00						2.710.337.200,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100%	0,00	2.616.190.000,00	2.616.190.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	2.703.677.200,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
1	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
1	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
1	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
1	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
1	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
1	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
1	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
1	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-				100%	0,00	43.315.000,00	43.315.000,00						43.315.000,00	
1	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				100%	0,00	43.315.000,00	43.315.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	43.315.000,00	DINAS KESEHATAN
1	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Puskesmas Ngambur						0,00		2.467.880.000,00	2.467.880.000,00						2.490.560.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00		2.467.880.000,00	2.467.880.000,00						2.490.560.000,00	
1	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00		2.467.880.000,00	2.467.880.000,00						2.490.560.000,00	
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan	-				100%	0,00	2.452.940.000,00	2.452.940.000,00						2.490.560.000,00	
1	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				100%	0,00	2.446.280.000,00	2.446.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	2.483.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
1	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
1	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
1	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
1	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
1	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
1	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
1	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
1	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
1	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
1	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
1	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
1	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
1	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
1	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
1	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
1	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
1	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-				100%	0,00	14.940.000,00	14.940.000,00						0,00	
1	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				100%	0,00	14.940.000,00	14.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN
1	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Puskesmas Ngaras						0,00		1.832.300.000,00	1.832.300.000,00						880.975.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00		1.832.300.000,00	1.832.300.000,00						880.975.000,00	
1	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00		1.832.300.000,00	1.832.300.000,00						880.975.000,00	
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan	-				100%	0,00	1.814.880.000,00	1.814.880.000,00						863.555.000,00	
1	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				100%	0,00	1.808.220.000,00	1.808.220.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	856.895.000,00	DINAS KESEHATAN
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
1	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
1	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
1	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
1	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
1	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
1	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
1	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
1	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
1	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
1	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
1	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
1	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
1	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
1	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
1	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
25	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				-	100%	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00							17.420.000,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		17.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
					Puskesmas Bangkunt								0,00	4.921.216.000,00	4.921.216.000,00						5.070.906.000,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								0,00	4.921.216.000,00	4.921.216.000,00						5.070.906.000,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								0,00	4.921.216.000,00	4.921.216.000,00						5.070.906.000,00	
26	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan				-	100%	0,00	4.914.191.000,00	4.914.191.000,00							5.063.881.000,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	4.907.531.000,00	4.907.531.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		5.057.221.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
	1	02	02	2.02	0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas																	
	1	02	02	2.02	0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
27	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				-	100%	0,00	7.025.000,00	7.025.000,00							7.025.000,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	7.025.000,00	7.025.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		7.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
					Puskesmas Way Krui								0,00	1.609.450.800,00	1.609.450.800,00						1.608.283.840,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								0,00	1.609.450.800,00	1.609.450.800,00						1.608.283.840,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								0,00	1.609.450.800,00	1.609.450.800,00						1.608.283.840,00	
28	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan				-	100%	0,00	1.560.125.800,00	1.560.125.800,00							1.558.958.840,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	1.553.465.800,00	1.553.465.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		1.552.298.840,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
	1	02	02	2.02	0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas																	
	1	02	02	2.02	0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
	1	02	02	2.02	0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat		6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
29	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				-	100%	0,00	49.325.000,00	49.325.000,00							49.325.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	49.325.000,00	49.325.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	49.325.000,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			1.477.730.000,00			
	1				Puskesmas Kru Selatan																					1.477.730.000,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					1.477.730.000,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					1.477.730.000,00		
30	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan				-	100%	0,00	1.418.805.000,00	1.418.805.000,00							1.443.365.000,00							
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	1.412.145.000,00	1.412.145.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	1.436.705.000,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																						
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																						
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																						
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																						
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																						
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																						
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																						
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																						
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																						
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																						
	1	02	02	2.03	Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	100%	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	6.660.000,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																						
31	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				-	100%	0,00	34.365.000,00	34.365.000,00							34.365.000,00							
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	34.365.000,00	34.365.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	34.365.000,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																						
					RSUD K.H Muhammad Thohir																					6.462.025.999,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					6.462.025.999,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					6.462.025.999,00		
32	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan SPM Bidang kesehatan				-	100%	0,00	6.462.025.999,00	6.462.025.999,00							6.462.025.999,00							
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100%	0,00	6.462.025.999,00	6.462.025.999,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Dan Masyarakat	6.462.025.999,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																						
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																						
	1				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					131.169.402.165,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					131.169.402.165,00		
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					131.169.402.165,00		
33	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				92,50 Persen	92,50 Persen	5.348.238.701,00	5.787.072.211,00	5.787.072.211,00							5.832.916.551,00							
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	23.100.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	25.434.079,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					13.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	12.100.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					12.124.079,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	3.289.800.000,00	2.666.750.900,00	2.666.750.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	3.358.141.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	3.276.300.000,00	2.653.250.900,00	2.653.250.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		3.343.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.324.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.324.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.662.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.662.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		100 %	100 %	95.000.000,00	61.780.000,00	61.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		180.752.462,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	61.780.000,00	61.780.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		180.752.462,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	61.780.000,00	61.780.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		180.752.462,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan sumber daya manusia	-		100 %	100 %	100.000.000,00	208.656.311,00	208.656.311,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5 Orang	20 Orang	100.000.000,00	208.656.311,00	208.656.311,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20 Orang	100.000.000,00	208.656.311,00	208.656.311,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-		100 %	100 %	441.828.701,00	1.547.739.000,00	1.547.739.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		538.031.010,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.00 Paket	9 Paket	10.000.000,00	23.793.000,00	23.793.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.821.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11.00 Paket	9 Paket	10.000.000,00	23.793.000,00	23.793.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.821.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.00 Paket	44 Paket	97.000.000,00	169.870.000,00	169.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		106.575.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41.00 Paket	44 Paket	97.000.000,00	169.870.000,00	169.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		106.575.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Paket	1 Paket	115.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		133.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	115.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		133.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8 Paket	8 Paket	75.000.000,00	173.076.000,00	173.076.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		127.429.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	75.000.000,00	173.076.000,00	173.076.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		127.429.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	616.000.000,00	616.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	616.000.000,00	616.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	114.828.701,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		130.106.010,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	114.828.701,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		130.106.010,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-		100 %	100 %	249.100.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		272.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	14 Unit	249.100.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		272.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung kantor	-			100 %	100 %	457.940.000,00	455.596.000,00	455.596.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		522.458.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	84.700.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		93.170.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	143.200.000,00	143.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		348.722.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	73.240.000,00	228.396.000,00	228.396.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		80.566.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	691.470.000,00	710.550.000,00	710.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		725.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	359.370.000,00	404.550.000,00	404.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		395.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	332.100.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
34	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah				45,00 Persen	45,00 Persen	7.184.286.394,00	4.567.881.748,00	4.567.881.748,00								10.058.000.951,00	
	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai	-			45 %	45 %	3.592.143.197,00	3.606.937.468,00	3.606.937.468,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		5.029.000.475,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	1.210.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.172.143.197,00	3.606.937.468,00	3.606.937.468,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.367.000.475,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																	
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				1 KM		1.210.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	-			45 %	45 %	3.592.143.197,00	960.944.280,00	960.944.280,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		5.029.000.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	1.777.143.197,00	960.944.280,00	960.944.280,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		3.032.500.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM		1.815.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.996.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman				43 Persen	43 Persen	2.275.402.820,00	650.000.000,00	650.000.000,00							3.413.104.229,00		
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	-			43 %	43 %	2.275.402.820,00	650.000.000,00	650.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		3.413.104.229,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	275.402.820,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		413.104.229,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				900 Liter/Detik	900 Liter/Detik	2.000.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
36	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman				75 Persen	75 Persen	1.975.202.820,00	100.000.000,00	100.000.000,00							2.962.804.229,00		
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air Limbah Domestik) Layak dan aman	-			75 %	75 %	1.975.202.820,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.962.804.229,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				300 M³/Hari	300 M³/Hari	1.491.202.820,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	484.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		512.804.229,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
37	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan				35,00 Persen	35,00 Persen	2.544.820.052,00	600.000.000,00	600.000.000,00							3.308.266.068,00		
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	-			35 %	35 %	2.544.820.052,00	600.000.000,00	600.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		3.308.266.068,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	300 M	2.544.820.052,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		3.308.266.068,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
38	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam skala mantap				70,00 Persen	70,00 Persen	96.818.073.298,00	18.724.458.637,00	18.724.458.637,00							64.362.953.003,00		
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah	-			70 %	70 %	96.818.073.298,00	18.724.458.637,00	18.724.458.637,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		64.362.953.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9 Dokumen	96.818.073.298,00	18.724.458.637,00	18.724.458.637,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		64.362.953.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
39	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang memiliki ruang terbuka hijau (RTH)				5,00 Persen	5,00 Persen	3.678.831.711,00	365.000.000,00	365.000.000,00							4.009.926.566,00		
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-			5 %	5 %	3.678.831.711,00	365.000.000,00	365.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		4.009.926.566,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional		Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	1 Kawasan	3.178.831.711,00	365.000.000,00	365.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	3.509.926.566,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen		500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				42,00 Persen	42,00 Persen	13.911.055.354,00	26.570.919.101,00	26.570.919.101,00						36.271.765.688,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	-			42 %	42 %	13.911.055.354,00	26.570.919.101,00	26.570.919.101,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	36.271.765.688,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					8 Dokumen	11 Dokumen	847.000.000,00	3.151.291.000,00	3.151.291.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	931.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																
						Panjang Jalan yang Dibangun					1.3 KM	1.3 KM	4.514.055.354,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	3.160.065.688,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi					1.5 KM	8.3 KM	3.000.000.000,00	20.019.628.101,00	20.019.628.101,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DBH Sawit	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala					1 KM	0 km	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan																
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi					5 Jembatan	0 km	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	3.630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																
						Jumlah Jembatan yang Dibangun					10,00 Jembatan	0 Jembatan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					1.1 KM	0 KM	550.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Konstruksi yang handal dan dapat diandalkan				35,00 Persen	35,00 Persen	473.880.948,00	500.000.000,00	500.000.000,00						606.530.233,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlatihnya tenaga terampil konstruksi	-			20 Orang	20 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat	170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih					50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	-			100 %	100 %	250.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			1 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			1,00 Layanan Informasi	0 layanan informasi	130.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan dan evaluasi pekerjaan fisik	-		100 %	100 %	143.880.948,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		161.530.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha			1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	143.880.948,00	290.000.000,00	290.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		161.530.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog			30,00 Persen	30,00 Persen	314.802.428,00	2.231.343.720,00	2.231.343.720,00								343.134.647,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	-		30 %	30 %	78.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		85.783.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			1 Orang	60 Orang	78.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR	-		1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	1.707.117.120,00	1.707.117.120,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		85.783.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	1.707.117.120,00	1.707.117.120,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	-		12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	177.781.520,00	177.781.520,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		85.783.664,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.891.832,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	152.781.520,00	152.781.520,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.891.832,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW	-		30 %	30 %	78.802.428,00	321.445.080,00	321.445.080,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		85.783.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.160.000,00	52.896.000,00	52.896.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		50.160.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		14.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	170.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	-		100 persen	0 persen	56.400.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	56.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		56.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-		100 persen	100 persen	65.774.000,00	65.774.000,00	65.774.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65.774.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		57.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		8.774.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	-		100 persen	100 persen	89.990.000,00	79.510.000,00	79.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	89.990.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		64.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	24.990.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		24.990.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
44	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni			88 persen	88 persen	1.643.820.052,00	199.770.000,00	199.770.000,00							707.920.000,00	
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		100 persen	0 persen	250.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	145.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																
						Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		62.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		82.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1		04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	-		12 Bulan	12 Bulan	950.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	100.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				25 Unit Rumah	0 Unit Rumah	850.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun	-			20 persen	20 persen	150.000.000,00	96.171.000,00	96.171.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	96.171.000,00	96.171.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Site Plan	-			12 Laporan	12 Laporan	293.820.052,00	37.099.000,00	37.099.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	202.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	293.820.052,00	37.099.000,00	37.099.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		202.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
45	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni				42.50 persen	0 persen	1.164.129.345,00	0,00	0,00						1.114.129.345,00				
	1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-			12 Bulan	0 Bulan	300.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-			0.5 Ha	0 Ha	630.129.345,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	580.129.345,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	03	2.02	0004																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				12 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	0 Dokumen	200.129.345,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		150.129.345,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				2 Kelompok Masyarakat	0 kelompok Masyarakat	120.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			6 Dokumen	0 Dokumen	160.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	-		42.50 persen	0 persen	234.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		234.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			1 Dokumen	0 Dokumen	234.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			234.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
46	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman yang Tertata			50 persen	50 persen	3.844.401.966,00	129.998.000,00	129.998.000,00							704.401.966,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	-		15 persen	15 persen	3.844.401.966,00	129.998.000,00	129.998.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		704.401.966,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			182 Unit Rumah	5 Unit Rumah	3.844.401.966,00	129.998.000,00	129.998.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			704.401.966,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
47	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum			45 persen	45 persen	1.177.296.243,00	115.851.000,00	115.851.000,00							1.177.296.243,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	-		20 persen	20 persen	1.177.296.243,00	115.851.000,00	115.851.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		1.177.296.243,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			8 Lokasi	8 Lokasi	1.177.296.243,00	115.851.000,00	115.851.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.177.296.243,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.854.329.407,00	2.667.131.400,00	2.667.131.400,00							1.013.143.446,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.854.329.407,00	2.667.131.400,00	2.667.131.400,00							1.013.143.446,00	
48	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria			0.5 Ha	0.5 Ha	92.391.704,00	23.047.000,00	23.047.000,00							92.391.704,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah	-		12 Bulan	12 Bulan	92.391.704,00	23.047.000,00	23.047.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		92.391.704,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 Berita Acara	12 Berita Acara	52.391.704,00	23.047.000,00	23.047.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.391.704,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
49	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya			11 Ha	11 Ha	5.463.757.704,00	2.525.540.000,00	2.525.540.000,00							665.617.742,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian	-		12 Bulan	12 Bulan	5.463.757.704,00	2.525.540.000,00	2.525.540.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		665.617.742,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional		Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	5.463.757.704,00	2.525.540.000,00	2.525.540.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		665.617.742,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
50	2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pemanfaatan tanah kosong				100 Ha	100 Ha	298.179.999,00	118.544.400,00	118.544.400,00						255.134.000,00					
	2	10	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	-			100 persen	100 persen	298.179.999,00	118.544.400,00	118.544.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	255.134.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																	255.134.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				81.00 Laporan	81.00 Laporan	298.179.999,00	118.544.400,00	118.544.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		255.134.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						5.413.102.296,00	4.912.731.800,00	4.951.740.800,00						5.438.781.482,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.413.102.296,00	4.912.731.800,00	4.951.740.800,00						5.438.781.482,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.413.102.296,00	4.912.731.800,00	4.951.740.800,00						5.438.781.482,00					
51	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.301.320.814,00	2.718.343.100,00	2.757.352.100,00						2.327.000.000,00					
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	1.805.500.000,00	2.281.703.900,00	2.281.703.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	1.805.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364.00 Orang/bulan	364.00 Orang/bulan	1.800.000.000,00	2.278.231.800,00	2.317.240.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.478.300,00	2.478.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	993.800,00	993.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	142.820.814,00	127.930.200,00	127.930.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	170.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.820.814,00	26.494.200,00	26.494.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	-		100 %	100 %	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana pendukung kinerja	-		100 %	100 %	127.000.000,00	117.509.000,00	117.509.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	110.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		100 persen	100 persen	214.000.000,00	184.200.000,00	184.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		214.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6.00 Unit	6.00 Unit	210.000.000,00	181.200.000,00	181.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
52	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			100 %	100 %	2.373.744.778,00	1.573.757.900,00	1.603.757.900,00							2.373.744.778,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase gangguan trantibum yang tertangani	-		100 %	100 %	2.208.744.778,00	1.499.537.000,00	1.499.537.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		2.208.744.778,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	106.000.000,00	218.079.000,00	218.079.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			106.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	12.000.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				8 laporan	8 laporan	2.075.000.000,00	1.261.958.000,00	1.261.958.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.075.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	5.000.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	5.744.778,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.744.778,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penegakan perda dan perbub yang terlaksa	-			100 %	100 %	125.000.000,00	45.151.900,00	75.151.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Mas	125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	45.151.900,00	75.151.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentasi pembinaan ppns kabupaten	-			100 %	100 %	40.000.000,00	29.069.000,00	29.069.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	29.069.000,00	29.069.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
53	1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran				100 %	100 %	738.036.704,00	620.630.800,00	620.630.800,00						738.036.704,00		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayaan pemadam kebakaran dan penyelamat kebakaran	-			100 %	100 %	738.036.704,00	620.630.800,00	620.630.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat	738.036.704,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.00 Laporan	12.00 Laporan	668.036.000,00	570.660.000,00	570.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		668.036.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.704,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		10.000.704,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																	
						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				2 Orang	2 Orang	60.000.000,00	49.970.800,00	49.970.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2.941.112.673,00	3.596.632.876,00	4.230.382.876,00								2.941.142.673,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.941.112.673,00	3.596.632.876,00	4.230.382.876,00								2.941.142.673,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.941.112.673,00	3.596.632.876,00	4.230.382.876,00								2.941.142.673,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.50 %	92.50 %	1.773.000.923,00	2.782.698.076,00	3.086.948.076,00							1.773.000.923,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	-			100 %	100 %	5.800.000,00	15.190.090,00	15.190.090,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	7.401.200,00	7.401.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	700.000,00	700.920,00	700.920,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.920,00	700.920,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	698.550,00	698.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	698.550,00	698.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	4.989.950,00	4.989.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada	-			100 %	100 %	1.107.813.923,00	2.077.134.686,00	2.147.134.686,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.107.813.923,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.104.313.923,00	2.071.635.900,00	2.141.635.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.104.313.923,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.499.700,00	2.499.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	1.999.150,00	1.999.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	999.936,00	999.936,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.00 Orang	5.00 Orang	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	207.089.000,00	239.242.600,00	349.242.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		207.089.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.326.000,00	12.689.600,00	12.689.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		15.326.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.763.000,00	13.353.000,00	13.353.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		18.763.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	165.000.000,00	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	40.000.000,00	69.375.000,00	69.375.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	58.875.000,00	58.875.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	151.940.000,00	169.472.700,00	275.722.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	151.940.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.440.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		16.440.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	115.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.500.000,00	20.552.700,00	126.802.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		20.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	-		100 %	100 %	250.358.000,00	192.283.000,00	210.283.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	250.358.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.358.000,00	37.658.000,00	37.658.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		39.358.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	156.000.000,00	126.625.000,00	126.625.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		156.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
55	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah			100 %	100 %	1.168.111.750,00	813.934.800,00	1.143.434.800,00							1.168.141.750,00							
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	-		100 %	100 %	79.522.000,00	70.713.600,00	70.713.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		79.552.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																						
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				90 Orang	90 Orang	79.522.000,00	70.713.600,00	70.713.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			79.552.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-		100 %	100 %	677.170.750,00	283.355.650,00	283.355.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		677.170.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																						
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				10,00 Kawasan	10,00 Kawasan	215.559.000,00	283.355.650,00	283.355.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			215.559.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				25 Orang	25 Orang	49.111.750,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			49.111.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi																							
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	258.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			258.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				90 Kawasan	90 Kawasan	54.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			54.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		100 %	100 %	230.771.000,00	221.619.100,00	521.619.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		230.771.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	108.271.000,00	146.619.100,00	146.619.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			108.271.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				16 Orang	16 Orang	122.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			122.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-		100 %	100 %	180.648.000,00	238.246.450,00	267.746.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		180.648.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	180.648.000,00	238.246.450,00	267.746.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		180.648.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Dinas Sosial							6.697.722.503,00	4.484.769.200,00	4.534.769.200,00							7.367.494.754,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.697.722.503,00	4.484.769.200,00	4.534.769.200,00							7.367.494.754,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6.697.722.503,00	4.484.769.200,00	4.534.769.200,00							7.367.494.754,00	
56	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				92,50 %	92,50 %	2.237.394.511,00	2.609.497.900,00	2.659.497.900,00							2.461.133.962,00	
	1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	6.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	7.040.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.540.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	1.700.369.004,00	2.105.269.300,00	2.105.269.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur	1.870.405.904,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18.00 Orang/bulan	18.00 Orang/bulan	1.694.869.004,00	2.099.769.300,00	2.149.769.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.864.355.904,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.750.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.200.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.100.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	191.755.507,00	258.798.600,00	258.798.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	210.931.058,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	43.755.507,00	65.798.600,00	65.798.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		48.131.058,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	12.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		13.200.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		12.100.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	112.720.000,00	95.360.000,00	95.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	123.992.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	15.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		16.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	97.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		106.700.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	720.000,00	720.000,00	720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		792.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	126.150.000,00	117.670.000,00	117.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	138.765.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	58.400.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		64.240.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4.00 Unit	4.00 Unit	58.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		63.800.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	9.750.000,00	9.370.000,00	9.370.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		10.725.000,00	DINAS SOSIAL	
57	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)				100 %	100 %	312.848.941,00	69.960.250,00	69.960.250,00							344.133.835,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	-			100 %	100 %	312.848.941,00	69.960.250,00	69.960.250,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	petugas sosial	344.133.835,00	DINAS SOSIAL	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	312.848.941,00	69.960.250,00	69.960.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		344.133.835,00	DINAS SOSIAL	
58	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial				100 %	100 %	3.401.463.270,00	1.543.353.900,00	1.543.353.900,00							3.741.609.597,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	-			100 %	100 %	412.463.270,00	176.862.000,00	176.862.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	453.709.597,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	215.000.000,00	97.675.050,00	97.675.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		236.500.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.00 Orang	60.00 Orang	146.463.270,00	49.316.850,00	49.316.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		161.109.597,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	51.000.000,00	29.870.100,00	29.870.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			56.100.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	-		100 %	100 %	2.989.000.000,00	1.366.491.900,00	1.366.491.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		3.287.900.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000.00 Orang	1000.00 Orang	79.000.000,00	85.039.850,00	85.039.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			86.900.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	21.452.050,00	21.452.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			11.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.900.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			3.190.000.000,00	DINAS SOSIAL		
59	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah			100 %	100 %	454.645.096,00	199.065.850,00	199.065.850,00							500.109.606,00			
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penanggulangan kemiskinan	-		100 %	100 %	454.645.096,00	199.065.850,00	199.065.850,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Fakir Miskin		500.109.606,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				117000 Orang	117000 Orang	170.000.000,00	153.409.000,00	153.409.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			187.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				60.00 Keluarga	60.00 Keluarga	134.645.096,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			148.109.606,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				11687 Keluarga	11687 Keluarga	150.000.000,00	45.656.850,00	45.656.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			165.000.000,00	DINAS SOSIAL		
60	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan pemenuhan pasca Bencana			100 %	100 %	291.370.685,00	62.891.300,00	62.891.300,00							320.507.754,00			
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-		100 %	100 %	151.370.685,00	0,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		166.507.754,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				117000 Orang	117000 Orang	151.370.685,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			166.507.754,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	-		100 %	100 %	140.000.000,00	62.891.300,00	62.891.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Tagana		154.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	140.000.000,00	62.891.300,00	62.891.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			154.000.000,00	DINAS SOSIAL		
												3.716.679.599,00	2.703.786.200,00	2.753.786.200,00								3.967.424.948,00		
2												2.677.044.091,00	2.374.625.200,00	2.424.625.200,00								3.096.656.026,00		
2												2.677.044.091,00	2.374.625.200,00	2.424.625.200,00								3.096.656.026,00		
61	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah			92,5 %	92,5 %	1.990.955.081,00	2.254.625.200,00	2.304.625.200,00							2.500.087.720,00			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-		100 %	100 %	8.500.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	6 Dokumen	3.500.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	1.508.950.900,00	1.684.286.200,00	1.684.286.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.852.714.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	1.498.450.900,00	1.678.786.200,00	1.728.786.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.846.664.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.750.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	-			3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			100 %	100 %	240.504.181,00	301.729.000,00	301.729.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	331.901.900,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Paket	0 Paket	6.504.181,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.00 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		27.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	39.729.000,00	39.729.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		43.701.900,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.00 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		13.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	15.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		12.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		235.400.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			100 %	100 %	20.000.000,00	101.960.000,00	101.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	112.156.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				3.00 Unit	8 Unit	20.000.000,00	101.960.000,00	101.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		112.156.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-			100 %	100 %	125.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		84.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12.00 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12.00 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		100 %	100 %	68.000.000,00	77.250.000,00	77.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		84.975.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2.00 Unit	2 Unit	57.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	11 Unit	6.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.375.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
62	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka			2,60 %	2,60 %	259.190.649,00	0,00	0,00							259.190.649,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	-		30 Orang	30 Orang	212.190.649,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		212.190.649,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			30.00 Orang	0 Orang	212.190.649,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			212.190.649,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja yang Meningkatkan Produktivitasnya	-		5 Orang	0 Orang	47.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		47.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			1.00 Dokumen	1 Dokumen	47.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
63	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			73,88 %	73,88 %	221.520.704,00	120.000.000,00	120.000.000,00							132.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemerataan Tenaga Kerja	-		30 %	30 %	146.520.704,00	54.040.000,00	54.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		59.444.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			200.00 Orang	100 Orang	146.520.704,00	54.040.000,00	54.040.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			59.444.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	-		20 %	20 %	75.000.000,00	65.960.000,00	65.960.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		72.556.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1000.00 Orang	2000 Orang	75.000.000,00	65.960.000,00	65.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.556.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
64	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Persen)				70 %	0%	205.377.657,00	0,00	0,00							205.377.657,00	
	2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur, skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-			20 %	0%	85.172.485,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Perusahaan		85.172.485,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1.00 Laporan	0 Laporan	85.172.485,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.172.485,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	-			2 Sengketa	0 Sengketa	120.205.172,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Perusahaan		120.205.172,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	0 Perkara	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1.00 Lembaga	0 Lembaga	60.205.172,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.205.172,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.039.635.508,00	329.161.000,00	329.161.000,00							870.768.922,00	
	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							647.613.352,00	209.161.000,00	209.161.000,00							446.397.968,00	
65	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin				40 %	40 %	446.332.868,00	152.745.000,00	152.745.000,00							384.340.368,00	
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Bina Kelompok Pengrajin	-			100 IKM	100 IKM	446.332.868,00	152.745.000,00	152.745.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		384.340.368,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.00 Dokumen	1 Dokumen	150.012.000,00	92.745.000,00	92.745.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			102.019.500,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.00 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			66.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.00 Dokumen	1 Dokumen	97.320.868,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			97.320.868,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1.00 Dokumen	1 Dokumen	119.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			119.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
66	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pengelolaan kontibusi industri sektor industri pengolahan terhadap PDRB				3,99 %	3,99 %	201.280.484,00	56.416.000,00	56.416.000,00							62.057.600,00	
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Website yang Dikelola Dengan Baik	-			1 Website	1 Website	201.280.484,00	56.416.000,00	56.416.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		62.057.600,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SiInas																
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SiInas				1.00 Dokumen	1 Dokumen	201.280.484,00	56.416.000,00	56.416.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			62.057.600,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							392.022.156,00	120.000.000,00	120.000.000,00							424.370.954,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi				44 %	44 %	99.651.202,00	120.000.000,00	120.000.000,00							132.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Transmigran	-			4 Kelompok	4 Kelompok	99.651.202,00	120.000.000,00	120.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		132.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				40.00 Orang	20 Orang	99.651.202,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			132.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
68	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina				1 Lokasi	0 Lokasi	292.370.954,00	0,00	0,00							292.370.954,00	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran	-			80 %	0%	292.370.954,00	0,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		292.370.954,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				30.00 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	92.379.954,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			92.379.954,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1.00 Satuan Permukiman	1Satuan Permukiman	199.991.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			199.991.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana							10.442.964.721,00	9.226.747.400,00	9.226.747.400,00							10.454.471.166,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.442.964.721,00	9.226.747.400,00	9.226.747.400,00							10.454.471.166,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.136.012.101,00	1.171.000.000,00	1.171.000.000,00							1.510.012.101,00	
69	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender				100 %	100 %	207.568.766,00	428.875.000,00	428.875.000,00							581.568.766,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Peserta dalam Penyusunan GAP/GBS di Kabupaten Pesisir Barat	-			1 kali	1 kali	130.000.000,00	88.875.000,00	88.875.000,00			Meingkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	130.000.000,00	88.875.000,00	88.875.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meingkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat	-			1 Kali	1 Kali	77.568.766,00	340.000.000,00	340.000.000,00			Meingkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		451.568.766,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	77.568.766,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meingkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.568.766,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Organisasi	8 Organisasi	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meingkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			374.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
70	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan				100 %	100 %	124.175.456,00	125.561.000,00	125.561.000,00							124.175.456,00	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terdampingnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	-			100 %	100 %	27.351.000,00	27.161.000,00	27.161.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		27.351.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.00 Layanan	5 Layanan	27.351.000,00	27.161.000,00	27.161.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.351.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja UPTD PPA	-			100 %	100 %	96.824.456,00	98.400.000,00	98.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		96.824.456,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50.00 Orang	50.00 Orang	46.283.856,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			46.283.856,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	30.540.600,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.540.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
71	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan perempuan Sebagai Tenaga Profesional	-			35 %	35 %	223.797.979,00	52.880.000,00	52.880.000,00							223.797.979,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan Kepala Keluarga dalam Peningkatan Ekonomi Bagi Keluarga	-			100 %	100 %	125.527.000,00	52.880.000,00	52.880.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		125.527.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	5 Dokumen	125.527.000,00	52.880.000,00	52.880.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			125.527.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pilah Dari Kecamatan	-			11 Kecamatan	0 Kecamatan	98.270.979,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		98.270.979,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				11 Lembaga	11 Lembaga	98.270.979,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			98.270.979,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
72	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan terhadap Anak	-			33,33 %	33,33 %	387.030.849,00	129.245.000,00	129.245.000,00							387.030.849,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Pemerhati Anak tentang Hak-hak Anak	-			100 %	0%	57.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		57.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	57.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	08	06	2.02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Barat	-			800 Point	800 Point	329.330.849,00	129.245.000,00	129.245.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		329.330.849,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				150.00 Orang	150.00 Orang	329.330.849,00	129.245.000,00	129.245.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			329.330.849,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
73	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus				100 %	100 %	193.439.051,00	434.439.000,00	434.439.000,00							193.439.051,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	-			100 %	100 %	59.700.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		59.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1.00 Orang	1.00 Orang	59.700.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			59.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terdampingnya Kasus-kasus Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-			100 %	100 %	103.739.051,00	304.439.000,00	304.439.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		103.739.051,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				1 Orang	40 Orang	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				40.00 Orang	40 Orang	63.739.051,00	274.439.000,00	274.439.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			63.739.051,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja UPTD PPA	-			100 %	0%	30.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1.00 Orang	1.00 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
74	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				92,50 %	92,50 %	4.556.653.452,00	4.192.096.400,00	4.192.096.400,00							8.944.459.065,00	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	22.824.000,00	26.124.000,00	26.124.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		22.824.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.106.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.106.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.106.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.106.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	3.941.250.252,00	3.573.996.400,00	3.573.996.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		3.941.250.252,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	3.935.750.252,00	3.568.496.400,00	3.568.496.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.935.750.252,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	277.591.200,00	277.295.000,00	277.295.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		277.591.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	4.225.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.225.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2		14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	25.366.200,00	25.070.000,00	25.070.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.366.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Daerah	-			100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-			100 %	100 %	94.888.000,00	94.581.000,00	94.581.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		97.879.283,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	3.688.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.679.283,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	205.100.000,00	205.100.000,00	205.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		205.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUIAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28.00 Unit	28.00 Unit	198.100.000,00	198.100.000,00	198.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30.00 Unit	30.00 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
75	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk				0,95 %	0,95 %	113.638.330,00	247.600.000,00	247.600.000,00							113.638.330,00	
	2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Terbentuknya SSK Pada SMP dan SLTA di Kabupaten Pesisir Barat	-			100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																
						Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang Mendapatkan Data dan Informasi Keluarga	-			100 %	100 %	88.638.330,00	222.600.000,00	222.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		88.638.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				11 Dokumen	0 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				11.00 Laporan	0 Laporan	15.638.330,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.638.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				11.00 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				11.00 Laporan	11.00 Laporan	14.000.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	15.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
76	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate				2,17 Angka	2,17 Angka	4.338.479.550,00	2.336.451.000,00	2.336.451.000,00							3.050.076.000,00							
	2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang BANGGA KENCANA	-			100 %	100 %	1.627.500.000,00	870.000.000,00	870.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		834.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				11.00 Laporan	11.00 Laporan	240.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10.00 Laporan	10.00 Laporan	481.500.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																						
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				11.00 Laporan	11.00 Laporan	286.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			143.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																						
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																						
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			-	0 0	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																						
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				11.00 Organisasi	11.00 Organisasi	320.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-			100 %	100 %	540.000.000,00	379.000.000,00	379.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		568.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																						
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				118.00 Orang	118.00 Orang	236.000.000,00	379.000.000,00	379.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			416.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																						
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				76.00 Organisasi	76.00 Organisasi	304.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			152.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	14	03	2.03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasyankes	-			100 %	100 %	1.382.979.550,00	642.701.000,00	642.701.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		929.176.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12.00 Laporan	12.00 Laporan	206.890.550,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)				1000.00 Orang	1000.00 Orang	529.948.000,00	534.401.000,00	534.401.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			529.948.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				9.00 Unit	9.00 Unit	246.913.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				11.00 Laporan	11.00 Laporan	270.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				4.00 Laporan	4.00 Laporan	129.228.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			129.228.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Pengetahuan Kader POKTAN dan POKJA di Kampung Keluarga Berkualitas dalam Rangka Mendukung Program BANGGA KENCANA dan Percepatan Penurunan Stunting	-		100 %	100 %	788.000.000,00	444.750.000,00	444.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		718.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				28.00 Organisasi	0 Organisasi	434.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			364.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	18.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				28.00 Kampung	28.00 Kampung	336.000.000,00	441.000.000,00	441.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			336.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
77	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga				61,00 Angka	61,00 Angka	298.181.288,00	1.279.600.000,00	1.279.600.000,00							1.221.100.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Kader GenRe dan BKB-HI dalam Melakukan KIE dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	-		100 %	100 %	214.781.288,00	360.400.000,00	360.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				11.00 Unit	11.00 Unit	40.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				88 Orang	0 Orang	50.181.288,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.180.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				402.00 Orang	0 Orang	44.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				11.00 Kelompok	0 Kelompok	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				22 Kelompok	22 Kelompok	40.400.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pekon, Kecamatan yang Mengikuti Lomba Kesrak, serta Kader Perempuan yang Mendapat Pembinaan P3KSS dan GSI	-			100 %	100 %	83.400.000,00	919.200.000,00	919.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.050.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				11 Organisasi	11 Organisasi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				11.00 Laporan	0 Laporan	43.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				100%	100%	0,00	402.000.000,00	402.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			442.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							14.183.535.339,00	7.624.498.250,00	7.624.498.250,00							12.277.436.258,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.956.573.313,00	6.061.430.800,00	6.061.430.800,00							7.318.670.760,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							7.956.573.313,00	6.061.430.800,00	6.061.430.800,00							7.318.670.760,00	
78	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,50 %	92,50 %	6.650.524.300,00	5.702.941.400,00	5.702.941.400,00							6.601.895.540,00	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	10.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu	-		100 %	100 %	5.624.724.300,00	4.911.443.000,00	4.911.443.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.562.747.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.618.724.300,00	4.905.943.000,00	4.905.943.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.556.697.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur Yang Berkinerja Baik	-		100%	0%	145.500.000,00	0,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		145.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65.00 Paket	0 Paket	45.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.00 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-		100 %	100 %	419.800.000,00	371.168.400,00	371.168.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		408.285.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.980.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	1 Paket	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	55.000.000,00	30.368.400,00	30.368.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.405.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		24.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	300.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		308.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor	-		100 %	100 %	90.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17.00 Unit	1 Unit	90.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-		100 %	100 %	171.000.000,00	212.180.000,00	212.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	233.398.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	60.000.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		48.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	107.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		183.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.000.000,00	780.000,00	780.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		858.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		100 %	100 %	189.500.000,00	180.750.000,00	180.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	219.825.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		55.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29.00 Unit	28 Unit	128.500.000,00	130.250.000,00	130.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		143.275.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30.00 Unit	0 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
79	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama			28000 Ton	28000 Ton	929.136.880,00	192.711.400,00	192.711.400,00							504.419.420,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	-		85,10 %	85,10 %	408.636.880,00	158.724.400,00	158.724.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	207.033.720,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	301.200.000,00	19.122.400,00	19.122.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		21.034.640,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				2 Unit	2 Unit	32.436.880,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		32.436.880,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	139.602.000,00	139.602.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			153.562.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	-			20 %	0%	260.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		260.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5.5 Ton	0 Ton	240.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				6.4 Ton	0 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	-			87,80 %	87,80 %	260.500.000,00	33.987.000,00	33.987.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		37.385.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	1 Laporan	205.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			17.270.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	18.287.000,00	18.287.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.115.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
80	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				5 %	5 %	270.039.584,00	97.204.000,00	97.204.000,00							106.924.400,00	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Daerah Rawan Pangan	-			100 %	100 %	75.000.000,00	47.204.000,00	47.204.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		51.924.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	47.204.000,00	47.204.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			51.924.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	-			1 Lokasi	1 Lokasi	195.039.584,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2.00 Laporan	1 Laporan	195.039.584,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
81	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				60 %	60 %	106.872.549,00	68.574.000,00	68.574.000,00							105.431.400,00	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-			100 %	100 %	106.872.549,00	68.574.000,00	68.574.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		105.431.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.754.000,00	10.754.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			11.829.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																	
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	31.872.549,00	27.820.000,00	27.820.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.602.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		4.958.765.498,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		4.958.765.498,00	
82	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)				99,77 Angka	99,77 Angka	2.336.903.374,00	249.018.000,00	249.018.000,00						1.113.755.174,00				
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	-			0,3 %	0,3 %	1.215.555.374,00	151.222.500,00	151.222.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Kios Pupuk dan Aparatur		371.900.124,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	1.010.000.000,00	151.222.500,00	151.222.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			166.344.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	0 Laporan	205.555.374,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			205.555.374,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	-			0,5 %	0,5 %	487.068.000,00	97.795.500,00	97.795.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		107.575.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	1 Dokumen	487.068.000,00	97.795.500,00	97.795.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			107.575.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Populasi Ternak yang bersumber dari dalam daerah	-			3 %	0%	259.780.000,00	0,00	0,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani			259.780.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																			
						Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				2.6 Laporan	0 Laporan	259.780.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			259.780.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	-			3 %	0%	374.500.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		374.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				99 Ekor	0 Ekor	374.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			374.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
83	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian				148340 Ton	148340 Ton	2.368.805.929,00	550.000.000,00	550.000.000,00							2.913.805.929,00			
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	-			100 %	100 %	150.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Aparatur		695.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			605.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berondisi baik	-			83 %	0%	2.218.805.929,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		2.218.805.929,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	440.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	440.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0Unit	318.805.929,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			318.805.929,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	690.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			690.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
84	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis				86 %	86 %	239.616.243,00	98.167.450,00	98.167.450,00							107.984.195,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	-			86 %	86 %	164.466.243,00	56.533.450,00	56.533.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Peternak dan Kesmavet		62.186.795,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	164.466.243,00	56.533.450,00	56.533.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			62.186.795,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terjaminnya Keamanan Daging yang beredar di Masyarakat	-			100 %	100 %	75.150.000,00	41.634.000,00	41.634.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Pedagang dan Kesmavet		45.797.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	75.150.000,00	41.634.000,00	41.634.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			45.797.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
85	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan				86 %	86 %	400.273.913,00	118.960.000,00	118.960.000,00							130.856.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-			10 %	10 %	400.273.913,00	118.960.000,00	118.960.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		130.856.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Ha	50 Ha	400.273.913,00	118.960.000,00	118.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			130.856.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
86	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani				975 Kelompok Tani	975 Kelompok Tani	881.362.567,00	546.922.000,00	546.922.000,00							692.364.200,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	-			80 %	80 %	881.362.567,00	546.922.000,00	546.922.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		692.364.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	11 Unit	410.000.000,00	295.960.000,00	295.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			325.556.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	11 Unit	270.612.567,00	146.905.000,00	146.905.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			161.595.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				11 Unit	0 Unit	90.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			90.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				11.00 Unit	11.00 Unit	110.000.000,00	104.057.000,00	104.057.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			114.462.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
					Dinas Lingkungan Hidup							6.612.324.336,00	5.977.313.850,00	5.977.313.850,00							6.853.082.576,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	6.853.082.576,00	
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	6.853.082.576,00	
87	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.267.704.529,00	3.202.977.850,00	3.202.977.850,00							3.508.462.854,00		
	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	12.533.600,00	12.418.700,00	12.418.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		12.533.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.360.000,00	4.057.500,00	4.057.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.360.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.100.000,00	2.072.850,00	2.072.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	639.600,00	662.400,00	662.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			639.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	614.000,00	626.000,00	626.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			614.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.320.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			92.50 %	92.50 %	1.845.640.000,00	2.025.548.600,00	2.025.548.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		2.165.856.169,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	1.839.100.000,00	2.019.078.100,00	2.019.078.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.159.316.169,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.540.000,00	2.470.850,00	2.470.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.999.850,00	2.999.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	999.800,00	999.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	0%	200.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi				Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2.00 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi umum perangkat daerah	-		100 %	100 %	360.707.929,00	268.574.550,00	268.574.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		371.642.085,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.537.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	61.747.800,00	60.574.550,00	60.574.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.747.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	249.423.129,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			261.894.285,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	-		100 %	100 %	100.392.000,00	111.300.000,00	111.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				33.00 Unit	0 Unit	50.392.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	50.000.000,00	111.300.000,00	111.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 %	100 %	136.301.000,00	75.556.000,00	75.556.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		96.301.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	114.500.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			74.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	9.801.000,00	8.556.000,00	8.556.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.801.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya operasional pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	612.130.000,00	709.580.000,00	709.580.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		612.130.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 Unit	2 Unit	50.400.000,00	53.150.000,00	53.150.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.00 Unit	10.00 Unit	419.480.000,00	487.810.000,00	487.810.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			419.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				1.00 Unit	1.00 Unit	114.004.000,00	162.700.000,00	162.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			114.004.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	12.00 Unit	18.246.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.246.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
88	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				92.50 %	92.50 %	493.738.650,00	370.705.000,00	370.705.000,00							493.738.650,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-			92.50 %	0%	93.738.650,00	0,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		93.738.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1.00 Dokumen	0 Dokumen	93.738.650,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			93.738.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan dokumen KLHS dalam K/R/P Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	400.000.000,00	370.705.000,00	370.705.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	370.705.000,00	370.705.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1.00 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
89	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup				100 %	100 %	311.715.209,00	50.000.000,00	50.000.000,00							311.715.209,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			100 %	100 %	311.715.209,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		311.715.209,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	253.416.209,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			253.416.209,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	58.299.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			58.299.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau	-			10 %	10 %	202.476.679,00	250.000.000,00	250.000.000,00						202.476.679,00		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terciptanya keanekaragaman hayati	-			100 %	100 %	202.476.679,00	250.000.000,00	250.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		202.476.679,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	202.476.679,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			202.476.679,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
91	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengendalian terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hgidup (PUU LH)	-			100 %	100 %	125.139.419,00	70.000.000,00	70.000.000,00						125.139.419,00		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	-			100 %	100 %	125.139.419,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		125.139.419,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	125.139.419,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			125.139.419,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
92	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat	-			80 %	0%	106.816.815,00	0,00	0,00						106.816.815,00		
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan	-			80 %	0%	106.816.815,00	0,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		106.816.815,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1.00 Dokumen	0 Dokumen	106.816.815,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			106.816.815,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
93	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persenatase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	-			100 %	100 %	2.104.733.035,00	2.033.631.000,00	2.033.631.000,00						2.104.732.950,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	-			100 %	100 %	2.104.733.035,00	2.033.631.000,00	2.033.631.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		2.104.732.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1.00 Kelompok	0 Kelompok	121.178.335,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			121.178.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																	
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				3297.00 Ton	3297.00 Ton	1.983.554.700,00	2.033.631.000,00	2.033.631.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.983.554.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							5.142.916.875,00	3.231.449.700,00	3.231.449.700,00								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.142.916.875,00	3.231.449.700,00	3.231.449.700,00								
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.142.916.875,00	3.231.449.700,00	3.231.449.700,00								
94	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			92,50 Persen	92,50 Persen	4.507.625.600,00	2.783.904.750,00	2.783.904.750,00						4.819.088.340,00		
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	705.995.000,00	12.399.850,00	12.399.850,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		782.754.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	7.400.100,00	7.400.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	0 Laporan	699.195.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			769.114.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	2.034.306.400,00	2.131.949.750,00	2.131.949.750,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		2.292.235.220,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.028.806.400,00	2.126.449.800,00	2.126.449.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.286.185.220,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.100,00	2.500.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
	2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	999.950,00	999.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	-			100 %	0%	391.933.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	aparatur		431.126.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	0 Paket	96.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			105.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				134 Orang	0 Orang	235.933.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			259.526.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	339.045.000,00	201.745.150,00	201.745.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		235.449.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	3.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.119.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	47.300.000,00	35.000.150,00	35.000.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.030.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		12.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	240.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		126.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-			100 %	0%	600.200.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur	660.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	600.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		660.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-			100 %	100 %	229.966.200,00	228.910.000,00	228.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur	252.962.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.966.200,00	94.966.200,00	94.966.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		104.462.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		141.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	4.943.800,00	4.943.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		6.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	206.180.000,00	208.900.000,00	208.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur	164.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	79.800.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		87.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	62.900.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		49.830.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	63.480.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		26.730.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
95	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan	-			90 Persen	90 Persen	335.363.433,00	311.616.950,00	311.616.950,00							382.814.300,00	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	presentase pelayanan pendaftaran penduduk	-			90 persen	90 persen	59.877.433,00	50.930.300,00	50.930.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	masyarakat	46.123.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	
						Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				169945.00 Dokumen	50000 Dokumen	59.877.433,00	50.930.300,00	50.930.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		46.123.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase penataan pendaftaran penduduk	-			90 persen	90 persen	166.990.000,00	188.740.000,00	188.740.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	masyarakat	226.864.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																	
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	5.304 Dokumen	166.990.000,00	188.740.000,00	188.740.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		226.864.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	terselenggaranya pendaftaran penduduk	-			90 persen	90 persen	108.496.000,00	71.946.650,00	71.946.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	masyarakat		109.827.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				169945 Dokumen	50.000 Dokumen	55.600.000,00	71.946.650,00	71.946.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			51.641.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0 Laporan	52.896.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			58.185.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
96	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil				90 Persen	90 Persen	108.507.804,00	47.705.100,00	47.705.100,00							123.417.800,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pelayanan pencatatan sipil	-			90 persen	90 persen	53.014.804,00	47.705.100,00	47.705.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	masyarakat		62.375.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				169945.00 Dokumen	50000 Dokumen	53.014.804,00	47.705.100,00	47.705.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.375.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	terselenggaranya pencatatan sipil	-			90 persen	0 persen	55.493.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		61.042.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	0 Laporan	55.493.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.042.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
97	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan				100 Persen	100 Persen	92.897.209,00	45.940.850,00	45.940.850,00							104.663.460,00	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			90 persen	90 persen	92.897.209,00	45.940.850,00	45.940.850,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	MASYARAKAT		104.663.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	49.189.209,00	45.940.850,00	45.940.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.584.660,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.708.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			48.078.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
98	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun				100 Persen	100 Persen	98.522.829,00	42.282.050,00	42.282.050,00							110.184.062,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	-			90 persen	90 persen	98.522.829,00	42.282.050,00	42.282.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	MASYARAKAT		110.184.062,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				75.00 Dokumen	0 Dokumen	54.385.329,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			59.823.862,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																	
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				50 Dokumen	50 Dokumen	44.137.500,00	42.282.050,00	42.282.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.360.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon							8.139.472.190,00	6.806.068.924,00	6.806.068.924,00							9.516.271.433,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.139.472.190,00	6.806.068.924,00	6.806.068.924,00							9.516.271.433,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.139.472.190,00	6.806.068.924,00	6.806.068.924,00							9.516.271.433,00	
99	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.263.797.064,00	2.562.654.240,00	2.562.654.240,00							2.988.596.307,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Jumlah laporan capaian kinerja	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.744.000,00	12.400.050,00	12.400.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.694.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.694.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.694.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.050.000,00	5.000.050,00	5.000.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Neraca dan LRA) Jumlah Dokumen Pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Laporan Realisasi Triwulan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.667.380.000,00	2.056.911.200,00	2.056.911.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.308.100.047,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	1.661.000.000,00	2.051.411.100,00	2.051.411.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.301.445.047,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.420.000,00	2.000.100,00	2.000.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.210.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	-			4 orang	4 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4.00 Orang	4.00 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Koordinasi di luar kantor Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Stand Pameran Jumlah Penyediaan Surat Kabar Majalah Jumlah Penyediaan ATK dan barang cetakan	-			12 bulan	12 bulan	299.779.760,00	294.386.990,00	294.386.990,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		343.889.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	3.939.760,00	3.939.000,00	3.939.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.939.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	30.390.000,00	32.447.990,00	32.447.990,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			39.390.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	13.200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.310.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	212.250.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			242.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin	-			3 Unit	0 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	0 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas Jumlah Penyediaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Wifi Jumlah Penyediaan Persedian Perlengkapan Kantor	-			3 Unit	0 Unit	154.534.804,00	100.386.000,00	100.386.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		153.554.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	39.204.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			39.204.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	105.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.330.804,00	9.186.000,00	9.186.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan	-			3 Unit	3 Unit	78.358.500,00	78.570.000,00	78.570.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		89.358.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	67.329.500,00	67.550.000,00	67.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			71.329.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12.00 Unit	12.00 Unit	11.029.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.029.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
100	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang			68 Desa	68 Desa	1.302.601.300,00	355.053.900,00	355.053.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.302.601.300,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Pekon Maju	-		1 Pekon	1 Pekon	1.302.601.300,00	355.053.900,00	355.053.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.302.601.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	1.302.601.300,00	355.053.900,00	355.053.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.302.601.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
101	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi			100 %	100 %	1.750.000.000,00	1.803.512.784,00	1.803.512.784,00							2.402.000.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang Jumlah Fasilitasi yang Diberikan jumlah Fasilitasi yang diberikan difasilitasi Pengelolaan aset Jumlah Fasilitasi yang Diberikan Penyusunan Produk Hukum Jumlah Pekon yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Pekon yang difasilitasi Penyusunan Perencanaan Desa	-		100 % 116 Pekon 12 Bulan 1 Fasilitas 1 Fasilitasi 27 Bumdes 42 orang	100 % 116 Pekon 12 Bulan 1 Fasilitas 1 Fasilitasi 27 Bumdes 42 orang	1.750.000.000,00	1.803.512.784,00	1.803.512.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.402.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	0,00	1.394.011.034,00	1.394.011.034,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.182.693.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					116.00 Dokumen	0 Dokumen	330.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				116.00 Dokumen	116.00 Dokumen	300.500.000,00	115.999.950,00	115.999.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				116.00 Dokumen	116.00 Dokumen	356.000.000,00	193.501.800,00	193.501.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			196.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				27.00 Dokumen	27.00 Dokumen	306.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				116.00 Laporan	0 Laporan	185.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			156.306.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				116 Dokumen	0 Dokumen	272.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			272.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
102	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				100 %	100 %	2.823.073.826,00	2.084.848.000,00	2.084.848.000,00							2.823.073.826,00		
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Penggerakan TP PKK Jumlah kader Posyandu yang dibina Jumlah Pekon yang Mendapatkan Fasilitasi bulan bakti Jumlah Pekon yang Mendapatkan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna	-		100 % 116 Pekon 12 Bulan 900 orang	100 % 116 Pekon 12 Bulan 900 orang	2.823.073.826,00	2.084.848.000,00	2.084.848.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.823.073.826,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				900.00 Lembaga	900.00 Lembaga	1.230.000.000,00	1.325.347.950,00	1.325.347.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				12.00 Laporan	0 Laporan	253.073.826,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			253.073.826,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				12.00 Laporan	0 Laporan	240.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.100.000.000,00	759.500.050,00	759.500.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
						Dinas Perhubungan							6.201.111.894,00	5.070.371.795,00	5.330.371.795,00								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.201.111.894,00	5.070.371.795,00	5.330.371.795,00								
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							6.201.111.894,00	5.070.371.795,00	5.330.371.795,00								
103	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan			90 %	90 %	2.608.051.200,00	2.608.789.497,00	2.868.789.497,00							2.608.051.200,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100%	100%	6.400.000,00	12.399.590,00	12.399.590,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		6.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.400.000,00	7.399.700,00	7.399.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	4.999.890,00	4.999.890,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Daerah	-				100%	100%	2.090.391.200,00	1.963.423.200,00	1.963.423.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		2.090.391.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.084.891.200,00	1.957.923.400,00	2.217.923.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.084.891.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.499.950,00	2.499.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	999.950,00	999.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Pegawai	-				90 %	90 %	55.000.000,00	10.000.157,00	10.000.157,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					6 Orang	6 Orang	55.000.000,00	10.000.157,00	10.000.157,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aktifitas Jumlah ATK Tersedia Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jumlah Koordinasi SKPD Jumlah SKHU	-				10 SKHU 12 Bulan	10 SKHU 12 Bulan	170.960.000,00	351.107.150,00	351.107.150,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		170.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	6.998.250,00	6.998.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	74.875.000,00	74.875.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	25.130.800,00	37.233.900,00	37.233.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.130.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	94.829.200,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			94.829.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangunan dan Kendaraan Dinas Jumlah Tagihan	-				8 Unit	8 Unit	117.300.000,00	130.209.400,00	130.209.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		117.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	19.800.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 Laporan	6 Laporan	92.500.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			92.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	24.209.400,00	24.209.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	15	01	2.09	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-			4 Unit	4 Unit	168.000.000,00	141.650.000,00	141.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		168.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	163.000.000,00	84.650.000,00	84.650.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			163.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
104	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Infrastruktur				70 %	70 %	2.940.519.400,00	1.994.067.298,00	1.994.067.298,00							1.440.519.600,00	
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran PIJU Jumlah Perengkapan Jalan	-			12 Bulan 20 Unit	12 Bulan 20 Unit	993.920.000,00	1.143.538.798,00	1.143.538.798,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		993.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	20 Unit	873.920.000,00	1.143.538.798,00	1.143.538.798,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			873.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Lalu Lintas	-			12 Laporan	12 Laporan	151.599.000,00	432.607.250,00	432.607.250,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		151.599.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				3 Laporan	12 Laporan	151.599.000,00	432.607.250,00	432.607.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			151.599.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan transportasi yang dipelihara Jumlah Tranportasi/Angkutan Orang/Barang	-			12 Laporan 2 Unit	12 Laporan 2 Unit	295.000.400,00	323.830.000,00	323.830.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		295.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				7 Laporan	12 Laporan	295.000.400,00	323.830.000,00	323.830.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			295.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	-			12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	94.091.250,00	94.091.250,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1140 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	94.091.250,00	94.091.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
105	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Angkutan Laut				55 %	55 %	652.541.294,00	467.515.000,00	467.515.000,00							652.541.294,00	
	2	15	03	2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Laut Jumlah Laporan	-			2 Laporan 2 Unit	2 Laporan 2 Unit	652.541.294,00	467.515.000,00	467.515.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		652.541.294,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	12 Laporan Laporan	652.541.294,00	467.515.000,00	467.515.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			652.541.294,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						9.064.248.469,00	7.222.714.300,00	7.503.022.620,00							9.064.248.469,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.064.248.469,00	7.222.714.300,00	7.503.022.620,00							9.064.248.469,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.846.019.769,00	7.049.369.300,00	7.329.677.620,00							8.846.019.769,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	5.002.041.300,00	4.098.074.700,00	4.378.383.020,00							5.002.041.300,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			92,5 Persen	92,5 Persen	6.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			92,5 Persen	92,5 Persen	1.598.901.700,00	1.488.953.100,00	1.488.953.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.598.901.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15.00 Orang/bulan	15.00 Orang/bulan	1.595.705.300,00	1.483.453.100,00	1.483.453.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.595.705.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	1.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	646.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			646.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			92,5 Persen	92,5 Persen	1.796.885.600,00	1.491.765.600,00	1.491.765.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.796.885.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			67.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	259.348.600,00	205.588.600,00	205.588.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			259.348.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.212.960.000,00	951.600.000,00	951.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.212.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00 Laporan	100.00 Laporan	199.577.000,00	209.577.000,00	209.577.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			199.577.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	16	01	2.07	0006	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			92,5 Persen	92,5 Persen	198.298.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		198.298.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24.00 Unit	24.00 Unit	198.298.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.298.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-			92,5 Persen	92,5 Persen	1.305.556.000,00	841.956.000,00	1.122.264.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.305.556.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.300.000.000,00	840.000.000,00	1.120.308.320,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.556.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.556.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Miliki Daerah yang dalam Koindisi Baik	-			92,5 Persen	92,5 Persen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		96.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.00 Unit	2.00 Unit	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.00 Unit	3.00 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	12.00 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
107	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik				80 Persen	80 Persen	2.555.591.900,00	2.254.180.500,00	2.254.180.500,00							2.555.591.900,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	-			80 Persen	80 Persen	2.555.591.900,00	2.254.180.500,00	2.254.180.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		2.555.591.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	122.677.500,00	361.000.000,00	361.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.677.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	370.803.000,00	382.703.000,00	382.703.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			370.803.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	72.800.000,00	87.800.000,00	87.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	730.299.400,00	8.677.500,00	8.677.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			730.299.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				100.00 Layanan	100.00 Layanan	1.259.012.000,00	1.414.000.000,00	1.414.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.259.012.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
108	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				82,5 persen	82,5 persen	1.288.386.569,00	697.114.100,00	697.114.100,00							1.288.386.569,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyediaan informasi digital di lingkup pemerintah daerah	-			82,5 Persen	82,5 Persen	104.192.569,00	34.847.900,00	34.847.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		104.192.569,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				13.00 Domain	0 Domain	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.01	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1.00 Unit	1.00 Unit	96.992.569,00		34.847.900,00	34.847.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.992.569,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara digital	-			82,5 persen	82,5 persen	1.184.194.000,00	662.266.200,00	662.266.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		1.184.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				6.00 Unit	6.00 Unit	258.753.500,00	233.336.500,00	233.336.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			258.753.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				39.00 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	396.162.200,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			396.162.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2.00 Unit	2.00 Unit	204.000.000,00	78.343.000,00	78.343.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			204.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2.00 Dokumen	0 Dokumen	59.387.300,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.387.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	03	2.02	0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				2 Dokumen	2 Dokumen	235.891.000,00	350.586.700,00	350.586.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			235.891.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
109	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data dan informasi statistik Daerah Yang Tersusun Dengan Baik				2 Dokumen	2 Dokumen	112.207.375,00	41.045.000,00	41.045.000,00							112.207.375,00		
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	-			2 Dokumen	2 Dokumen	112.207.375,00	41.045.000,00	41.045.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		112.207.375,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	20	02	2.01	0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	52.311.719,00	41.045.000,00	41.045.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.311.719,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	20	02	2.01	0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				50 Orang	0 Orang	59.895.656,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.895.656,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
110	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik				100 Persen	100 Persen	106.021.325,00	132.300.000,00	132.300.000,00							106.021.325,00		
	2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.01	0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				39.00 Perangkat Daerah	39.00 Perangkat Daerah	50.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-			12 bulan	12 bulan	56.021.325,00	84.800.000,00	84.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat	56.021.325,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				39.00 Perangkat Daerah	39.00 Perangkat Daerah	56.021.325,00	84.800.000,00	84.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		56.021.325,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan						4.428.325.263,00	3.861.707.800,00	3.861.707.800,00						5.077.775.700,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.731.353.336,00	2.845.255.800,00	2.845.255.800,00							3.792.144.200,00		
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						3.731.353.336,00	2.845.255.800,00	2.845.255.800,00							3.792.144.200,00		
111	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				92,5 Persen	92,5 Persen	2.702.155.039,00	2.398.315.600,00	2.398.315.600,00						2.762.946.150,00		
	2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	12.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		7.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 Persen	100 Persen	1.756.316.600,00	1.822.207.800,00	1.822.207.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	1.823.707.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12.00 Orang/bulan	12.00 Orang/bulan	1.749.316.600,00	1.816.707.800,00	1.816.707.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.816.707.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12.00 Orang	12.00 Orang	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 Persen	100 Persen	423.338.439,00	290.807.800,00	290.807.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	427.338.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	65.338.439,00	48.807.800,00	48.807.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			65.338.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	300.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Tersedia	-		100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6.00 Unit	6.00 Unit	45.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	-		92,5 Persen	92,5 Persen	99.500.000,00	86.500.000,00	86.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		86.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	155.400.000,00	155.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		318.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10.00 Unit	10.00 Unit	168.000.000,00	150.900.000,00	150.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	150.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
112	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif			52,5 Persen	52,5 Persen	93.545.599,00	78.545.500,00	78.545.500,00							93.545.500,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diawasi	-		100 Persen	100 Persen	93.545.599,00	78.545.500,00	78.545.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		93.545.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				30.00 Unit Usaha	30.00 Unit Usaha	93.545.599,00	78.545.500,00	78.545.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			93.545.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
113	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten				50 Persen	50 Persen	532.707.739,00	112.337.700,00	112.337.700,00							532.707.700,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi dan Pelaku UKM yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	-			100 Persen	100 Persen	532.707.739,00	112.337.700,00	112.337.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		532.707.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																	
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100.00 Orang	50.00 Orang	532.707.739,00	112.337.700,00	112.337.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			532.707.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
114	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB				2,08 Persen	2,08 Persen	402.944.959,00	256.057.000,00	256.057.000,00							402.944.850,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan, serta terdata di database	-			100 Persen	100 Persen	402.944.959,00	256.057.000,00	256.057.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		402.944.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1.00 Unit Usaha	1.00 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																	
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				50.00 Orang	50.00 Orang	202.944.959,00	56.057.000,00	56.057.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			202.944.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							696.971.927,00	1.016.452.000,00	1.016.452.000,00							1.285.631.500,00	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							696.971.927,00	1.016.452.000,00	1.016.452.000,00							1.285.631.500,00	
115	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB				11,56 Persen	11,56 Persen	103.918.299,00	686.495.000,00	686.495.000,00							686.495.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	103.918.299,00	686.495.000,00	686.495.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		686.495.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1.00 Unit	3 Unit	50.000.000,00	605.577.000,00	605.577.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			605.577.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	53.918.299,00	80.918.000,00	80.918.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			80.918.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
116	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok				50 Persen	50 Persen	329.179.609,00	60.000.000,00	60.000.000,00							329.179.500,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				48.00 Laporan	48.00 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang	-			100 Persen	100 Persen	254.179.609,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		254.179.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			52.00 Laporan	52.00 Laporan	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			4.00 Laporan	0 Laporan	214.179.609,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			214.179.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pupuk dan Pestisida Terawasi	-		100 Persen	0 Persen	25.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			12.00 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
117	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Barang dan Jasa			43.141 Juta	43.141 Juta	263.874.019,00	269.957.000,00	269.957.000,00							269.957.000,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pameran Dagang Terealisasi	-		100 Persen	100 Persen	263.874.019,00	269.957.000,00	269.957.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		269.957.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			20.00 Pelaku Usaha	20.00 Pelaku Usaha	263.874.019,00	269.957.000,00	269.957.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			269.957.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						5.527.740.677,00	5.277.352.286,00	5.277.352.286,00							6.081.124.192,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.527.740.677,00	5.277.352.286,00	5.277.352.286,00							6.081.124.192,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.527.740.677,00	5.277.352.286,00	5.277.352.286,00							6.081.124.192,00	
118	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,5 persen	92,5 persen	2.803.476.742,00	2.150.967.200,00	2.150.967.200,00							3.084.434.416,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	-		2 Dokumen	2 Dokumen	10.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		10.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	5.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-		14 bulan	14 bulan	1.994.494.900,00	1.721.467.200,00	1.721.467.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		2.195.594.390,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.988.494.900,00	1.715.967.200,00	1.715.967.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.187.344.390,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang berdaya saing	-		5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur Sipil Negara		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5.00 Orang	5 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi SKPD	-		12 bulan	12 bulan	563.481.842,00	253.600.000,00	253.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat		619.830.026,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.481.842,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.030.026,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-		2 Unit	2 Unit	45.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		49.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	45.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			49.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	-		12 bulan	12 bulan	62.500.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		68.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya barang milik daerah dengan kondisi baik	-		12 bulan	12 bulan	77.600.000,00	75.700.000,00	75.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		85.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.860.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
119	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA				750 perusahaan/UKM /IKM	0 perusahaan/UKM/I KM	344.409.399,00	0,00	0,00						378.850.339,00		
	2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-			1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	-			1 peta	0 peta	194.409.399,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	213.850.339,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	194.409.399,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		213.850.339,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
120	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA				6,05 persen	6,05 persen	742.684.517,00	1.499.742.000,00	1.499.742.000,00						816.952.452,00		
	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peminat investasi	-			110 pengunjung	110 pengunjung	742.684.517,00	1.499.742.000,00	1.499.742.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	816.952.452,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	742.684.517,00	1.499.742.000,00	1.499.742.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		816.952.452,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
121	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN				16,99 persen	16,99 persen	635.250.009,00	1.030.258.086,00	1.030.258.086,00						698.775.010,00		
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	-			12 bulan	12 bulan	635.250.009,00	1.030.258.086,00	1.030.258.086,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	698.775.010,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	505.078.500,00	985.258.086,00	985.258.086,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		555.586.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	130.171.509,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		143.188.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
122	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan				80 persen	80 persen	677.916.651,00	471.385.000,00	471.385.000,00						745.708.316,00		
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	-			12 Bulan	12 Bulan	677.916.651,00	471.385.000,00	471.385.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	745.708.316,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12.00 Kegiatan Usaha.	12.00 Kegiatan Usaha.	147.916.651,00	82.089.000,00	82.089.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		162.708.316,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				189 Pelaku Usaha	189 Pelaku Usaha	350.000.000,00	244.436.000,00	244.436.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		385.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	180.000.000,00	144.860.000,00	144.860.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		198.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
123	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan				5 Laporan	5 Laporan	324.003.359,00	125.000.000,00	125.000.000,00						356.403.659,00		
	2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	-			5 Laporan	5 Laporan	324.003.359,00	125.000.000,00	125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat	356.403.659,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	5 Dokumen	324.003.359,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		356.403.659,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Dinas Pemuda dan Olahraga															6.403.726.404,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															6.403.726.404,00		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															6.403.726.404,00		
124	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,50 %	92,50 %	2.343.684.086,00	2.512.348.500,00	2.694.348.500,00						2.343.684.086,00		
	2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	6.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu undefined	-			100 %	100 %	1.838.671.086,00	1.930.270.500,00	1.930.270.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur	1.838.671.086,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.822.038.886,00	1.907.346.500,00	2.089.346.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		1.822.038.886,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	11.132.200,00	17.424.000,00	17.424.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		11.132.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		2.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		1.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur yang berkinerja baik	-			100 %	100 %	13.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur	13.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	13.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			13.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	219.143.000,00	350.830.000,00	350.830.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		219.143.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.004.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.451.000,00	22.131.400,00	22.131.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			14.451.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.688.000,00	201.694.600,00	201.694.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			130.688.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan layanan pendukung	-			100 %	100 %	144.748.000,00	96.748.000,00	96.748.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		144.748.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			42.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	97.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			97.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.748.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-			100 %	100 %	121.222.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		121.222.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	68.672.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			68.672.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	13.950.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			13.950.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RakPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional		Daerah					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	27.600.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			27.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
125	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				95 %	95 %	2.167.564.804,00	444.998.000,00	495.998.000,00								2.167.564.804,00	
	2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			100 %	100 %	650.000.000,00	129.998.000,00	129.998.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																	
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2 Orang	2 Orang	151.000.000,00	39.998.850,00	59.998.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			151.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																	
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	117.000.000,00	39.999.700,00	45.999.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			117.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	20 Orang	382.000.000,00	49.999.450,00	74.999.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			382.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	-			70 %	70 %	1.517.564.804,00	315.000.000,00	315.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		1.517.564.804,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				31 Dokumen	31 Dokumen	1.517.564.804,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.517.564.804,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
126	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolaraagan				50 %	50 %	1.992.477.514,00	1.325.000.000,00	1.274.000.000,00								1.892.477.514,00	
	2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	penyediaan sarana dan prasarana olahraga	-			100 %	100 %	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lomba/kejuaraan olahraga yang di laksanakan	-			100 %	100 %	161.112.011,00	70.000.000,00	70.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		161.112.011,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	161.112.011,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			161.112.011,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan olahraga diluar daerah	-			80 %	80 %	154.285.954,00	270.000.000,00	270.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur		154.285.954,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				10 Orang	10 Orang	154.285.954,00	270.000.000,00	294.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			154.285.954,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bantuan operasional organisasi keolahragaan	-			100 %	100 %	1.526.696.229,00	845.000.000,00	845.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur	1.526.696.229,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				26 Organisasi	26 Organisasi	1.526.696.229,00	845.000.000,00	735.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		1.526.696.229,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan dan pemasara festival dan olahraga rekreasi yang difasilitasi pemda	-			80 %	80 %	50.383.320,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparatur	50.383.320,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				50 Dokumen	50 Dokumen	50.383.320,00	50.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		50.383.320,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Dinas Perikanan						5.058.925.795,00	3.019.819.700,00	3.079.819.700,00						5.067.741.513,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.058.925.795,00	3.019.819.700,00	3.079.819.700,00						5.067.741.513,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.058.925.795,00	3.019.819.700,00	3.079.819.700,00						5.067.741.513,00		
127	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,5 Persen	92,5 Persen	3.205.408.358,00	2.643.044.700,00	2.703.044.700,00						3.197.249.175,00		
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		93 Persen	93 Persen	6.729.042,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	6.729.042,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.555.400,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Pasar Kota Krui	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.555.400,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	1.00 Laporan	5.173.642,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		5.173.642,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	2.272.395.455,00	2.003.097.200,00	2.003.097.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	2.272.395.455,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.262.063.155,00	1.994.819.700,00	2.054.819.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.262.063.155,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.500,00	2.777.500,00	2.777.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.777.500,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	3.666.300,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		3.666.300,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.222.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.222.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.666.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.666.500,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	-		2 Orang	2 Orang	58.139.943,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	58.139.943,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2.00 Orang	2.00 Orang	58.139.943,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		58.139.943,00	DINAS PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	-			93 Persen	93 Persen	353.982.094,00	260.101.900,00	260.101.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		345.822.911,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	4.421.780,00	4.421.780,00	4.421.780,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.421.780,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	27.775.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.775.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	35.166.404,00	15.166.404,00	15.166.404,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			35.166.404,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.239.988,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.239.988,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.219.989,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.219.989,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	263.158.933,00	196.513.716,00	196.513.716,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			254.999.750,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	-			93 Persen	0 Persen	74.783.603,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur		74.783.603,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	41.819.959,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			41.819.959,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	32.963.644,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			32.963.644,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			93 Persen	93 Persen	77.854.985,00	81.755.000,00	81.755.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		77.854.985,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.299.985,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.299.985,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.555.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.555.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			93 Persen	93 Persen	361.523.236,00	275.690.600,00	275.690.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		361.523.236,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	21.419.979,00	21.400.000,00	21.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.419.979,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	280.394.077,00	194.600.000,00	194.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			280.394.077,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.360.600,00	30.360.600,00	30.360.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.360.600,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	29.348.580,00	29.330.000,00	29.330.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.348.580,00	DINAS PERIKANAN	
128	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap			14419 Ton	14419 Ton	618.386.706,00	76.225.000,00	76.225.000,00							618.386.706,00		
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-		14419 Ton	14419 Ton	412.686.706,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan		412.686.706,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				10,00 Dokumen	0 Dokumen	34.241.422,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			34.241.422,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				30,00 Unit	0 Unit	173.353.675,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			173.353.675,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				60,00 Unit	0 Unit	205.091.609,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			205.091.609,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Nelayan	-		270 Kelompok	270 Kelompok	205.700.000,00	76.225.000,00	76.225.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan		205.700.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	37.325.000,00	37.325.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	10 Kelompok	105.700.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			105.700.000,00	DINAS PERIKANAN	
129	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya			192,09 Ton	192,09 Ton	598.020.651,00	148.050.000,00	148.050.000,00							612.773.539,00		
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan	-		60 Orang	60 Orang	154.100.780,00	148.050.000,00	148.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan		168.853.668,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5,00 Kelompok	5,00 Kelompok	53.853.668,00	44.629.850,00	44.629.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			53.853.668,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				30 Kelompok	30 Kelompok	100.247.112,00	103.420.150,00	103.420.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			115.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan	-		12 Kelompok	0 Kelompok	443.919.871,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan		443.919.871,00	DINAS PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	0 Unit	443.919.871,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			443.919.871,00	DINAS PERIKANAN
130	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman				0,032 Angka	0,032 Angka	162.266.807,00	75.000.000,00	75.000.000,00							164.000.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Proporsi Tangkapan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman	-			0,032 Angka	0,032 Angka	162.266.807,00	75.000.000,00	75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Perikanan		164.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	81.133.403,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			82.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0 Dokumen	81.133.404,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			82.000.000,00	DINAS PERIKANAN
131	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan				104 Angka	104 Angka	474.843.273,00	77.500.000,00	77.500.000,00							475.332.093,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terselenggaranya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-			1 Kali	1 Kali	106.493.491,00	77.500.000,00	77.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan		106.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				5.00 Unit Usaha	5.00 Unit Usaha	106.493.491,00	77.500.000,00	77.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			106.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolah Pemasar Hasil Perikanan	-			100 Persen	0 Persen	368.349.782,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan		368.832.093,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6000 Ton	0 Ton	161.832.093,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			161.832.093,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20,00 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	206.517.689,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			207.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Pariwisata							21.999.701.700,00	10.715.431.600,00	10.790.432.770,00							10.693.044.100,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							21.999.701.700,00	10.715.431.600,00	10.790.432.770,00							10.693.044.100,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							21.999.701.700,00	10.715.431.600,00	10.790.432.770,00							10.693.044.100,00	
132	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				92,50 Persen	92,50 Persen	3.649.701.700,00	4.003.079.600,00	4.044.080.770,00							3.888.044.100,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 Persen	100 Persen	18.468.000,00	18.468.000,00	18.468.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		18.468.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	6.068.000,00	6.068.000,00	6.068.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.068.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 Persen	100 Persen	1.908.887.100,00	2.146.339.600,00	2.146.339.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.908.887.100,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.878.044.100,00	2.130.431.600,00	2.205.432.770,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.878.044.100,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	25.343.000,00	10.408.000,00	10.408.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.343.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkualitas dan Berkinerja Baik	-			100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12.00 Orang	10 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			100 Persen	100 Persen	544.143.600,00	505.898.500,00	505.898.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		542.386.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	135.643.600,00	149.898.500,00	149.898.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			136.386.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	19.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	350.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			100 Persen	100 Persen	112.980.000,00	77.797.500,00	77.797.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		112.980.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7.00 Unit	12 Unit	52.980.000,00	48.367.500,00	48.367.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.980.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	2 Unit	60.000.000,00	29.430.000,00	29.430.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-			100 Persen	100 Persen	764.893.000,00	1.034.916.000,00	1.034.916.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		989.993.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			111.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			67.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	586.893.000,00	856.916.000,00	822.916.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			811.993.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	100 Persen	225.330.000,00	169.660.000,00	169.660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		225.330.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5.00 Unit	5.00 Unit	134.870.000,00	96.200.000,00	96.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			134.870.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12.00 Unit	12.00 Unit	90.460.000,00	73.460.000,00	73.460.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.460.000,00	DINAS PARIWISATA
133	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata				2,98 Persen	2,98 Persen	4.100.000.000,00	219.700.000,00	219.700.000,00							1.970.000.000,00	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lama Kunjungan Wisata	-			8 Hari	8 Hari	1.850.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Destinasi Wisata		985.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				6.00 Lokasi	0 Lokasi	450.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				4 Orang	Orang	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			185.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lamanya Kunjungan Wisata	-			8 Hari	8 Hari	500.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Destinasi Wisata		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lamanya Kunjungan Wisata	-			8 Hari	8 Hari	1.750.000.000,00	219.700.000,00	219.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Destinasi Wisata		835.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	2 Lokasi	700.000.000,00	109.400.000,00	109.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			385.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5.00 Unit	3 Unit	250.000.000,00	110.300.000,00	110.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
134	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan				494.527 Orang	494.527 Orang	11.450.000.000,00	5.742.043.000,00	5.776.043.000,00							3.500.000.000,00	
	3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	-			100 Persen	100 Persen	11.450.000.000,00	5.742.043.000,00	5.742.043.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Aparatur dan masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2.00 Kegiatan	1 Kegiatan	9.500.000.000,00	5.597.728.000,00	5.631.728.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.850.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1.00 Promosi	1.00 Promosi	750.000.000,00	29.315.000,00	29.315.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
135	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata				30,00 Persen	30,00 Persen	2.800.000.000,00	750.609.000,00	750.609.000,00							1.335.000.000,00	
	3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersediannya SDM Pariwisata yang Berkualitas	-			100 Persen	100 Persen	2.800.000.000,00	750.609.000,00	750.609.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	SDM Pariwisata		1.335.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3.00 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	148.519.400,00	148.519.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				80 Orang	30 Orang	650.000.000,00	102.089.600,00	102.089.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			185.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50,00 Orang	20 Orang	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50,00 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
						Sekretariat Daerah						59.843.413.782,00	108.762.863.377,00	108.851.379.897,00							61.826.800.085,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
136	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan Daerah yang dikelola			1 Lokasi	1 Lokasi	320.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00								352.500.000,00
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan manusia	-		95 persen	95 persen	125.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	-		137.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				116 Perpustakaan	116 Perpustakaan	50.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	75.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan manusia	-		85 persen	85 persen	195.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				194,00 Perpustakaan	194,00 Perpustakaan	195.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
137	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku			25,00 Persen	25,00 Persen	58.581.521,00	34.029.802,00	34.029.802,00								63.000.000,00
												58.581.521,00	34.029.802,00	34.029.802,00								63.000.000,00
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan manusia	-		90 persen	90 persen	48.581.521,00	21.514.198,00	21.514.198,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				8 Berkas	8 Berkas	28.699.549,00	10.263.398,00	10.263.398,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	19.881.972,00	11.250.800,00	11.250.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	-		90 persen	90 persen	10.000.000,00	12.515.604,00	12.515.604,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	10.000.000,00	12.515.604,00	12.515.604,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
												59.464.832.261,00	108.583.833.575,00	108.851.379.897,00								61.411.300.085,00
												59.464.832.261,00	108.583.833.575,00	108.851.379.897,00								61.411.300.085,00
138	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah			92,50 Persen	92,50 Persen	45.665.574.245,00	99.301.636.799,00	99.390.153.319,00								47.424.162.909,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 persen	100 persen	146.585.600,00	15.400.000,00	15.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		155.720.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.083.200,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			32.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.573.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.573.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.646.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.646.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.077.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			31.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.204.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			90 persen	90 persen	22.094.237.550,00	66.800.861.800,00	64.950.020.630,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		23.505.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	22.089.485.550,00	66.796.542.100,00	64.945.700.930,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.584.000,00	1.439.900,00	1.439.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.584.000,00	1.439.900,00	1.439.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.584.000,00	1.439.900,00	1.439.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			95 persen	95 persen	620.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	620.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	-			98 persen	98 persen	631.292.400,00	195.000.000,00	245.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		593.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.00 Unit	1.00 Unit	21.936.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				290 Paket	290 Paket	411.356.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			452.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		50 Orang	50 Orang	198.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			117.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-		90 persen	90 persen	2.531.216.386,00	2.230.948.058,00	3.280.948.058,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.786.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		1 Paket	1 Paket	29.834.200,00	109.935.000,00	196.297.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		3 Paket	3 Paket	361.524.240,00	323.704.800,00	373.704.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			398.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		12 Paket	12 Paket	302.511.000,00	85.059.600,00	85.059.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		12 Laporan	12 Laporan	1.155.000.000,00	1.140.800.000,00	1.590.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.276.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		12 Laporan	12 Laporan	632.346.946,00	546.448.658,00	1.110.086.158,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			694.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-		90 persen	90 persen	3.574.584.000,00	897.949.750,00	1.060.449.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.635.084.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		1 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		10 Unit	10 Unit	2.140.000.000,00	835.980.000,00	835.980.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		10.00 Unit	0 Unit	306.078.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			306.078.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		42 Unit	42 Unit	514.078.000,00	23.625.000,00	186.125.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			514.078.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		12 Unit	12 Unit	109.428.000,00	38.344.750,00	38.344.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			119.428.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-		90 persen	90 persen	6.466.640.000,00	22.063.360.000,00	22.213.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		6.466.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas											
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.465.640.000,00	1.950.000.000,00	2.050.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.465.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					1.001.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.001.000.000,00	956.000.000,00	956.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.001.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	19.157.360.000,00	19.207.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi bai	-			90 persen	90 persen	3.027.500.000,00	2.415.080.000,00	2.515.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.027.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	964.480.000,00	826.515.000,00	826.515.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			964.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				86 Unit	86 Unit	1.178.320.000,00	836.845.000,00	836.845.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.178.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				1.00 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	370.700.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			370.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																								
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	424.720.000,00	524.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi dan keuangan dan operasional KDH/WKDH	-			90 persen	90 persen	588.789.500,00	711.346.000,00	711.346.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		588.789.500,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	168.089.500,00	347.346.000,00	347.346.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.089.500,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	95.700.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.00 Orang	2.00 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	-		90 persen	90 persen	1.773.850.738,00	1.412.417.690,00	1.489.275.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.773.850.738,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	813.680.120,00	767.334.400,00	778.338.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			813.680.120,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	626.680.120,00	580.334.400,00	591.338.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			626.680.120,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	333.490.498,00	64.748.890,00	119.497.780,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			333.490.498,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Cakupan Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	-		85 persen	85 persen	791.220.000,00	252.532.100,00	252.532.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		791.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				50 Dokumen	50 Dokumen	135.000.000,00	65.765.000,00	65.765.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				50 Laporan	50 Laporan	355.408.000,00	75.793.100,00	75.793.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			355.408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				55 Dokumen	55 Dokumen	180.812.000,00	87.702.000,00	87.702.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.812.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				55 Dokumen	55 Dokumen	75.000.000,00	16.403.000,00	16.403.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	6.869.000,00	6.869.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		95 persen	95 persen	3.419.658.071,00	1.806.741.401,00	2.156.741.401,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.419.658.071,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	1.586.653.155,00	665.477.000,00	865.477.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.586.653.155,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1.388.095.720,00	1.006.200.000,00	1.156.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.388.095.720,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	444.909.196,00	135.064.401,00	135.064.401,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			444.909.196,00	SEKRETARIAT DAERAH			
139	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			85,00 Persen	85,00 Persen	9.970.144.764,00	7.685.448.449,00	7.685.448.449,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				10.158.023.924,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu	-			95 persen	95 persen	1.420.382.130,00	916.235.350,00	916.235.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.562.420.343,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	24 Dokumen	927.737.800,00	635.755.750,00	635.755.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.020.511.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	6 Dokumen	318.314.306,00	140.205.250,00	140.205.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			350.145.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				20 Dokumen	2 Dokumen	174.330.024,00	140.274.350,00	140.274.350,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			191.763.026,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	-		85 persen	85 persen	5.955.419.560,00	5.854.410.863,00	5.854.410.863,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.955.419.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	2.526.871.680,00	1.621.465.273,00	1.661.465.273,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.526.871.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	3.308.540.280,00	4.161.884.190,00	4.151.884.190,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.308.540.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.007.600,00	71.061.400,00	41.061.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			120.007.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum	-		90 persen	90 persen	2.135.933.600,00	827.620.236,00	827.620.236,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.135.933.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	889.146.200,00	405.014.000,00	405.014.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			889.146.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	637.539.000,00	381.795.236,00	381.795.236,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			637.539.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	2 Dokumen	609.248.400,00	40.811.000,00	40.811.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			609.248.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	-		95 persen	95 persen	458.409.474,00	87.182.000,00	87.182.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		504.250.421,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	3 Dokumen	458.409.474,00	87.182.000,00	87.182.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			504.250.421,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				85,00 Persen	85,00 Persen	3.829.113.252,00	1.596.748.327,00	1.596.748.327,00							3.829.113.252,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-			90 persen	90 persen	1.223.934.984,00	308.780.482,00	383.017.822,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.223.934.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	0 Dokumen	115.686.296,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			115.686.296,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	832.255.028,00	227.101.822,00	363.945.822,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			832.255.028,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	196.493.660,00	81.678.660,00	19.072.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			196.493.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	0	79.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			79.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan laporan fasilitasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersedia	-			90 persen	90 persen	1.328.825.600,00	611.887.027,00	611.887.027,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.328.825.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	309.931.000,00	123.293.610,00	123.293.610,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			309.931.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	551.279.000,00	168.491.000,00	168.491.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			551.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	467.615.600,00	320.102.417,00	320.102.417,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			467.615.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa secara elektronik	-			90 persen	90 persen	1.125.155.500,00	535.897.650,00	535.897.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.125.155.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150.00 Dokumen	150.00 Dokumen	305.145.000,00	104.009.600,00	104.009.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			305.145.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150.00 Dokumen	150.00 Dokumen	557.573.000,00	368.587.400,00	368.587.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			557.573.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				4.00 Orang	4.00 Orang	262.437.500,00	63.300.650,00	63.300.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			262.437.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-			85 persen	85 persen	151.197.168,00	140.183.168,00	65.945.828,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		151.197.168,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	37.926.988,00	47.672.988,00	17.512.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.926.988,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	34.593.988,00	36.633.988,00	20.804.828,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.593.988,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.676.192,00	55.876.192,00	27.629.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			78.676.192,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Sekretariat DPRD						34.241.344.009,00	35.179.712.899,00	38.179.712.899,00							38.697.684.189,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						34.241.344.009,00	35.179.712.899,00	38.179.712.899,00							38.697.684.189,00		
						SEKRETARIAT DPRD						34.241.344.009,00	35.179.712.899,00	38.179.712.899,00							38.697.684.189,00		
141	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD			92,50 Persen	92,50 Persen	20.420.263.022,00	21.381.142.609,00	21.466.343.609,00							23.519.256.870,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-		100 %	100 %	6.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-		100 %	100 %	1.745.556.900,00	1.834.535.900,00	1.919.736.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.017.989.490,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.00 Orang/bulan	16.00 Orang/bulan	1.740.056.900,00	1.829.035.900,00	1.914.236.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.011.939.490,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja baik	-		100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					16.00 Orang	16.00 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-		100 %	100 %	1.654.606.663,00	1.840.773.272,00	1.840.773.272,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.024.850.599,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12.00 Paket	12.00 Paket	32.590.400,00	32.598.132,00	32.598.132,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.857.945,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	21.780.000,00	21.772.800,00	21.772.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		23.950.080,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			11.00 Paket	11.00 Paket	45.680.000,00	45.626.000,00	45.626.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		50.188.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12.00 Paket	12.00 Paket	231.497.263,00	272.963.050,00	272.963.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		300.259.355,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	700.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		935.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11.00 Laporan	11.00 Laporan	347.500.000,00	272.500.000,00	272.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		299.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.00 Laporan	12.00 Laporan	275.559.000,00	345.313.290,00	345.313.290,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		379.844.619,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-		100 %	100 %	469.280.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	274.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			32.00 Unit	32.00 Unit	229.780.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		109.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			2.00 Unit	2.00 Unit	239.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-		100 %	100 %	652.223.000,00	1.328.306.800,00	1.328.306.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	1.461.137.480,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12.00 Laporan	12.00 Laporan	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		316.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12.00 Laporan	12.00 Laporan	57.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		108.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12.00 Laporan	12.00 Laporan	307.223.000,00	941.306.800,00	941.306.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.035.437.480,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		100 %	100 %	957.967.819,00	731.879.838,00	731.879.838,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	805.067.822,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7.00 Unit	7.00 Unit	215.700.000,00	215.700.000,00	215.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		237.270.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1.00 Unit	1.00 Unit	580.126.019,00	354.038.038,00	354.038.038,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		389.441.842,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	162.141.800,00	162.141.800,00	162.141.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		178.355.980,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 %	100 %	14.135.336.800,00	14.651.176.799,00	14.651.176.799,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	16.116.294.479,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				26.00 Orang/Bulan	26.00 Orang/Bulan	13.564.836.800,00	13.700.676.999,00	13.700.676.999,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		15.070.744.699,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				125.00 Paket	150.00 Paket	300.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		605.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25.00 Orang	25.00 Orang	270.500.000,00	400.499.800,00	400.499.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		440.549.780,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi	-			-	100 %	298.891.840,00	232.470.000,00	232.470.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	255.717.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				34.00 Laporan	34.00 Laporan	66.420.850,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60.00 Laporan	60.00 Laporan	232.470.990,00	232.470.000,00	232.470.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		255.717.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
142	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				100 Persen	100 Persen	13.821.080.987,00	13.798.570.290,00	16.713.369.290,00						15.178.427.319,00		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Sesuai Regulasi	-			100 %	100 %	576.455.720,00	560.100.000,00	560.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Aparatur	616.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1.00 Dokumen	0 Dokumen	16.355.720,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	560.100.000,00	560.100.000,00	560.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		616.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan Anggaran	-			100 %	100 %	405.350.000,00	431.528.000,00	431.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	474.680.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	62.898.000,00	62.818.000,00	62.818.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		69.099.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	62.898.000,00	62.818.000,00	62.818.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		69.099.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	91.286.000,00	91.206.000,00	91.206.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.326.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	91.286.000,00	91.206.000,00	91.206.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.326.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	96.982.000,00	123.480.000,00	123.480.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			135.828.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		100 %	100 %	103.750.000,00	103.630.000,00	103.630.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		113.993.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			10.00 Laporan	10.00 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.798.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			10.00 Laporan	10.00 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.798.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			10.00 Laporan	10.00 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.798.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			10.00 Laporan	10.00 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.798.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			10.00 Laporan	10.00 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.798.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	-		100 %	100 %	2.754.835.437,00	2.586.897.010,00	2.586.897.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.845.586.711,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	300.000.000,00	309.095.000,00	309.095.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			340.004.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.912.564.937,00	2.002.532.010,00	2.002.532.010,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.202.785.211,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			4.00 Orang	0 Orang	195.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			6.00 Orang	6.00 Orang	347.270.500,00	275.270.000,00	275.270.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			302.797.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Pokir yang terealisasi	-		100 %	100 %	1.100.875.350,00	912.485.000,00	912.485.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur, Masyarakat		1.003.733.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			36.00 Laporan	36.00 Laporan	130.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			253.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1.00 Dokumen	0 Dokumen	27.152.750,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	943.722.600,00	682.485.000,00	682.485.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			750.733.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	-		100 %	100 %	8.879.814.480,00	9.203.930.280,00	12.118.729.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.124.323.308,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				28.00 Dokumen	28.00 Dokumen	8.850.000.000,00	9.143.930.280,00	12.058.729.280,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.058.323.308,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	29.814.480,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						11.692.772.504,00	9.236.500.500,00	9.236.500.500,00							10.451.715.917,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.692.772.504,00	9.236.500.500,00	9.236.500.500,00							10.451.715.917,00	
	5	01				PERENCANAAN						10.152.174.063,00	6.139.985.500,00	6.139.985.500,00							8.468.363.917,00	
143	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,50 %	92,50 %	3.866.833.917,00	4.195.922.500,00	4.195.922.500,00							4.070.625.917,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	28.693.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		28.693.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4.025.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.106.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.106.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.106.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.106.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.152.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.152.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.092.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.092.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	2.673.722.917,00	2.888.626.500,00	2.888.626.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.673.722.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.659.686.917,00	2.883.126.500,00	2.883.126.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.659.686.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	4.130.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	2 Laporan	5.834.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.834.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	4.072.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.072.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja Baik	-			100 %	100 %	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			19 Orang	19 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			100 %	100 %	634.648.000,00	760.436.000,00	760.436.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		793.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	114.648.000,00	122.436.000,00	122.436.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	84.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			475.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			100 %	100 %	20.000.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		84.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	20.000.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			84.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan layanan pendukung	-			100 %	100 %	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	-			100 %	100 %	168.770.000,00	145.210.000,00	145.210.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		175.210.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	135.250.000,00	133.850.000,00	133.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			138.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	16 Unit	8.520.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
144	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Dokumen Penganggaran				100 %	100 %	3.155.165.031,00	1.083.720.000,00	1.083.720.000,00							2.054.228.000,00	
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	-			100 %	100 %	2.150.294.000,00	825.428.000,00	825.428.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.327.726.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	348.574.000,00	165.714.000,00	165.714.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			184.364.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				1 Dokumen	0 Dokumen	200.808.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			76.548.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	0 Berita Acara	175.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0 Berita Acara	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	514.807.000,00	267.217.000,00	267.217.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			280.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			1 Usulan	1 Usulan	154.263.000,00	64.823.000,00	64.823.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.323.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			3 Dokumen	3 Dokumen	631.842.000,00	327.674.000,00	327.674.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			420.274.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	-		100 %	100 %	435.778.000,00	68.148.000,00	68.148.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		435.778.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	1 Dokumen	263.042.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			263.042.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			39 Orang	39 Orang	172.736.000,00	68.148.000,00	68.148.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			172.736.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	-		100 %	100 %	569.093.031,00	190.144.000,00	190.144.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		290.724.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			1 Laporan	1 Laporan	224.089.000,00	73.547.000,00	73.547.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			77.047.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2 Laporan	2 Laporan	345.004.031,00	116.597.000,00	116.597.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			213.677.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
145	5		01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat			85 %	85 %	3.130.175.115,00	860.343.000,00	860.343.000,00							2.343.510.000,00		
	5		01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-		70 %	70 %	1.589.255.115,00	454.395.000,00	454.395.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.021.907.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	1 Dokumen	218.604.115,00	84.642.000,00	84.642.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			157.166.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	191.139.000,00	81.681.000,00	81.681.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.231.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	194.017.000,00	90.885.000,00	90.885.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			161.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5		01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	193.075.000,00	57.335.000,00	57.335.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			63.405.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	0 Dokumen	196.656.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			196.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	0 Laporan	196.656.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			196.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan	189.335.000,00	64.355.000,00	64.355.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			70.341.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan	209.773.000,00	75.497.000,00	75.497.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			85.797.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		70 %	70 %	771.714.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		753.317.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1 Laporan	0 Laporan	190.460.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	190.062.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			171.665.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1 Laporan	10 Laporan	190.460.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			1 Laporan	10 Laporan	200.732.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.732.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian kinerja bidang infrastruktur dan kewilayahan	-		70 %	70 %	769.206.000,00	304.448.000,00	304.448.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		568.286.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1 Laporan	1 Laporan	190.460.000,00	101.624.000,00	101.624.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			169.265.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	1 Laporan	201.218.000,00	101.421.000,00	101.421.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			106.265.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0 Laporan	186.491.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		186.491.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	191.037.000,00	101.403.000,00	101.403.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		106.265.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.540.598.441,00	3.096.515.000,00	3.096.515.000,00							1.983.352.000,00		
146	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah				Sangat Inovatif Angka	Sangat Inovatif Angka	1.540.598.441,00	3.096.515.000,00	3.096.515.000,00						1.983.352.000,00		
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-		80 %	80 %	490.598.441,00	518.259.000,00	518.259.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	823.753.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	125.598.441,00	115.195.250,00	115.195.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		210.275.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	223.422.750,00	223.422.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		276.596.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	84.716.000,00	84.716.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		200.978.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	94.925.000,00	94.925.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		135.904.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan	-		80 %	80 %	120.000.000,00	528.249.000,00	528.249.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	283.599.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				1 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	528.249.000,00	528.249.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		283.599.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	-		80 %	80 %	930.000.000,00	2.050.007.000,00	2.050.007.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	876.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	0 Dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		283.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	0 Dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		310.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	5 Dokumen	310.000.000,00	2.050.007.000,00	2.050.007.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		283.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							196.909.704.819,00	190.309.514.291,00	199.696.114.291,00						196.909.704.819,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							196.909.704.819,00	190.309.514.291,00	199.696.114.291,00						196.909.704.819,00		
	5	02				KEUANGAN							196.909.704.819,00	190.309.514.291,00	199.696.114.291,00						196.909.704.819,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
147	5	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,50 %	92,50 %	11.921.630.049,00	22.431.935.966,00	31.679.295.966,00							11.921.630.049,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	15.500.000,00	15.499.400,00	15.499.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	10.220.584.569,00	20.787.845.466,00	30.025.205.466,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.220.584.569,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	10.215.584.569,00	20.782.845.766,00	30.020.205.766,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.215.584.569,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.850,00	1.999.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	999.950,00	999.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	-			100 %	100 %	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		260.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			23 Orang	24 Orang	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-			100 %	100 %	892.685.480,00	784.271.050,00	784.271.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	892.685.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	390.000.000,00	327.771.050,00	327.771.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	72.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		72.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	150.000.000,00	188.500.000,00	188.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	255.685.480,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		255.685.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan mesin	-			100 %	100 %	65.000.000,00	128.625.000,00	128.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	128.625.000,00	128.625.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-			100 %	100 %	266.660.000,00	261.201.550,00	271.201.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	266.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		37.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	221.160.000,00	213.000.000,00	213.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		221.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	48.201.550,00	58.201.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang	-			-	100 %	201.200.000,00	154.493.500,00	154.493.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	201.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	140.350.000,00	140.350.000,00	140.350.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		140.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				85 Unit	85 Unit	60.850.000,00	14.143.500,00	14.143.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		60.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
148	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	"Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan				100 %	100 %	182.614.083.973,00	165.514.829.625,00	165.654.069.625,00						182.614.083.973,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	3.376.150.000,00	2.694.558.800,00	2.724.558.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	3.376.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	357.549.960,00	289.896.150,00	289.896.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		357.549.960,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	358.632.800,00	289.896.150,00	289.896.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		358.632.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	103.285.060,00	50.305.500,00	50.305.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		103.285.060,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	101.785.060,00	50.305.500,00	50.305.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		101.785.060,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	89.268.620,00	50.429.400,00	50.429.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		89.268.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	90.292.500,00	50.429.400,00	50.429.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		90.292.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	896.990.000,00	697.946.650,00	727.946.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		896.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	901.818.000,00	736.646.650,00	736.646.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		901.818.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			3 Dokumen	3 Dokumen	476.528.000,00	478.703.400,00	478.703.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		476.528.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Dokumen penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	-		100 %	100 %	3.223.748.520,00	1.760.660.950,00	1.817.900.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	3.223.748.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			36 Dokumen	36 Dokumen	1.553.929.400,00	518.258.050,00	575.498.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.553.929.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			2 Dokumen	2 Dokumen	181.606.000,00	147.182.500,00	147.182.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		181.606.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			12 Dokumen	12 Dokumen	424.909.120,00	298.959.650,00	298.959.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		424.909.120,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			12 Dokumen	12 Dokumen	421.506.000,00	375.523.500,00	375.523.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		421.506.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				78 Orang	78 Orang	641.798.000,00	420.737.250,00	420.737.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			641.798.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Laporan Keuangan daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	837.460.400,00	674.655.800,00	674.655.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		837.460.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	90.431.000,00	154.474.100,00	154.474.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.431.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	523.494.400,00	332.690.500,00	332.690.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			523.494.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	188.535.000,00	187.491.200,00	187.491.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			188.535.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	-			100 %	100 %	174.480.119.053,00	160.199.650.925,00	160.251.650.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		174.480.119.053,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	6.615.000.000,00	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.615.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	166.365.119.053,00	153.253.900.925,00	153.305.900.925,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			166.365.119.053,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah	-			100 %	100 %	696.606.000,00	185.303.150,00	185.303.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		696.606.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	696.606.000,00	185.303.150,00	185.303.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			696.606.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
149	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai aturan				100 %	100 %	2.373.990.797,00	2.362.748.700,00	2.362.748.700,00							2.373.990.797,00		
	5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pencatatan aset daerah	-			100 %	100 %	2.373.990.797,00	2.362.748.700,00	2.362.748.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.373.990.797,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	306.051.600,00	333.774.200,00	333.774.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			306.051.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	757.925.197,00	631.393.800,00	631.393.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			757.925.197,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	444.214.000,00	255.077.700,00	255.077.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			444.214.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	459.800.000,00	564.977.000,00	564.977.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			459.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	406.000.000,00	577.526.000,00	577.526.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			406.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah							7.057.088.949,00	5.326.291.650,00	5.326.291.650,00							7.051.088.949,00	
	5					UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.057.088.949,00	5.326.291.650,00	5.326.291.650,00							7.051.088.949,00	
	5	02				KEUANGAN							7.057.088.949,00	5.326.291.650,00	5.326.291.650,00							7.051.088.949,00	
150	5	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah				90 %	90 %	3.956.775.142,00	3.406.507.498,00	3.406.507.498,00							3.950.775.142,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	13.150.500,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		13.150.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.703.250,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.703.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.447.250,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.447.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	2.865.287.142,00	2.202.767.700,00	2.202.767.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.859.287.142,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	2.848.838.992,00	2.197.267.700,00	2.197.267.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.848.838.992,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	0 Laporan	5.628.200,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.628.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.436.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.436.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.383.750,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			5.383.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12.00 Orang	12.00 Orang	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-			1 paket	1 paket	509.827.500,00	462.589.798,00	462.589.798,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		509.827.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	100.827.500,00	82.107.500,00	82.107.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.827.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	22.000.000,00	21.104.298,00	21.104.298,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	350.000.000,00	322.378.000,00	322.378.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	-		92.50 %	92.50 %	150.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	12.00 Unit	150.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		12 Laporan	12 Laporan	185.760.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		185.760.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	5.760.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.760.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah atau Kendaraan dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		8 unit	8 unit	132.750.000,00	127.750.000,00	127.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		132.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8.00 Unit	8.00 Unit	112.750.000,00	112.750.000,00	112.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			112.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
151	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah				4.26%	4.26%	3.100.313.807,00	1.919.784.152,00	1.919.784.152,00							3.100.313.807,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	3.100.313.807,00	1.919.784.152,00	1.919.784.152,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-	3.100.313.807,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2.00 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	287.274.000,00	265.693.000,00	265.693.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		287.274.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	398.605.000,00	106.045.602,00	106.045.602,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		398.605.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				20 Unit	0 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	122.905.600,00	524.887.600,00	524.887.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		122.905.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	676.974.000,00	485.410.000,00	485.410.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		676.974.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	245.888.447,00	207.479.800,00	207.479.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		245.888.447,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	0 Dokumen	120.711.960,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		120.711.960,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	400.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		400.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	150.000.000,00	250.642.950,00	250.642.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	207.604.800,00	79.625.200,00	79.625.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		207.604.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							6.965.825.736,00	3.852.637.800,00	3.902.637.800,00								
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.965.825.736,00	3.852.637.800,00	3.902.637.800,00								
	5	03			KEPEGAWAIAN							4.317.648.916,00	3.615.867.800,00	3.665.867.800,00								
152	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			92.50 persen	92.50 persen	2.583.313.341,00	2.244.425.400,00	2.294.425.400,00							2.244.425.400,00	
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 persen	100 persen	7.000.000,00	14.399.950,00	14.399.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	14.399.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		7.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	499.950,00	499.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			499.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-		100 persen	100 persen	1.961.068.200,00	1.883.137.800,00	1.883.137.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.883.137.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.955.568.200,00	1.877.637.800,00	1.927.637.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.877.637.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	-		100 persen	100 persen	30.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-		100 persen	100 persen	301.583.141,00	211.267.650,00	211.267.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		211.267.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12.00 Paket	12.00 Paket	49.870.400,00	43.582.500,00	43.582.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.582.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12 Laporan	203.712.741,00	119.685.150,00	119.685.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			119.685.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	-		100 persen	0 persen	81.980.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.00 Unit	0 Unit	81.980.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	-		100 persen	100 persen	131.642.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		67.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.00 Laporan	0 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12 Laporan	12 Laporan	127.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		67.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Laporan	0 Laporan	2.242.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-		100 persen	100 persen	70.040.000,00	68.620.000,00	68.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		68.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2 Unit	2 Unit	60.100.000,00	60.100.000,00	60.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		60.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14 Unit	12 Unit	9.940.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		8.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
153	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			73.54 persen	73.54 persen	1.734.335.575,00	1.371.442.400,00	1.371.442.400,00							1.371.442.400,00		
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	-		100 persen	100 persen	797.481.800,00	745.564.550,00	745.564.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		745.564.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						2 Dokumen	2 Dokumen	556.040.800,00	548.952.900,00	548.952.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		548.952.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						2 Dokumen	2 Dokumen	48.889.000,00	23.824.200,00	23.824.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		23.824.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						1 Lembaga	1 Lembaga	71.344.000,00	137.819.000,00	137.819.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		137.819.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						2.00 Dokumen	2 Dokumen	96.974.000,00	20.779.150,00	20.779.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		20.779.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						2 Dokumen	2 Dokumen	24.234.000,00	14.189.300,00	14.189.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		14.189.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN	-			100 persen	630.374.400,00	422.613.200,00	422.613.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		422.613.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	220.498.800,00	72.613.200,00	72.613.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.613.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	409.875.600,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pemenuhan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			100 persen	306.479.375,00	203.264.650,00	203.264.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		203.264.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Laporan	2 Laporan	79.677.000,00	79.586.850,00	79.586.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			79.586.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1000 Orang	1000 Orang	146.483.000,00	90.825.750,00	90.825.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.825.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	80.319.375,00	32.852.050,00	32.852.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			32.852.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
154	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN telah yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan				22.42 persen	22.42 persen	2.648.176.820,00	236.770.000,00	236.770.000,00							236.770.000,00		
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis	-			100 persen	100 persen	260.770.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				160 Orang	0 Orang	260.770.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			100 persen	100 persen	2.387.406.820,00	236.770.000,00	236.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		236.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3.00 Laporan	3 Laporan	2.387.406.820,00	236.770.000,00	236.770.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			236.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	6					Inspektorat									8.813.620.900,00	6.420.695.300,00	7.032.710.300,00					9.694.982.990,00		
	6	01				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									8.813.620.900,00	6.420.695.300,00	7.032.710.300,00					9.694.982.990,00		
155	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,50 %	92,50 %	5.053.620.900,00	4.773.171.300,00	5.385.186.300,00							5.558.982.990,00		
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			100 %	100 %	7.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		8.140.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.900.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.090.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.050.000,00	INSPEKTORAT	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	3.253.420.900,00	3.876.195.300,00	3.876.195.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		3.578.762.990,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19.00 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3.247.370.900,00	3.870.695.300,00	4.482.710.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.572.107.990,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.025.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.420.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																						
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.210.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	-		100 %	100 %	400.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		440.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	8 Orang	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				19 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			110.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-		100 %	100 %	562.000.000,00	315.281.000,00	315.281.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		618.200.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.300.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	109.349.000,00	109.349.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.200.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	375.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			412.500.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	-		100 %	100 %	120.000.000,00	99.803.000,00	99.803.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		132.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	13 Unit	100.000.000,00	99.803.000,00	99.803.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	-		100 %	100 %	362.500.000,00	293.492.000,00	293.492.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		398.750.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	324.500.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			356.950.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	38.492.000,00	38.492.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			41.800.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-		100 %	100 %	348.300.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		383.130.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.780.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	288.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			317.350.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	20 Unit	20.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	INSPEKTORAT						
156	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang - Undangan	-		100 %	100 %	2.260.000.000,00	1.354.727.500,00	1.354.727.500,00							2.486.000.000,00							
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penjabaran Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	-		100 %	100 %	1.570.000.000,00	990.110.500,00	990.110.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.727.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100.00 Laporan	25 Laporan	200.000.000,00	184.153.000,00	184.153.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	110 Laporan	200.000.000,00	218.099.000,00	218.099.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																						
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	57.271.000,00	57.271.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																						
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	71.827.000,00	71.827.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				116 Laporan	40 Laporan	220.000.000,00	156.518.000,00	156.518.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			242.000.000,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2.00 Kesepakatan	2.00 Kesepakatan	350.000.000,00	51.531.000,00	51.531.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			385.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	11 Dokumen	300.000.000,00	250.711.500,00	250.711.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penjabaran Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	-		100 %	100 %	690.000.000,00	364.617.000,00	364.617.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		759.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	240.000.000,00	153.067.000,00	153.067.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			264.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	18 Laporan	450.000.000,00	211.550.000,00	211.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			495.000.000,00	INSPEKTORAT	
157	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	-		100 %	100 %	1.500.000.000,00	292.796.500,00	292.796.500,00							1.650.000.000,00		
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penjabaran Konsistensi Perumusan Kebijakan Teknis terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	-		100 %	100 %	400.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		440.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	0 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	3 Rekomendasi	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Penjabaran Konsistensi Perumusan Kebijakan Teknis terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	-		100 %	100 %	1.100.000.000,00	262.796.500,00	262.796.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.210.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				39 perangkat daerah	15 perangkat daerah	350.000.000,00	89.150.500,00	89.150.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			385.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				39 perangkat daerah	1 perangkat daerah	250.000.000,00	33.184.000,00	33.184.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	250.000.000,00	111.930.000,00	111.930.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	250.000.000,00	28.532.000,00	28.532.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.000.000,00	INSPEKTORAT	
						Kecamatan Bangkunt											805.700.000,00	835.700.000,00	835.700.000,00			805.700.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											805.700.000,00	835.700.000,00	835.700.000,00			805.700.000,00	
	7	01				KECAMATAN											805.700.000,00	835.700.000,00	835.700.000,00			805.700.000,00	
158	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	-	763.015.500,00	789.545.900,00	789.545.900,00							763.015.500,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	511.200.000,00	511.199.500,00	511.199.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		511.200.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	505.700.000,00	505.700.000,00	505.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			505.700.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.499.950,00	2.499.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.999.850,00	1.999.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	999.700,00	999.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	141.791.000,00	183.031.150,00	183.031.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		141.791.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	9.918.500,00	9.918.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.141.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.620.000,00	26.261.650,00	26.261.650,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.620.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.730.000,00	32.551.000,00	32.551.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.730.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.534.500,00	28.815.500,00	28.815.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		28.534.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	4.507.500,00	4.507.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.401.500,00	8.308.000,00	8.308.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.401.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	76.490.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		76.490.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	50.550.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.940.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
159	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	42.684.500,00	46.154.100,00	46.154.100,00							42.684.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	42.684.500,00	46.154.100,00	46.154.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		42.684.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.684.500,00	46.154.100,00	46.154.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.684.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
						Kecamatan Ngaras						752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							752.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							752.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN						752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							752.400.000,00	
160	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	709.715.500,00	757.954.000,00	757.954.000,00							709.715.500,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	457.900.000,00	477.369.850,00	477.369.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		457.900.000,00	KECAMATAN NGARAS
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	452.400.000,00	471.900.000,00	471.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			452.400.000,00	KECAMATAN NGARAS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.493.850,00	2.493.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	995.000,00	995.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	995.000,00	995.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	141.791.000,00	185.581.900,00	185.581.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		141.791.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	7.509.400,00	7.509.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.141.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	7.509.400,00	7.509.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.141.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	12 Paket	21.620.000,00	22.897.500,00	22.897.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.620.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.620.000,00	22.897.500,00	22.897.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.620.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					12 Paket	12 Paket	21.730.000,00	40.875.000,00	40.875.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.730.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.730.000,00	40.875.000,00	40.875.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.730.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.534.500,00	28.412.250,00	28.412.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		28.534.500,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.401.500,00	8.662.250,00	8.662.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.401.500,00	KECAMATAN NGARAS
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	76.490.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		76.490.000,00	KECAMATAN NGARAS
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	50.550.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN NGARAS
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.940.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN NGARAS
161	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	42.684.500,00	43.946.000,00	43.946.000,00							42.684.500,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	42.684.500,00	43.946.000,00	43.946.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		42.684.500,00	KECAMATAN NGARAS
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.684.500,00	43.946.000,00	43.946.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.684.500,00	KECAMATAN NGARAS
					Kecamatan Ngambur							792.700.000,00	795.400.000,00	795.400.000,00								
7					UNSUR KEWILAYAHAN							792.700.000,00	795.400.000,00	795.400.000,00								
7	01				KECAMATAN							792.700.000,00	795.400.000,00	795.400.000,00								
162	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	750.025.200,00	752.725.500,00	752.725.500,00							750.025.200,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	9.999.750,00	9.999.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	9.999.750,00	9.999.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	498.200.000,00	475.901.350,00	475.901.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		498.200.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	492.700.000,00	465.400.000,00	465.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			492.700.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	2.001.400,00	2.001.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	141.800.700,00	154.799.900,00	154.799.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		141.800.700,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	9.140.250,00	9.140.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.141.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.629.700,00	21.629.500,00	21.629.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.629.700,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.150.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.880.000,00	25.880.150,00	25.880.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.880.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	38.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.534.500,00	35.534.500,00	35.534.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		28.534.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.401.500,00	10.401.500,00	10.401.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.401.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	76.490.000,00	76.490.000,00	76.490.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		76.490.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.550.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN NGAMBUR			
163	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	42.674.800,00		42.674.500,00							42.674.800,00				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	42.674.800,00		42.674.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		42.674.800,00	KECAMATAN NGAMBUR			
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.674.800,00		42.674.500,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.674.800,00	KECAMATAN NGAMBUR		
						Kecamatan Pesisir Selatan						799.000.000,00	829.200.000,00	829.200.000,00							799.000.000,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7	01				KECAMATAN																			
164	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	769.948.400,00	800.158.000,00	800.158.000,00							769.948.400,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	4.519.800,00	4.519.000,00	4.519.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		4.519.800,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.519.800,00	4.519.000,00	4.519.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.519.800,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	525.342.600,00	504.541.000,00	504.541.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		525.342.600,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	520.000.000,00	499.200.000,00	499.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			520.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.413.800,00	2.413.000,00	2.413.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.413.800,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.930.800,00	1.930.000,00	1.930.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.930.800,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	998.000,00	998.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			998.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	142.524.000,00	194.149.000,00	194.149.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		142.524.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.048.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.946.000,00	29.946.000,00	29.946.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.946.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.530.000,00	22.155.000,00	22.155.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.530.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	35.813.000,00	35.813.000,00	35.813.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		35.813.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.605.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.208.000,00	16.208.000,00	16.208.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.208.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	61.749.000,00	61.136.000,00	61.136.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		61.749.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	40.950.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.950.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.399.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.399.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.400.000,00	6.386.000,00	6.386.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.400.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
165	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	-	29.051.600,00	29.042.000,00	29.042.000,00							29.051.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	29.051.600,00	29.042.000,00	29.042.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		29.051.600,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.051.600,00	29.042.000,00	29.042.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.051.600,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
						Kecamatan Kruil Selatan						771.900.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							797.350.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						771.900.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							797.350.000,00	
	7	01				KECAMATAN						771.900.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							797.350.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
166	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	729.225.200,00	759.225.200,00	759.225.200,00							754.675.200,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	477.400.000,00	478.400.000,00	478.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		478.400.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	471.900.000,00	471.900.000,00	471.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 0	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	141.800.700,00	156.800.700,00	156.800.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		152.250.700,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	7.141.000,00	7.141.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.141.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	21.629.700,00	31.079.700,00	31.079.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			31.079.700,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.030.000,00	25.580.000,00	25.580.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.030.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	28.534.500,00	37.534.500,00	37.534.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		37.534.500,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	5.533.000,00	5.533.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.533.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.401.500,00	10.401.500,00	10.401.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.401.500,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	76.490.000,00	81.490.000,00	81.490.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		81.490.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.550.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
167	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	-	42.674.800,00	42.674.800,00	42.674.800,00					-		42.674.800,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	42.674.800,00	42.674.800,00	42.674.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		42.674.800,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.674.800,00	42.674.800,00	42.674.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.674.800,00	KECAMATAN KRUI SELATAN
						Kecamatan Pesisir Tengah						2.033.100.000,00	3.381.570.000,00	3.381.570.000,00							2.944.371.700,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.033.100.000,00	3.381.570.000,00	3.381.570.000,00							2.944.371.700,00	
	7	01			KECAMATAN							2.033.100.000,00	3.381.570.000,00	3.381.570.000,00							2.944.371.700,00	
168	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	1.400.300.000,00	1.386.900.000,00	1.386.900.000,00					-		1.400.263.200,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.910.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.950.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.910.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.950.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	954.827.000,00	1.061.427.000,00	1.061.427.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		954.790.200,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	950.300.000,00	1.056.900.000,00	1.056.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			950.300.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.377.800,00	1.377.800,00	1.377.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.377.800,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.635.600,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	513.600,00	513.600,00	513.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			476.800,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	165.165.000,00	120.256.000,00	120.256.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		170.165.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.037.000,00	10.037.000,00	10.037.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.037.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	62.831.000,00	52.224.000,00	52.224.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.031.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.497.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.497.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.600.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	203.928.000,00	133.837.000,00	133.837.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		203.928.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	203.928.000,00	133.837.000,00	133.837.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.928.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	48.600.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		43.600.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.600.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	25.870.000,00	25.830.000,00	25.830.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		25.830.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	25.870.000,00	25.830.000,00	25.830.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.830.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
169	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	632.800.000,00	1.994.670.000,00	1.994.670.000,00							1.544.108.500,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	632.800.000,00	1.994.670.000,00	1.994.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		1.544.108.500,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	0,00	1.181.870.000,00	1.181.870.000,00	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			650.028.500,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	632.800.000,00	812.800.000,00	812.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			894.080.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
						Kecamatan Way Krui						752.400.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00							783.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						752.400.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00							783.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN						752.400.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00							783.400.000,00	
170	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	752.400.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00							783.400.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		4.692.000,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.692.000,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	464.238.500,00	461.338.500,00	461.338.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		466.238.500,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	452.400.000,00	448.500.000,00	448.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			452.400.000,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.255.000,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	2 Laporan	3.261.500,00	4.261.500,00	4.261.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.261.500,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen	0 Dokumen	4.322.000,00	4.322.000,00	4.322.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.322.000,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	168.894.500,00	184.623.500,00	184.623.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		184.623.500,00	KECAMATAN WAY KRUI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.113.000,00	12.113.000,00	12.113.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.113.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.100.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.150.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.150.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.531.500,00	59.260.500,00	59.260.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.260.500,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	16.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	37.475.000,00	40.146.000,00	40.146.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		40.146.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.597.000,00	5.597.000,00	5.597.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.597.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.678.000,00	12.349.000,00	12.349.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.349.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	78.100.000,00	87.700.000,00	87.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		87.700.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	53.100.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.700.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI			
						Kecamatan Karya Penggawa											752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00					752.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00					752.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN											752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00					752.400.000,00	
171	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	752.400.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00							752.400.000,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.092.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.092.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.092.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.092.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	462.074.200,00	480.161.400,00	480.161.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		462.074.200,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	452.400.000,00	471.900.000,00	471.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		452.400.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.359.800,00	2.524.000,00	2.524.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.359.800,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.571.400,00	2.305.000,00	2.305.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.571.400,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																						
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.743.000,00	3.432.400,00	3.432.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.743.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	178.061.300,00	229.875.600,00	229.875.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		178.061.300,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.981.000,00	7.981.000,00	7.981.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		7.981.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.050.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		8.050.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		25.600.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.430.300,00	75.594.600,00	75.594.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		57.430.300,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		12.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	16.000.000,00	44.350.000,00	44.350.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		16.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		51.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA						

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	22.722.500,00	19.876.000,00	19.876.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		22.722.500,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	5.012.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.012.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	10.510.500,00	8.244.000,00	8.244.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.510.500,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	86.450.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		86.450.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	4 Unit	61.450.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.450.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA
	7				Kecamatan Pesisir Utara								839.500.000,00		846.100.000,00	846.100.000,00							839.500.000,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN								839.500.000,00		846.100.000,00	846.100.000,00							839.500.000,00	
	7	01			KECAMATAN								839.500.000,00		846.100.000,00	846.100.000,00							839.500.000,00	
172	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	796.824.540,00	803.425.000,00	803.425.000,00									796.824.540,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	545.000.000,00	521.600.000,00	521.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		545.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	539.500.000,00	516.100.000,00	516.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			539.500.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	141.800.040,00	148.902.750,00	148.902.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		141.800.040,00	KECAMATAN PESISIR UTARA		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	6.141.000,00	6.141.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.141.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	21.629.040,00	21.629.000,00	21.629.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.629.040,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	21.030.000,00	21.030.000,00	21.030.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.030.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	45.102.750,00	45.102.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	28.534.500,00	28.534.000,00	28.534.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		28.534.500,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	8.401.500,00	8.401.000,00	8.401.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.401.500,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	76.490.000,00	99.388.250,00	99.388.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		76.490.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit	3 Unit	50.550.000,00	50.549.750,00	50.549.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	5.940.000,00	5.938.500,00	5.938.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
173	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	42.675.460,00	42.675.000,00	42.675.000,00							42.675.460,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	42.675.460,00	42.675.000,00	42.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		42.675.460,00	KECAMATAN PESISIR UTARA		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.675.460,00	42.675.000,00	42.675.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.675.460,00	KECAMATAN PESISIR UTARA		
						Kecamatan Lemong																			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		886.379.670,00	
	7	01				KECAMATAN																		886.379.670,00	
174	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	732.604.500,00	782.104.800,00	782.104.800,00							838.865.170,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	5.319.750,00	5.319.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.851.725,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.319.750,00	5.319.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.851.725,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	481.300.000,00	501.914.450,00	501.914.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		530.655.895,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	475.800.000,00	495.300.000,00	495.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			523.380.000,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.568.750,00	2.568.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.825.625,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.769.900,00	2.769.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.046.890,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.275.800,00	1.275.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.403.380,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	141.982.500,00	161.077.600,00	161.077.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		177.159.950,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.244.500,00	8.342.000,00	8.342.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.176.200,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.680.000,00	26.495.200,00	26.495.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.144.720,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.665.000,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.908.000,00	15.990.400,00	15.990.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.564.030,00	KECAMATAN LEMONG		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.610.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			41.800.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	27.934.000,00	31.453.000,00	31.453.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		34.623.600,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	4.394.000,00	4.394.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.833.400,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.401.000,00	11.059.000,00	11.059.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.190.200,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	76.388.000,00	82.340.000,00	82.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		90.574.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	50.450.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.650.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	30.840.000,00	30.840.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.924.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.938.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN LEMONG	
175	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	43.195.200,00	43.195.000,00	43.195.000,00								47.514.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	43.195.200,00	43.195.000,00	43.195.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		47.514.500,00	KECAMATAN LEMONG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.195.200,00	43.195.000,00	43.195.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			47.514.500,00	KECAMATAN LEMONG	
						Kecamatan Pulau Pisang						735.500.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00								734.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						735.500.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00								734.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN						735.500.000,00	801.900.000,00	801.900.000,00								734.500.000,00	
176	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan pada kecamatan pulau pisang undefined			-	90 undefined persen undefined	690.900.300,00	757.300.350,00	757.300.350,00								689.900.300,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			-	1 Laporan undefined undefined	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-			-	6 orang bulan	441.000.000,00	477.400.750,00	477.400.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		440.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	435.500.000,00	471.900.750,00	471.900.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			435.500.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-			-	2 paket	127.457.300,00	188.848.100,00	188.848.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		127.457.300,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	6.195.700,00	6.195.700,00	6.195.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.195.700,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kantor				2 Paket	2 Paket	22.656.100,00	28.672.000,00	28.672.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.656.100,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Paket	12 Paket	16.305.500,00	23.480.400,00	23.480.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.305.500,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Perundang-undangan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			-	2 Laporan	43.533.000,00	43.631.000,00	43.631.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		43.533.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.533.000,00	5.133.000,00	5.133.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.400.000,00	8.698.000,00	8.698.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.400.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-		-	1 unit	73.910.000,00	42.420.500,00	42.420.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		73.910.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	46.350.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			46.350.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	780.500,00	780.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	7.560.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.560.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
177	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-	100%	44.599.700,00	44.599.650,00	44.599.650,00								44.599.700,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 dokumen	44.599.700,00	44.599.650,00	44.599.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		44.599.700,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.599.700,00	44.599.650,00	44.599.650,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.599.700,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						40.366.553.960,00	23.423.655.630,00	23.623.375.802,00								44.403.209.358,00	
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							40.366.553.960,00	23.423.655.630,00	23.623.375.802,00								44.403.209.358,00	
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							40.366.553.960,00	23.423.655.630,00	23.623.375.802,00								44.403.209.358,00	
178	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				92.5 Persen	92.5 Persen	2.773.644.407,00	2.307.710.500,00	2.491.220.500,00								3.051.008.848,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-			92.5 Persen	92.5 Persen	4.612.042,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.073.246,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.612.042,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.873.246,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	-		92.5 Persen	92.5 Persen	1.503.708.900,00	1.399.338.500,00	1.399.338.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.654.079.790,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13.00 Orang/bulan	13.00 Orang/bulan	1.498.208.900,00	1.394.338.500,00	1.577.848.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.648.029.790,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	-		92.5 Persen	92.5 Persen	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5.00 Orang	5.00 Orang	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	-		92.5 Persen	92.5 Persen	383.617.820,00	300.628.000,00	300.628.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		421.979.602,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	11.758.400,00	3.781.000,00	3.781.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.934.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	55.600.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	87.259.420,00	58.747.000,00	58.747.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.985.362,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	55.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	-		92.5 Persen	92.5 Persen	32.500.000,00	45.720.000,00	45.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		35.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01		2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		15.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	18.500.000,00	45.720.000,00	45.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		20.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	-			92.5 Persen	92.5 Persen	621.012.835,00	435.624.000,00	435.624.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	683.114.119,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	346.392.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		381.031.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	259.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		284.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	15.620.835,00	2.824.000,00	2.824.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		17.182.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	-			92.5 Persen	92.5 Persen	203.192.810,00	99.000.000,00	99.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	223.512.091,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.00 Unit	3.00 Unit	99.459.750,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		109.405.725,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01		2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5.00 Unit	5.00 Unit	103.733.060,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		114.106.366,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
179	8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat				49 Persen	49 Persen	1.256.985.542,00	777.117.000,00	777.117.000,00						1.382.684.096,00	
	8	01	02		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan /kota	-			49 Persen	49 Persen	1.256.985.542,00	777.117.000,00	777.117.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur	1.382.684.096,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02		2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150.00 Orang	150.00 Orang	1.049.639.110,00	777.117.000,00	777.117.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.154.603.021,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02		2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150.00 Orang	0 Orang	207.346.432,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		228.081.075,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
180	8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat				84.92 Persen	84.92 Persen	32.390.266.865,00	828.317.130,00	844.527.302,00						35.629.293.552,00	
	8	01	03		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	-			84.92 Persen	84.92 Persen	32.390.266.865,00	828.317.130,00	844.527.302,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur	35.629.293.552,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03		2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	32.161.774.568,00	333.637.130,00	349.847.302,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.377.952.025,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	86.859.977,00	494.680.000,00	494.680.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.545.975,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.00 Laporan	0 Laporan	141.632.320,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			155.795.552,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
181	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Pesisir Barat			75 Persen	75 Persen	1.274.406.134,00	19.180.000.000,00	19.180.000.000,00							1.401.846.748,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		75 Persen	75 Persen	1.274.406.134,00	19.180.000.000,00	19.180.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		1.401.846.748,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	1.197.391.195,00	19.180.000.000,00	19.180.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.317.130.315,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	77.014.939,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.716.433,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
182	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			74.2 Persen	74.2 Persen	670.286.948,00	130.511.000,00	130.511.000,00							737.315.643,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	-		100 Persen	100 Persen	670.286.948,00	130.511.000,00	130.511.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Aparatur		737.315.643,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	270.122.866,00	130.511.000,00	130.511.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			297.135.153,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150.00 Orang	0 Orang	400.164.082,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			440.180.490,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
183	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Pesisir Barat			100 Persen	100 Persen	2.000.964.064,00	200.000.000,00	200.000.000,00							2.201.060.471,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			100 Persen	100 Persen	2.000.964.064,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		2.201.060.471,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	550.095.795,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			605.105.375,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150.00 Orang	150.00 Orang	850.864.468,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			935.950.915,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12.00 Laporan	0 Laporan	600.003.801,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.004.181,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H													938.603.096.460,00	913.718.174.916,00	929.234.401.098,00						1.043.116.597.683,00		

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2024 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses serta dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan pada pelaksanaan sisa tahun anggaran 2024 yang memusatkan pada pencapaian Tujuan, Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Tahun 204 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat untuk tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, Isu-isu Strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta pelaksanaannya melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut serta demi terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan dari semua pemangku kepentingan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai mitra ataupun sebagai salah satu unsur pemberi masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan, sub kegiatan;
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan melalui upaya pengendalian internal dan melaporkannya secara triwulan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat melakukan evaluasi, verifikasi serta pengendalian terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian dari Kepala Perangkat Daerah dan apabila dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dimaksud;
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;
7. Pada akhir pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan serta target capaian keuangan

pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2024 dan disampaikan dalam bentuk Laporan Ikhtisar Keuangan Tahunan serta dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Demikianlah Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024, Perubahan RKA-Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024 serta DPPA APBD TA 2024. Lebih lanjut, diharapkan dokumen ini dapat menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, sub kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan daerah sebagaimana terangkum dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL